



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bukittinggi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bukittinggi untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan:

- a. penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
- b. dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

- a. menjabarkan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021-2026 dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan dan program Pembangunan Daerah serta indikasi kerangka pendanaan;
- b. menetapkan pedoman untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah;
- c. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya; dan
- d. mewujudkan pembangunan Daerah yang sinergis dan selaras dengan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2021-2026 meliputi penjabaran Visi, dan Misi Walikota dan Wakil Walikota ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - e. BAB V : VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
 - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; DAN
 - i. BAB IX : PENUTUP.
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya RPJMD Tahun 2021-2026 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,
dto

RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT: (4/53/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Walikota, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 – 2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari suksesnya suatu program dan kegiatan dalam menghasilkan output, akan tetapi sejauh mana pembangunan memberikan keuntungan dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan yang berorientasi minimal outcome telah digulirkan pemerintah melalui berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan dan bidang lainnya. Karena itu pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menyusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah hingga jangka pendek yang substansinya saling berkaitan, dengan berbagai aspek, informasi dan data yang akurat.

Perencanaan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Secara nasional pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Sesuai pentahapan perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2019, tahun 2021 merupakan tahun awal periode terakhir (periode ke-4), oleh karena itu perlu dilakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD untuk Periode ke-4 tersebut pada tahun ini. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima tahun), yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan mempertimbangkan masalah masalah yang dihadapi dan isu isu strategis yang perlu diperhatikan di masa datang. Perencanaan mutlak diperlukan untuk memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik memungkinkan terwujudnya efisiensi pelaksanaan pembangunan dan efektifnya pencapaian tujuan pembangunan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 264 ayat (1) menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda. Selanjutnya pada Pasal 264 ayat (4) menyebutkan RPJMD harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan RPJMD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dengan dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilukada Tahun 2020 pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat, maka salah satu tugas utama Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi setelah dilantik adalah segera menyusun RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, meskipun perodesasi masa pemerintahan adalah 2021-2024. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang menyatakan bahwa perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 telah disusun berdasarkan pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yakni: a).teknokratik, b).partisipatif, c).politis, dan d).atas-bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik yang merupakan penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Pendekatan partisipatif yang merupakan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Perencanaan terlihat melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJMD. Selanjutnya, pendekatan politis adalah dengan menterjemahkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih ke dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang merupakan penyelerasan perencanaan pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Selain itu RPJMD sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan perlu juga mempertimbangkan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan. Karena itu penyusunan RPJMD ini telah mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 tahun 2018. Pertimbangan -pertimbangan yang berkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan benuansa rendah karbon mewarnai muatan RPJMD ini. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD ini akan mewujudkan selain peningkatan pertumbuhan ekonomi juga peningkatan kualitas lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 antara lain adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. RPJMD Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Barat, RTRW Propinsi Sumatera Barat dan RTRW Kota Bukittinggi serta memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota daerah tetangga.

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Bukittinggi dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 mengacu pada 7 agenda pembangunan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

2. RPJMD Kota Bukittinggi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Selain mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional, penyusunan RPJMD juga mengacu pada upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 220 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang akan diwujudkan sejak Tahun 2016 sampai 2030 antara lain :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan , kesempatan kerja produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota- dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari , menghentikan penggurunan dan memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. RPJMD Kota Bukittinggi dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat, permasalahan pembangunan yang masih dihadapi Sumatera Barat dan harus mendapat perhatian sebagai berikut:

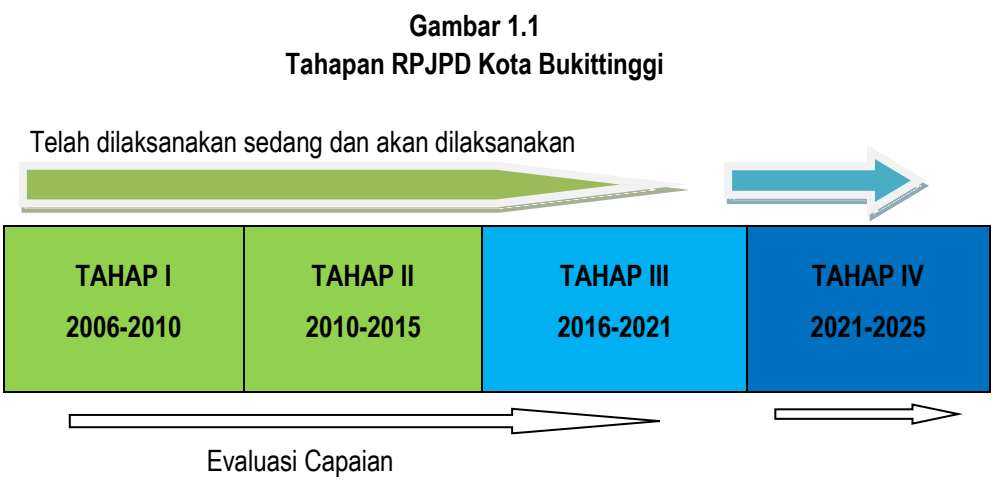
1. Pola hubungan yang tidak integratif dan sinergis antara pemerintahan nagari, pemerintahan desa, lembaga adat yang dikelola oleh lembaga (Kerapatan Adat Nagari (KAN), lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan lembaga lainnya dalam nagari.
2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan adat dan agama dalam meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama, norma dan nilai adat dalam masyarakat.
3. Belum optimalnya pewarisan budaya lokal dengan penanaman nilai-nilai adat dan budaya melalui pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4. Tanah ulayat memerlukan penyelesaian hukum dengan kebijakan tersendiri untuk merumuskannya secara komprehensif dalam peraturan daerah serta optimalisasi pemanfaatan tanah ulayat.
5. Belum terciptanya budaya kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi dan produktivitas, dan terbatasnya kualitas aparatur daerah.
6. Belum optimalnya sinergitas penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang prima, transparansi, aspiratif dan partisipatif.
7. Belum optimalnya penerapan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (revolusi industri) dan penggunaan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha perdagangan, transportasi dan jasa lainnya.
8. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan hukum dan perlindungan HAM, antara lain : 1) Pembentukan produk hukum daerah yang belum aspiratif, partisipatif yang sinergi dengan hukum Nasional yang memberikan perlindungan HAM, 2) Penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum daerah dan nasional pada kalangan birokrat dan masyarakat masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh pada kesadaran hukum, 3) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah yang dibentuk oleh Kabupaten dan Kota dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan di Sumatera Barat, dan 4) Belum optimalnya pelaksanaan dan penegakan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Belum optimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan (menengah), dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Sumatera Barat.

10. Belum optimalnya pelaksanaan proses pengadministrasian kependudukan berbasis teknologi informasi, yang berimplikasi pada ketersediaan data hasil administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pemerintahan.
11. Belum optimalnya peningkatan produksi, ketahanan pangan, keragaman konsumsi pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.
12. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan.
13. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan (UMKM, IKM).
14. Belum optimalnya upaya pengelolaan wisata Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama, budaya dan wisata alam.
15. Faktor yang mempengaruhi investasi antara lain ketersediaan sumber daya, jumlah penduduk/populasi (semakin besar populasi penduduk semakin menarik investor terutama di bidang manufaktur), ketersediaan infrastruktur, energi, perhubungan dan telekomunikasi.
16. Belum optimalnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan kebutuhan dasar daerah tertinggal.
17. Belum optimalnya konektivitas antar daerah, regional dan nasional serta internasional sehingga masih perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan pembangunan daerah.
18. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung penyediaan infrastruktur daerah.
19. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk penyediaan kebutuhan listrik terutama bagi daerah tertinggal, terluar dan perbatasan.
20. Pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kualitas Lingkungan Hidup dan mitigasi bencana
21. Peningkatan sarana dan prasarana drainase, air limbah, persampahan, air minum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
22. Belum terpeliharanya ekosistem darat dan laut/perairan.
23. Belum optimalnya peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal terjadinya konflik sosial
24. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
25. Memudarnya wawasan kebangsaan di berbagai kalangan, khususnya generasi muda akibat pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan yang sudah tidak sesuai

- 26. Belum mantapnya ketahanan ekonomi, budaya, dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi.
- 27. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- 28. Belum optimalnya peran dan partisipasi pemuda, pramuka dalam pembangunan daerah.
- 29. Belum optimal mengatasi pemuda yang berperilaku menyimpang dan beresiko.
- 30. Belum optimalnya pengembangan, pembibitan, pembinaan dan penghargaan pada olahraga rekreasi, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi dalam rangka membangun masyarakat sehat, bugar, berprestasi, berdaya saing tinggi dan berkarakter.
- 31. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga dalam rangka mendukung pengembangan, pembibitan dan pembinaan olahraga.

4. RPJMD Kota Bukittinggi dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Tahapan pembangunan jangka menengah daerah pada RPJPD Kota Bukittinggi digambarkan pada gambar di bawah.

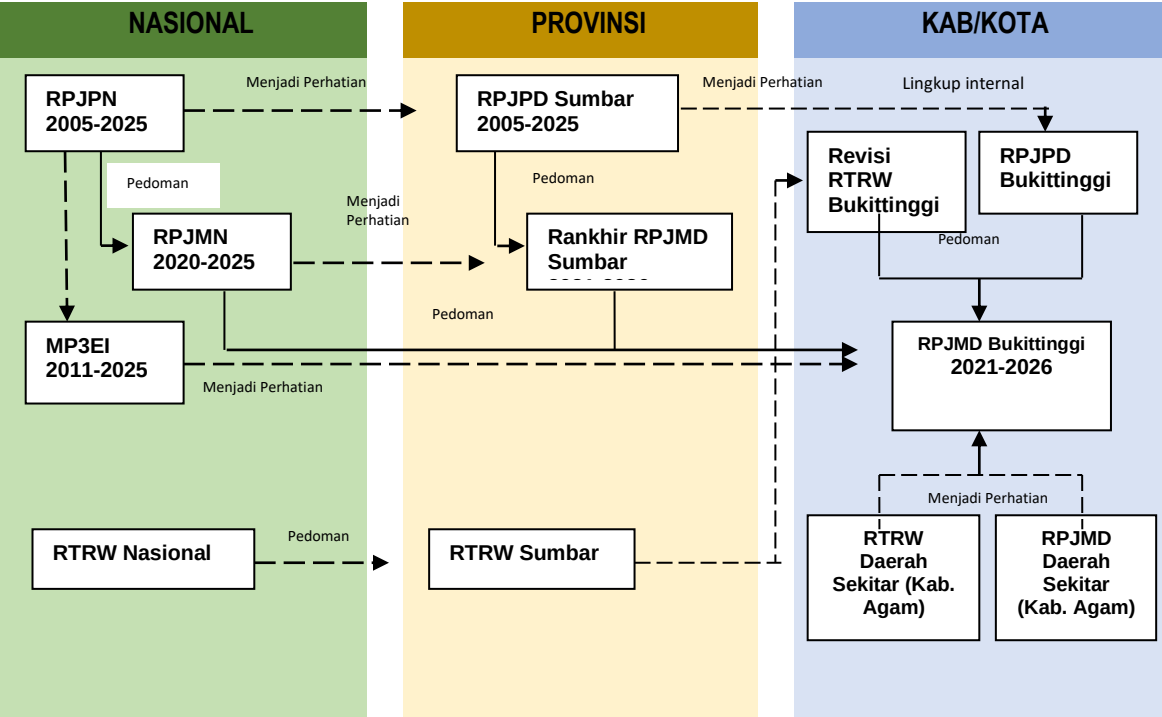


Sumber : Bapelitbang Kota Bukittinggi, 2020 (data diolah)

5. RPJMD Kota Bukittinggi dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan lain yang berkaitan dengan RPJMD Tahun 2021-2026 juga perlu ditelaah baik dokumen yang berskala nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota (Kabupaten Agam) di sekitar Kota Bukittinggi. Skema hubungan antara RPJMD Tahun 2021-2016 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini

Gambar I.2
Hubungan antara Rancangan Awal RPJMD Kota Bukittinggi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Bapelitbang Kota Bukittinggi, 2020 (data diolah)

Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi juga berpedoman pada Revisi RTRW Kota Bukittinggi yaitu dengan menyelaraskan permasalahan dan isu strategis daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

- a) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;

- b) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
- c) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga telah memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen lain yang relevan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Bukittinggi secara komprehensif dan evaluasi kinerja pembangunan selama 5 tahun terakhir sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan lima tahun kedepan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

- BAB IV** **Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**
Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB V** **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021-2026. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ini adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2021-2024.
- BAB VI** **Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**
Bab ini memuat Strategi yang dipilih dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pada setiap strategi yang dipilih disusun arah kebijakan dan indikasi program pembangunan daerah
- BAB VII** **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**
Memuat urusan pemerintah dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah dan target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.
- BAB VIII** **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
Bab ini berisi indikator kinerja pemerintah daerah sebagai gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
- BAB IX** **Penutup**
Bab ini berisi penekanan kembali secara ringkas argumentasi penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, keterkaitan dengan semua dokumen rencana baik secara horizontal dan vertikal. Bab ini diakhiri dengan kata penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2024. RPJMD ini memaparkan potensi daerah, isu strategis dan rencana pencapaian tujuan pembangunan.

1.5.2. Tujuan

Tujuan utama Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021-2026 dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan dan program Pembangunan Daerah serta indikasi kerangka pendanaan;

- 2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah;
- 3. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya; dan
- 4. Mewujudkan pembangunan Daerah yang sinergis dan selaras dengan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Contents

I BAB I PENDAHULUAN..... 1

1 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3 Hubungan Antar Dokumen 4

1.4 Sistematika Penulisan 10

1.5 Maksud dan Tujuan..... 11

Gambar 1.1 Tahapan RPJPD Kota Bukittinggi 8

Gambar I.2 Hubungan antara Rancangan Awal RPJMD Kota Bukittinggi dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya 9

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Bukittinggi terletak antara 100°20' - 100°25' bujur timur dan 00°16' - 00° 20' lintang selatan pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera. Letak astronomisnya menunjukkan bahwa Bukittinggi berada di bagian tengah pulau Sumatera, pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan udara di Kota Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan destinasi wisata. Letak geografis ini cukup strategis, bila dikaitkan dengan posisi sentral Kota Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, Padang ke Medan dan Padang ke Pekanbaru.

Kota yang terkenal dengan ikon Jam Gadang ini, memiliki kondisi geografis yang berbukit dan lembah sehingga luas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan menjadi sangat terbatas. Kota Bukittinggi juga tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dieksploitasi secara fisik, seperti hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut. Potensi yang dimiliki oleh Bukittinggi adalah lingkungan alam yang indah, sejuk, bersih, dan letaknya strategis serta nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai agama dan nilai adat Minangkabau.

Dengan kondisi tersebut di atas, menjadikan Kota Bukittinggi menjadi daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sumatera Barat, disamping sebagai kota pendidikan, kota pelayanan kesehatan dan kota perdagangan dan jasa serta tempat peristirahatan. Gambaran umum kondisi daerah Kota Bukittinggi disajikan sebagai berikut.

2.1 Aspek Geografis dan Demografi

Aspek geografis dan demografi menggambarkan tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi Kota Bukittinggi.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan Kota Bukittinggi.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,24 km², yang merupakan 0,06 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi yang sangat strategis terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi – Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Kota-kota

tersebut berada pada jalur perlintasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

- 1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,83 km² (683,10 Ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan;
- 2. Kecamatan Mandiangan Koto Selayan dengan luas areal 12,16 km² (1.215,60 Ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan;
- 3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,25 km² (625,20 Ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

Pembagian wilayah administrasi Kota Bukittinggi per Kecamatan dan Kelurahan ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
I	GUGUK PANJANG	683,10	27,07
1.	Bukit Cangang K. Ramang	47,00	1,86
2.	Tarok Dipo	148,00	5,86
3.	Pakan Kurai	87,00	3,45
4.	Aur Tajungkang T. Sawah	69,00	2,73
5.	Benteng Pasar Atas	56,00	2,22
6.	Kayu Kubu	91,00	3,61
7.	Bukit Apit Puhun	185,10	7,33
II	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1.215,60	48,16
1.	Pulai Anak Air	88,20	3,49
2.	Koto Selayan	73,00	2,89
3.	Garegeh	65,00	2,58
4.	Manggis Ginting	65,10	2,58
5.	Campago Ipuh	139,30	5,52
6.	Puhun Tembok	71,00	2,81
7.	Puhun Pintu Kabun	361,00	14,30
8.	Kubu Gulai Banchah	181,00	7,17
9.	Campago Guguk Bulek	172,00	6,81
III	AUR BIRUGO TIGO BALEH	625,20	24,77
1.	Belakang Balok	50,40	2,00
2.	Sapiran	25,70	1,02
3.	Birugo	94,00	3,72
4.	Aur Kuning	90,00	3,57
5.	Pakan Labuah	118,00	4,68
6.	Kubu Tanjung	91,10	3,61
7.	Ladang Caklah	74,00	2,93
8.	Parit Antang	82,00	3,25
JUMLAH		2.523,90	100,00

Sumber : Kota Bukittinggi dalam Angka, 2021

Pembagian wilayah Kota Bukittinggi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi Kota Bukittinggi pada Gambar 2.1. Secara administratif, Wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

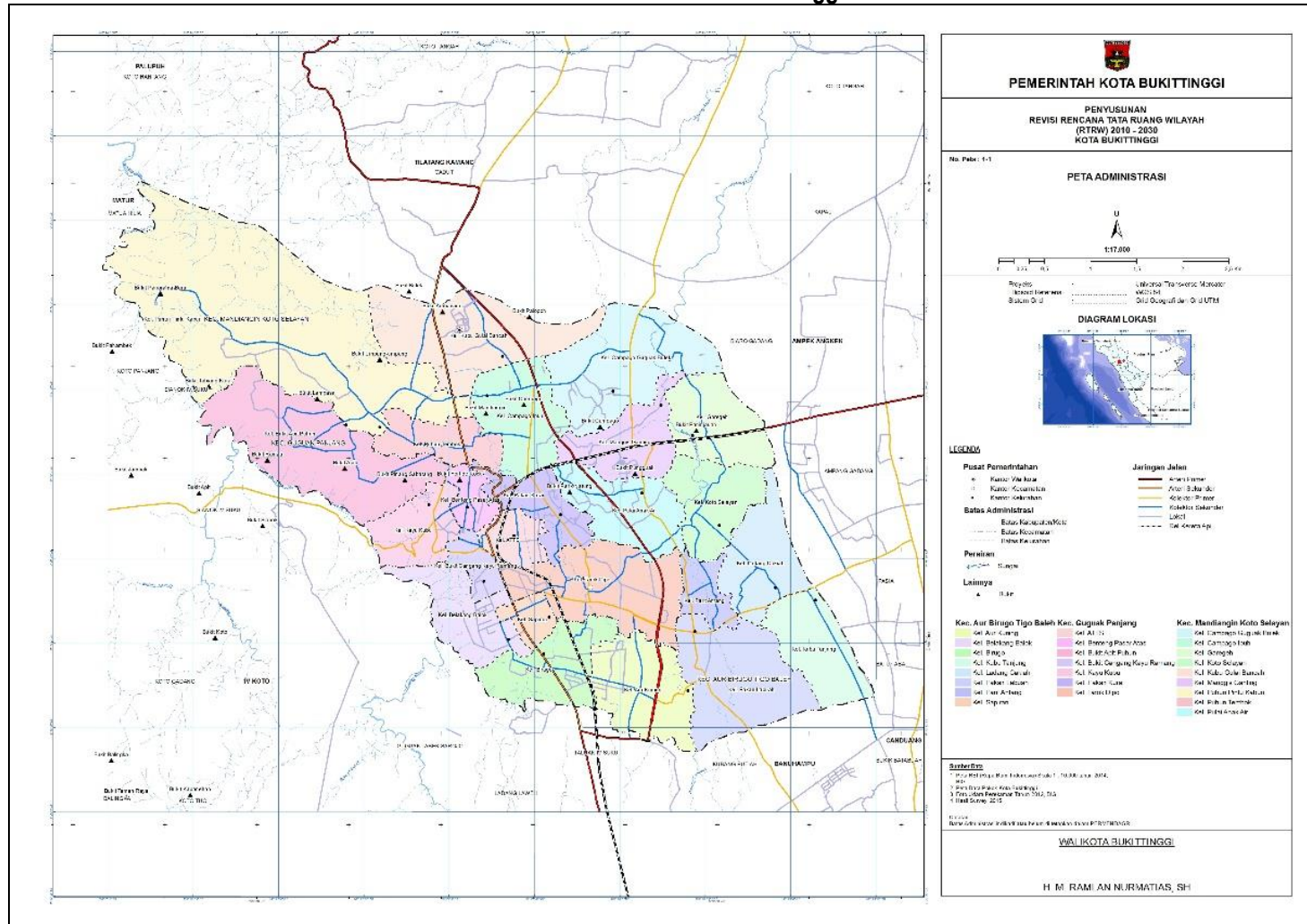
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Bukittinggi berada dalam lingkup Kabupaten Agam, serta terletak pada posisi sentral dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun antar provinsi terdekat. Kota Bukittinggi telah menjadi kota titik perlintasan dari Jalur Lintas Tengah Sumatera serta jalur penghubung antara Jalur Lintas Tengah dengan Jalur Lintas Timur Sumatera.

Secara astronomis, Kota Bukittinggi membentang antara 100°20' - 100°25' BT dan antara 00°16' - 00° 20' LS. Kota Bukittinggi dengan posisi geostrategisnya, mempunyai dataran yang tinggi dan bergelombang serta mempunyai udara yang sejuk, memungkinkan untuk menarik kunjungan wisatawan. Oleh karena itu dalam lingkup Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi menjadi orientasi pelayanan utama perdagangan, dan pariwisata. Kota Bukittinggi dengan wilayah yang dimilikinya merupakan kategori Kota Kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori Kota Sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukittinggi tidak mempunyai daerah pedalaman, terpencil, pesisir, pegunungan dan kepulauan.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Bukittinggi



Sumber : RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Topografi

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan yang terbentuk dari tufa batu apung dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut, sehingga tanahnya subur. Namun demikian luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali yaitu 639 ha dan kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki lahan pertanian yang paling luas yaitu 344 ha, diikuti kecamatan Aur BirugoTigo Baleh seluas 238 ha dan kecamatan Guguk Panjang 57 ha. Hal ini disebabkan karena sebahagian besar lahan digunakan untuk pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa.

Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wilayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,64%) berada di kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan dataran (74,98%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur. Proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi berdasarkan klasifikasi kelerengan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya

No	Lereng	Kecamatan						Jumlah (Ha)	%
		ABTB		GP		MKS			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
1.	0-2%	430,22	68,81	369,77	54,313	584,27	49,06	1.384,26	54,59
2.	3-8%	88,57	14,17	96,70	14,16	71,47	5,88	256,74	9,79
3.	9-15%	25,60	4,09	52,95	7,75	180,63	14,86	259,18	10,60
4.	16-25%	9,73	1,56	23,66	3,46	94,74	7,79	128,13	5,27
5.	26-40%	4,86	0,78	29,93	4,38	73,75	6,07	108,54	4,37
6.	>40%	66,22	10,59	110,09	16,12	210,75	17,34	387,05	15,38
JUMLAH		625,20	100	683,10	100	1.215,60	100	2.523,90	100

Sumber : RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Kota Bukittinggi dikelilingi oleh perbukitan di sebelah utara, timur dan barat, serta pegunungan di sebelah selatan dengan topografi wilayah pada umumnya bergelombang. Dengan kondisi demikian, berakibat terhadap terbatasnya pemanfaatan ruang kota untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan. Gambaran topografi Kota Bukittinggi dapat dilihat Gambar 2.2.

Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dapat dibedakan menjadi empat satuan morfologi, yaitu :

1. Satuan Morfologi Dataran
Kemiringan lereng umumnya 10%, dengan ketinggian berkisar antara 865-920 mdpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan, kebun/ladang dan permukiman, daerah ini dibentuk oleh endapan vulkanik muda berupa tufa apung.
2. Satuan Morfologi Berelief Halus
Kemiringan lereng antara 10-15 % dengan ketinggian 850-920 mdpl, umumnya merupakan kebun/ladang belukar, permukiman dan perwasahan. Daerah ini dibentuk oleh batuan tufa apung dan sebagian oleh metamorf.
3. Satuan Morfologi Berelief Kasar
Dibentuk oleh batuan tufa apung dengan ketinggian daerah antara 650-900 mdpl, medan cukup terjal, kemiringan lebih dari 60% satuan morfologi ini merupakan tebing Ngarai Sianok.
4. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi
Kemiringan medan antar 10 -20% dengan kemiringan tempat 900 mdpl, penggunaan lahan pada satuan ini berupa semak/belukar, dan sebahagian persawahan. Daerah dengan satuan morfologi ini sangat subur, karena dibentuk oleh hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava.

Geologi

Kota Bukittinggi tersusun dari material padat alam, yang terdiri dari batuan dasar, tanah, dan humus sebagai hamparan tempat tumbuhnya aneka tumbuhan. Di area Kota Bukittinggi, hanya terdapat sejenis batuan dasar yang tersingkap (exposed), yaitu Tufa Batuapung, hasil dari proses kegunungapian (volkanisme).

Tanah sebagai bentukan dari pelapukan batuan secara fisika dan kimia, terdiri dari dua jenis, yaitu 1) tanah endapan, dan 2) tanah residu. Untuk Kota Bukittinggi, tanah endapan terdapat di dasar ngarai sepanjang alur Batang Sianok, sebagai hasil erosi, transportasi dan pengendapan oleh air sungai (aluvium) dan oleh longsoran tebing (koluvium). Tanah residu sebagai hasil pelapukan kimiawi terhadap batuan dasar, terutama ada di dataran dan lekuk perbukitan di Kota Bukittinggi (contohnya di hamparan sawah dan pemukiman). Bagian paling atas dari hamparan tanah yang diselimuti tumbuhan (vegetasi) merupakan humus.

Kawasan Bukittinggi, terletak pada suatu zona yang dikenal sebagai jalur utama Sistem Sesar Sumatera yaitu pada segmen Central Barisan Fault Zone (CBFZ, Possavec et al, 1973 & Hahn & Weber, 1981). CBFZ merupakan komponen utama dari Sistem Sesar Sumatera dna kerap juga disebut sebagai "Patahan Semangko" yang membentang sepanjang

tengah daratan Pulau Sumatera. Kota Bukittinggi, terletak 1.250 meter di timur dari jalur CBFZ. Untuk skala regional, jarak tersebut relatif dekat. Gambaran kondisi geologi Kota Bukittinggi ditampilkan pada Gambar 2.3.

Hidrologi

Kota Bukittinggi terletak di dalam dua Wilayah Aliran Sungai (WAS), yaitu WAS Masanghulu yang berada di bagian Barat dan mengalir ke arah Samudera Indonesia, dan WAS Batang Agam yang mengalir ke arah bagian Timur. Sungai-sungai yang relatif lebar di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 sampai 12 meter, serta terdapat juga sungai-sungai kecil (raven) yang merupakan tempat aliran air permukaan menuju ke pola aliran sungai. Sungai ini berperan sebagai jaringan drainase primer yang merupakan muara distribusi pembuangan air dari kawasan perencanaan yang berasal dan jaringan drainase sekunder dan tersier. Kondisi Sungai yang ada di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Sungai/ Batang yang Melalui Bukittinggi

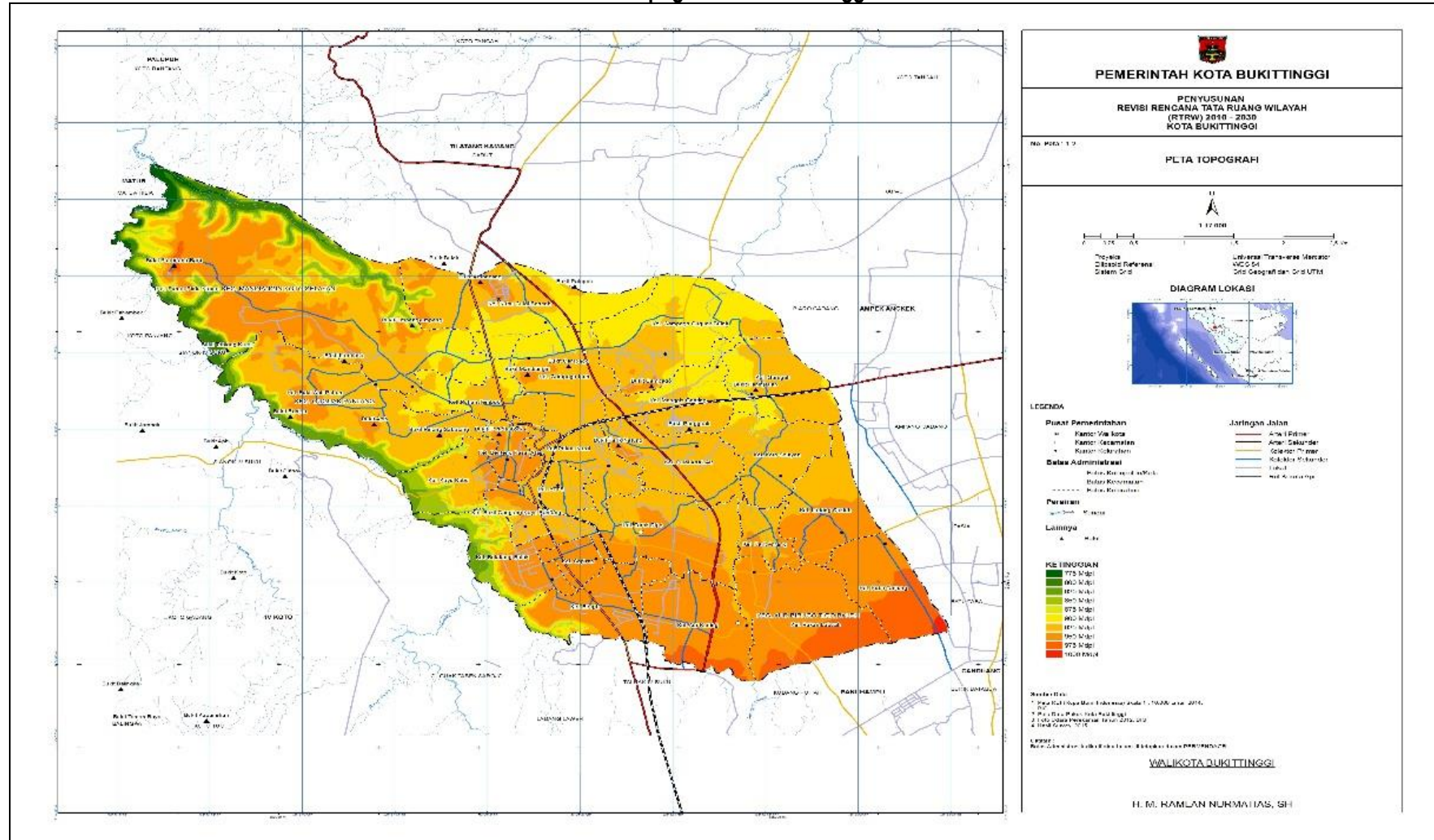
No	Nama Sungai / Batang	Lebar (m)	Kec. Yang Dilalui
1.	Batang Tambuo	7	• Aur Birugo Tigo Baleh • Mandiingin Koto Selayan
2.	Batang Sianok	12	• Aur Birugo Tigo Baleh • Guguk Panjang • Mandiingin Koto Selayan
3.	Batang Agam	6	• Guguk Panjang • Mandiingin Koto Selayan

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2020

Pengembangan wilayah di sekitar sungai perlu memperhatikan garis sempadan sungai, yakni kawasan di kiri dan kanan palung sungai sebagai batas perlindungan sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan (kedalaman tidak lebih dari tiga meter) memiliki garis sempadan minimal 10 meter dari sungai batang sianok, 5 m sempadan sungai untuk Batang Tambuo dan 4 m untuk Batang Agam.

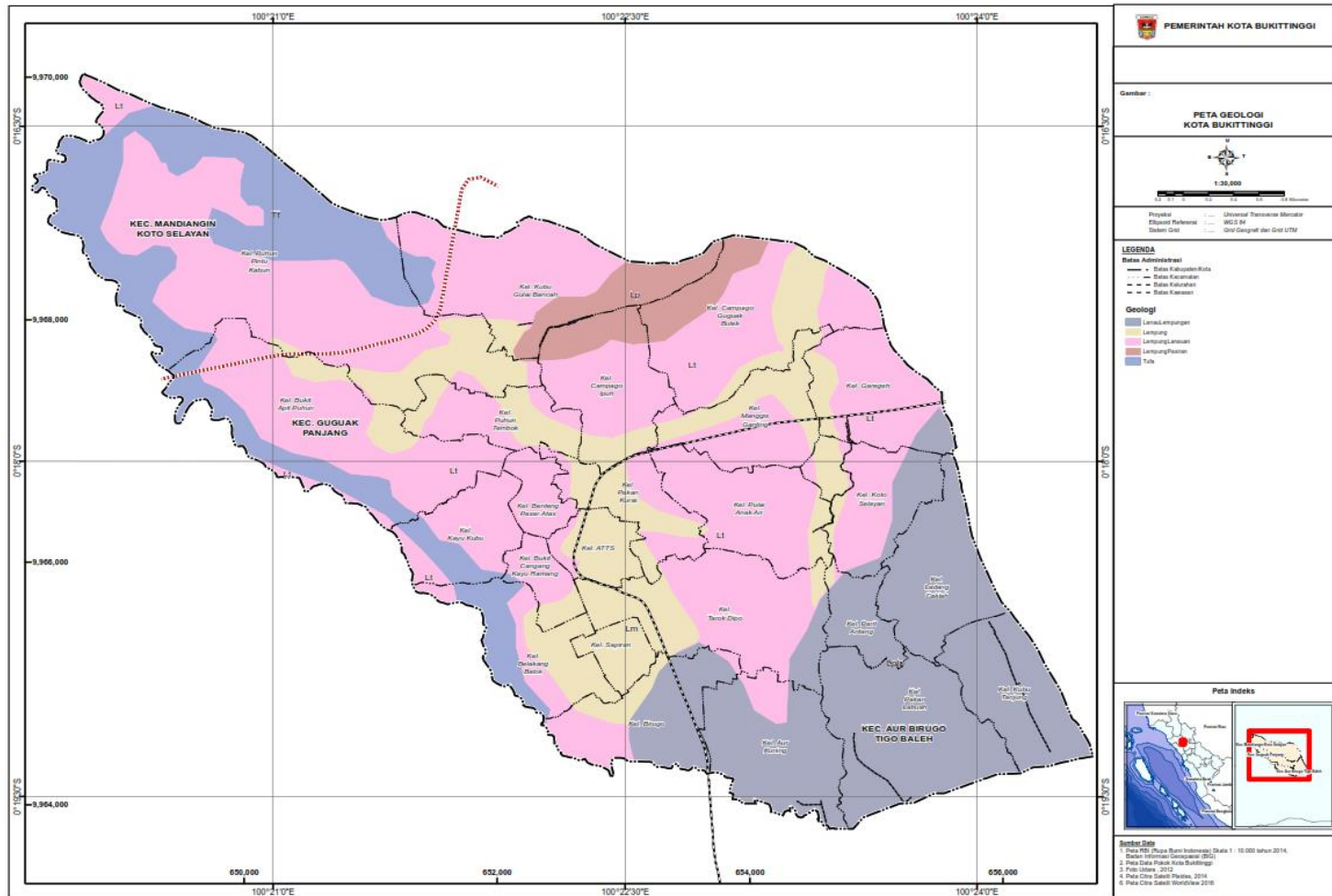
Selain sungai, Kota Bukittinggi juga memiliki 3 buah embung yang tersebar di seluruh kecamatan. Embung terluas adalah embung Lubuak Anak Limau dengan luas total sebesar 0,25 Ha yang terletak di Daerah Anak Limau, Kelurahan Kubu Tanjuang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Gambar 2.4 menampilkan peta Hidrologi Kota Bukittinggi.

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Bukittinggi



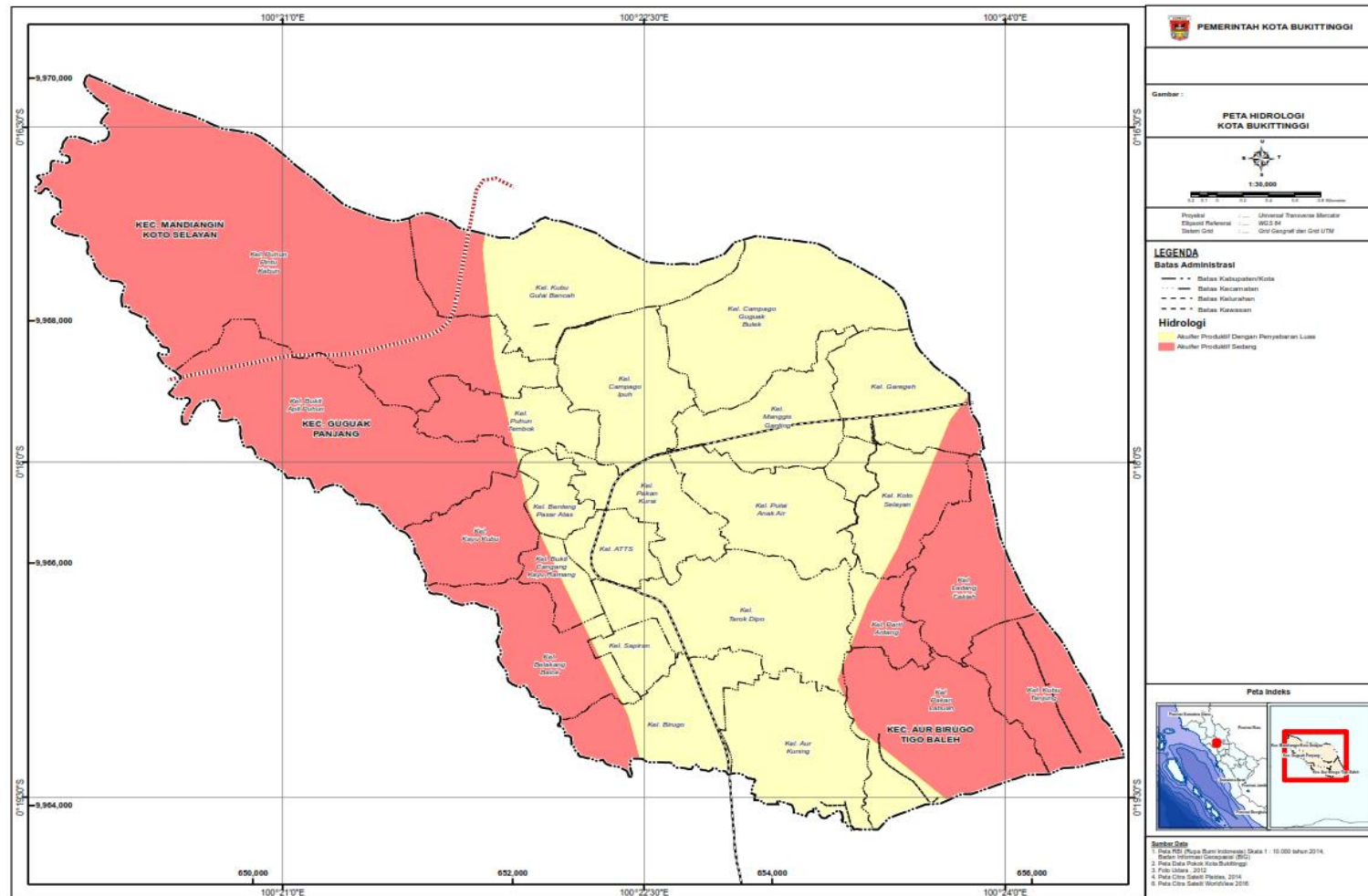
Sumber : RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Gambar 2.3.
Peta Geologi Kota Bukittinggi



Sumber : RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Gambar 2.4.
Peta Hidrologi Kota Bukittinggi



Sumber : RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Klimatologi

Kota Bukittinggi beriklim tropis basah yang ditandai dengan kelembapan udara yang relatif tinggi (umumnya di atas 90 persen), memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki suhu tahunan lebih dari 18°C dan mencapai 38°C ketika musim kemarau. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat sejuk dan sangat cocok untuk pertanian terutama untuk tanaman hias, disamping untuk tempat peristirahatan. Kelembapan udara minimum 78 persen dan maksimum 93 persen, dengan kelembapan rata-rata 82 persen setiap tahunnya.

Secara umum kondisi rata-rata curah hujan di Kota Bukittinggi berkisar antara 2.500-3.500 mm per tahun. Jumlah hari hujan di Kota Bukittinggi berkisar antara 190 sampai 220 hari setiap tahunnya, jika dirata-ratakan perbulan berkisar antara 16 sampai 17 hari hujan. Untuk lebih jelasnya rata-rata curah hujan dan jumlah hari hujan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Curah Hujan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Curah Hujan (mm)	2.509,1	3.066	2.981,50	2.981,50	3.010
Jumlah Hari Hujan (hari)	194	191	208	208	211

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021

2.1.2 Penggunaan Lahan

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana pola ruang wilayah Kota Bukittinggi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Gambaran rencana pola ruang di Kota Bukittinggi secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)

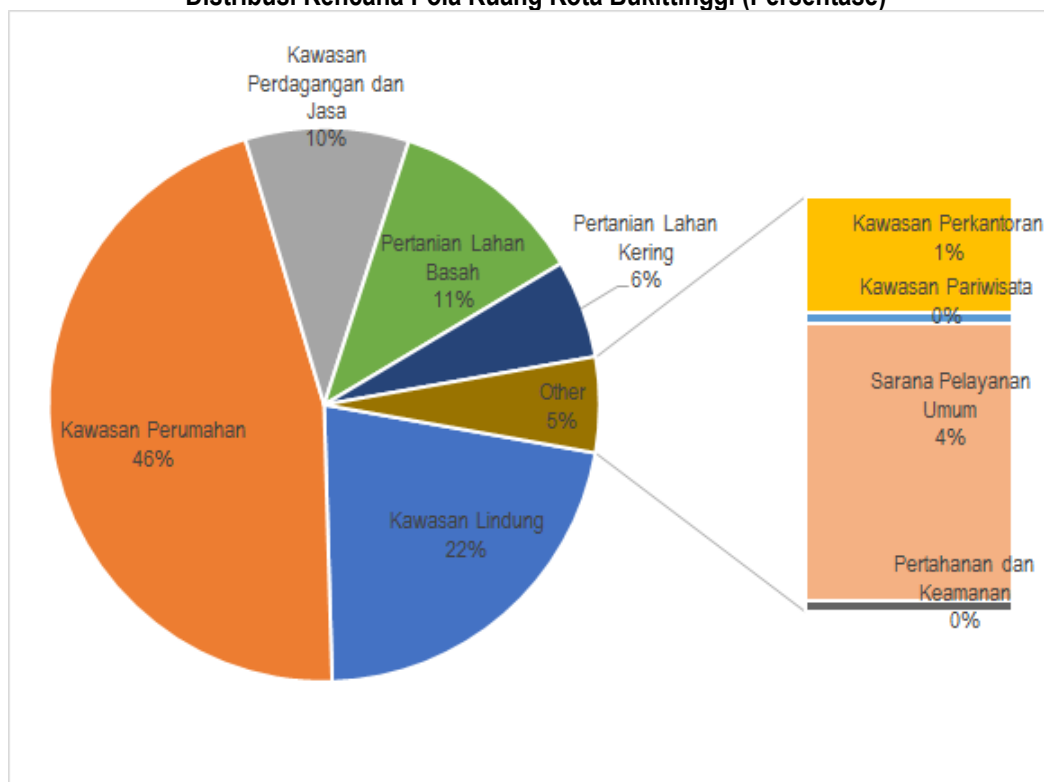
POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
Semua Kawasan		652,569	567,215	1.303,750	2.523,900
Kawasan Lindung		85,169	135,978	327,765	549,012
1, Kawasan Lindung Setempat		56,687	77,103	195,654	329,444
1,1	Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444
2, Ruang Terbuka Hijau		28,482	58,875	132,111	219,568
2,1	RTH Taman	3,624	11,640	44,963	60,327

POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
	Taman Kota	2,232	6,528	21,188	29,948
	Hutan Kota	1,392	5,112	23,775	30,279
2,2	RTH Fungsi Tertentu	22,013	42,992	81,731	146,736
	Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836
	Sempadan Sungai	5,032	4,899	15,268	25,200
	Taman Pemakaman Umum	3,124	6,399	10,177	19,700
2,3	RTH Jalur Hijau Jalan	2,845	4,243	5,417	12,505
	RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,520	1,200	2,345	5,065
	RTH Ruang Di Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,440
Kawasan Budidaya		567,399	431,238	975,986	1.974,888
1,	Kawasan Perumahan	320,376	211,357	624,927	1156,927
1,1	Perumahan Kepadatan Tinggi	112,985	104,362	298,424	515,771
1,2	Perumahan Kepadatan Sedang	194,511	96,928	326,503	617,942
1,3	Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946
2,	Kawasan Perdagangan dan Jasa	32,759	131,424	78,229	242,411
3,	Kawasan Perkantoran	8,555	10,989	19,402	38,945
4,	Kawasan Pariwisata	0	4,021	0	4,021
5,	Kawasan Peruntukan Lainnya	205,520	74,003	253,428	532,951
5,1	Pertanian Lahan Basah	183,390	0	106,948	290,338
5,2	Pertanian Lahan Kering	0	33,337	111,458	144,795
5,3	Sarana Pelayanan Umum	19,345	40,110	33,906	93,361
5,4	Pertahanan dan Keamanan	2,974	0,556	1,116	4,090

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiangan Koto Selayan)

Sumber : RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030

Gambar 2.5.
Distribusi Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Persentase)



Sumber : Diolah dari RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030

Berdasarkan rencana pola ruang Kota Bukittinggi, kawasan perumahan dialokasikan 46% dari total luas Kota Bukittinggi, diikuti dengan Kawasan Pertanian baik pertanian lahan basah maupun pertanian lahan kering (27%) dan kawasan lindung yang terdiri dari kawasan lindung setempat dan ruang terbuka hijau (22%), seperti terlihat pada Gambar 2.5.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan pusat-pusat pelayanan di Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi dari setiap kawasan di Kota Bukittinggi dalam pengembangan Kota Bukittinggi secara keseluruhan. Pengembangan pusat-pusat pelayanan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Arahan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Bukittinggi

No	Pusat Pelayanan	Kawasan	Arahan Pengembangan
1	Pusat Pelayanan Kota – Fungsi Primer	Kawasan Pasar Atas	- Kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional; - Kawasan perumahan kepadatan tinggi; - Ruang terbuka hijau skala perkotaan dalam bentuk taman kota dan jalur hijau jalan.
		Kawasan Aur Kuning	- Kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional; - Pusat pergerakan regional;
2	Pusat Pelayanan Kota – Fungsi Sekunder	Kawasan Gulai Banchah	- kawasan pusat pemerintahan kota; - kawasan sosial budaya dengan keberadaan gedung perpustakaan bung hatta; - ruang terbuka hijau berbentuk taman kota, jalur hijau, taman makam pahlawan dan taman pemakaman umum; - kawasan permukiman kepadatan sedang beserta fasilitas pendukungnya; dan - kawasan pengembangan fasilitas pelayanan umum
		Kawasan Belakang Balok	- Kawasan Perkantoran Pemerintahan skala kota. - Kawasan Pusat Pelayanan Pendidikan menengah dan tinggi serta Pusat pelayanan kesehatan skala kota. - Kawasan Perumahan berikut fasilitas pendukungnya. - Kawasan Perdagangan dan jasa skala kota. - Pengembangan Ruang Terbuka hijau skala kota
3	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kawasan Campago Ipuh	- Pusat Pelayanan Umum dan Sosial, meliputi pendidikan menengah, rekreasi skala sub wilayah kota. - Perdagangan dan Jasa Koridor skala sub wilayah kota. - Kawasan Olahraga skala sub wilayah Kota. - Perumahan berkepadatan tinggi dan fasilitas pendukungnya. - Ruang Terbuka Hijau rekreasi.

No	Pusat Pelayanan	Kawasan	Arahan Pengembangan
		Kawasan Garegeh	- Perdagangan dan jasa skala sub wilayah kota. - RTH rekreasi skala sub wilayah kota. - Kawasan Olahraga skala sub wilayah Kota - Pendidikan tingkat menengah dan kesehatan skala puskesmas pembantu. - Sebagian perumahan berkepadatan tinggi dan sebagian perumahan kepadatan sedang dengan fasilitas pendukungnya.
		Kawasan Ladang Cakiah	- Perdagangan dan jasa skala sub wilayah kota. - RTH rekreasi skala sub wilayah kota. - Kawasan Olahraga skala sub wilayah Kota - Pendidikan tingkat menengah dan kesehatan skala puskesmas pembantu. - Perumahan berkepadatan sedang dan fasilitas pendukungnya
4	Pusat Lingkungan	Kecamatan Aur Birugo Tiga Baleh, dengan 2 pusat pelayanan lingkungan berada pada Kelurahan Pakan Labuah dan Kelurahan Birugo	- Pendidikan tingkat dasar; - Kesehatan: balai pengobatan; - Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Taman lingkungan/olahraga lingkungan; - Fasilitas peribadatan skala lingkungan; - Fasilitas perdagangan skala lingkungan
		Kecamatan Guguk Panjang, dengan 2 pusat pelayanan lingkungan berada pada Kelurahan Tarok Dipo dan Kel. Pakan Kurai	- Pendidikan tingkat dasar; - Kesehatan: balai pengobatan; - Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Taman lingkungan/olahraga lingkungan; - Fasilitas peribadatan skala lingkungan; - Fasilitas perdagangan skala lingkungan
		Kecamatan Mandiangin Koto Selatan, dengan 4 pusat pelayanan lingkungan berada pada Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kelurahan Pulai Anak Air, dan Kelurahan Koto Selayan	- Pendidikan tingkat dasar; - Kesehatan: balai pengobatan; - Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Taman lingkungan/olahraga lingkungan; - Fasilitas peribadatan skala lingkungan; - Fasilitas perdagangan skala lingkungan.

Sumber : RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial

sebagai sentra perekonomian tidak hanya Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah. Bila dilihat dari karakteristik alam, kemiringan lereng Kota Bukittinggi yang sebagian wilayahnya merupakan bukit dan lembah (mencapai 25 persen dari kota) menyebabkan terbatasnya daya dukung pengembangan wilayah Kota Bukittinggi. Namun hal ini tidak menghambat pembangunan di Kota Bukittinggi dan itu merupakan suatu peluang dan tantangan bagi Kota ini untuk lebih mengembangkan ekonominya disektor perdagangan dan jasa, dengan sektor unggulannya yaitu kepariwisataan, dan pendidikan.

Pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi dalam tata ruang Provinsi Sumatera Barat diarahkan sebagai pusat kegiatan pariwisata dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I. Dalam WPP I didominasi oleh jenis obyek wisata alam pegunungan. Kota Bukittinggi sendiri arahan pengembangan pariwisatanya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Arahan Pengembangan Pariwisata Kota Bukittinggi

Satuan Pengembangan Pariwisata (SPP)	Obyek Wisata (OW)	Arahan Pengembangan
SPP I : Bukittinggi	Kota Bukittinggi (1-I)	Memperkuat fungsinya sebagai Kota Wisata
	Panorama Ngarai Sianok (1-I)	Melestarikan lingkungan dan pengendalian Bangunan fisik sebagai Ekowisata
	Lubang Jepang (1 – I)	Revitalisasi dengan penampilan fisik yang baik, wisata sejarah
	Benteng Fort de Kock (1-I)	Revitalisasi bangunan, sebagai wisata sejarah
	Pasar Atas & Bawah	Pusat Kerajinan
	TMSBK	Kebun Binatang

Sumber : RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030

2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana.

Catatan sejarah kejadian bencana pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Data kejadian bencana Kota Bukittinggi yang tercatat pada DIBI merupakan kejadian bencana dalam rentang tahun 2000 sampai 2018. Dalam rentang tahun tersebut, Kota Bukittinggi telah mengalami 18 kali kejadian dari 4 (empat) jenis bencana selama tahun 2000-2018 (lihat Tabel 2.8).

Tabel 2.8.
Sejarah Kejadian Bencana di Kota Bukittinggi Tahun 2000–2018

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)			Rumah (Unit)				Kerusakan (Unit)		
		Meninggal&Hilang	Luka-Luka	Terdampak & Mengungsi	Rusak Berat	Rusaksedang	Rusak Ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
1. Banjir	9	3	-	2.120	40	-	50	546	-	2	2
2. Gempabumi	2	7	100	1.525	10	-	89	-	-	-	14
3. Cuacaekstrem	3	-	-	92	14	15	7	-	-	1	-
4. Tanah Longsor	4	13	-	-	2	1	2	-	-	-	-
Total	18	23	100	3.737	66	16	148	546	-	3	16

Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia, Agustus 2018

Berdasarkan Tabel 2.8, dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kota Bukittinggi, bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Selain itu, dari total kejadian seluruh bencana terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan berupa korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan fasilitas (umum dan kesehatan). Hal ini membuktikan bahwa Kota Bukittinggi membutuhkan upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana.

Kawasan Rawan bencana Banjir/genangan

Melihat kondisi Tofografi Kota Bukittinggi, sangat rentan terhadap bencana. Bencana yang berkemungkinan paling sering terjadi adalah bencana banjir. Berdasarkan hasil kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bukittinggi Tahun 2018, bencana banjir ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Besarnya debit air yang datang dari Kabupaten Agam;
2. Penumpukan sampah yang terbawa air disaluran drainase dan badan air;
3. Banyaknya terjadi *Bottleneck* di badan drainase (dimensi drainase primer/sekunder/tersier);
4. Adanya bangunan liar di atas drainase;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelancaran arus air di badan drainase; dan
6. Riol lama jaman Belanda tertutup

Adapun luasan bahaya banjir perkecamatan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 2.9. Secara keseluruhan, bahaya banjir memberikan dampak luas bahaya di Kota Bukittinggi dengan total 1.284,66 Ha yang berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.9.
Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Bukittinggi

Kecamatan	Bahaya	
	Luas(Ha)	Kelas
1. Aur Birugo Tigo Baleh	382,77	Tinggi
2. Guguk Panjang	294,12	Tinggi
3. Mandiingin Koto Selayan	607,77	Tinggi
Kota Bukittinggi	1.284,66	Tinggi

Sumber:Dok. KRB Kota Bukittinggi Tahun 2018

Kawasan rawan bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor

Kawasan Rawan gempa bumi meliputi ketiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi dan daerah rawan longsor berada sepanjang bibir Ngarai Sianok yang juga meliputi ketiga kecamatan yang ada seperti

Tabel 2.10. Seluruh wilayah yang berada dalam Kota Bukittinggi sangat berisiko terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi. Kategorinya mulai dari zona rawan bencana rendah, sedang dan tinggi.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, bahwa sepanjang Kawasan Ngarai Sianok dan sempadan Ngarai Sianok yaitu dari Bibir Ngarai sampai dengan 50 Meter merupakan kawasan rawan bencana dengan zona rawan tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai kerawanan guncangan tanah di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Tabel 2.10.
Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor

Rawan Gempa Bumi				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
1.	Zona Rawan Tinggi	Belakang Balok Birugo Ladang Cakiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran Aur Kuning Parit Antang	Kayu Kubu BCKR Pakan Kurai ATTS Tarok Dipo Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Garegeh Campago G.Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai bancah Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak Air Puhun P.Kabun

Rawan Gempa Bumi				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
Kerawanan Guncangan Tanah				
1.	Zona Rawan rendah	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Sapiran Parit Antang Ladang Cakiah	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Pakan Kurai Bukit Apit Puhun ATTS	Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Puhun Pintu Kabun
2.	Zona Rawan Sedang	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Parit Antang	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Bukit Apit Puhun ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Campago Ipuh Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah
3.	Zona Rawan Tinggi	Birugo Belakang Balok	BCKR Tarok Dipo ATTS Kayu Kubu ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Sumber : Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim

Berdasarkan hasil kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bukittinggi Tahun 2018, bencana cuaca ekstrim ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Kurangnya peremajaan pohon pelindung
2. Konstruksi papan iklan tidak memenuhi persyaratan teknis
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya cuaca ekstrim

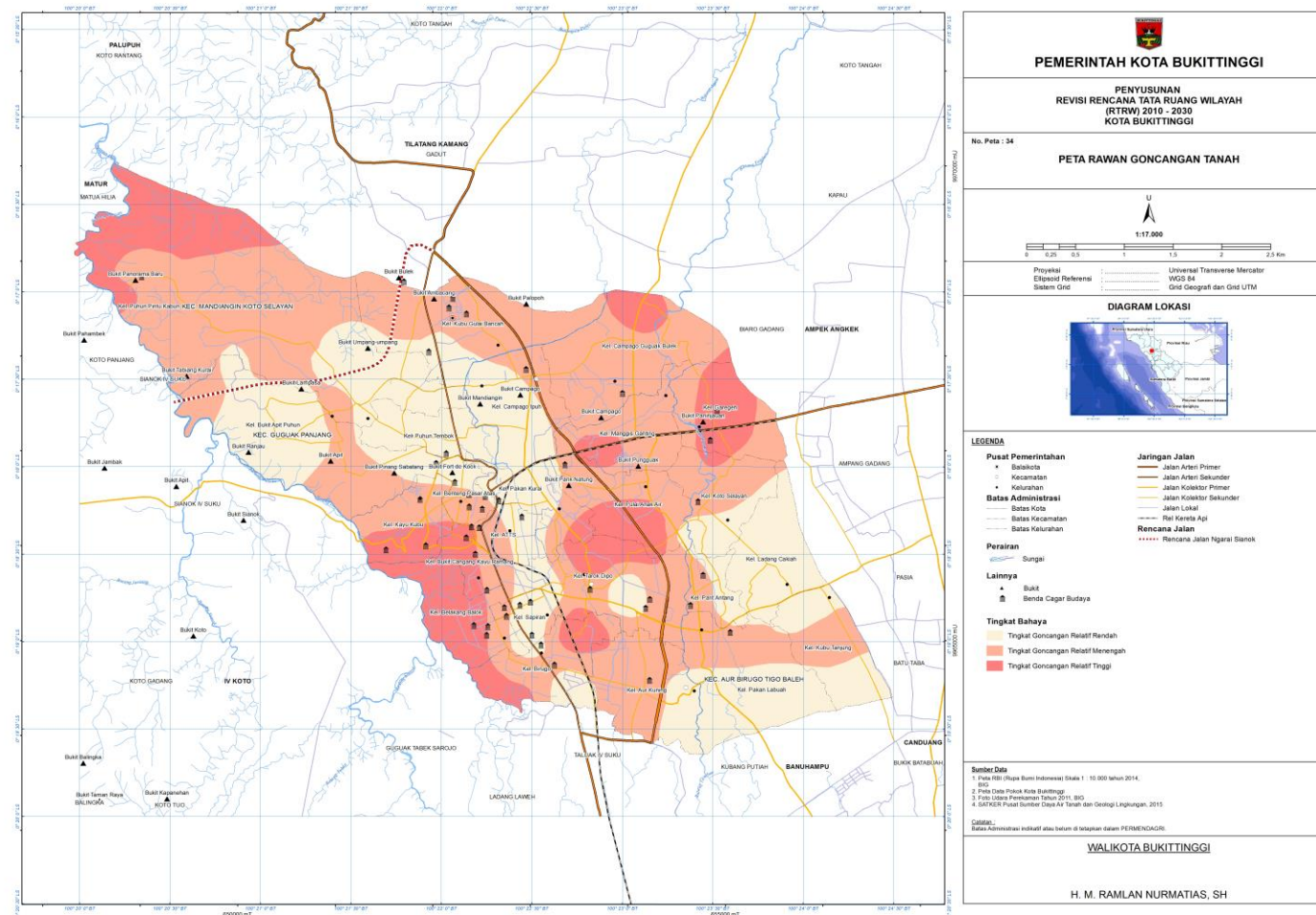
Luasan bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Bukittinggi

KECAMATAN	Bahaya	
	Luas(Ha)	Kelas
1. Aur Birugo Tigo Baleh	625,20	Sedang
2. Guguk Panjang	683,10	Sedang
3. Mandiingin Koto Selayan	1.215,60	Sedang
Kota Bukittinggi	2.523,90	Sedang

Sumber : Dokumen KRB Kota Bukittinggi Tahun 2018

Gambar 2.6.
Peta Guncangan Tanah Kota Bukittinggi



Sumber : RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

2.1.5 Demografi

Data jumlah penduduk berperan penting dalam perencanaan pembangunan, Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Perkembangan jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.12

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2016 s.d. 2020

Kelompok Umur		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4		5.523	5.223	10.746
5 – 9		5.172	4.958	10.130
10 – 14		5.343	4.983	10.326
15 – 19		5.107	4.829	9.936
20 – 24		5.101	5.214	10.315
25 – 29		5.353	5.407	10.760
30 – 34		4.965	4.891	9.856
35 – 39		4.459	4.433	8.892
40 – 44		4.097	4.034	8.131
45 – 49		3.839	3.867	7.706
50 – 54		3.278	3.448	6.726
55 – 59		2.884	2.884	5.768
60 – 64		2.193	2.220	4.413
65 – 69		1.500	1.626	3.126
70 – 74		834	1.079	1.913
75+		867	1.417	867
Jumlah Tahun 2020		60.515	60.513	121.028
Jumlah	2019	63.519	67.254	130.773
	2018	62.484	66.299	128.783
	2017	61.588	65.216	126.804
	2016	60.503	64.212	124.715

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai sex ratio 99,99%. Jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Dengan luas wilayah yang relatif tetap maka penambahan penduduk secara dinamis akan berdampak terhadap tingkat kepadatan wilayah tempat tinggal penduduk, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk Kota Bukittinggi. Hal ini menyebabkan penurunan kepadatan penduduk, pada tahun 2016 tingkat kepadatan sekitar 5.103 orang/km² sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 4.795 orang/km².

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Tahun	Penduduk (Orang)	Kepadatan (Orang/km ²)	Laju Pertumbuhan
1.	2020	121.028	4 795	0,81
2.	2019	130.773	4.858	1.77
3.	2018	128.783	4.941	1.71
4.	2017	126.804	5.024	1.68
5.	2016	124.715	5.103	1.56

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021

Kepadatan penduduk terpusat di Kecamatan Guguk Panjang yang antara lain disebabkan karena banyaknya pusat kegiatan ekonomi dan pusat pariwisata. Kepadatan berikutnya disusul oleh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Kepadatan penduduk yang paling jarang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Jika dilihat penyebaran penduduk per kecamatan di Kota Bukittinggi, maka penyebaran berbanding lurus dengan luas wilayah, dimana wilayah yang luas, maka penduduknya juga banyak.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan diantaranya, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, PDRD Perkapita, Indeks Gini, Penduduk Miskin dan IPM.

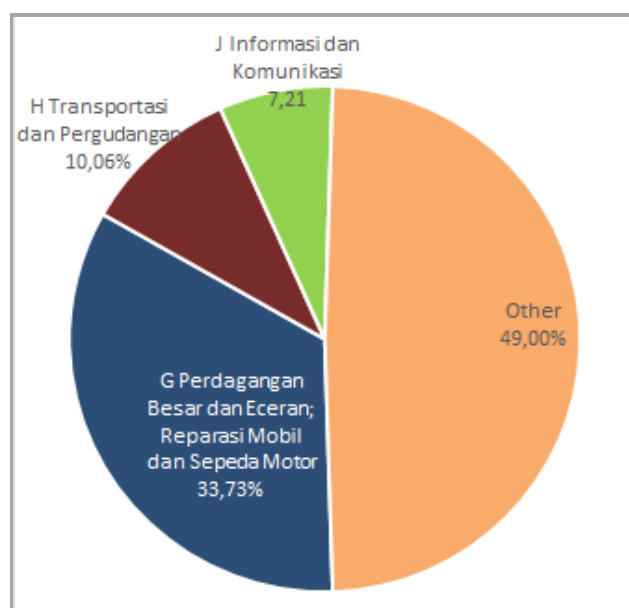
2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Produk Domestik Regional Bruto yang akan disajikan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu harga Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). Berikut nilai dan kontribusi masing-masing sektor atau lapangan usaha PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.14. Kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya. Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7.
Sektor yang Berkontribusi Besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2020



Sumber: Diolah dari BPS Kota Bukittinggi, 2021

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s.d. 2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.15. Pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB Kota Bukittinggi, namun berdasarkan proyeksi dari data 10 tahun terakhir diprediksi tetap terjadi peningkatan PDRB seperti terlihat pada Gambar 2.8.

Tiga sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Kota Bukittinggi (baik berdasarkan PDRB Harga Berlaku maupun PDRB Harga Konstan) adalah:

1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
2. Transportasi dan Pergudangan; dan
3. Informasi dan Komunikasi

Tabel 2.14.
Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020 (dalam juta rupiah)

NO	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	92.970,90	1,37	96.650,87	1,30	92.970,90	1,37	96.650,87	1,30	101.410,07	1,18
2.	Pertambangan dan Penggalian	187,97	0,00	190,5	0,00	187,97	0,00	190,5	0,00	186,58	0,00
3.	Industri Pengolahan	437.706,04	6,45	453.203,15	6,08	437.706,04	6,45	453.203,15	6,08	447.376,30	5,19
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	47.377,68	0,70	53619,5	0,72	47.377,68	0,70	53619,5	0,72	59.164,34	0,69
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.163,85	0,15	11.035,67	0,15	10.163,85	0,15	11.035,67	0,15	13.187,98	0,15
6.	Konstruksi	422.171,48	6,22	486.029,6	6,52	422.171,48	6,22	486.029,6	6,52	577.807,99	6,70
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.304.338,39	33,98	2.524.056,86	33,87	2.304.338,39	33,98	2.524.056,86	33,87	2.910.422,94	33,73
8.	Transportasi dan Pergudangan	719.657,59	10,61	799.518,9	10,73	719.657,59	10,61	799.518,9	10,73	868.106,21	10,06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	387.302,14	5,71	433.568,27	5,82	387.302,14	5,71	433.568,27	5,82	405.653,81	4,70
10.	Informasi dan Komunikasi	400.451,04	5,90	460.744,43	6,18	400.451,04	5,90	460.744,43	6,18	622.251,49	7,21
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	420.792,93	6,20	432.853,32	5,81	420.792,93	6,20	432.853,32	5,81	481.149,49	5,58
12.	Real Estat	241.591,62	3,56	258.774,84	3,47	241.591,62	3,56	258.774,84	3,47	292.009,19	3,38
13.	Jasa Perusahaan	44.805,36	0,66	48.298,26	0,65	44.805,36	0,66	48.298,26	0,65	55.389,48	0,64
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	414.835,05	6,12	451.816,62	6,06	414.835,05	6,12	451.816,62	6,06	581.858,04	6,74
15.	Jasa Pendidikan	363.667,98	5,36	415.625,87	5,58	363.667,98	5,36	415.625,87	5,58	545.305,28	6,32
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207.306,12	3,06	241.571,22	3,24	207.306,12	3,06	241.571,22	3,24	337.934,34	3,92
17.	Jasa lainnya	266.559,93	3,93	285.548,92	3,83	266.559,93	3,93	285.548,92	3,83	328.374,14	3,81
	PDRB	5.635.927,99	100	7.453.106,84	100	5.635.927,99	100	7.453.106,84	100	8.627.587,69	100

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Tabel 2.15.
Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020 (dalam juta rupiah)

No.	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	67.822,77	1,31	69.120,86	1,26	68.797,97	1,18	69.089,41	1,12	70.012,79	1,16
2.	Pertambangan dan Penggalian	125,03	0,00	124,41	0,00	123,92	0,00	123,41	0,00	120,04	0,00
3.	Industri Pengolahan	373.267,84	7,22	376.197,39	6,86	370.134,83	6,37	364.832,12	5,93	361.107,56	5,97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	39.249,16	0,76	41.303,96	0,75	42.950,77	0,74	44.061,92	0,72	40.849,56	0,68
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.923,28	0,15	8.216,44	0,15	8.397,29	0,14	8.804,26	0,14	9.177,56	0,15
6.	Konstruksi	331.162,91	6,41	359.860,60	6,56	384.955,45	6,62	409.929,10	6,66	398.580,49	6,59
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.699.443,88	32,88	1.803.831,77	32,90	1.926.174,04	33,14	2.059.082,68	33,47	2.037.476,63	33,70
8.	Transportasi dan Pergudangan	584.086,70	11,30	638.262,16	11,64	694.264,66	11,94	733.918,61	11,93	654.886,65	10,83
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	235.736,77	4,56	253.442,64	4,62	273.127,74	4,70	290.011,16	4,71	222.403,14	3,68
10.	Informasi dan Komunikasi	402.406,54	7,79	438.485,51	8,00	473.259,81	8,14	512.172,78	8,33	564.445,23	9,34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	313.318,30	6,06	313.463,23	5,72	315.767,83	5,43	323.790,81	5,26	329.045,56	5,44
12.	Real Estat	175.761,98	3,40	183.495,50	3,35	190.792,22	3,28	198.085,59	3,22	198.587,40	3,29
13.	Jasa Perusahaan	34.876,67	0,67	36.702,35	0,67	38.464,42	0,66	40.679,97	0,66	39.286,78	0,65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	292.374,64	5,66	304.946,75	5,56	322.589,86	5,55	336.425,17	5,47	335.005,29	5,54
15.	Jasa Pendidikan	257.079,60	4,97	279.445,53	5,10	298.040,25	5,13	322.892,07	5,25	346.132,61	5,73
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163.489,34	3,16	177.876,40	3,24	190.591,04	3,28	204.460,54	3,32	229.798,27	3,80
17.	Jasa lainnya	190.850,45	3,69	198.622,93	3,62	213.959,05	3,68	233.722,92	3,80	208.177,73	3,44
PDRB		5.168.975,87	100,00	5.483.398,44	100	5.812.391,14	100,00	6.152.082,50	100,00	6.045.093,28	100,00

Sumber:

BPS

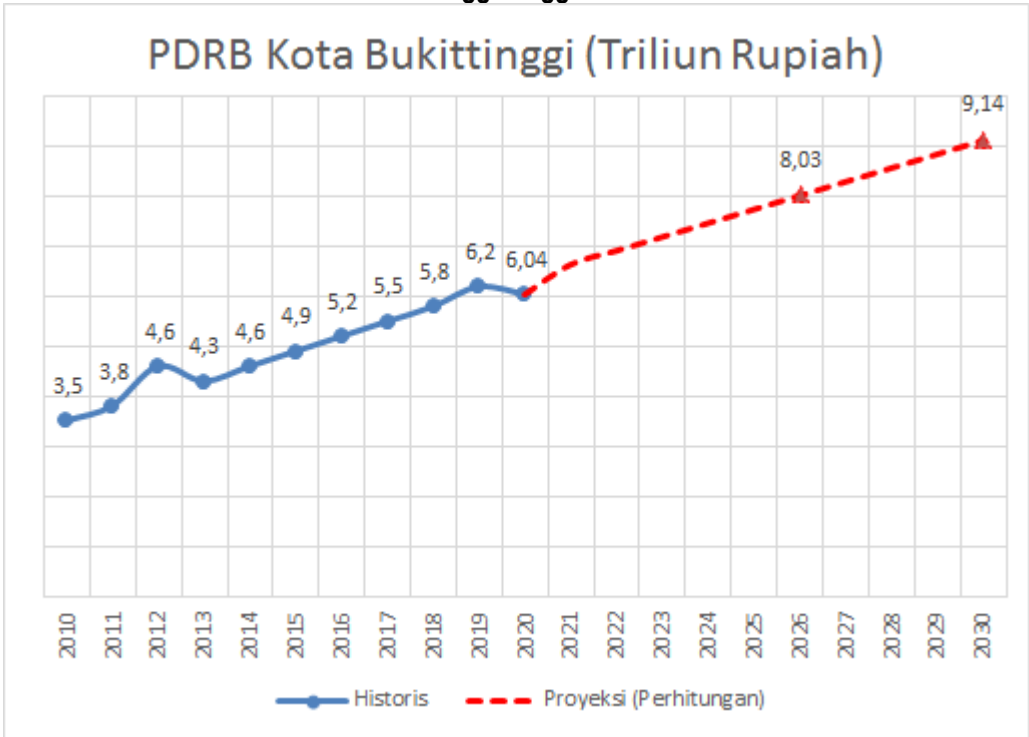
Kota

Bukittinggi,

2021

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, terjadi peningkatan kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kota Bukittinggi, akibat meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi dalam menunjang aktivitas pendidikan, perkantoran, termasuk perdagangan dan jasa.

Gambar 2.8.
Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kota Bukittinggi hingga Tahun 2030



Sumber: Diolah dari BPS Kota Bukittinggi, 2021

Dalam sepuluh tahun terakhir terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB Kota Bukittinggi seperti terlihat pada Tabel 2.16. Sektor-sektor ini perlu mendapat perhatian khusus dalam RPJMD dan berpotensi untuk ditingkatkan kontribusinya terhadap PDRB dan struktur perekonomian Kota Bukittinggi.

Tabel 2.16.
Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kota Bukittinggi Tahun 2010 dan 2020

Jenis Lapangan Usaha	Kontribusi (%)		Selisih (%)
	2010	2020	
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,8	1,18	-0,62
B Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
C Industri Pengolahan	8,46	5,19	-3,27
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0,69	-0,03
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,15	-0,04
F Konstruksi	6,56	6,70	0,14
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31,89	33,73	1,84
H Transportasi dan Pergudangan	11,22	10,06	-1,16
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,92	4,70	0,78
J Informasi dan Komunikasi	7,15	7,21	0,06

Jenis Lapangan Usaha	Kontribusi (%)		Selisih (%)
	2010	2020	
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,78	5,58	-0,20
L Real Estate	3,75	3,38	-0,37
M,N Jasa Perusahaan	0,75	0,64	-0,11
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,59	6,74	0,15
P Jasa Pendidikan	4,73	6,32	1,59
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81	3,92	1,11
R,S,T,U Jasa lainnya	3,65	3,81	0,16
Jumlah PDRB ADHK	100	100	

Sumber: Diolah dari Kota Bukittinggi dalam Angka Tahun 2011 dan Tahun 2021

2.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019 telah terjadi tren penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi (lihat Tabel 2.17). Hal ini disebabkan oleh perlambatan ekonomi secara global karena trend penurunan pertumbuhan investasi swasta dan rendahnya permintaan global serta proteksi perdagangan internasional yang berdampak pada kinerja ekspor.

Pada tahun 2020, akibat adanya pandemi Covid-19 terjadi resesi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2020 adalah -1,74%. Sektor yang paling terdampak adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Transportasi dan Pergudangan.

Tabel 2.17.
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,65	1,91	-0,46	0,46	1,34
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,61	-5,50	-0,39	-0,41	-2,74
3.	Industri Pengolahan	1,12	0,78	-1,60	-1,43	-1,02
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,15	5,24	3,99	2,59	-7,29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		3,70	2,20	4,89	4,24
6.	Konstruksi	3,48	8,67	7,01	6,53	-2,77
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,94	6,14	6,81	6,95	-1,05
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,41	9,28	8,83	5,75	-10,77
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,40	7,51	7,77	6,18	-23,31
10.	Informasi dan Komunikasi	7,29	8,97	7,98	8,27	10,21
11.	Jasa Keuangan dan	8,46	0,05	0,74	2,54	1,62

NO	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
	Asuransi					
12.	Real Estate	4,92	4,40	3,98	3,82	0,25
13.	Jasa Perusahaan	4,23	5,23	4,80	5,76	-3,42
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	4,30	5,82	4,33	-0,42
15.	Jasa Pendidikan	7,35	8,70	6,65	8,34	7,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	8,80	7,12	7,28	12,39
17.	Jasa lainnya	6,03	4,07	7,72	9,24	-10,93
PDRB		6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2021

Seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami resesi ekonomi (pertumbuhan ekonomi negatif). Namun Kota Bukittinggi membutuhkan upaya tambahan untuk mengatasi kondisi ini, karena penurunan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata penurunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada Gambar 2.9. Bahkan jika dibandingkan dengan target RPJPD Kota Bukittinggi, di akhir periode RPJMD ini dipredikasikan masih terdapat GAP laju pertumbuhan ekonomi 6,25% seperti terlihat pada Gambar 2.10.

2.2.3 Laju Inflasi

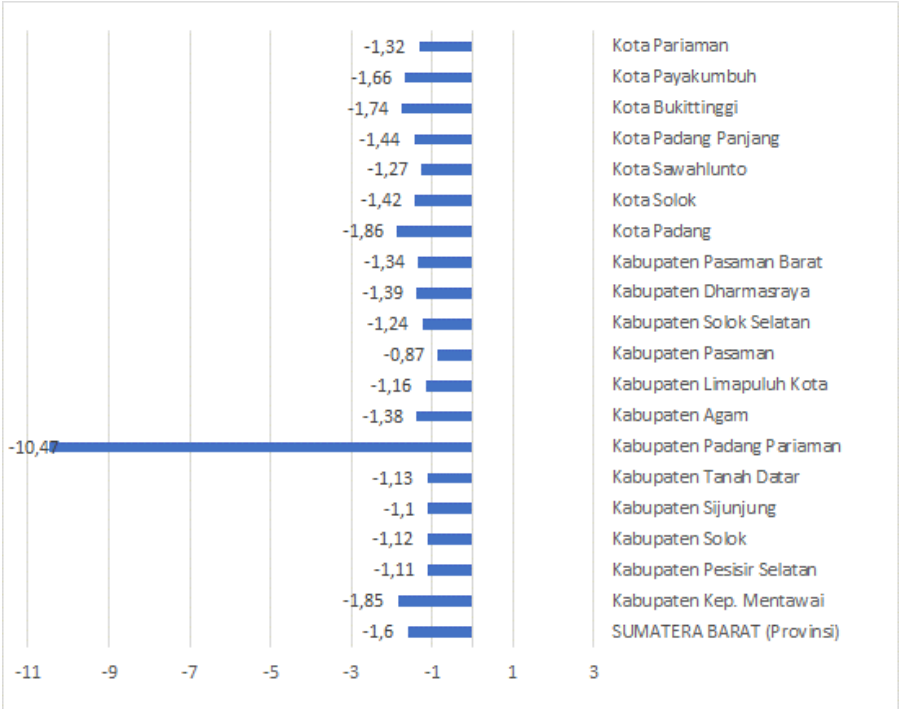
Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2020 tercatat di bawah laju Inflasi Sumatera Barat (lihat Tabel 2.18), namun lebih tinggi dari inflasi Indonesia. Padahal, dari tahun 2016 hingga 2019 rata-rata lebih rendah dari inflasi nasional. Hal ini mengindikasikan pada tahun 2020 kenaikan harga di Kota Bukittinggi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan harga nasional.

Tabel 2.18.
 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d. 2020

Inflasi	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kota Bukittinggi	3,93	1,37	2,9	1,31	2,02
Inflasi Sumatera Barat	5,02	2.11	2,60	1,67	2,11
Inflasi Indonesia	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

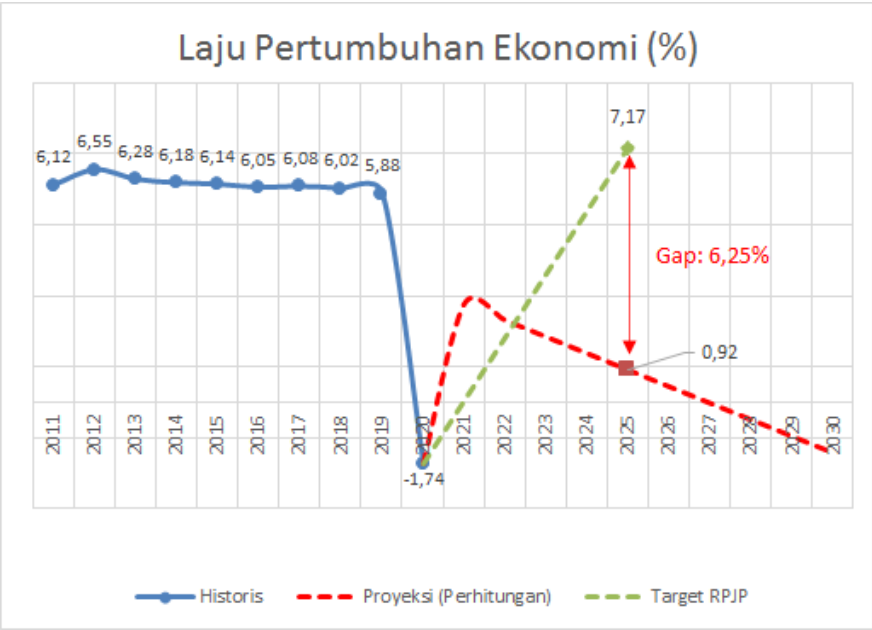
Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Gambar 2.9.
 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2020



Sumber: Diolah dari BPS Sumatera Barat, 2021

Gambar 2.10.
 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2020



Sumber: Diolah dari BPS Kota Bukittinggi, 2021

2.2.4 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun seperti ditampilkan

pada Tabel 2.19, hal ini disebabkan karena tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.19.
Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	6.783.186,07	7.453.106,84	8012777,07	8.699.579,35	8 627 587.69
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	5.168.975,87	5.483.398,44	5.813.635.05	6.155.217,98	6 045 093,28
Jumlah Penduduk (jiwa)	124.715	126.804	128.786	130,773	121.028
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	5 4,38	58,78	62,22	66,52	71,28
PDRB per Kapita ADHK (juta Rp)	41,45	43,24	45,14	47,06	49,85

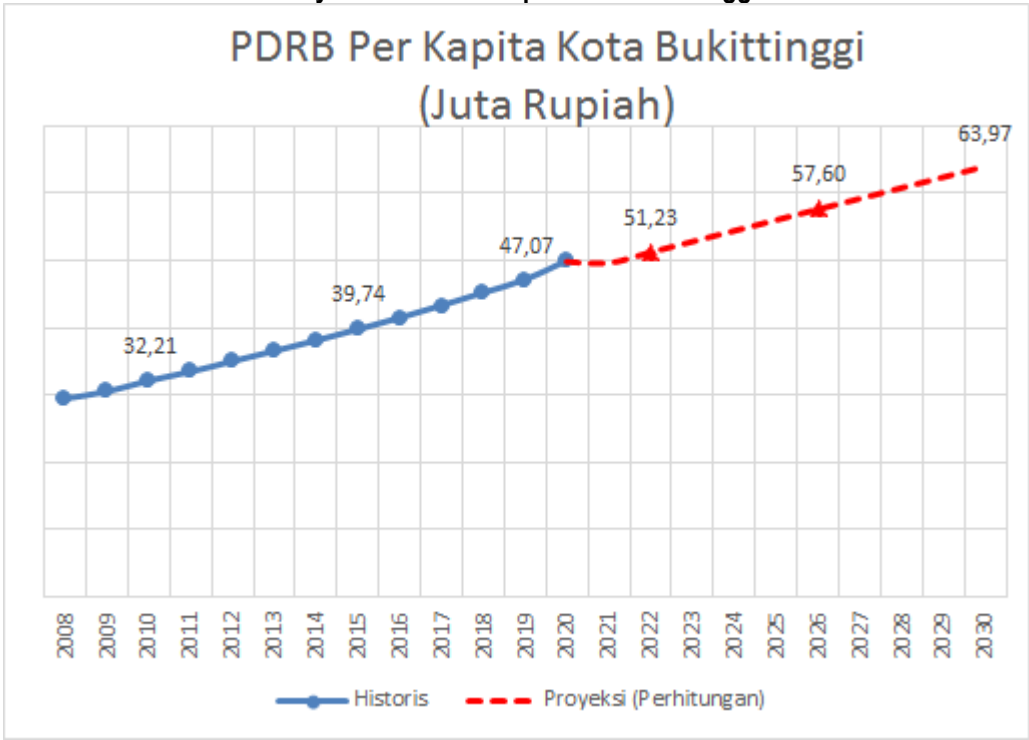
Sumber: BDA 2021 dan PDRB Kota Bukittinggi 2021

Target PDRB dalam indikator tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 50 juta rupiah. Untuk Kota Bukittinggi, diperkirakan target ini akan tercapai diakhir tahun 2021. Tingginya PDRB per kapita Kota Bukittinggi ini karena didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PDRB per kapita Kota Bukittinggi adalah dengan memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil mikro menengah (UMKM). Proyeksi PDRB Perkapita Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 2.11.

2.2.5 Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016 s.d. 2018 berada pada ketimpangan sedang (indeks gini antara 0,3 s.d. 0,5), sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 berada pada kategori ketimpangan rendah. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan. Perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2016 s.d 2020 dan perbandingannya dengan indeks gini Provinsi Sumatera Barat dan nasional terlihat pada Tabel 2.20.

Gambar 2.11.
Proyeksi PDRB Perkapita Kota Bukittinggi



Sumber: Diolah dari BPS Kota Bukittinggi, 2021

Tabel 2.20.
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Gini Kota Bukittinggi	0,340	0,310	0,340	0,267	0,265
Indeks Gini Prov. Sumatera Barat	0,31	0,31	0,305	0,307	0,301
Indeks Gini Indonesia	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385

Sumber: BPS, 2021

2.2.6 Penduduk Miskin

Salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan adalah pengendalian kemiskinan. Gambaran penduduk miskin, kedalaman serta keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi dapat diamati pada Tabel 2.21. Walaupun terdampak pandemi Covid-19, pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sampai angka 4,54% pada tahun 2020. Namun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) cenderung meningkat. Hal ini dapat diartikan bahwa secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin lebar.

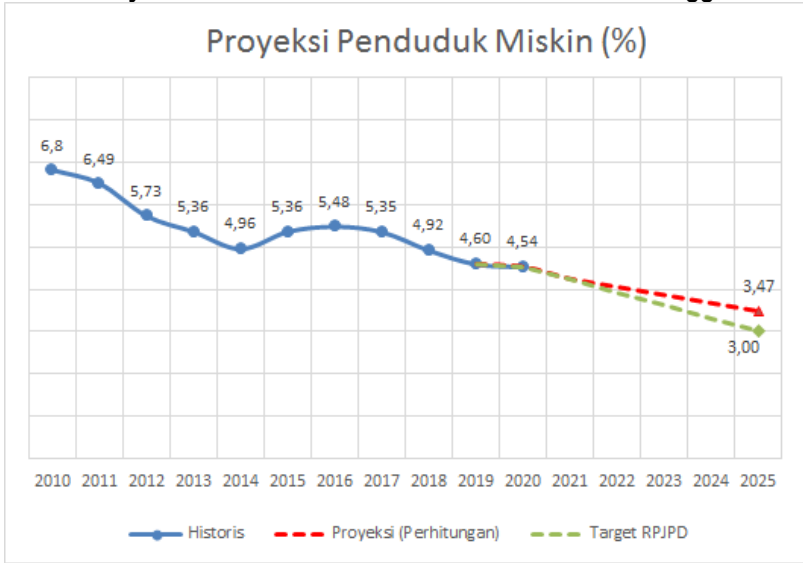
Tabel 2.21.
Penduduk Miskin Kota Bukittinggi

Indikator Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rupiah)	420.478	475.755	459.371	441.087	519 470
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	6,81	6,75	6,32	6,00	6,01
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,05	0,57	0,39	0,56	0,56
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,30	0,10	0,06	0,12	0,20

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, data diolah 2021

Capaian penurunan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.22. Dipredikasikan persentase penduduk miskin Kota Bukittinggi terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun, jika tanpa upaya tambahan target persentase penduduk miskin pada RPJPD Kota Bukittinggi diprediksikan tidak akan tercapai seperti terlihat pada Gambar 2.12. Selanjutnya sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan maka disajikan beberapa indikator pada tujuan tersebut sebagaimana Tabel 2.22.

Gambar 2.12.
Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi



Sumber: Diolah dari BPS Kota Bukittinggi, 2021

Tabel 2.22.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54
Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28
Tingkat Kemiskinan Nasional	10,70	10,12	9,66	9,22	9,98

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah 2021

Tabel 2.23.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berkurangnya Kesenjangan

Indikator	2016	2017	2018	2019
Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS).	na	9.618	9.120	9.143
Jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah).	na	20.916	32.279	26.271
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	na	45,98	28,25	34,80
Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan .	na	7.064	8.385	10.141
Jumlah seluruh pekerja	na	56.121	59.935	58.456
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	na	12,59	13,99	17,35
Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitas sosial.	na	97	104	54
Jumlah populasi penyandang disabilitas.	na	390	218	195
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	na	12,59	13,99	17,35
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	na	931	1649	1586

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, 2020

Sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan berkurangnya kesenjangan, terdapat beberapa indikator yang diamati diantaranya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan, proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.

Penduduk miskin dan rentan miskin Kota Bukittinggi yang mendapat jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) masih menunjukkan proporsi yang rendah. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Kota Bukittinggi tertinggi sebesar 46 persen pada tahun 2017 dan terendah 28 persen pada tahun 2018. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi kedepan agar masyarakat miskin dan rentan miskin di Kota Bukittinggi dapat menikmati jaminan sosial baik melalui pembiayaan pemerintah pusat maupun pembiayaan pemerintah daerah.

Tidak jauh berbeda, Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan juga menunjukan cakupan yang rendah, bahkan dibawah 20 persen selama beberapa tahun terakhir. Kebijakan terkait pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi kedepan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak tenaga kerja.

Demikian juga halnya dengan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas masih sangat rendah bahkan berada dibawah angka 20 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Penenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan penyandang disabilitas secara khusus serta mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Ramah Disabilitas.

2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia menjelaskan akses penduduk terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Selama kurun waktu 2016-2020, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan (seperti terlihat pada Tabel 2.24). Hal ini mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi.

Tabel 2.24.
Perbandingan IPM Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

IPM	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Bukittinggi	79,11	79,8	80,11	80,71	80,58
Provinsi Sumatera Barat	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah 2021

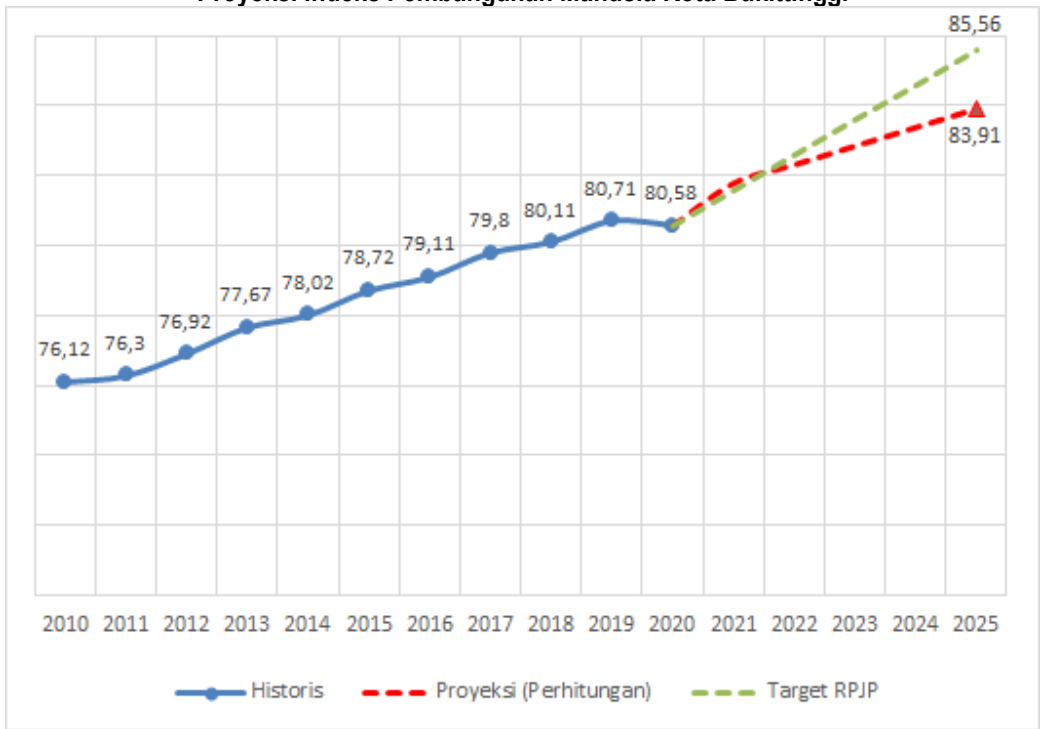
Target IPM Kota Bukittinggi dalam RPJPD adalah Peringkat 9 Nasional. Pada tahun 2013 IPM Kota Bukittinggi adalah peringkat 11 Nasional seperti ditampilkan pada Gambar 2.13. Walaupun IPM Kota Bukittinggi meningkat, tetapi peringkat secara nasional turun menjadi peringkat 25 Nasional. Hal ini disebabkan laju kenaikan IPM Kabupaten/ Kota lain di Indonesia lebih baik. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 2.14.

Gambar 2.13.
Perbandingan Peringkat IPM Kota Bukittinggi Tahun 2013 dan 2019

No	Nama Kabupaten / Kota	IPM 2013	No	Nama Kabupaten / Kota	IPM 2019
1	KOTA YOGYAKARTA	80,5	1	Kota Yogyakarta	86,65
2	KOTA MAKASSAR	80,2	2	Kota Banda Aceh	85,07
3	KOTA DEPOK	80,1	3	Sleman	83,85
4	SLEMAN	80,0	4	Kota Denpasar	83,68
5	KOTA BALIKPAPAN	79,9	5	Kota Semarang	83,19
6	KOTA AMBON	79,6	6	Kota Salatiga	83,12
7	KOTA PALANGKA RAYA	79,5	7	Kota Kendari	82,86
8	KOTA PEKANBARU	79,5	8	Kota Padang	82,68
9	KOTA DENPASAR	79,4	9	Kota Makasar	82,25
10	KOTA MANADO	79,3	10	Kota Surabaya	82,22
11	KOTA BUKITTINGGI	79,3	11	Kota Surakarta	81,86
12	KOTA SURAKARTA	79,1	12	Kota Bandung	81,62
13	KOTA PARE-PARE	79,0	13	Kota Bekasi	81,59
14	KOTA BANDA ACEH	79,0	14	Badung	81,59
15	KOTA DUMAI	79,0	15	Kota Palu	81,5
16	KOTA SURABAYA	79,0	16	Kota Tangerang Selatan	81,48
17	KOTA SORONG	78,9	17	Kota Pekanbaru	81,35
18	KOTA PADANG	78,8	18	Kota Malang	81,32
19	KOTA PADANG PANJANG	78,8	19	Kota Batam	81,09
20	KOTA SAMARINDA	78,8	20	Kota Medan	80,97
21	KOTA MALANG	78,8	21	Kota Madiun	80,88
22	KOTA BENGKULU	78,8	22	Kota Depok	80,82
23	KOTA BATAM	78,7	23	Kota Ambon	80,81
24	KOTA BLITAR	78,7	24	Kota Palangka Raya	80,77
25	KOTA MOJOKERTO	78,7	25	Kota Bukittinggi	80,71

Sumber BPS 2014 dan 2021

Gambar 2.14.
Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi



Sumber: Diolah dari BPS Kota Bukittinggi, 2021

2.2.8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesenjangan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar-negara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);

15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals / MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapai Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kota Bukittinggi dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kota Bukittinggi sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori :

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA
- d. Indikator TPB yang tidak memiliki target/TT

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kota adalah 16 TPB (kecuali TPB 14, Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan). Sedangkan jumlah indikator dari 16 TPB yang menjadi kewenangan kota adalah 222 indikator. Dari 222 indikator tersebut, terdapat 11 (sebelas) indikator yang bukan kewenangan (BK) Kota Bukittinggi. Dengan demikian, jumlah indikator TPB/ SDGs yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi adalah 211 indikator.

Kondisi Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan. Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada SKPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 107 indikator (50,71%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 71 indikator (33,65%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 33 indikator (15,64%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kota Bukittinggi.

Tabel 2.25.
Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Bukittinggi

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	107	50,71%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	71	33,65%
3.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	33	15,64%
TOTAL		211	100%

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 107 indikator atau dengan persentase 50,71%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bukittinggi

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	11	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	5	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	19	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	9	Sosial
5	Kesetaraan Gender	7	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6	Lingkungan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	13	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	3	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	8	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	0	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	14	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	9	Ekonomi
	Jumlah	107	

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 71 indikator atau dengan persentase 33,65%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27.
Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kota Bukittinggi

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	10	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	3	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	11	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	3	Sosial
5	Kesetaraan Gender	5	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	10	Lingkungan
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	1	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	6	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	2	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	5	Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	3	Ekonomi
	Jumlah	71	

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang tidak memiliki data adalah sebanyak 33 indikator atau 15,64%. Lebih jelasnya, jumlah indikator

dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang tidak memiliki data dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Indikator Pada Setiap TPB/SDGs yang Tidak Memiliki Data di Kota Bukittinggi

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	4	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	3	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	4	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	1	Sosial
5	Kesetaraan Gender	2	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	Lingkungan
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	2	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	2	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	2	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	2	Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	3	Ekonomi
	Jumlah	33	

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, yang komprehensif serta saling terkait atau integration. Kemajuan salah satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs merupakan suatu aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat pada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan “No one left behind” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dilihat melalui indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah. Gambaran umum kondisi daerah Kota Bukittinggi dari aspek Pelayanan Umum diuraikan berikut.

2.3.1 **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni atau APM juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program pendidikan di suatu daerah. APM ini diukur berdasarkan pengelompokan umur penduduk menurut jenjang pendidikan dan berdasarkan jumlah siswa di kelompok jenjang pendidikan tersebut. Kelompok APM tersebut adalah tingkat SD untuk kelompok di usia 7-12 tahun dan tingkat SMP untuk kelompok usia 13-15 tahun. Perkembangan APM Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD / MI					
	APM SD / MI	98,85	99,46	98,77	98,95	99,38
2	SMP /MTs					
	APM SMP / MTs	79,36	79,21	80,79	81	81,46

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Secara umum APM tingkat SD/MI berfluktuasi dari tahun 2016 s.d. 2020 dan rata-rata sudah lebih dari 90%. Ini berarti hampir seluruh penduduk diusia sekolah tingkat SD telah terdaftar dan tepat usia sebagai pelajar yang tersebar di 45 Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi. Kesadaran dan ketepatan waktu sesuai usia wajib belajar diusia 7-12 tahun di tingkat dasar telah sepenuhnya dilaksanakan oleh para orang tua, sehingga mereka mendaftarkan anak anak mereka ke sekolah formal. APM tingkat SMP/MTs umur 13-15 tahun pada tahun 2020 APM SMP sebesar 81,46% artinya dari 100 orang siswa umur 13-15 tahun sedang bersekolah sebanyak 81 orang, sisanya tidak melanjutkan sekolah atau bersekolah ditempat lain.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

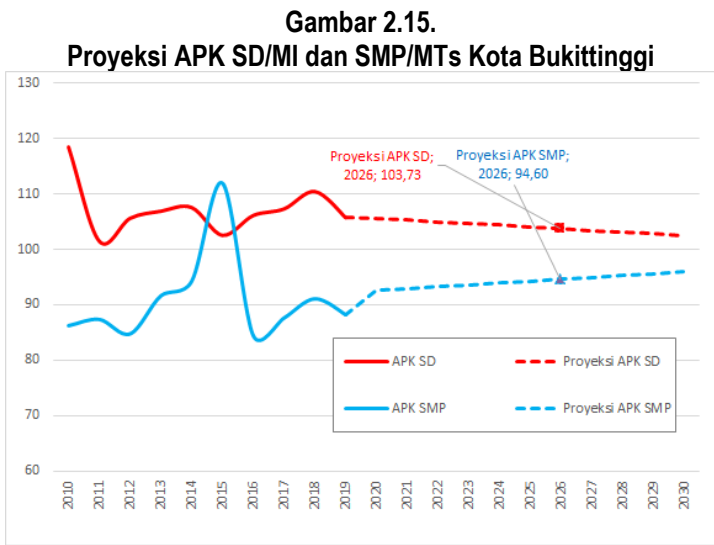
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang Pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Data perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020						
No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	APK SD/MI	106,11	107,34	110,47	105,78	112,44
2	SMP/MTs					
	APK SMP/MTs	84,52	87,71	91,15	88,29	84,76

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Analisis dari tren data dalam 10 tahun terakhir, diproyeksian APK SD/MI akan cenderung menurun setiap tahunnya. Sementara itu, APK SMP/MTs dalam beberapa tahun yang akan datang masih di bawah 100%, seperti terlihat pada Gambar 2.15.



Sumber: Diolah dari BPS Kota Bukittinggi, 2021

Selain pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, keberpihakan pemerintah dan minat serta perhatian masyarakat terhadap kemajuan pendidikan juga perlu dilihat dari pendidikan anak usia dini. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) Kota Bukittinggi ditampilkan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan APK PAUD					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
APK PAUD	95,07	98,30	71,09	55,25	47,43

Sumber : KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, 2020

Anak Usia Dini (APK PAUD) Kota Bukittinggi tidak memperlihatkan perkembangan yang baik selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data di atas, tergambar bahwa hanya sebagian penduduk usia 3 sampai 6 tahun di Kota Bukittinggi sedang mengikuti PAUD. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi data ini, diantaranya kemungkinan usia 3 tahun lebih belum diikutsertakan PAUD oleh orang tua dan kemungkinan adanya anak masuk sekolah dasar sebelum usia 7 tahun. Namun

demikian ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi untuk pembangunan pendidikan kedepan.

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Bangunan merupakan salah satu syarat untuk dapat terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik. Kondisi bangunan yang baik akan menambah kenyamanan bagi peserta didik dalam menerima pembelajaran. Kondisi Bangunan Baik untuk Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat dalam Tabel 2.32:

Tabel 2.32. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi						
No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
I.	SD/MI					
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	24	40	47	54	63
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	61	61	62	64	64
3	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik (No 1/ no 2) X 100	39,97	65,91	76,34	84,48	98,46
II.	SMP/MTs					
1.	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	7	10	15	17	20
2.	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	19	19	21	21	21
3.	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik (No 1/ no 2) X 100	36,71	50	69,20	80	93,33

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Konsep bangunan satuan pendidikan berkondisi pendidikan baik adalah bangunan yang layak untuk proses belajar mengajar dan memiliki fasilitas pendukung pendidikan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan. Rendahnya persentase satuan pendidikan berkondisi baik di Kota Bukittinggi menggambarkan perlunya perhatian pemerintah kedepan untuk menyediakan jenis dan mutu layanan pendidikan berkualitas baik. Selanjutnya untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pendidikan di setiap tingkat pendidikan digunakan indikator capaian akreditasi sekolah sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tabel 2.33.

Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan terkait proporsi sekolah terakreditasi minimal B di Kota Bukittinggi menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase SD/ MI yang terakreditasi minimal B menunjukkan capaian diatas 93 persen selama 3 tahun terakhir, dan persentase SMP/MTs yang terakreditasi minimal B mencapai diatas 80 persen selama 3 tahun terakhir. Meskipun belum seluruh SD/ MI dan SMP/MTs yang terakreditasi di Kota Bukittinggi namun jika dilihat dari status kepemilikan, maka seluruh SD dan SMP Negeri di Kota Bukittinggi telah terakreditasi minimal B. Penguatan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan/ swasta perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi kedepan.

Tabel 2.33.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Proporsi Sekolah Berakreditasi Minimal B

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B	na	63	63	62
Jumlah SD/MI	na	67	67	66
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	na	94.03	94.03	93.94
Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu.	na	12	12	11
Jumlah SMP/MTs .	na	15	15	13
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	na	80.00	80.00	84.62

Sumber : KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, 2020

Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

- Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
- Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas:
 - Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
 - Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
 - Kelompok mata pelajaran setetika, dan
 - Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan Kesehatan
- Lulus ujian S/M/PK untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
- Lulus UN

Dari Tabel 2.34 terlihat bahwa dari tahun 2016 s.d. 2020 Angka Kelulusan Siswa SD/MI dan SMP/MTs selalu menunjukkan angka hampir 100 % Angka Kelulusan. Ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah SD/MI di Kota Bukittinggi sudah menunjukkan angka yang signifikan kalau dilihat dari jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.34.
Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
I.	SD/MI					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	2.543	2.554	2.671	2.671	2.726

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	2.553	2.557	2.671	2.671	2.726
3.	AL SD/MI	99,61	99,88	100	100	100
II.	SMP/MTs					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	2.137	2.847	3.000	3.000	2.261
2.	Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	2.140	2.848	3.000	3.000	2.261
3.	AL SMP/MTs	99,86	99,96	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Angka Melanjutkan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs

Angka Menlanjutkan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs Kota Bukittinggi digambarkan dalam Tabel 2.35: Angka Melanjutkan dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dari Tahun 2016 s.d 2019 terjadi sedikit fluktuasi turun naik. Pada tahun 2019 angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs adalah 78, angka yang cukup rendah karena data dari MI dan MTs tidak ada. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 89.

Tabel 2.35.
Angka Melanjutkan (AM) dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs	105	119	114	78	89

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Namun hal ini bukan berarti bahwa jika APS tinggi maka daya serap dan partisipasi sekolah juga tinggi. Namun kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Tabel 2.36 menampilkan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bukittinggi.

Tabel 2.36.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	APS SD/MI	100	99,46	98,77	99,38	99,90
2	SMP/MTs					
	APS SMP / MTs	98,29	98,53	98,24	98,54	98,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Terjadi penurunan angka partisipasi sekolah terjadi penurunan secara terus menerus. APS SD/MI meskipun mengalami penurunan sejak tahun 2016 Kondisi ini perlu dicermati dan dicari langkah-langkah pada tahun-tahun depan sehingga APS ini hendaknya meningkat dan diharapkan semua siswa pada usia pendidikan ini dapat semuanya diserap pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Bukittinggi terutama untuk tingkat SMP/MTs.

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program Wajib Belajar 9 tahun. Dinamika ini dapat dilihat dari rasio dalam pelayanan penduduk usia sekolah pada tabel 2.37.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dinyatakan untuk standar sarana dan prasarana SD/MI sebagai berikut:

- 1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
- 2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru
- 3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI
- 4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Tabel 2.37.
Ketersediaan Sekolah, Penduduk Usia Sekolah dan Rasio Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD / MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	61	61	62	64	65
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.478	12.908	13.111	13.164	12183
1.3.	Rasio	48,89	47,26	47,29	48,61	53,35
2	SMP / MTs					

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.	Jumlah gedung sekolah	19	19	21	21	21
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.610	6.702	6.795	6.799	6.292
2.3.	Rasio	28,74	28,35	30,90	30,88	33,37

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Adapun sarana dan prasarana untuk SMP/MTs sesuai standar sarana dan prasarana pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 sebagai berikut:

1. Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
2. Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru
3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs, yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.
4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Pada tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, pemenuhan syarat wajib sarana dan prasarana terhadap sekolah telah terpenuhi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP diantaranya dengan pelaksanaan Rehab dan RKB serta pengadaan peralatan. Hal ini ditunjang oleh semakin besarnya anggaran daerah yang di alokasikan untuk membenahi sarana prasarana sekolah baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Disamping itu alokasi dana dari Pemerintah Pusat dibidang pendidikan turut menunjang meningkatnya pencapaian sasaran ini dari tahun ke tahun.

Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru sesuai tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai pengajar merupakan faktor pendukung yang tak kalah pentingnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid untuk tingkat pendidikan dasar dilihat pada Tabel 2.38..

Tabel 2.38.
Jumlah Guru, murid dan Rasio Guru Jenjang Pendidikan Dasar Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD / SLB/MI					
1.1.	Jumlah Guru	815	900	883	883	962
1.2.	Jumlah Murid	16.237	17.285	17.222	17.222	17.150
1.3.	Rasio	50,19	52,07	51,27	51,27	56,09
2	SMP / SMPLB/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	659	582	598	598	589
2.2.	Jumlah Murid	9.157	9.137	8.947	8.947	8.556
2.3.	Rasio	71.97	63.7	66.84	66.84	68,84

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan selama kurun waktu 2016-2019, namun pada tahun 2020 terdapat peningkatan rasio sekitar 5% menjadi 56,09%. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi masih kekurangan guru pada jenjang pendidikan ini seperti halnya Guru Kelas. Tidak jauh berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MI, rasio yang juga terbilang rendah dapat dilihat pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

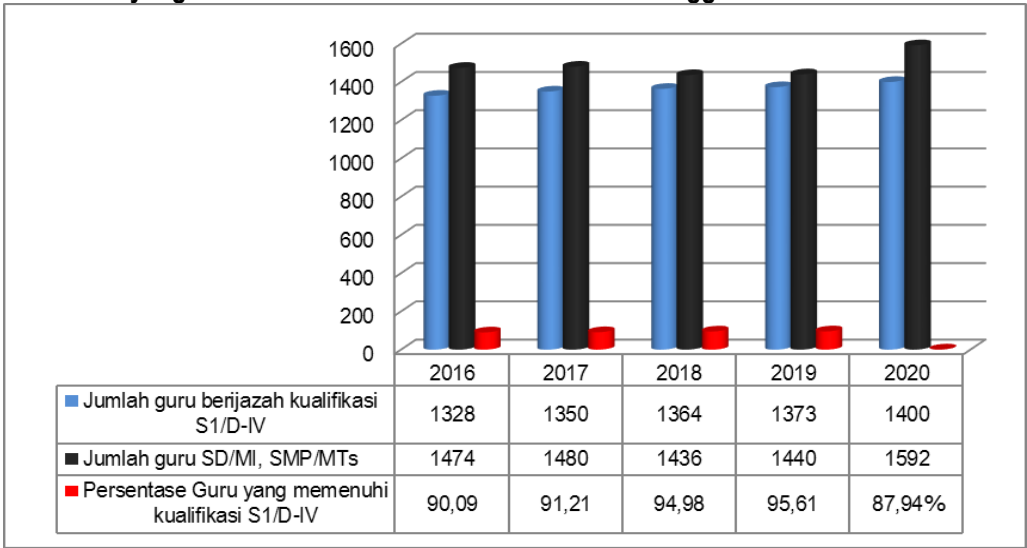
Dikaitkan dengan capaian indikator kinerja Persentase SD/SDLB/MI yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan, Kota Bukittinggi masih memperoleh capaian sebesar 78,06%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi belum mencapai 100% dalam pemenuhan tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan. Oleh sebab itu indikator kinerja terhadap persentase tenaga pendidik SD/SDLB/MI yang telah sesuai Standar Nasional Pendidikan masih menjadi agenda pokok dari pendidikan dasar. Masih banyak tenaga pengajar yang belum sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang tersebar di seluruh SD/SDLB /MI yang berada di Kota Bukittinggi.

Dari tabel diatas juga terlihat penurunan rasio guru terhadap jumlah murid yang disebabkan karena peningkatan jumlah siswa yang cukup besar namun tidak sebanding dengan pertambahan jumlah guru. Salah satu penyebab pertumbuhan jumlah guru tidak bisa mengimbangi pertambahan jumlah siswa pada jenjang pendidikan ini adalah adanya kebijakan moratorium penerimaan ASN yang tidak dikecualikan untuk guru di Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk memenuhi standar ketersediaan guru terhadap kelangsungan pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan kebijakan dengan tetap memberdayakan guru-guru honorer. Dengan kebijakan ini diharapkan kekurangan guru tidak menimbulkan kendala terhadap kemajuan pendidikan di Kota Bukittinggi.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Sesuai dengan standar pelayanan dasar pendidikan, setiap guru harus berpendidikan minimal S1/DIV. Penyediaan guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang sesuai untuk tingkat pendidikan dasar di Bukittinggi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Kualifikasi pendidikan guru pada tingkat SD/ MI dan SMP/ MTs tahun 2016 s.d. 2020 dapat diamati pada grafik berikut ini. S1/D-IV

Gambar 2.16.
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki kualifikasi S1/DIV dari tahun 2016 s.d 2020 mengalami peningkatan namun belum mampu memenuhi standar dasar yang ditetapkan, karena persentasenya mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan terkait upaya dalam peningkatan kualitas dan kompetensi guru terutama kualifikasi pendidikan guru selama beberapa tahun terakhir.

2.3.2 *Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan*

Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Angka Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi

Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
73.60	73,69	73,91	74,22	74,38

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan, Angka Harapan Hidup tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Dengan mengetahui indikator Angka Harapan Hidup ini, kita bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan faktor-faktor yang bisa meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Dari tabel 2.39. dapat dilihat jika angka usia harapan hidup Kota Bukittinggi telah berada di posisi yang cukup baik, bahkan berada diatas rata-rata provinsi (rata-rata Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 69,31). Peningkatan angka harapan hidup ini hendaknya juga diiringi dengan peningkatan kualitas harapan hidup.

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi merupakan jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2020 merupakan angka kematian bayi tertinggi dalam lima tahun terakhir (tabel 2.40).

Tabel 2.40.
Angka Kematian Bayi Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah kematian bayi (>1 tahun)	Jumlah kelahiran hidup	Angka kematian bayi
1	2016	9	2.465	3,65
2	2017	12	2.570	4,67
3	2018	5	2.460	2,03
4	2019	7	2.156	3,25
5	2020	7	1.865	5,36

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berbagai berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB diantaranya:

1. Dukungan peningkatan akses pelayanan kesehatan antara lain peningkatan cakupan imunisasi dan pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan.
2. Perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap infeksi penyakit.

Pandemi covid-19 pada tahun 2020, berpengaruh tidak langsung terhadap peningkatan angka kematian bayi di Kota Bukittinggi.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan tempat tinggal, ketersediaan layanan kesehatan. Indikator yang terkait langsung dengan angka kelangsungan hidup bayi adalah angka kematian bayi (*infant mortality rate*) yaitu suatu angka yang menunjukkan jumlah bayi yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum.

Dari grafik diatas terlihat bahwa dari tahun 2016-2020 kelangsungan hidup bayi selalu bervariasi dari tahun ke tahun. Angka kelangsungan hidup bayi ini mengalami sedikit fluktuasi namun tetap dalam rentang dan kategori baik, hal ini dipengaruhi oleh multi faktor antara lain penyakit infeksi, berat badan lahir rendah, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan lain-lain.

Tabel 2.41.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Bayi Tahun 2016 s.d 2020

No	Tahun	Angka kematian bayi	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
1	2016	3,65	996,35
2	2017	4,67	995,33
3	2018	2,03	997,97
4	2019	3,25	996,75
5	2020	5,36	994,64

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan sewaktu melahirkan dan masa nifas. Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah Pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga.

Jika dilihat AKI dari tahun 2015 hingga 2019, secara umum terjadi penurunan. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka AKI. Oleh karena ini dibutuhkan upaya pemerintah bersama masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, peningkatan gizi ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Angka Kematian Ibu Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Jumlah Ibu Hamil Yang Meninggal	Jumlah Kelahiran Hidup
1	2016	2	2.465
2	2017	1	2.570
3	2018	1	2.460
4	2019	2	2.156
5	2020	6	1.865

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sehat diperlukan peningkatan derajat Kesehatan dan gizi masyarakat serta peningkatan kualitas dalam pelayanan kesehatan. Berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan sarana/prasarana kesehatan dan tenaga Kesehatan.

Salah satu potensi unggulan Kota Bukittinggi adalah bidang pelayanan kesehatan. Ini didukung oleh fasilitas yang cukup memadai, bahkan saat ini Kota Bukittinggi telah memiliki sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tentunya kehadiran RSUD ini akan melengkapi Bukittinggi sebagai kota pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan semata melainkan juga sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan karena dijadikan salah satu indikator terhadap kualitas hidup masyarakat.

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan secara bersama–sama oleh pemerintah dan masyarakat. Kerjasama tersebut berbentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Salah satu UKBM tersebut adalah posyandu. Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan Kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini, Salah satu pendukung pembangunan kesehatan di masyarakat dilihat dari ketersediaan posyandu, yaitu rasio posyandu dengan jumlah balita. Untuk Kota Bukittinggi dari tahun 2016 – 2020 terlihat pada grafik berikut :

Tabel 2.43.
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d 2020

No	Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu Per Satuan Balita
1	2016	123	12.649	9,72
2	2017	135	12.654	10,67
3	2018	135	12.646	10,68
4	2019	136	12.635	10,76
5	2020	133	10.746	12,38

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Rasio posyandu per satuan balita menggambarkan jumlah balita yang dapat dilayani oleh satu posyandu. Dalam kurun waktu 2016-2020 terlihat bahwa rasio semakin meningkat yang artinya tingkat pertumbuhan balita sebanding dengan dari tingkat pertumbuhan posyandu. Namun, idealnya rasio posyandu terhadap balita adalah 13, oleh karena itu diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan jumlah posyandu di Kota Bukittinggi.

Kinerja pelayanan kesehatan terkait dengan ketersediaan posyandu selain diamati melalui capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait gizi ibu hamil dan balita, dapat diamati dengan indikator lain sebagaimana tabel 2.44..

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Balita dan Gizi Ibu Hamil

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah seluruh anak balita yang menderita kekurangan gizi (underweight).	na	na	416	771	879
Jumlah anak balita pendek (stunting)	na	na	922	1.306	1.271

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anak balita yang menderita kurus (wasting)	na	na	266	585	563
Jumlah seluruh anak balita	na	na	5.300	8.753	8.981
Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	na	na	7,85	8,81	9,79
Prevalensi stunting	na	na	17,40	17,20	14,15
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) pada balita	na	na	5,02	6,68	6,27
Ibu hamil dengan anemia	na	na	326	383	226
Ibu hamil yang diperiksa	na	na	2.266	2.613	2.572
Prevalensi anemia pada ibu hamil	na	na	14,39	14,66	8,79

Sumber : KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, 2020

Meskipun pemerintah Kota Bukittinggi telah memprioritaskan pembangunan kesehatan pada RPJMD Tahun 2016-2021, namun capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan terkait gizi baita dan ibu hamil masih menunjukkan hasil yang belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya angka prevalensi kekurangan gizi (underweight), prevalensi stunting, prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, dan prevalensi anemia pada ibu hamil. Pada tahun 2017, terdapat 416 balita menderita kekurangan gizi dari total 5.300 balita di Kota Bukittinggi yang berarti preverensi kekurangan gizi pada balita mencapai angka 7,85 persen. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 8 anak balita kekurangan gizi dari setiap 100 orang anak balita di Kota Bukittinggi. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita ini mengalami peningkatan tahun 2018 menjadi 8,81 persen dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 9,79 persen. Ini berarti bahwa terdapat 10 anak balita mengalami kekurangan gizi pada setiap 100 anak balita di Kota Bukittinggi pada tahun 2019.

Demikian juga dengan capaian prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada balita, meskipun berfluktuasi namun secara umum mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Capaian tahun 2019, prevalensi malnutrisi pada balita berada pada angka 6,27 persen, ini berarti bahwa dari setiap 100 balita terdapat 6 balita di Kota Bukittinggi mengalami kurus. Selanjutnya, capaian tujuan prevalensi stunting meskipun mengalami penurunan namun masih menunjukkan angka yang masih tinggi. Prevalensi stunting di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 mencapai angka 17,40 persen, dapat diturunkan pada tahun 2018 menjadi 14,92 persen, dan menurun menjadi 6,27 persen pada tahun 2019. Demikian juga prevalensi anemia pada ibu hamil mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Prevalensi anemia pada tahun 2017 sebesar 15,39 persen dan menurun sampai angka 8,79 persen pada tahun 2019.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Poliklinik	12	12	14	14	14
3.	Jumlah Pustu	11	11	11	11	11
4.	Jumlah Penduduk	124.715	126.805	128.783	130.773	121.028
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk *)	0,056	0,055	0,05	0,05	0,06
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk *)	0,096	0,094	0,11	0,11	0,12
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk *)	0,112	0,11	0,11	0,11	0,09

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Sarana kesehatan berupa puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dalam kondisi jumlah yang sama setiap tahunnya, beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi khususnya Dinas Kesehatan adalah meningkatkan pelayanan dengan melengkapi sarana dan prasarana serta SDM yang langsung melayani.

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data jumlah dan rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel tabel berikut.

Tabel 2.46.
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	0	0	0	0	1
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	2	2	2
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	5	5	5	5	6
7.	Jumlah Penduduk	124.715	126.805	128.783	130.773	121.028
8.	Rasio*)	0,040	0,039	0,039	0,038	0,050

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan Kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 0,050 artinya satu rumah sakit melayani 20.000 jiwa.

Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang dimaksud Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu kelompok tenaga kesehatan adalah tenaga medis yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan (Anireon, 1984). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokter memiliki pengertian yang sama dengan tenaga medis. (tabel 2.47).

Tabel 2.47.
Jumlah Dokter/ Tenaga Medis di Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020

No	Dokter/ Tenaga Medis	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokter Spesialis	82	81	97	97	97
2.	Dokter Umum	112	136	179	179	181
3.	Dokter Gigi	49	60	69	69	69
	Jumlah	243	277	345	345	347

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat kecenderungan kenaikan rasio tenaga medis per satuan penduduk. Hal ini disebabkan penambahan jumlah tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada penduduk. Selanjutnya diperlihatkan rasio dokter per satuan jumlah penduduk tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Jumlah Dokter dan Jumlah Penduduk Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah Dokter	Jumlah Penduduk	Rasio Dokter Per Penduduk
1.	2016	263	124.715	2,11
2.	2017	280	126.805	2,21
3.	2018	277	128.783	2,15
4.	2019	355	130.773	2,71
5.	2020	347	121.028	2,87

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan jumlah Dokter di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 adalah sebanyak 263 orang dan bertambah hingga 347 orang tahun 2020 yang tersebar pada Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Institusi Dinas Kesehatan lainnya. Ketersediaan jumlah dokter ini dipengaruhi oleh penyediaan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit di Kota Bukittinggi yang melayani rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar dari Kota Bukittinggi dan kabupaten/kota sekitarnya.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis yang ada di Kota Bukittinggi terdiri dari tenaga analisis labor, temperatur dan pengaturan rontgen, anestesi, fisioterapi, rekam medik, refotpsien yang tersebar diseluruh puskesmas, rumah sakit dan institusi. Rasio tenaga medis per satuan penduduk meunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga Kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis per satuan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Secara umum dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 s.d. 2019 terdapat kenaikan rasio tenaga medis per satuan penduduk yang dikarenakan penambahan jumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada penduduk. Namun karena pada tahun 2020 tidak terjadi penurunan jumlah tenaga medis, sehingga terjadi penurunan rasio.

Selanjutnya penyediaan pelayanan kesehatan kepada penduduk dapat tergambar dari indikator terkait kesehatan masyarakat. Beberapa indikator terkait kesehatan masyarakat sebagaimana termuat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.49.
Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Medis	341	375	444	444	395
2	Jumlah Penduduk	124.715	126.804	128.783	130.773	121.028
3	Rasio	2,73	2,96	3,45	3,40	3,26

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Tabel 2.50.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait kesehatan Masyarakat

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk umur 15 - 49 tahun yang positif HIV	na	na	51	74	70
Jumlah penduduk umur 15-49 tahun	na	na	65.189	65.434	64.404
Prevalensi HIV pada populasi dewasa per 10.000 populasi	na	na	7.82	11.31	10.87
Jumlah kasus TB baru dan kambuh	na	na	450	454	246
Jumlah penduduk	na	na	130.773	128.783	126.804
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 10.000 penduduk	na	na	34,41	35,25	19,40
Jumlah kelurahan yang mencapai eliminasi malaria.	na	na	7	7	7
Jumlah seluruh sampel orang usia 10-59 tahun yang pernah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir.	na	na	91	79	59
Jumlah penduduk usia 10-59 tahun.	na	na	89.482	88.912	87.671
Prevalensi penyalahgunaan narkoba per 10.000 penduduk usia 10-59 tahun	na	na	10,17	8,89	6,73

Sumber : KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, 2020

Prevalensi HIV pada populasi dewasa per 10.000 populasi mengalami peningkatan meskipun berfluktuasi selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 terdapat 51 orang penduduk umur 15-49 tahun positif HIV dan meningkat tajam menjadi 74 orang tahun 2018, selanjutnya sedikit turun ke angka 70 orang pada tahun 2019. Pencegahan penularan dan penanganan pasien HIV perlu menjadi pemerintah kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

Pemerintah kota Bukittinggi telah berhasil menekan kasus TB baru dan kambuh selama beberapa tahun terakhir. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 10.000 penduduk pada tahun 2017 sebesar 34,41, meningkat menjadi 35,25 pada tahun 2018 dan selanjutnya turun ke angka 19,40 tahun 2019 atau 246 kasus dari 126.804 penduduk. Demikian juga dengan kasus penyalahgunaan narkoba, prevalensi penyalahgunaan narkoba per 10.000 penduduk usia 10-59 tahun secara terus menerus menurun selama 3 tahun terakhir. Prevalensi penyalahgunaan narkoba per 10.000 penduduk usia 10-59 tahun tahun 2017 sebesar 10,17, turun menjadi 8,89 tahun 2018 dan turun lagi tahun 2019 menjadi 6,73.

2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam upaya menyediakan infrastruktur bagi peningkatan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat maka pemerintah harus selalu meningkatkan kinerja pembangunan terkait jaringan jalan, peningkatan ini salah satunya dapat diukur dari proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik yang dipantau perkembangannya setiap tahun.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Sebagai kawasan yang memprioritaskan pembangunannya di sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan jasa, maka sektor transportasi di Kota Bukittinggi mempunyai peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dalam hubungan sistem aktivitas sistem transportasi, perkembangan fasilitas transportasi disebabkan oleh perkembangan guna lahan, pola aktivitas maupun keputusan lokasional. Jalan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang menghubungkan berbagai pusat-pusat kegiatan serta sebagai sarana distribusi barang dan jasa untuk menunjang perekonomian. Dalam mendesain jalan, hal yang harus dipertimbangkan adalah antisipasi terhadap kondisi lalu lintas dimasa yang akan datang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	156,75	135,13	158,72	156,91	160,61
2.	Jalan kota keseluruhan	180,17	180,17	180,17	180,17	180,17
3.	Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	87	75	88,09	87	89,08

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Salah satu indikator untuk mengukur pembangunan infrastruktur daerah adalah proporsi panjang jalan kondisi baik dan sedang. Pada tahun 2016 proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang adalah sebesar 87 persen atau 156,75 km berkondisi baik dan sedang dari 180,17 Km Panjang keseluruhan jalan kota. Kondisi jalan membaik sampai tahun 2020 menjadi 89,08 persen atau 160,61 Km berkondisi baik dari 180,17 Km jalan kota di Bukittinggi. Namun demikian, untuk mendukung perkembangan sektor-sektor unggulan kota Bukittinggi kedepan seperti sektor pariwisata dan perdagangan maka peningkatan kondisi jalan perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi kedepan.

b. Jaringan Irigasi

Irigasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Dengan adanya irigasi maka kebutuhan akan air pada sebidang lahan tetap terpenuhi sekalipun kondisi lengas tanah tidak mencukupi sehingga tanaman tetap bisa tumbuh secara normal.

Jaringan irigasi yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnnya. Rasio Jaringan irigasi dapat menggambarkan efisiensi dan efektifitas operasional jaringan irigasi yang ada dalam mengairi petak sawah / areal tanam yang ada. Tabel 2.52. menyajikan Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi.

Tabel 2.52.
Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

No	Pasokan Irigasi	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Saluran Irigasi (km)	31,70	31,70	31,70	31,41	32,84
2.	Luas Areal Tanam (Ha)	588	588	588	214,48	214,48
3.	Rasio Jaringan Irigasi	0,05	0,05	0,05	0,146	0,153

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2021

Dilihat dari tabel di atas, panjang saluran irigasi Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak terdapat penambahan panjang saluran irigasi dan luas areal tanam, sehingga rasio jaringan irigasi per luas areal tanam juga tetap yaitu sebesar 0,05 artinya tidak ada penambahan beban saluran irigasi dalam mengairi area tanam. Namun pada tahun 2019 dan 2020 terjadi pengurangan luas areal tanam menjadi 214,48 Ha sesuai dengan hasil Sinkronisasi Peta Jaringan Irigasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan satu peta dengan jaringan irigasi yang jadi kewenangan provinsi, di mana ada beberapa kawasan yang areal tanamnya tumpang tindih kewenangan antara provinsi dan kewenagan Kota Bukittinggi. Sehingga disepakati terjadi pengurangan areal tanam untuk Kota Bukittinggi menjadi 214,48 Ha. Dengan berkurangnya luasan areal tanam Kota Bukittinggi di tahun 2019 dan 2020 maka meningkatkan rasio jaringan irigasi menjadi 0,146 dan 0,153. Hal ini berimbas pada anggaran.

c. Persentase penduduk berakses air minum

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya. Data akses air munum layak dan berkelanjutan rumah tangga di Kota Bukittinggi sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.53.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan.

Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak).	28.614	29.608	31.388	32.635
Jumlah Rumah Tangga	33.126	33.912	35.411	36.435
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	85	68,9	87,3	88,62
Jumlah penduduk yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	109.526	111.956	114.211	116.583
Jumlah Penduduk	119.183	121.590	123.296	125.469
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	91.90	92.00	92.63	92.92

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 sudah mencapai 88,62 % serta proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan juga meningkat sampai dengan tahun 2019 sebesar 92,63 persen. Akses layanan air minum ini dilaksanakan melalui sitem air minum bukan jaringan perpipaan maupun sitem air minum jaringan perpipaan. Namun masih ada 11,28 % masyarakat yang masih belum mendapatkan akses layanan sumber air bersih dikarenakan terbatasnya Sumber Air Baku yang ada di Wilayah Bukittinggi dan sebagian besar sumber baku yang ada berada diluar wilayah administrasi Kota Bukittinggi.

Sementara itu, untuk layanan sistem air minum bukan jaringan perpipaan, sebagian masyarakat masih memanfaatkan penggunaan Sumbur gali terlindungi, sumur bor terlindungi, terminal air, mata air dan penampungan air. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dari hasil pemeriksaan air tahun 2017 secara bakteriologis terhadap PDAM, sumur gali dan sumur bor sebanyak 452 sampel yang diuji, sebayak 213 sampel yang memenuhi syarat atau sebesar 47,1 %.

Pada tahun 2018 persentase air yang memenuhi syarat mengalami penurunan dari 215 sampel yang diuji yang memenuhi syarat hanya sebanyak 90 sampel atau 41.86%, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya masih banyak sumur warga yang tidak memenuhi mutu kualitas air, sehingga perlu pengawasan secara berkala terhadap sumur gali/sumur bor tersebut.

Secara umum dilihat dari segi Kualitas, kuantitas dan kontiniutas kesediaan air minum Kota Bukittinggi, sebaiknya kedepan diarahkan untuk akses air minum yang dimanfaatkan masyarakat menggunakan air minum perpipaan (PDAM), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kondisi permukiman penduduk yang sangat padat, sehingga banyak sumur bor yang tidak sesuai dengan standar kesehatan karena jarak sumur bor dengan septitank yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan.
- b. Kota Bukittinggi yang belum memiliki IPLT, sehingga banyak septitank penduduk yang tidak dilakukan penyedotan serta standar septitank yang tidak septik.
- c. Kondisi lingkungan yang kurang baik, baik dari segi persampahan drainase/limbah, sehingga kualitas air yang ada sangat rendah.

Terkait layanan sistem air minum perpipaan di Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh PDAM Tirta Jam Gadang, Karena terbatasnya sumber air baku yang ada maka hal ini berimbas terhadap rendahnya tingkat layanan air bersih Kota Bukittinggi yang baru 49,25% (audit kinerja 2018) serta tingginya tingkat kebocoran jaringan perpipaan PDAM sebesar 40.95 % (audit Kinerja 2018) sehingga berpengaruh terhadap layanan PDAM yang belum 24 Jam (rata-rata 18 jam/hari).

d. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Data rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebagaimana indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan.

Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah desa/kelurahan yang ODF/SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	na	3	2	2
Jumlah infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	na	7	2	0
Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak	na	24.019	24.215	24.826
Jumlah Rumah Tangga	na	33.126	33.912	35.411
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	na	72,50	71,40	70,11

Sumber :Dokumen KLHS RPJMD, 2020

e. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Kota Bukittinggi memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Sehingga jumlah Masjid dan Mushalla sangat menonjol dari pada jumlah tempat beribadah lainnya. Dalam 5 tahun terakhir rasio masjid terhadap satuan penduduk cenderung tetap, sedangkan rasio mushalla cenderung meningkat.

Tempat ibadah yang tidak ada di Kota Bukittinggi adalah Pura (tempat beribadah agama Hindu). Bukittinggi juga terkenal dengan toleransi antar umat beragamanya, masing-masing agama bebas menjalankan peribadatan dengan nyaman. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kerusuhan yang terjadi antar umat beragama di Kota Bukittinggi. Rasio masing-masing tempat ibadah terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.55..

Tabel 2.55.
Rasio Tempat Ibadah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Mesjid	44	45	45	46	46
2.	Jumlah Mushalla menurut BDA	146	146	146	164	164
3.	Jumlah Penduduk beragama Islam	119.497	121.560	115.980	125.529	123.303
4.	Rasio Masjid Per satuan penduduk	0,37	0,37	0,39	0,37	0,37
5.	Rasio Mushalla Per satuan penduduk	1,22	1,20	1,26	1,31	1,33
6.	Jumlah Gereja Katholik	1	1	1	1	1
7.	Jumlah Penduduk beragama Katholik	1.139	1.160	1.132	1.204	1.114
8.	Rasio Gereja Katholik Per satuan penduduk	0,88	0,86	0,88	0,83	0,90
9.	Jumlah Gereja Protestan	1	1	1	1	1
10	Jml Penduduk Beragama Protestan	1.754	1.758	1,882	1.802	2.057
11	Rasio Gereja Protestan Per satuan penduduk	0,57	0,57	0,53	0,55	0,49

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2021

f. Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bukittinggi merupakan lahan yang terdiri dari Taman dan Hutan Kota, fasilitas umum berupa lapangan olah raga dan lahan pekarangan, Sempadan Sungai dan Sempadan Ngarai Sianok, TPU dan Jalur Hijau. Berikut Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dapat dilihat pada tabel berikutTabel 2.56.

Tabel 2.56.
Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017*)	2018*)	2019*)	2020*)
1	Luas RTH	*	212,128	212,163	392,42	392,42
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	*	2.523,9	2.523,9	2.523,9	2.523,9
3	Rasio	*	1 : 0,084	1 : 0,084	1 : 0,155	1 : 0,155

Keterangan: * data tidak tersedia
*) data RTH Publik

Dari tabel di atas terlihat bahwa luas RTH sampai dengan tahun 2020 seluas 392.42 Ha terjadi penambahan luas sebesar 180,257 Ha dibandingkan tahun 2018. RTH ini terdiri dari: Taman kota, Jalur Hijau yang pengelolaannya merupakan kewenangan DLH, Taman Pariwisata, Sempadan Sungai dan Ngarai yang pengelolaannya merupakan kewenangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga. Untuk luas wilayah Hak Penggunaan Lahan / Hak Guna Bangunan pada tahun 2020 adalah 0,155, artinya dalam 1 HPL/HGB baru terdapat 0,155 Ha RTH, dalam perhitungan sudah termasuk luas jalur sempadan sungai dan ngarai.

Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan besaran proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang meliputi 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau. Perkembangan Luasan RTH Publik Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s.d. 2020 (Tabel 2.57).

Tabel 2.57.
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Tahun 2016.d 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM (m ²)	na	2.121.280	2.194.680	2.345.001	3.924.200
2	Luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota (m ²)	na	5.047.800	5.047.800	5.047.800	5.047.800
3	Persentase		42%	43%	46%	78%

Sumber : DIKPLH tahun 2021

Luas RTH publik yang seharusnya tersedia dibandingkan dengan luas Kota Bukittinggi adalah 5.047.800 m², sedangkan luas RTH publik pada akhir tahun 2020 adalah 3.924.200 m² (78% dari target). Oleh karena itu, masih terdapat kekurangan RTH publik sekitar 1.123.600 m² atau sekitar 22% dari target yang diamanatkan oleh undang-undang.

Memenuhi amanat UU No. 26 Tahun 2007 bahwa luasan RTH publik Kota Bukittinggi belum mencapai angka 20%, kekurangan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti:

1. Sebagian besar lahan yang berpotensi sebagai RTH adalah tanah milik kaum sehingga penetapan lahan ini menjadi RTH membutuhkan proses yang panjang,
2. Adanya pengalihan fungsi lahan menjadi permukiman; dan
3. Harga tanah yang tinggi sehingga membutuhkan alokasi dana yang besar untuk memilikinya disisi lain APBD Kota Bukittinggi juga terbatas.

g. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 bahwasanya Kota Bukittinggi tidak memiliki Kawasan Hutan, namun hanya memiliki beberapa kawasan yang memiliki lindung yaitu Kawasan Ngarai Sianok, Sempadan Ngarai Sianok dan Sempadan Sungai serta Kawasan Ruang Terbuka hijau (RTH) dengan fungsi Hutan Kota yang merupakan kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati). Selain itu hutan kota juga dimanfaatkan sebagai aktivitas sosial masyarakat (duduk, beristirahat, olah raga ringan). Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58.
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan Tahun 2016 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016*	2017)**	2018)*	2019)**
1	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara (Ha)	67,99	67,99	61.74	61,51
2	Luas daratan	2523 Ha	2523 Ha	2523 Ha	2523 Ha
3	Rasio	na	1 : 0,0269	1: 0,0244	1: 0,0243

Sumber:)* Data Perkiraan)** Data Diolah oleh Bapelitbang)** Data Diolah Dinas PUPR
CTT: Beberapa pohon di kawasan Jam gadang ditebang

Berdasarkan tabel di atas yang merupakan hasil perhitungan Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil analisis foto udara Kota Bukittinggi Tahun 2019 didapat luasan kawasan yang tertutup pepohonan seluas 61,51 Ha dari luas daratan Kota Bukittinggi, dengan rasio 1: 0,0243 artinya dalam 1 Ha baru 0,024 Ha luas Kawasan yang tertutup pepohonan. Rasio ini turun 0,001 dari tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh semakin banyaknya lahan terbangun sehingga terjadi penebangan pohon-pohon besar di beberapa lokasi seperti di sekitar Jam Gadang dan lahan-lahan permukiman serta di beberapa ruang jalan. Hal ini juga disebabkan tumbangnya pepohonan yang lapuk karena dimakan usia serta terpaan angin saat terjadi hujan lebat yang disertai angin

Keberadaan pepohonan dalam kota perlu dipertahankan karena keberadaannya sebagai paru-paru kota adalah penyumbang terhadap O2, dapat menyegarkan udara, menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembapan kota. Sekaligus sebagai pemandangan alami perkotaan dan mengurangi polusi udara serta berfungsi dalam proses

fotosintesis tanaman akan menyerap CO2 terutama dari gas buang yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Untuk itu perlu dilakukan penanaman kembali pohon-pohon terutama di ruang-ruang terbuka public dan melalui gerakan menanam pohon untuk mengantisipasi angka pencemaran lingkungan dan dampak pemanasan global.

2.3.4 *Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

a. Perumahan Rakyat

Setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan bathin, mempunyai tempat tinggal serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak. Hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia dimana pemerintah berkewajiban utuk mewujudkannya. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni. Rasio rumah layak huni untuk Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut..

Tabel 2.59.
Rasio Rumah Layak Huni Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah Layak Huni	na	17.914	20.089	20.456	19.364
2	Jumlah penduduk	124.715	126.804	128.783	130.773	121.028
3	Rasio	na	0,141	0,156	0,156	0,160

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2021

Jumlah rumah layak huni di Kota Bukittinggi pada tahun 2020 adalah sekitar 19.364 rumah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yang berjumlah sekitar 121.028 jiwa, maka rasio rumah layak huni per jumlah penduduk di Kota Bukittinggi adalah 0,160. Jika diasumsi masing-masing rumah terdiri dari 5 orang anggota maka dibutuhkan rumah layak huni sebanyak 24.206 rumah. Dengan demikian, maka kekurangan rumah layak huni sebesar 4.842 unit rumah atau lebih kurang 25%. Upaya penanganan rumah tidak layak huni telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam berbagai macam program dan kegiatan, diantaranya adalah program bedah rumah.

b. Kawasan Kumuh

Dalam penangan kawasan kumuh dintervensi melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam mencapai *universal acces* yang salah satunya adalah pengurangan kawasan kumuh perkotaan menjadi 0% pada tahun 2019. Disamping itu, penanganan rumah tidak layak huni juga dilakukan pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat, serta dana dari sumber-sumber lainnya baik di pusat maupun daerah melalui APBD dan juga penaganan melalui dana CSR (*Rasio Corporate Social Responsibility*) dimana pada tahun 2020 akan dilakukan bedah rumah di kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan kelurahan Pakan Kurai.

Luas permukiman kumuh pada tahun 2016-2019 di Kota Bukittinggi adalah seluas 30,6 Ha. Dari luas tersebut semuanya sudah tertangani keseluruhan sebesar 30,6 Ha pada tahun 2019, sehingga persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2019 sudah tuntas menjadi 0 %. Pada tahun 2020 sudah tidak terdapat permukiman kumuh di Kota Bukittinggi. Persentase luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	0	8,81	27,37	30,6	0
2	Luas permukiman kumuh (Ha)	30,6	30,6	30,6	30,6	0
3	Persentase	0%	28,79%	89,44 %	100%	0

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2020

Secara umum, daerah kumuh (*slum area*) diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di banyak kota besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah jembatan. Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61.
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Kawasan Kumuh	30,6 Ha	21,79	4 Ha	0 Ha	0 Ha
2.	Luas Wilayah	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha
3.	Persentase	1,21%	0,9%	0,15%	0%	0%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dari tabel diatas persentase luas pemukiman kumuh di kawasan perkotaan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 0 (nol) persen atau sudah tuntas. Hal ini merupakan gambaran berhasilnya program terhadap pemukiman kumuh yang telah dilaksanakan, baik kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Meskipun luas kawasan kumuh telah berhasil diturunkan ke capaian 0 (nol) persen, namun perlu dilihat penurunan rumah tangga kumuh perkotaan sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan dengan persentase rumah tangga kumuh perkotaan. Capaian penurunan persentase rumah tangga kumuh perkotaan disajikan pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan.

Tahun	2016*	2017	2018	2019
Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan pada waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah).	757	757	951	662
Jumlah rumah tangga di perkotaan pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah).	6.107	6.107	7.472	4.934
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	13,4	13,42	12,73	12,40

Sumber) * Data Perkiraan, Dokumen KLHS RPJMD, 2020

Capaian penurunan rumah tangga kumuh perkotaan di Kota Bukittinggi belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Meskipun berhasil menurunkan persentase rumah tangga kumuh perkotaan, namun indikator ini masih menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Penanganan rumah tangga kumuh perkotaan perlu lebih dioptimalkan pemerintah Kota Bukittinggi kedepan agar pengentasan rumah tangga kumuh dapat memperlihatkan capaian yang lebih baik.

2.3.5 **Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pemerintah Kota Bukittinggi terus melakukan upaya untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kinerja pelayanan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada beberapa indikator sebagaimana berikut:

Stabilitas dan Keamanan Lingkungan

Indikator stabilitas dan keamanan lingkungan dapat dilihat dari sejauhmana cakupan petugas perlindungan Masyarakat, tingkat penyelesaian K3, dan Tingkat Penegakan Perda dapat direalisasikan. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasarnya kepada masyarakat, didasari dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Didalam pesan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 mengamanahkan bahwa yang terkait dengan tupoksi dari satuan perlindungan masyarakat didaerah, menurut jenis pelayanan dasarnya adalah pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dengan indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota dengan nilai satu (1) orang atau anggota satuan perlindungan masyarakat pada setiap rukun tetangga.

Tabel 2.63.
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Perlindungan Masyarakat	Jumlah RT	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat
1	2016	120	338	36%
2	2017	120	338	36%
3	2018	120	338	36%
4	2019	120	338	36%
5	2020	120	338	36%

Sumber: Dinas Satpol PP, diolah, 2021

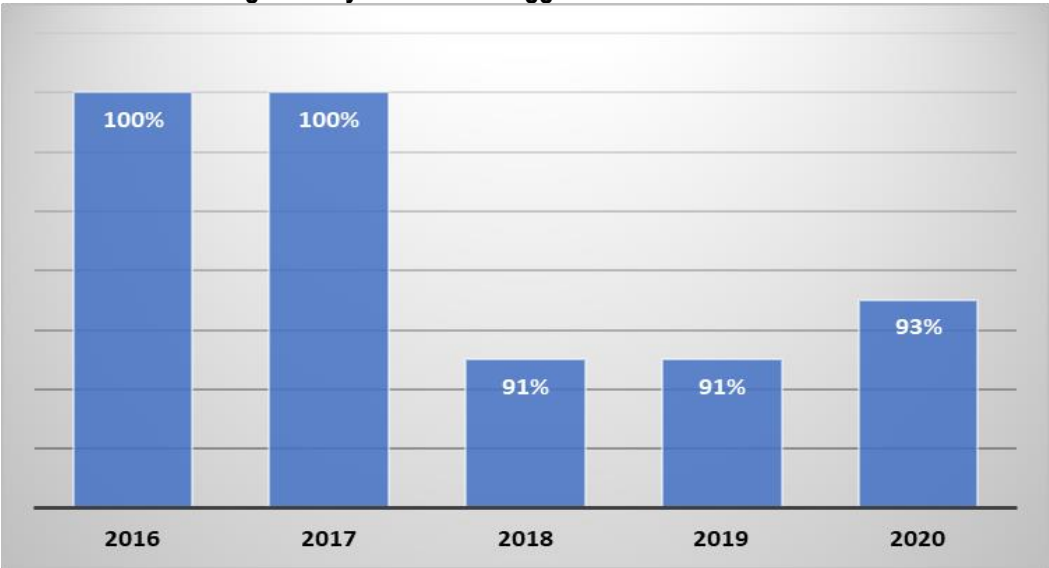
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada Tahun 2016 s.d. 2020 cakupan petugas Linmas hanya 36%. Jumlah petugas Linmas hanya 5 orang per Kelurahan, dengan total 120 orang se Kota Bukittinggi. Sementara untuk kondisi ideal seharusnya ada 338 orang petugas Linmas (sesuai dengan jumlah RT). Rendahnya realisasi cakupan petugas Linmas Kota Bukittinggi disebabkan oleh keterbatasan anggaran, meskipun dengan jumlah personil Linmas yang terbatas sejauh ini pelaksanaan tugas perlindungan Masyarakat di Kota Bukittinggi tidak mengalami kendala berarti.

Penyelesaian Pelanggaran K3

Terkait Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk itu tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan merupakan salah satu indikator dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Capaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dapat diukur dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang telah dilaksanakan. Selama periode Tahun 2016-2020, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.17.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Satpol PP. 2021

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2016-2020 berasal dari perbandingan antara jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan. dengan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP (Tabel 2.64Tabel 2.64).

Tabel 2.64.
Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan dan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	657	1,494	1,944	2,357	1.366
2	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	657	1,494	2,131	2,587	1.465
3	Persentase Pelanggaran K3 yang terselesaikan	100%	100%	91%	91%	93%

Sumber: Dinas Satpol PP, 2021

Pelanggaran K3 yang terselesaikan adalah pelanggaran yang telah selesai dilakukan sidang dan telah selesai pembayaran denda. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran K3 cenderung meningkat. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ditahun 2018 dan Tahun 2019 hanya sebesar 91%, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 terdapat sebanyak 187 kasus yang masih dalam proses penyelesaian pelanggaran Perda antara lain menunggu proses sidang, tidak sanggup membayar biaya penegakan Perda, atau tidak/belum diselesaikan oleh pihak pelanggar Perda. Kejadian yang sama juga terjadi pada Tahun 2019 dengan jumlah kasus yang masih dalam proses penyelesaian meningkat menjadi 230 kasus. Sedangkan persentase pelanggaran K3 yang terselesaikan pada tahun 2020 meningkat menjadi 93%.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah menegakkan Perda dan Perkada. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventifnon yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dan jumlah Pelanggaran PERDA di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.65.

Tabel 2.65.
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dan jumlah Pelanggaran PERDA

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	657	1,494	1,944	2,357	1.366
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	657	1,494	2,131	2,587	1.465
	Persentase penyelesaian penegakan PERDA	100%	100%	91%	91%	93%

Sumber: Dinas Satpol PP, 2021

Layanan bencana kebakaran

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah layanan kebakaran merupakan salah satu sub urusan Ketentraman dan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dimana pada sub urusan kebakaran Pemerintah Kabupaten/ Kota salah satunya berkewajiban untuk melakukan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan Kebakaran.

Dalam memberikan pelayanannya diatur dalam Standar Pelayanan Minimalnya yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (*response time*).

Besarnya cakupan layanan bencana kebakaran tidak terlepas ketersediaan sarana penanggulangan kebakaran yang ada di Dinas Kebakaran salah satunya keberadaan mobil pemadam kebakaran, berikut gambaran cakupan layanan bencana kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.66..

Tabel 2.66.
Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	6	6	6	6	6
2.	Jumlah Penduduk	124.715	126.804	121.590	130.773	121.028
3.	Rasio (1:2 x 100%)	48,31%	47,31%	49,35%	45,88%	49,58%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kota Bukittinggi per tahun 2020 masih tetap 6 unit artinya tidak ada penambahan mobil pemadaman kebakaran dari tahun 2016. Berdasarkan standar *International Fire Chiefs Association of Asia* (IFCAA) yang menetapkan bahwa setiap 10.000 penduduk dilayani 1 (satu) unit mobil (telah sesuai dengan standar yg dipedomani oleh Damkar). Jika Penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2020 adalah sebanyak 121.028 jiwa, maka idealnya Kota Bukittinggi memiliki 12 unit mobil pemadam kebakaran. Walaupun demikian, Dinas Kebakaran selalu berusaha memaksimalkan sarana yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal, dengan jumlah mobil pemadam kebakaran 6 unit, cakupan layanan bencana kebakaran adalah sebesar 49,58% menurun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dengan kondisi lebih dari 50% kekurangan mobil pemadam kebakaran Kota Bukittinggi maka hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah kota sehingga cakupan layanan bencana kebakaran kedepan lebih terpenuhi sesuai standar yang seharusnya.

Tingkat waktu tanggap (*response time*) menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran). Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah 15 (lima belas) menit.

Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. (ini adalah arahan dalam permendagri di atas artinya setiap kejadian kebakaran wajib ditangani oleh Damkar). Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran	115	121	77	65	58
2.	Jumlah Kejadian Kebakaran	115	121	77	65	58
3.	Rasio (1:2 x 100%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebakaran,2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Bukittinggi telah 100%, rasio ini telah memenuhi mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018. Dari tabel juga tergambar bahwa kejadian kebakaran menurun sebanyak 12 kasus dan seluruh kasus dapat tertangani dan memenuhi tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*).

2.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PPKS. Adapun data PPKS Kota Bukittinggi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68.
Data PPKS Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

No	Jenis PPKS	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Anak Balita Terlantar	Anak	14	45	1	0	0
2.	Anak Terlantar	Anak	436	580	4	1	23
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak	1	4	9	2	3
4.	Anak Jalanan	Anak	27	25	0	0	0
5.	Anak dengan Kedisabilitasan	Anak	106	134	64	74	150
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak	16	32	12	0	11
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	3	4	8	6	4
8.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	1595	1894	340	383	745
9.	Penyandang Disabilitas	Orang	363	390	123	28	565
10.	Tuna Susila	Orang	6	5	2	0	0
11.	Gelandangan	Orang	29	61	39	40	2
12.	Pengemis	Orang	5	9	4	12	3
13.	Pemulung	Orang	62	83	23	39	54
14.	Kelompok Minoritas	Orang	7	7	7	3	0
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Permayarakatan	Orang	0	15	0	2	34
16.	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	14	36	55	0	34
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	65	470	66	7	6
18.	Korban Trafficking	Orang	1	0	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	Orang	1	0	0	0	0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	0	0	0	0	0
21.	Korban Bencana Alam	Orang	563	1137	1497	713	690
22.	Korban Bencana Sosial	Orang	1	0	68	9	100
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	1108	820	810	724	936
24.	Fakir Miskin	KK	4977	5508	5772	5744	5231
25.	Keluarga Bermasalah Psikologi	KK	0	0	22	7	40
26.	Komunitas Adat Terpencil	KK	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Penanganan PPKS menjadi program prioritas pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk menangani PPKS tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak, perlu ada sinergitas antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Persoalan mendasar PPKS adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti Kesehatan, Pendidikan, sandang, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Para PPKS harus diberdayakan dan dilatih untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan data tabel 2.68 di atas, terlihat secara umum masih banyak terdapat PPKS di Kota Bukittinggi yang terbagi ke dalam 26 jenis PPKS. Jumlah PPKS berdasarkan jenis PPKS sangat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor terutama adalah ekonomi.

Jenis PPKS terbanyak didominasi oleh Fakir Miskin. Hal ini disebabkan banyak faktor, karena memang Kota Bukittinggi merupakan daerah tujuan yang mengakibatkan mobilitas penduduk guna mencari nafkah sangat tinggi. Sedangkan untuk jenis komunitas adat terpencil dan pekerja migran bermasalah sosial memang tidak ada di Kota Bukittinggi

2.3.7 Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja

Tenaga Tenaga kerja sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di intansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja saat ini relatif masih rendah, salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas. Perkembangan lulusan S1/S2/S3 dari tenaga kerja kita lihat pada uraian Tabel 2.69.

Tabel 2.69.
Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1	10.063	9.622	10.454	11.394*	11.645
2.	Jumlah lulusan S2/S3	1.322	893	956	1.091*	1.117
3.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	11.385	10.515	11.410	12.485*	12.771
4.	Jumlah penduduk	124.715	126.804	128.783	130.773	130.773
5.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	7,77	8,29	8,85	9,54	9,77

Sumber: Dinas PMPTSP,2021

Dari tabel di atas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja.

Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

Penduduk usia kerja digambarkan melalui rentang umur mulai 15 tahun ke atas, terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Perkembangan jumlah penduduk usia kerja dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang diikuti pula peningkatan pada angkatan kerja. Angkatan kerja Kota Bukittinggi yang bekerja rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun juga diikuti oleh pengangguran terbuka. Sementara Bukan Angkatan Kerja didominasi oleh Mengurus Rumah Tangga, Sekolah dan Lainnya. Gambaran Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut jenis kegiatan seminggu yang lalu di Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu Kota Bukittinggi

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angkatan Kerja	60.107	60.306	64.551	62.283	70.190
2.	Bekerja	56.478	56.121	59.935	54.456	64.916
3.	Pengangguran Terbuka	3.629	4.185	4.616	3.827	5.274
4.	Bukan Angkatan Kerja	28.816	32.151	29.499	33.501	30.314
5.	Sekolah	9.651	14.751	14.502	14.436	11.549
6	Mengurus Rumah Tangga	12.367	13.191	12.464	15.712	14.969
7	Lainnya	6.798	4.209	2.533	3.353	3.796

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, 2017,2018,2019,2020,2021

Seiring dengan meningkatnya Angkatan Kerja, pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas. Masih banyak terdapat Angkatan Kerja yang pendidikan tertingginya Tidak/ Belum Tamat SD dan Tamat Sekolah Dasar. Gambaran pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh Penduduk Usia Kerja Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Bukittinggi

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		AK	BAK	AK	BAK	AK	BAK	AK	BAK	AK	BAK
1.	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	151	421	178	214	-	-	-	121	46	-
2.	Tidak/ Belum Tamat SD	5.014	2.407	5.239	2.534	4.096	2.134	4.187	1.828	3.008	1.955
3.	Sekolah Dasar	4.831	3.804	6.165	4.244	7.499	5.189	6.054	4.174	5.126	3.024
4.	Sekolah Menengah Pertama	9.344	10.381	8.613	11.444	8.685	10.784	10.297	11.121	12.380	9.378
5.	Sekolah Menengah Atas	15.699	6.256	14.937	8.166	19.056	5.894	15.927	9.225	17.416	8.988
6	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	10.605	3.132	9.160	2.795	9.285	2.105	11.293	3.156	13.647	3.218
7	Diploma I/II/III/ Akademi	4.356	980	4.531	1.016	4.298	1.000	3.735	1.990	5.339	2.130
8	Universitas	10.107	1.435	11.483	1.738	11.632	2.393	10.790	1.886	13.228	1.621

Keterangan : AK:Angkatan Kerja, BAK: Bukan Angkatan Kerja

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, 2017,2018,2019,2020,2021

2.3.8 *Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan juga merupakan sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas dibawah laki-laki. Salah satu indikator Pemberdayaan perempuan adalah dengan melihat Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan proporsi yang duduk di DPRD.

Indikator terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72.
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	9,07%	8,41%	8,92%	8,92%	8,92%
2.	Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD	8%	8%	8%	8%	8%
3.	Rasio KDRT	0,00%	0,20%	0,36%	0,19%	0,13%
4.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	0,07%	0,06%	4,50%	4,50%	1,53%
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	54,63%	57,97%	54,68%	54,68%	54,63%

Sumber: DP3APPKB, 2021

Berdasarkan tabel di atas untuk partisipasi perempuan di lembaga pemerintah rata-rata 8-9% setiap tahunnya, sedangkan untuk proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bukittinggi tetap sama dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu sebesar 8% dengan keterlibatan perempuan sebanyak 2 (dua) orang dari total 25 orang anggota DPRD.

Untuk Rasio KDRT di Kota Bukittinggi, dapat dilihat masih dalam persentase yang sangat kecil dan cenderung menurun setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya untuk persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur yang sedikit mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2019, kembali menurun pada tahun 2020. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih agar anak-anak pada usia sekolah dapat bersekolah dengan baik.

Partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Bukittinggi sudah sedikit diatas angka 54,63%. Hal ini sudah menunjukkan angka yang baik karena tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia hanya 54 persen.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Salah satu indikator daerah dalam upaya perlindungan anak adalah Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Penilaian KLA dinilai melalui 24 indikator KLA, yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif Konvensi Hak Anak, yang meliputi: Klaster 1, Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; Klaster 2, Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster 3, Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; Klaster 4, Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan Klaster 5, Perlindungan khusus anak.

Pada tahun 2016, Kota Bukittinggi mendapat penilaian KLA dengan predikat Pratama, dan meningkat di tahun 2018 menjadi Madya. Pada tahun 2019 tidak dilakukan penilaian karena mewabahnya Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pada tahun 2020 kembali dilakukan penilaian, dan Kota Bukittinggi berhasil meraih nilai Madya. Keberhasilan Bukittinggi ini terwujud atas capaian pembangunan dalam memenuhi 31 Hak Anak melalui 5 klaster Hak Anak dan 24 indikator Kota Layak Anak yang ditentukan oleh Pemerintah. Capaian Kota Layak Anak Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73.
Capaian Kota layak Anak Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2020

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian KLA	Pratama	Pratama	Madya	Tidak Ada Penilaian	Madya

Sumber: DP3APPKB, 2021

2.3.9 *Urusan Pemerintahan Bidang Pangan*

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dari pengertian tersebut maka menjadi kewajiban Negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perserorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya.

Sebagai daerah perkotaan, Kota Bukittinggi masih memiliki lahan untuk pertanian yang tersebar pada 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, kecamatan Mandingin Koto Selayan yang mempunyai lahan pertanian yang lebih luas dibanding 2 (dua) kecamatan lainnya. Ketersediaan pangan utama (beras) Kota Bukittinggi untuk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	124.715	126.804	128.783	130.773	121.028
2.	Ketersediaan Beras (ton)	15.934	19.006	19.667	18.872	18.399
3.	Ketersediaan pangan utama	127,76	149,88	152,71	144,31	152,02

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Dari tabel diatas terlihat jumlah ketersediaan beras di Kota Bukittinggi sejak dari tahun 2016 s.d. 2018 cenderung meningkat. Namun terjadi penurunan ketersediaan sejak tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sekitar 473 ton atau sekitar 2,51% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan semakin berkurangnya area persawahan di Kota Bukittinggi dimana sebagian lahan pertanian yang berpola permukiman telah dimanfaatkan untuk perumahan. Penyediaan pangan di Kota Bukittinggi hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota telah melaksanakan berbagai kegiatan baik dengan cara mandiri maupun bekerjasama dengan daerah sekitar. Selain sebagai salah satu upaya ketahanan pangan, sawah abadi juga diperuntukan bagi perluasan ruang terbuka hijau. Saat ini sedang dilakukan kajian tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dimana nantinya akan ditetapkan suatu luasan dimana lahan ini akan dipertahan tetap menjadi lahan pangan sampai kapanpun, jika lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B di bangun maka akan dikenakan sanksi perdata.

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan juga dilakukan terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Bukittinggi.

Selanjutnya, selain terkait dengan penyediaan pangan, guna menilai situasi konsumsi pangan di Kota Bukittinggi terlihat melalui Pola Pangan Harapan. Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Pola Pangan Harapan merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor Pola Pangan Harapan. Semakin tinggi skor Pola Pangan Harapan, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Skor Pola Pangan Harapan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 terlihat cenderung turun setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Skor Pola Pangan Harapan Kota Bukittinggi mencapai 91,8, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 87,3 dan terus menurun sampai dengan tahun 2020 menjadi 81,5. Penurunan ini disebabkan banyak hal, terutama terkait dengan pendapatan, pendidikan dan jumlah anggota keluarga. Secara rinci Skor Pola Pangan Harapan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75.
Skor Pola Pangan Harapan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan	91.8	87.3	82.1	83.1	81.5

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

2.3.10 **Pertanahan**

Urusan pertanahan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Sebagai unit kerja baru, bidang pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran urusan pertanahan antara lain adalah persentase tanah bersertifikat, penyelesaian permasalahan/ sengketa tanah dan penyelesaian izin lokasi Per 31 Desember 2019 tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 420 persil tanah dengan luas 1.143.068,26 m² berupa tanah bangunan gedung, tanah jalan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Dari total 420 persil tanah yang dikuasai, sebanyak 137 persil dengan luas 385.121,80 m² telah memiliki sertifikat dan sebanyak 283 persil dengan luas 757.946,46 m² belum memiliki sertifikat.

Capaian kinerja urusan pertanahan Kota Bukittinggi tahun 2016 s/d 2020 terlihat dari jumlah aset tanah kota yang disertifikasi, jumlah sertipikat pengembalian konsolidasi By Pass, jumlah bidang pengembalian Konsolidasi By Pass dn luas tanah dan fasilitas pengadaan tanah. Perkembangan capaian kinerja urusan pertanahan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76.
Capaian kinerja urusan Pertanahan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Aset Tanah Kota yang disertifikasi (sertipikat)	2	6	1	11	11
Jumlah sertipikat pengembalian konsolidasi By Pass (sertipikat)	12	17	18	19	7
Jumlah bidang pengembalian Konsolidasi By Pass (bidang)	27	27	27	27	27
Luas Pengadaan Tanah dan Fasilitas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (m2)			1.862	13.602	2574

Sumber: Dinas PUPR, 2021

2.3.11 Lingkungan Hidup

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Lingkungan Hidup merupakan Urusan Konkuren Wajib Non Dasar. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup di Kota Bukittinggi ada pada Dinas Lingkungan Hidup dimana salah satu Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang harus dipenuhi dalam urusan lingkungan hidup adalah persentase penanganan sampah. Persoalan sampah bukanlah hal yang sepele jika tidak ditangani secara serius karena berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan Sosial Ekonomi. Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup:

a. Pengelolaan Sampah

Dalam rangka pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan hidup melakukan dua upaya yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Upaya penanganan berupa Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir. Sampah yang ditangani berasal dari berbagai sumber diantaranya sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah fasum dan sampah fasos. Kondisi kota Bukittinggi yang memiliki 3 Pasar yang cukup besar serta jumlah penduduk yang cukup padat untuk skala kota kecil, memiliki volume sampah yang besar setiap harinya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77.
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	412 m ³	426 m ³	38.629 ton	39.236 ton	40.424 ton
2.	Jumlah volume produksi sampah (m3)	432 m ³	448 m ³	43.658 ton	44.442 ton	45.068 ton
3.	Persentase	95,37 %	95,08%	88,48 %	88,28%	89,69%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Dari tahun 2016, persentase jumlah sampah yang ditangani cenderung menurun, walaupun pada tahun 2020 persentase sampah yang ditangani lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Dari data Dinas Lingkungan Hidup sumber sampah kota yang dominan adalah sampah yang berasal dari Jalan, Pasar Tradisional Rumah tangga, yang mendominasi dari total jumlah timbulan perhari yaitu 119,613 ton/hari.

Belum diberlakukannya sepenuhnya Penegakan Perda aturan pembuangan sampah pada masyarakat pada jam-jam yang telah ditentukan dan masih kurangnya peran serta masyarakat dalam penanganan sampah terutama pengolahan sampah organik menjadi kompos dan daur ulang sampah non organik menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis sehingga bisa menambah income/pendapatan masyarakat, merupakan penyebab peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun. Disamping itu budaya malu untuk membuang sampah sembarangan juga belum ada pada masyarakat kota Bukittinggi maupun pengunjung yang masuk ke Kota Bukittinggi.

Dari jumlah volume sampah kota Bukittinggi, pada tahun 2019, volume sampah yang ditangani sebesar 616 m3 atau 88,40 % dan sisanya atau 11,6 % sudah diolah menjadi kompos artinya secara keseluruhan sampah yang ada di Kota Bukittinggi sudah tertangani sesuai yang ditargetkan pada RPJMD Kota Bukittinggi. Pengolahan sampah menjadi kompos saat ini baru ada di 4 kelurahan dimana 1 Kelurahan melalui pendanaan APBD yaitu Kel.Aur Kuning, dan 3 Kelurahan lainnya yaitu Kel. Pulai Anak Air, Kel. Bukit Canggih Kayu Ramang dan Kel.Puhun Pintu Kabun masih bersifat swadaya masyarakat.

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d 2020 berdasarkan WWW.sipsn.menlhk.go.id terlihat bahwa persentase pengurangan sampah Kota Bukittinggi terjadi peningkatan dari 2,95% pada tahun 2019 menjadi 6,03% pada tahun 2020. Sementara persentase penanganan sampah Kota Bukittinggi terjadi penurunan dari 95,47% pada tahun 2019 menjadi 89,75% pada tahun 2020. Gambaran capaian kinerja pengelolaan sampah Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78.
Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi
Tahun 2019 s.d. 2020

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Timbulan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	41.402,80	45.368,41
2	Pengurangan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	1.219,44	2.735,04
3	Persentase Pengurangan Sampah	2,95	6,03
4	Penanganan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	39.528,00	40.716,11
5	Persentase Penanganan Sampah	95,47	89,75
6	Sampah Terkelola Tahunan (Ton/Tahun)	40.747,45	43.451,16
7	Persentase Sampah Terkelola	98,42	95,77
8	Daur Ulang Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	1.020,62	2.174,10
9	Bahan Baku Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	292,00	292,00
10	Recycling Rate	3,17	5,44

Sumber: *WWW.sipsn.menlhk.go.id*

b. Cakupan Area Pelayanan

Data sebaran timbulan sampah menurut Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2020 terbesar ada di Kecamatan Guguk Panjang sebesar 50,46 ton/hari hal ini sebanding dengan tingkat kepadatan penduduknya. Timbulan ini dapat dilayani secara penuh (100%). Kendala yang ada saat ini adalah Kota Bukittinggi tidak memiliki TPA, sampah yang dilayani dibuang ke TPA Regional Payakumbuh sedangkan berdasarkan kajian TPA ini hanya mampu menampung sampah 2 atau 3 tahun kedepan jadi hal ini menjadi PR besar bagi Kota Bukittinggi untuk segera mencari solusi TPA jika TPA Regional sudah penuh sehingga cakupan pelayanan timbulan sampah di Kota Bukittinggi tetap dipenuhi secara keseluruhan.

Tabel 2.79.
Daerah Pelayanan Sektor Persampahan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km²/Ha)	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523.9 Ha
2.	Luas area kota (Ha)	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523.9 ha
3.	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup, 2021*

Dari tabel terlihat bahwa daerah cakupan pelayanan persampahan telah meliputi seluruh kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi yaitu sebanyak 24 kelurahan, yang dilayani dengan sarana prasarana Betor sebanyak 44 unit yang menjemput sampah setiap kelurahan rata – rata 2 kali sehari untuk masing-masing kelurahan dan menggunakan Gerobak serta Becak Sampah, untuk selanjutnya sampah ini dengan menggunakan dump

truck sebanyak 15 unit per hari dengan penjadwalan 2 shift setiap hari, diangkut ke TPA Regional Payakumbuh.

c. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Sebelum sampah di angkut ke TPA regional sebagian sampah dikumpul di TPS yang terbesar di beberapa titik di Kota Bukittinggi. Idealnya jumlah TPS yang ada dapat menampung seluruh volume sampah yang ditumpuk di TPS yang dapat digambarkan berdasarkan rasio tempat pembuangan sampah tabel di bawah ini :

Tabel 2.80.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah daya tampung TPS	243,1	136,72	186,6	337,2	325,95
2	Jumlah Penduduk	124.715	126.804	129.521	123.296	124.297
3	Persentase	0,19%	0,10 %	0,14%	0,26 %	0,26%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Dari tabel di atas terlihat daya tampung TPS untuk tahun 2020 sebesar 325,95 m² meliputi TPS batu, TPS kayu, TPS Gandeng dan Kontainer. Secara umum, terdapat trend kenaikan rasio tempat pembuangan sampah terhadap satuan penduduk di Kota Bukittinggi. Namun, berdasarkan Standar Pengelolaan sampah di permukiman SNI No. 3242:2008 maka kebutuhan TPS dibedakan kepada tipenya, merujuk pada keadaan TPS di Kota Bukittinggi dapat dikategorikan pada tipe I dimana volume TPS 100 m² untuk 2.500 jiwa, artinya dari data di atas dengan jumlah penduduk 124.297 jiwa idealnya dibutuhkan daya tampung TPS seluas lebih kurang 5.200 m² angka ini masih jauh dari luasan TPS yang ada.

Sebagai antisipasi kekurangan ini upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penjemputan sampah langsung ke rumah penduduk serta upaya mengolah sampah setempat baik oleh masing-masing Rumah tangga ataupun yang dikelola oleh kelompok masyarakat peduli sampah yang ada di beberapa kelurahan serta dengan pengaturan pola/ jam pengangkutan sampah. Upaya ini secara nyata dapat menghindari adanya penumpukan sampah dalam waktu lama.

d. Indeks Pencemaran Air (IPA)

Indeks kualitas air adalah salah satu indikator pencemaran air untuk mengukur kualitas air baku air permukaan. Indek ini diukur oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan data yang tersedia adalah data tahun 2019 yaitu 51,38. Sedangkan yang rutin dipantau adalah kualitas air sungai yang diukur oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi.

Pemantaun Kualitas Air Sungai dilakukan setiap tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pada Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan terhadap 3 (tiga) sungai yakni Sungai Batang Masang, Sungai Batang Agam

dan Sungai Batang Tambuo yang dipantau di masing-masing hulu dan hilirnya dengan periode pemantauan 4 kali dalam setahun.

Batang Agam merupakan salah satu sungai di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan status mutunya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian, dan Batang Lembang. Berdasarkan Pergub tersebut, mutu air Batang Agam dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu mutu kelas I yakni pada segmen hulu dan rentang sungai, dan mutu kelas II, pada segmen hilir sungai.

Hasil analisis sampel air yang dilakukan di laboratorium dan pengujian langsung di lapangan, dapat dilakukan evaluasi sesuai baku mutu air. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa sungai-sungai yang mengalir di Kota Bukittinggi telah menunjukkan indikasi pencemaran, terutama untuk parameter mikrobiologi. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan yang tinggi dari sektor domestik.

Pengukuran status mutu air sungai di Kota Bukittinggi dilakukan terhadap 8 (delapan) parameter, yaitu TSS, TDS, BOD, COD, Total Phospat, Fenol, E.Coli dan Total Coliform. Penentuan status mutu air sungai mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan Metode Storet diketahui status mutu air sungai Batang Agam dan Batang Tambuo sudah dalam kondisi Cemar Berat dengan skor mutu Batang Agam -59 dan Batang Tambuo adalah -52 yaitu termasuk pada Kelas D : buruk, karena skor ≥ -31 . Tingginya pencemaran ini salah satu berasal dari limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai. Limbah domestik yang dibuang bukan hanya merusak ekosistem sungai secara kimia saja, namun juga fisik dari sungai tersebut. Banyaknya sampah yang menghambat laju air, merupakan salah satu penyebab masalah banjir yang sering terjadi belakangan ini serta limbah tinja yang langsung di alirkan ke sungai.

e. Indeks Pencemaran Udara (IPU)

Indeks Pencemaran Udara adalah kualitas udara untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Kualitas udara ambien dipengaruhi oleh aktivitas manusia maupun aktivitas alami, namun yang bisa dikendalikan adalah sumber pencemar yang berasal dari aktivitas manusia yang berupa emisi sumber bergerak maupun sumber stasioner/ tidak bergerak

Kualitas udara menggambarkan tingkat pencemaran udara yang terjadi sehingga kualitas udara juga ini perlu dipantau secara berkala sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota .

Untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di Kota Bukittinggi maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi telah melakukan pemantauan Kualitas Udara melalui pengukuran dengan titik pantau di Lapangan Kantin dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Pengukuran dilakukan terhadap 8 (delapan) parameter sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.81.
Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Bukittinggi

No	Parameter	Hasil Pemantauan Titik Jam Gadang		Hasil Pemantauan Titik DLH		Baku Mutu	Satuan
		Tahap I Februari	Tahap II September	Tahap I Maret	Tahap II September		
1	Sulfur Dioksida (SO2)	2,19	4,94	1,98	5,29	900	µg/Nm³
2	Carbon Monoksida (CO)	487,9	410	433	354	30.000	µg/Nm³
3	Nitrogen Dioksida (NO2)	9,19	16,5	3,61	16,18	400	µg/Nm³
4	Ozon (O3)	2,39	1,19	0,836	1,97	235	µg/Nm³
5	Hidro Carbon (HC)	6,7	0,88	7,2	2,25	160	µg/Nm³
6	Particulate Matter (PM 10)	31,42	26,0	98,3	21,0	150	µg/Nm³
7	Total Suspended Particulate (TSP)	54,0	91,33	116	52,7	230	µg/Nm³
8	Timbal (Pb)	0,16	<0,002	1,038	0,006	2	µg/Nm³

Sumber : Olahan Data Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kota Bukittinggi 2018
Keterangan: Baku mutu berdasarkan PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan hasil anailisa diketahui kondisi udara Kota Bukittinggi untuk semua parameter yang diukur masih tergolong baik karena angka masing-masing parameter masih berada di bawah baku mutu. Dan dari perhitungan Indeks kualitasnya udaranya adalah 87,89 meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar 84,38 dan nilai IKU ini berada di bawah IKU Provinsi Sumbar (89,4) tapi melebihi nilai IKU Nasional (86,8) Keadaan ini perlu kita petahankan bahkan ditingkatkan sehingga sebutan Bukittinggi kota yang sejuk tetap terjaga.

Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan IKU Kota Bukittinggi 5 (Lima) tahun terakhir diperoleh data series yang cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari berbagai macam faktor, baik yang berupa antropogenik (berhubungan dengan aktivitas manusia) maupun karena faktor alam. Pengaruh aktvitas manusia antara lain berupa peningkatan jumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, peningkatan kegiatan industri, serta peningkatan jumlah penduduk.

Selain faktor antropogenik tersebut, terdapat faktor alam yang juga turut mempengaruhi kualitas udara diantaranya kondisi curah hujan, arah angin, suhu udara, serta lamanya penyinaran matahari. Kondisi cuaca yang sering turun hujan akan berkontribusi meningkatkan kualitas udara di suatu daerah, sedangkan daerah yang jarang turun hujan juga akan menyebabkan lamanya waktu tinggal polutan diudara yang berpotensi menyebabkan turunnya kualitas udara ambien.

f. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Pada Tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi telah mencapai angka 56,56. Perhitungan tersebut terdiri dari Indeks Kualitas Air 47,33, Indeks Kualitas Udara 83,54 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 22,90.

Guna meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bukittinggi tentu perlu diupayakan strategi dan arah kebijakan serta program-program yang mendukung pelestarian lingkungan hidup sehingga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dapat meningkat kedepannya.

g. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan daerah harus memperhatikan Daya dukung dan Daya tampung lingkungan hidup.

Daya tampung lingkungan hidup Kota Bukittinggi terdiri atas 20 jasa ekosistem yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok jasa, yaitu: jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung. Kota Bukittinggi telah menyusun dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tersebut. Uraian berikut dapat diketahui kondisi daya dukung dan daya tampung Kota Bukittinggi dilihat dari jasa penyediaan pangan, jasa penyediaan air bersih, jasa pengaturan tata aliran air dan banjir, jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana, jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup, jasa budaya rekreasi dan ecotourism.

1. Jasa Penyediaan Pangan

Luas lahan yang mendukung penyediaan pangan di Kota Bukittinggi hanya Sebagian kecil yang termasuk kategori sangat tinggi dan tinggi, yakni 27,60% dari luasan lahan Kota Bukittinggi. Sedangkan luasan lahan Kota Bukittinggi dengan daya dukung penyediaan pangan termasuk dalam kategori rendah dan sangat rendah yaitu 58,68%. Sisanya sebesar 12,72% termasuk kategori sedang.

Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Penyediaan Pangan terlihat bahwa daya dukung tinggi dan sangat tinggi berada di Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, yakni seluas 97,85 ha (14,24%) dari luas Kota Bukittinggi. Sedangkan daya dukung rendah dan sangat rendah berada di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, yakni seluas 320,04 ha (21,55%) dari luas Kota Bukittinggi.

Besarnya kemampuan ekosistem wilayah Kota Bukittinggi memberikan jasa pangan sangat ditentukan oleh tutupan lahan dan ecoregion. Tutupan lahan pada wilayah yang memberikan daya dukung yang rendah dan sangat rendah ini adalah lading. Sementara ekoregionnya yang dominan adalah perbukitan patahan. Karena tutupan lahan dan ecoregion yang demikian maka sebagian besar wilayah Kota Bukittinggi memberikan daya dukung rendah terhadap jasa penyediaan pangan. Gambaran Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Penyediaan Pangan terlihat pada tabel 2.81.

2. Jasa Penyediaan Air Bersih

Luasan lahan yang mendukung jasa penyediaan air bersih di Kota Bukittinggi secara umum berkategori rendah dan sangat rendah. Lahan dengan kategori rendah dan sangat rendah yakni seluas 1.405,52 ha (56,47%) dari total luas lahan Kota Bukittinggi. Sedangkan kategori tinggi dan sangat tinggi pada daya dukung jasa penyediaan air bersih adalah 729,6 ha (14,21%) dari total luas Kota Bukittinggi. Jasa penyediaan air bersih di Kota Bukittinggi sangat minim dilihat dari segi kemampuan penyediaannya yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi hanya 29,31%. Daya dukung jasa penyediaan air bersih yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi seluas 729,60 ha Sebagian berada di Kelurahan Kubu Tanjung sebesar 63,40 ha, Kelurahan Ladang Cakiah seluas 72,21 %, Kelurahan

dan Kelurahan Pakan Labuah seluas 97,08 ha di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan seluas 67,68 ha. Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Penyediaan Air Bersih terlihat pada tabel 2.82.

3. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Secara umum luasan lahan untuk jasa pengaturan aliran air dan banjir Kota Bukittinggi dalam kategori sedang dengan luasan lahan sebesar 40,39 %. Kondisi ini diikuti dengan kategori tinggi dan sangat tinggi sebesar 47,72% dan selanjutnya kategori rendah dan sangat rendah sebesar 11,89%.

Hampir seluruh daerah di Kota Bukittinggi memiliki jasa pengaturan tata aliran air dan banjir dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. Wilayah dengan daerah terluas pada kategori ini adalah Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luasan 246,64 ha (20,77%). Berdasarkan kajian DDDTLH potensi lahan dalam pengaturan tata aliran air dan banjir pada masing-masing kecamatan dimana daerah yang memiliki persentase paling rendah atau sangat rendah adalah Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yakni sebesar 2,08 ha (0,7%) dari luas.

4. Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Secara umum, Kota Bukittinggi berada pada kategori sedang dalam jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana, yakni dengan kategori sedang sebesar 49,52% yang menandakan potensi terjadinya bencana masih dapat ditoleransi. Pada kategori sangat tinggi dan tinggi berada pada 37,17% dimana daerah ini sangat aman dan terlindungi dari potensi terjadinya bencana. Sedangkan untuk kategori rendah dan sangat rendah memiliki luasan 13,31% dari luas Kota Bukittinggi.

Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana terlihat pada table 2.83.

5. Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sementara. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Daya dukung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Bukittinggi pada kategori rendah dan sangat rendah yaitu mencapai 40,10%. Kategori tinggi dan sangat tinggi hanya 26,60%. Sedangkan kategori sedang mencapai 33,30%. Daya dukung dengan kategori sangat rendah dan rendah adalah di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas 376,39 ha. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 2.84.

6. Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism.

Hampir sekitar 67,97% atau seluas 1.691,60 ha wilayah Kota Bukittinggi mempunyai daya dukung dan daya tampung rekreasi dan ecotourism yang tergolong sangat tinggi dan tinggi. Dari segi tutupan lahan, wilayah yang mempunyai daya dukung dan daya tampung untuk penyediaan jasa rekreasi dan ecotourism adalah juga merupakan wilayah yang mempunyai daya dukung jasa penyediaan serat yang tinggi. Kedua fungsi ini bisa saling berseberangan apabila tidak memperhatikan pemanfaatannya. DDDTLH Kota Bukittinggi dalam Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism terlihat pada tabel 2.85.

Tabel 2.82.
Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Penyediaan Pangan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan/Kelurahan	Rendah dan Sangat Rendah		Sedang		Tinggi dan Sangat Tinggi		Jumlah	%
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH									
1.	Kelurahan Aur Kuning	56,28	3,79	6,89	2,18	41,32	6,01	104,49	4,20
2.	Kelurahan Belakang Balok	73,75	4,97	5,00	1,58	0,21	0,03	78,96	3,17
3.	Kelurahan Birugo	62,54	4,21	5,89	1,85	19,89	2,89	88,31	3,55
4.	Kelurahan Kubu Tanjung	21,27	1,43	0,04	0,01	63,40	9,23	84,71	3,40
5.	Kelurahan Ladang Cakiah	15,26	1,03	0,24	0,08	72,55	10,56	88,06	3,54
6.	Kelurahan Pakan Labuah	36,16	2,43	8,42	2,66	97,85	14,24	142,45	5,72
7.	Kelurahan Parit Antang	15,08	1,01	3,11	0,98	15,57	2,27	33,72	1,35
8.	Kelurahan Sapiran	22,89	1,54	0,00	0,00	0,52	0,07	23,40	0,94
KECAMATAN GUGUAK PANJANG									
1.	Kelurahan ATTS	32,54	2,19	0,03	0,01	1,84	0,27	34,41	1,38
2.	Kelurahan Benteng Pasar Atas	23,35	1,57	0,16	0,05	3,21	0,47	26,73	1,07
3.	Kelurahan Bukit Apit Puhun	150,75	10,15	39,02	12,33	16,18	2,35	205,96	8,28
4.	Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	22,70	1,53	4,56	1,44	0,02	0,00	27,29	1,10
5.	Kelurahan Kayu Kubu	50,91	3,43	9,32	2,94	4,62	0,67	64,85	2,61
6.	Kelurahan Pakan Kurai	52,66	3,55	0,01	0,00	4,62	1,01	59,62	2,40
7.	Kelurahan Tarok Dipo	115,66	7,79	1,30	0,41	6,95	3,24	139,21	5,59
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN									
1.	Kelurahan Campago Guguak Bulek	76,88	5,18	20,20	6,38	56,72	8,26	153,80	6,18
2.	Kelurahan Campago Ipuh	66,17	4,59	6,57	2,08	19,00	2,77	93,74	3,77
3.	Kelurahan Garegeh	33,47	2,25	11,01	3,48	41,46	6,03	85,91	3,45
4.	Kelurahan Koto Selayan	16,39	1,10	10,46	3,31	53,70	7,82	80,55	3,24
5.	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	76,10	5,12	23,84	7,53	58,36	8,50	158,30	6,36
6.	Kelurahan manggis Ranting	49,72	3,35	2,35	0,75	26,70	3,89	78,78	3,17
7.	Kelurahan Puhun Pintu Kabun	320,04	21,55	142,82	45,13	22,61	3,29	485,47	19,51
8.	Kelurahan Puhun Tembok	39,75	2,68	2,39	0,75	17,15	2,50	59,28	2,38
9.	Kelurahan Pulau Anak Air	53,09	3,57	12,84	4,05	24,93	3,63	90,85	3,65
KOTA BUKITTINGGI		1485,38	100,00	316,49	100,00	687,01	100,00	2488,87	100,00
PRESENTASE		59,68		12,72		27,60		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

Tabel 2.83.
Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Penyediaan Air Bersih
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan/Kelurahan	Rendah dan Sangat Rendah		Sedang		Tinggi dan Sangat Tinggi		Jumlah	%
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH									
1.	Kelurahan Aur Kuning	46,95	3,34	16,80	4,75	40,75	5,58	104,49	4,20
2.	Kelurahan Belakang Balok	72,72	5,17	1,98	0,56	4,27	0,59	78,96	3,17
3.	Kelurahan Birugo	57,46	4,09	6,89	1,95	23,97	3,29	88,31	3,55
4.	Kelurahan Kubu Tanjung	18,18	1,29	3,14	0,89	63,40	8,69	84,71	3,40
5.	Kelurahan Ladang Cakiah	13,53	0,96	2,32	0,66	72,21	9,90	88,06	3,54
6.	Kelurahan Pakan Labuah	30,76	2,19	14,60	4,13	97,08	13,31	142,45	5,72
7.	Kelurahan Parit Antang	12,42	0,88	6,40	1,81	14,89	2,04	33,72	1,35
8.	Kelurahan Sapiran	17,65	1,26	5,29	1,50	0,46	0,06	23,40	0,94
KECAMATAN GUGUAK PANJANG									
1.	Kelurahan ATTS	28,67	2,04	3,90	1,10	1,84	0,25	34,41	1,38
2.	Kelurahan Benteng Pasar Atas	21,23	1,51	2,30	0,65	3,20	0,44	26,73	1,07
3.	Kelurahan Bukit Apit Puhun	163,16	11,61	17,44	4,93	25,36	3,48	205,96	8,28
4.	Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	19,68	1,40	3,02	0,85	4,59	0,63	27,29	1,10
5.	Kelurahan Kayu Kubu	52,89	3,76	3,53	1,00	8,43	1,16	64,85	2,61
6.	Kelurahan Pakan Kurai	45,65	3,25	7,17	2,03	6,80	0,93	59,62	2,40
7.	Kelurahan Tarok Dipo	97,28	6,92	20,79	5,88	21,13	2,90	139,21	5,59
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN									
1.	Kelurahan Campago Guguak Bulek	65,68	4,67	31,69	8,96	56,43	7,73	153,80	6,18
2.	Kelurahan Campago Ipuh	58,54	4,17	16,95	4,79	18,25	2,50	93,74	3,77
3.	Kelurahan Garegeh	29,90	2,13	15,33	4,33	40,71	5,58	85,94	3,45
4.	Kelurahan Koto Selayan	14,37	1,02	13,57	3,84	52,61	7,21	80,55	3,24
5.	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	56,65	4,03	33,96	9,60	67,68	9,28	158,30	6,36
6.	Kelurahan manggis Ranting	41,81	2,97	10,92	3,09	26,05	3,57	78,78	3,17
7.	Kelurahan Puhun Pintu Kabun	361,22	25,70	86,08	24,33	38,16	5,23	485,47	19,51
8.	Kelurahan Puhun Tembok	34,01	2,42	8,50	2,40	16,78	2,30	59,28	2,38
9.	Kelurahan Pulai Anak Air	45,12	3,21	21,20	5,99	24,53	3,36	90,85	3,65
KOTA BUKITTINGGI		1405,52	100,00	353,76	100,00	729,60	100,00	2488,87	100,00
PRESENTASE		56,47		14,21		29,31		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

Tabel 2.84.
Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Pencegahan dan Perlindungan
Menurut Kecamatan

Kecamatan/Kelurahan	Rendah & Sangat Rendah		Sedang		Tinggi & Sangat Tinggi		Jumlah	%
	Ha	%	Ha	%	Ha	%		
Kec. Aur Birugo Tigo Baleh								
Kel. Aur Kuning	9,90	2,99	46,37	3,76	48,21	5,21	104,49	4,20
Kel. Belakang Balok	29,08	8,78	46,14	3,74	3,74	0,40	78,96	3,17
Kel. Birugo	12,74	3,85	50,70	4,11	24,88	2,69	88,31	3,55
Kel. Kubu Tanjung	3,10	0,93	18,18	1,47	63,44	6,86	84,71	3,40
Kel. Ladang Cakiah	2,08	0,63	13,19	1,07	72,80	7,87	88,06	3,54
Kel. Pakan Labuah	6,18	1,87	29,98	2,43	106,29	11,49	142,45	5,72
Kel. Parit Antang	3,29	0,99	11,74	0,95	18,68	2,02	33,72	1,35
Kel. Sapiran	5,29	1,60	17,60	1,43	0,52	0,06	23,40	0,94
Kec. Guguak Panjang								
Kel. ATTS	3,87	1,17	28,67	2,33	1,87	0,20	34,41	1,38
Kel. Benteng Pasar Atas	2,13	0,64	21,22	1,72	3,38	0,36	26,73	1,07
Kel. Bukit Apit Puhun	54,60	16,48	118,31	9,60	33,05	3,57	205,96	8,28
Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang	3,15	0,95	19,55	1,59	4,59	0,50	27,29	1,10
Kel. Kayu Kubu	13,41	4,05	43,08	3,50	8,36	0,90	64,85	2,61
Kel. Pakan Kurai	7,16	2,16	45,50	3,69	6,96	0,75	59,62	2,40
Kel. Tarok Dipo	19,49	5,88	96,17	7,80	23,55	2,55	139,21	5,59
Kec. Mandiangin Koto Selayan								
Kel. Campago Guguak Bulek	11,50	3,47	65,38	5,30	76,92	8,31	153,80	6,18
Kel. Campago Ipuh	10,38	3,13	57,79	4,69	25,57	2,76	93,74	3,77
Kel. Garegeh	4,31	1,30	29,16	2,37	52,47	5,67	85,94	3,45
Kel. Koto Selayan	3,11	0,94	13,28	1,08	64,16	6,94	80,55	3,24
Kel. Kubu Gulai Bancah	19,55	5,90	56,55	4,59	82,20	8,89	158,30	6,36
Kel. Manggis Ganting	8,56	2,58	41,16	3,34	29,06	3,14	78,78	3,17
Kel. Puhun Pintu Kabun	83,26	25,13	285,01	23,13	117,20	12,67	485,47	19,51
Kel. Puhun Tembok	6,80	2,05	32,96	2,67	19,52	2,11	59,28	2,38
Kel. Pulai Anak Air	8,37	2,53	44,72	3,63	37,76	4,08	90,85	3,65
Kota Bukittinggi	331,31	100,00	1232,42	100,00	925,15	100,00	2488,87	100,00
Presentase	13,31		49,52		37,17		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

Tabel 2.85.
 Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup
 Menurut Kecamatan

Kecamatan/Kelurahan	Rendah & Sangat Rendah		Sedang		Tinggi & Sangat Tinggi		Jumlah	%
	Ha	%	Ha	%	Ha	%		
Kec. Aur Birugo Tigo Baleh								
Kel. Aur Kuning	21,74	2,18	46,37	5,59	36,38	5,50	104,49	4,20
Kel. Belakang Balok	35,31	3,54	11,70	1,41	31,94	4,83	78,96	3,17
Kel. Birugo	30,70	3,08	34,11	4,11	23,51	3,55	88,31	3,55
Kel. Kubu Tanjung	49,99	5,01	18,18	2,19	16,54	2,50	84,71	3,40
Kel. Ladang Cakiah	66,33	6,65	13,19	1,59	8,55	1,29	88,06	3,54
Kel. Pakan Labuah	82,40	8,26	29,98	3,62	30,06	4,54	142,45	5,72
Kel. Parit Antang	9,04	0,91	11,74	1,42	12,93	1,95	33,72	1,35
Kel. Sapiran	0,21	0,02	17,60	2,12	5,60	0,85	23,40	0,94
Kec. Guguak Panjang								
Kel. ATTS	1,55	0,16	28,67	3,46	4,19	0,63	34,41	1,38
Kel. Benteng Pasar Atas	0,01	0,00	21,22	2,56	5,50	0,83	26,73	1,07
Kel. Bukit Apit Puhun	115,78	11,60	33,64	4,06	56,54	8,54	205,96	8,28
Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang	0,04	0,00	19,54	2,36	7,71	1,16	27,29	1,10
Kel. Kayu Kubu	22,31	2,24	24,29	2,93	18,26	2,76	64,85	2,61
Kel. Pakan Kurai	5,19	0,52	45,50	5,49	8,93	1,35	59,62	2,40
Kel. Tarok Dipo	16,57	1,66	96,17	11,60	26,47	4,00	139,21	5,59
Kec. Mandiangin Koto Selayan								
Kel. Campago Guguak Bulek	39,71	3,98	65,38	7,89	48,71	7,36	153,80	6,18
Kel. Campago Ipuh	8,51	0,85	57,79	6,97	27,43	4,14	93,74	3,77
Kel. Garegeh	18,58	1,86	29,16	3,52	38,20	5,77	85,94	3,45
Kel. Koto Selayan	36,66	3,67	13,28	1,60	30,61	4,62	80,55	3,24
Kel. Kubu Gulai Bancah	29,87	2,99	56,55	6,82	71,88	10,86	158,30	6,36
Kel. Manggis Ganting	14,29	1,43	41,16	4,97	23,33	3,52	78,78	3,17
Kel. Puhun Pintu Kabun	376,39	37,72	36,03	4,35	73,05	11,03	485,47	19,51
Kel. Puhun Tembok	6,54	0,66	32,95	3,97	19,80	2,99	59,28	2,38
Kel. Pulau Anak Air	10,21	1,02	44,72	5,40	35,91	5,42	90,85	3,65
Kota Bukittinggi	997,93	100,00	828,92	100,00	662,03	100,00	2488,87	100,00
Presentase	40,10		33,30		26,60		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

Tabel 2.86.
 Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism
 Menurut Kecamatan

Kecamatan/Kelurahan	Rendah & Sangat Rendah		Sedang		Tinggi & Sangat Tinggi		Jumlah	%
	Ha	%	Ha	%	Ha	%		
Kec. Aur Birugo Tigo Baleh								
Kel. Aur Kuning	9,90	3,07	21,16	4,46	73,42	4,34	104,49	4,20
Kel. Belakang Balok	28,42	8,80	3,74	0,79	46,80	2,77	78,96	3,17
Kel. Birugo	12,04	3,73	17,99	3,79	58,29	3,45	88,31	3,55
Kel. Kubu Tanjung	3,10	0,96	49,99	10,54	31,62	1,87	84,71	3,40
Kel. Ladang Cakiah	2,08	0,64	65,99	13,91	20,00	1,18	88,06	3,54
Kel. Pakan Labuah	6,18	1,91	81,62	17,21	54,65	3,23	142,45	5,72
Kel. Parit Antang	3,29	1,02	8,36	1,76	22,06	1,30	33,72	1,35
Kel. Sapiran	5,29	1,64	0,15	0,03	17,96	1,06	23,40	0,94
Kec. Guguak Panjang								
Kel. ATTS	3,87	1,20	1,55	0,33	28,98	1,71	34,41	1,38
Kel. Benteng Pasar Atas	2,13	0,66	0,00	0,00	24,59	1,45	26,73	1,07
Kel. Bukit Apit Puhun	52,92	16,39	7,78	1,64	145,26	8,59	205,96	8,28
Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang	3,15	0,98	4,59	0,97	19,55	1,16	27,29	1,10
Kel. Kayu Kubu	10,20	3,16	6,73	1,42	47,92	2,83	64,85	2,61
Kel. Pakan Kurai	7,16	2,22	5,03	1,06	47,42	2,80	59,62	2,40
Kel. Tarok Dipo	19,49	6,04	15,46	3,26	104,26	6,16	139,21	5,59
Kec. Mandiangin Koto Selayan								
Kel. Campago Guguak Bulek	11,50	3,56	39,41	8,31	102,89	6,08	153,80	6,18
Kel. Campago Ipuh	10,38	3,21	7,76	1,64	75,60	4,47	93,74	3,77
Kel. Garegeh	4,31	1,34	17,84	3,76	63,79	3,77	85,94	3,45
Kel. Koto Selayan	3,11	0,96	35,58	7,50	41,86	2,47	80,55	3,24
Kel. Kubu Gulai Bancah	19,55	6,05	39,19	8,26	99,57	5,89	158,30	6,36
Kel. Manggis Ganting	8,56	2,65	13,65	2,88	56,58	3,34	78,78	3,17
Kel. Puhun Pintu Kabun	81,08	25,11	14,90	3,14	389,49	23,02	485,47	19,51
Kel. Puhun Tembok	6,80	2,11	6,11	1,29	46,37	2,74	59,28	2,38
Kel. Pulau Anak Air	8,37	2,59	9,82	2,07	72,67	4,30	90,85	3,65
Kota Bukittinggi	322,88	100,00	474,39	100,00	1691,60	100,00	2488,87	100,00
Presentase	12,97		19,06		67,97		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

2.3.12 **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Kota Bukittinggi berada dibawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas ini telah dibentuk sejak tahun 2008, dimana sebelumnya hanya merupakan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari indikator rasio penduduk yang ber-KTP per satuan penduduk dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

a. **Rasio Penduduk yang ber-KTP per satuan Penduduk**

Dari sistem aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara online dan berbasis internet serta *Single Identity Number* dapat digunakan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atas berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatatan Sipil. Kartu tanda penduduk yang mempunyai nomor induk kependudukan tunggal merupakan salah satu bukti kependudukan suatu wilayah. Salah satu indikator dalam pengendalian penduduk adalah seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk memiliki dan melengkapi administrasi kependudukannya antara lain dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menetapkan KTP secara elektronik yang terkoneksi dalam *data based* di tingkat nasional. Jumlah penduduk yang memiliki KTP dan jumlah penduduk yang wajib KTP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87.
Jumlah Penduduk yang telah memiliki KTP dan Jumlah Penduduk Wajib KTP
Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk yang telah memiliki KTP	73.658	77.775	81.182	85.454	88.289
2.	Jumlah Penduduk Wajib KTP	81.345	82.723	84.845	85.596	88.327
3.	Rasio Penduduk yang memiliki KTP	90,55%	94,02%	95,68%	99,83%	99,96%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2016-2020 masih ada penduduk usia wajib KTP yang belum mempunyai KTP, akan tetapi jumlah yang telah memiliki KTP jika dibandingkan dengan penduduk yang wajib KTP, rasionya relatif tinggi. Idealnya penduduk yang wajib KTP sama dengan penduduk yang telah memiliki KTP. Kerjasama seluruh elemen kota sangat diperlukan dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesadaran tentang wajib KTP bagi setiap penduduk usia wajib KTP dimaksud. Jika hal ini telah terlaksana dengan baik maka siapa dan dimanapun berada dapat dipantau dengan adanya SIAK dengan basis nomor induk kependudukan secara tunggal.

b. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana. Instansi pelaksana yang dimaksud untuk Kota Bukittinggi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerapan KTP nasional berbasis NIK di Kota Bukittinggi sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Tabel 2.88.
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

No.	Uraian	Sudah/belum
1	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.3.13 Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong.

a. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Perkembangan lebih lengkap dasa wisma dapat dilihat ada tabel berikut:

Tabel 2.89.
Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mandiangan Koto Selayan	433	433	433	433	436
2.	Guguak Panjang	364	364	364	364	364
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	288	288	288	288	266

Sumber: TP PKK Kota Bukittinggi, 2021

Kelompok Dasawisma inilah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibawah naungan PKK untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan. Untuk mengaktifkan fungsi dan kualitas Dasawisma ini diperlukan peran masyarakat dan pemerintah. Perkembangan kelompok dasawisma dari tahun ketahun di Kota Bukittinggi relatif tetap, dan sesuai dengan jumlah penduduk, maka kelompok dasawisma terbanyak terdapat ada Kecamatan Mandiangan Koto Salayan yakni 425, disusul Kecamatan Guguk Panjang 388 dan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 288. Kelompok ini dibentuk dalam 10 rumah tangga menjadi 1 Dasawisma pada setiap kelurahan. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus meningkat dan berperan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan, maka melalui kelompok dasawisma ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran perempuan.

b. Jumlah LSM

Secara umum pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat yang disingkat (LSM) merupakan semua organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah dan birokrasi, tujuannya bisa membantu kinerja pemerintah bahkan justru ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Saat ini di Kota Bukittinggi terdapat 70 lembaga swadaya masyarakat yang ikut berperan aktif dalam mengawasi jalanya pemerintahan terutama pada ranah politik. Perkembangan jumlah LSM di Kota Bukittinggi didukung oleh beberapa faktor antara lain adalah karena perkembangan dalam bidang politk, bidang pembangunan, demokrasi dan pembangunan ekonomi hal ini seiring dengan perkembangan laju pembangunan semua sector di Kota Bukittinggi. Berikut data Jumlah LSM yang ada di Kota Bukittinggi.

Tabel 2.90.
Jumlah LSM Tahun 2016 s.d. 2020 di Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah LSM
2016	160
2017	136
2018	146
2019	56
2020	70

Sumber : Dinas Kesbangpol, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah LSM di Kota Bukittinggi mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2018, hal ini dikarenakan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019 hanya menerima 7 LSM pendaftaran baru muncul sementara dari LSM yang sudah ada, diantaranya ada surat keterangan terdaftarnya sudah berakhir /tidak memperpanjang.

c. PKK Aktif

Tim Pengerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan partner Pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat. Jangkauan wilayah kerja PKK mulai di tingkat Kota sampai dengan Dasawisma. Dalam hal pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Jumlah Tim

Penggerak PKK di Kota Bukittinggi berjumlah 28 (dua puluh delapan), yang terdiri dari 1 (satu) TP PKK tingkat Kota, 3 (tiga) TP PKK tingkat kecamatan dan 24 (dua puluh empat) TP PKK tingkat kelurahan. Semua TP PKK yang ada di Kota Bukittinggi berjalan dengan aktif dan lancar.

d. Posyandu Aktif

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu ini merupakan kegiatan swadaya masyarakat dibidang kesehatan yang berada pada kelurahan-kelurahan. Posyandu ini lebih difokuskan kepada pelayanan kesehatan balita meliputi imunisasi, timbang berat badan, menyediakan makan suplemen dll. Hal ini sangat penting dilakukan dalam meningkatkan angka harapan hidup bayi. Tenaga kesehatan atau sukarelawan pada posyandu telah mendapat pelatihan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan dan panduan bagi ibu hamil, bayi dan ibu menyusui. Selain itu Posyandu juga memberikan makanan suplemen kepada bayi dan Balita. Posyandu ini juga berfungsi sebagai pendeteksi dini terhadap perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak. Jumlah posyandu aktif yang tersebar di Kota Bukittinggi sebagai berikut :

Tabel 2.91.
Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu	123	135	135	136	134
2.	Jumlah Posyandu Aktif	123	135	135	136	134
Persentase		100	100	100	100	100

Sumber : Bukittinggi dalam Angka 2021

Terlihat pada data berikut, jumlah pos yandu aktif konstan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, pada tahun 2019 terjadi penambahan yaitu pada Kecamatan Guguk Panjang, namun pada tahun 2020 terjadi pengurangan 2 posyandu. Harapan yang terpenting dari keberadaan posyandu adalah bagaimana kelompok Dasawisma dapat meningkatkan dan menggerakkan kegiatan posyandu, agar kualitas posyandu dapat maksimal, dan berdampak pada peningkatan perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak.

2.3.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rasio Akseptor KB

Rasio Akseptor KB menggambarkan adanya pengendalian terhadap jumlah penduduk. Rasio Akseptor KB dihitung dengan membandingkan jumlah akseptor KB dengan pasangan usia subur mulai dari umur di bawah 20 tahun sampai umur 49 tahun.

Pada tahun 2016 s.d. 2020 tercatat rasio peningkatan peserta KB aktif dibandingkan dengan PUS atau pasangan usia subur. Pasangan Usia Subur menjalani program KB dan aktif menjadi akseptor KB. Semakin tinggi persentase angka absolutnya

berarti program KB semakin dipahami dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun sebenarnya program KB ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat secara maksimal. Agar usaha ini berhasil maka program KB perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yang lebih efektif.

Tabel 2.92.
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
Tahun 2016						
1.	Guguk Panjang	5.897	1.241	21.04	3.685	63.49
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.856	1.277	18.62	4.120	60.09
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.591	834	23.22	2.283	63.58
	Total	16.344	3.352	20.51	10.088	61.72
Tahun 2017						
1.	Guguk Panjang	5.932	1.550	26.13	3.784	63.79
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.943	1.382	19.90	4.325	62,29
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.580	932	26.03	2.387	66.68
	Total	16.455	3.864	23.48	10.496	63.79
Tahun 2018						
1	Guguk Panjang	5.927	1.461	24.65	3.834	64.69
2	Mandiingin Koto Selayan	7.049	1.743	24.72	4.448	63.1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.445	377	10.94	2.363	68.6
	Total	16.421	3.581	21.81	10.645	64.83
Tahun 2019						
1	Guguk Panjang	5.941	1.364	22,96	3.924	66.05
2	Mandiingin Koto Selayan	7.219	1.401	19,41	4.958	68.68
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.481	621	17,84	2.446	70.27
	Total	16.641	3.386	60,21	11.328	68,33
Tahun 2020						
1	Guguk Panjang	5.762	1.097	19,03	3.795	65,86
2	Mandiingin Koto Selayan	7.197	990	13,75	4.918	68,33
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.304	471	14,25	2.359	71,4
	Total	16.263	2.558	47,03	11.072	68,53

Sumber : Dinas DP3APPKB, 2021

2.3.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan soaial dan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu pengelolaan sarana transportasi menjadi sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya. Pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi hanya melayani angkutan darat saja sementara untuk angkutan kereta api, kapal laut dan pesawat udara tidak ada di Bukittinggi. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta aksesibilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan alasan diatas, maka kinerja pelayanan urusan perhubungan di kota Bukittinggi tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum, Rasio

Izin Trayek, Jumlah Uji Keur Angkutan Umum, Jumlah Terminal Bis, Pemasangan rambu-rambu dan Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus penumpang angkutan umum di Kota Bukittinggi terjadi di Terminal Simpang Aur, Terminal Wowo dan beberapa terminal bayangan. Terminal Simpang Aur adalah terminal tipe A yang melayani arus penumpang bus Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Luar Provinsi. Pada tahun 2019 pengelolaan terminal ini telah diambil alih Kementerian Perhubungan, sementara itu untuk melayani angkutan kota dan angkutan pedesaan yang berasal dari Utara Kota Bukittinggi berlangsung di Terminal Wowo yaitu Terminal Tipe C dan beberapa terminal bayangan yang melayani arus penumpang pedesaan.

Angkutan pedesaan yang memasuki Kota Bukittinggi yang diberikan dispensasi perpanjangan izin karena angkutan ini melayani sebagian besar masyarakat Agam Timur yang beraktifitas di Kota Bukittinggi dan pertumbuhan angkutan pedesaan ini sangat sulit dikendalikan. Berikut Arus penumpang angkutan umum di Kota Bukittinggi dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.93.
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penumpang Angkutan Kota	4.062.450	3.869.000	2.788.740	2.336.000	618.079
2.	Jumlah penumpang Antar Kota Dalam Provinsi	396.846	-	96.336	1.235.901	0
3.	Jumlah penumpang Antar Kota Antar Provinsi	284.528	-	294.098	292.485	0
4.	Jumlah penumpang Kapal laut	0	0	0	0	0
5.	Jumlah penumpang Pesawat udara	0	0	0	0	0
6.	Total Jumlah Penumpang	4.636.973	3.869.000	3.179.174	3.864.386	618.079

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2021, Dinas Perhubungan Tahun 2021 dan Terminal Tipe A, 2021

Komposisi jumlah penumpang angkutan umum di Kota Bukittinggi dari tahun 2016-2019 rata-rata didominasi oleh penumpang angkutan kota dengan persentase 83,94%, diikuti dengan penumpang antar kota dalam provinsi 10,89% dan penumpang antar kota antar provinsi 5,74%. Rata-rata jumlah penumpang ketiga komposisi angkutan umum ini mengalami tren penurunan.

Dari tahun 2016-2019, terjadi penurunan penumpang angkutan antar kota. Hal ini disebabkan oleh banyaknya angkutan berbasis daring dan taxi online seperti Gojek dan Grab dan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penumpang angkutan antar kota mencapai 73,54% dibandingkan dengan tahun 2019. Selain disebabkan oleh 2 alasan di atas, hal ini juga disebabkan adanya pembatasan aktivitas sosial akibat pandemi covid-19.

Sementara itu penurunan jumlah penumpang antar kota antar provinsi tidak terlepas dari kondisi Terminal Tipe A (melayani penumpang bus antar kota dan antar provinsi) yang pengelolaanya telah diambil alih oleh kementerian Perhubungan tahun 2016. Kondisi terminal Tipe A Simpang Aur Kuning saat ini kurang tertata dan semraut serta adanya penyempitan areal terminal oleh para pedagang kaki lima, sehingga menimbulkan ketidaknyaman bagi para pengunjung/penumpang. Selain itu, adanya pilihan moda lain yang lebih efisien dari sisi waktu perjalanan yaitu pesawat udara yang belakangan ini berpacu memberikan diskon harga tiket serta promo-promo yang membuat calon penumpang beralih moda.

b. Rasio Izin Trayek

Menurut Kusumawati (1999), trayek angkutan umum yang baik harus dapat memenuhi kepentingan beberapa pihak terkait seperti penumpang (*user*), pengelola (*operator*) dan pemerintah (*regulator*) yang pada umumnya kepentingan tersebut saling bertolak belakang. Dengan wilayah seluas ± 25 Km², dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan telah dibentuk/ditetapkan trayek angkutan kota sebanyak 24 trayek dengan 539 unit kendaraan yang melayani trayek dalam Kota Bukittinggi.

Semenjak tahun 2016-2020 tidak terdapat penambahan jumlah trayek. Hal ini disebabkan luas wilayah perkotaan kecil, sehingga sudah terlayani dengan trayek yang ada. Jumlah trayek dan perkembangan jumlah penduduk terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94.
Rasio Izin Trayek Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Izin Trayek perkotaan	24	24	24	24	24
2.	Jumlah penduduk	124.715	126.804	121.590	128.783	124.297
3.	Rasio Izin Trayek	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pengawasan dan penerapan pengujian KIR angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Uji KIR kendaraan umum ini dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dengan artian 1 (satu) kendaraan umum akan melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Uji KIR ini harus diperketat demi mengantisipasi terjadinya kecelakaan angkutan umum. Hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan angkutan umum. Angkutan umum ini yang wajib uji KIR meliputi mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang digunakan untuk transportasi umum yang ditandai dengan warna

kuning pada plat kendaraan. Perkembangan angkutan umum melakukan uji KIR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95.
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Angkutan umum	1.177	1.088	1.077	1.791	1.089
2.	Jumlah Uji Kir					
Rasio						

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

d. Jumlah Terminal Bis

Di Kota Bukittinggi tidak terdapat pelabuhan laut dan pelabuhan udara, sementara untuk terminal bis hanya terdapat 1 (satu) terminal, yaitu terminal tipe A Simpang Aur, dan Terminal tipe C di wowo yang merupakan terminal angkutan kota dan angkutan pedesaan. Jumlah terminal bis dari tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.96.
Jumlah Terminal Bis Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
Jumlah		1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2021

Semenjak tahun 2016 terminal Simpang Aur telah diserahkan ke Pemerintah Pusat karena Terminal Tipe A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pada tahun 2019 memiliki 1 (satu) terminal yaitu terminal tipe C di Wowo yang merupakan kewenangan kota Bukittinggi.

e. Jumlah Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu lalu lintas diatur menurut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014. Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Setiap tahun Dinas Perhubungan selalu berbenah dalam mewujudkan layanan lalu lintas yang aman, nyaman dan berkeselamatan bagi penggunaanya, dan keberadaan rambu lalu lintas salah satunya. Berikut data jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s.d 2020:

Tabel 2.97.
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	608	621	956	711	1.000
2.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	1.000	1.500	1.500	3.000	1.485
Persentase		71%	58%	71%	61%	41,4%

Sumber: Dinas Perhubungan tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas di kota Bukittinggi yang tercatat menurut data-data dari Dinas Perhubungan pada tahun 2020 adalah 1.000 unit, sementara Jumlah pemasangan rambu-rambu yang seharusnya tersedia sebanyak 1.485 unit, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dari yang seharusnya (persentase rambu-rambu terpasang 41,4%). Rendahnya jumlah rambu yang terpasang dengan yang seharusnya memberikan sinyal bagi pemerintah untuk segera memenuhinya sesuai kebutuhan yang seharusnya karena keberadaan rambu erat kaitannya dengan tingkat keselamatan berlalu lintas.

f. Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dibawah ini adalah tabel yang menampilkan panjang jalan yang adalah di kota Bukittinggi dengan jumlah kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2.98.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang jalan	198,18	155,683	180.17	180.17	180.17
2.	Jumlah kendaraan	42.680	38.941	38.300	38.912	na
Rasio		215,3	250.1	212,5	202,6	na

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2015-2019, Dinas Perhubungan Tahun 2021

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, di Kota Bukittinggi setiap 1 km jalan melayani 202 kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

2.3.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika merupakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan urusan ini telah menunjukkan capaian kinerja seperti yang sudah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan program tahunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk oleh Masyarakat dan di SK kan melalui Keputusan Lurah. Pembinaan untuk meningkatkan kualitas kelompok baik dalam hal peningkatkan SDM maupun dalam mengelola informasi. Salah satu kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyebaran informasi Pemerintah Kota Bukittinggi

baik melalui media elektronik maupun media tradisional dan juga melibatkan lembaga komunikasi sosial. Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini juga mendukung terciptanya keterbukaan informasi sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 dan Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibuat secara mandiri dan kreatif dalam mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna bertukar informasi serta membuka peluang kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kota. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang masih eksis ini tak hanya bertukar informasi antara pemerintah dan masyarakat saja. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga berperan sebagai penyebar (diseminator) informasi kepada masyarakat untuk mengakses informasi seputar pembangunan. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Kota Bukittinggi sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99.
Cakupan Pengembangan KIM Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah KIM	Jumlah Kelurahan	% Pengembangan/ kecamatan
1.	Mandiangan Koto Selayan	6	9	66,67
2.	Guguak Panjang	4	7	57,14
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	8	62,50

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2021

Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat di Kota Bukittinggi sampai Tahun 2020 hampir mencakup seluruh Kecamatan, untuk Kecamatan Mandiangan Koto Selayan telah dibentuk di Kelurahan Koto Selayan, Gulai Bancah, Garegeh, Campago Ipuah, Puhun Pintu Kabun, dan Manggis Gantiang, untuk tahun selanjutnya perlu pengembangan ke Kelurahan Pulai Anak Aia, Kubu Gulai bancah dan Campago Guguak Bulek. Pengembangan KIM di Kecamatan Guguak Panjang meliputi Kelurahan Kayu Kubu, Bukik Cangang Kayu Ramang, Benteng Pasar Ateh, dan Bukik Apit Puhun, dan untuk tahun selanjutnya perlu pembentukan KIM di Kelurahan Tarok Dipo, Pakan Kurai dan Aua Tajung Tangah Sawah. Sementara itu Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh telah membentuk KIM di Kelurahan Aua Kuning, Ladang Cakiah, Sapiran, dan Belakang Balok, dan ditahun berikutnya perlu dibentuk di Kelurahan, Birugo, Pakan Labuah dan Parit Antang.

2.3.17 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Koperasi adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang melandaskan kegiatannya sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Sementara tujuan Koperasi sebagaimana tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Sehingga Koperasi sebagai salah satu soko guru ekonomi Indonesia, selain perusahaan swasta dan BUMN, merupakan lembaga yang paling tepat untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang sangat lebar dan membahayakan kesatuan bangsa ini.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah yaitu mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil. yaitu: 1). Sebagai Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, 2). Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, 3). Memberikan pemasukan devisa bagi Negara.

Salah satu indikator untuk menentukan berkembang atau tidaknya Koperasi pada suatu wilayah atau daerah yaitu dengan melihat jumlah koperasi aktif pada daerah tersebut. Koperasi Aktif menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 23/Per./M.KUKM/IX/2015 adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Perkembangan koperasi di Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d. 2020 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Perkembangan Koperasi Aktif Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koperasi aktif	105	92	92	93	94
2	Anggota (Orang)	14.561	15.111	15.910	15.736	15.213
3	Simpanan (juta rupiah)	165.793,38	177.732,27	212.256,37	183.270,08	210.868,80
4	Volume Usaha (juta rupiah)	175.590,39	480.543,11	202.499,46	195.793,39	179.916,47
5	Permodalan (juta rupiah)	252.062,21	272.173,14	310.499,18	291.298,76	300.268,85

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi 2021

Trend koperasi aktif di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan sejak tahun 2017 termasuk juga jumlah simpanan, volume usaha dan permodalan (dalam rupiah). Terdapat empat kendala mendasar yang menghambat bagi perkembangan kualitas koperasi yaitu,

1. Sumber daya manusia yang terlibat dalam koperasi yang kurang profesional dan kurang bisa diandalkan.
2. Kekurangan modal juga menjadi hambatan bagi perkembangan koperasi dalam menjalankan kegiatannya.
3. Lemahnya sistem manajerial koperasi, sumber daya manusia dengan sistem manajerial koperasi sangat berkaitan erat, karena sistem manajerial koperasi yang bagus dibentuk oleh sumber daya manusia yang bagus pula.
4. Kurangnya kesadaran berkoperasi para anggota yang berdampak pada kurangnya

rasa saling memiliki, sehingga para anggota kurang minatnya untuk berkontribusi lebih pada koperasi.

Melihat kendala yang dihadapi koperasi saat ini, pemberdayaan koperasi dari segi kualitas seperti pelatihan keterampilan pelayanan dan pengelolaan keuangan bagi para pegawai koperasi, sehingga koperasi-koperasi mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan menyejahterakan anggotanya.

Terkait dengan bidang urusan Usaha Kecil dan Menengah khususnya yang terkait dengan pengembangan Usaha Mikro lebih difokuskan kepada pembinaan yang dalam meningkatkan usaha baik dalam segi keterampilan maupun terhadap akses modal. Usaha mikro yang merupakan pemasaran dari industri kecil Kota Bukittinggi lebih banyak bergerak di bidang makadan dan kerajinan.

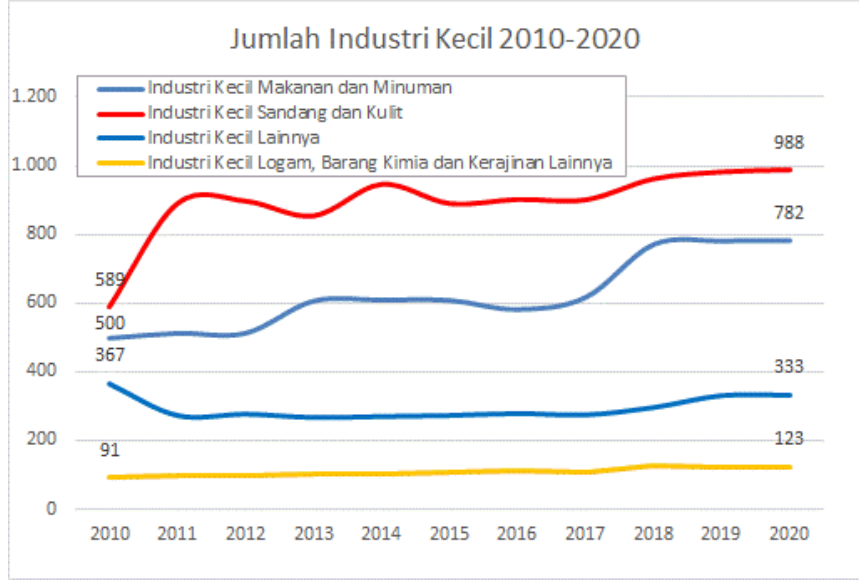
Industri kecil di Kota Bukittinggi didominasi oleh industri kecil sandang dan kulit, yaitu sebanyak 988 atau 44% dari total jumlah industri kecil. Kemudian diikuti dengan indutri kecil makanan yaitu sebanyak 782 atau 35% dari total jumlah industri kecil. Berikut Perkembangan jumlah industri kecil di Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel 2.100 dan Gambar 2.18.

Tabel 2.101.
Jumlah Unit dan Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

NO	Tahun	Industri Kecil Makanan		Industri Kecil Sandang dan Kulit		Industri Kecil Logam, Barang Kimia dan Kerajinan Lainnya		Industri Kecil Lainnya	
		Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja
1.	2016	583	1.497	902	4.560	110	326	279	1.123
2	2017	618	1.669	901	4.625	109	330	275	1.341
3	2018	771	1.973	962	4.470	126	530	297	1.163
4.	2019	781	2.006	982	4.803	123	337	332	1.125
5.	2020	782	2.009	988	4.358	123	337	333	1.216

Sumber: Kota Bukittinggi dalam Angka 2021

Gambar 2.18.
Tren Jumlah Industri Kecil Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Kota Bukittinggi dalam Angka 2009 s.d. 2021

Dalam 10 tahun terakhir, terjadi pertumbuhan industri kecil sekitar 3,36% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2 jenis industri kecil utama di Kota Bukittinggi yaitu, industri kecil sandang dan kulit serta indutri kecil makanan. Jumlah tenaga kerja di kedua jenis indutri adalah 6.367 orang. Rata-rata pertumbuhan (% r) industri kecil Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel 101.

Tabel 2.102.
Rata-rata pertumbuhan Industri Kecil Kota Bukittinggi Tahun 2010-2020

No	Tahun	Industri Kecil Makanan dan Minuman	Industri Kecil Sandang dan Kulit	Industri Kecil Lainnya	Industri Kecil Logam, Barang Kimia dan Kerajinan Lainnya	Jumlah
1	2010	500	589	367	91	1.547
2	2011	514	890	273	96	1.773
3	2012	514	897	277	99	1.787
4	2013	607	854	267	102	1.830
5	2014	610	946	270	104	1.930
6	2015	609	890	273	109	1.881
7	2016	583	902	279	110	1.874
8	2017	618	901	275	109	1.903
9	2018	771	962	297	126	2.156
10	2019	781	982	332	123	2.218
11	2020	782	988	333	123	2.226
Rata-rata Pertumbuhan (% r)		4,15%	4,81%	-0,88%	2,78%	3,36%

Sumber: Kota Bukittinggi dalam Angka 2009 s.d. 2021

Jumlah BPR/ LKM

Salah satu penunjang pengembangan usaha masyarakat dalam akses permodalan adalah keberadaan BPR dan LKM. Menurut Bank Indonesia BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Jumlah BPR dan LKM di Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d. 2020 tidak mengalami perubahan, di mana jumlah BPR sebanyak 3 BPR dan Jumlah LKM sebanyak 46 LKM.

Tabel 2.103.
Jumlah BPR / LKM Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah BPR	3	3	3	3	3
2.	Jumlah LKM	46	46	46	46	46
Jumlah		49	49	49	49	49

Sumber: Bagian Perekonomian Setda, 2021

Sejak beberapa tahun terakhir, BPR di Sumatra Barat mengalami perkembangan yang cukup sehat. Tetapi peran BPR dalam pembiayaan usaha kecil masih menempati porsi yang relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan oleh Bank Umum. Hal ini tidak terlepas dari kondisi BPR yang secara umum masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil, salah satunya adalah : (1) Struktur pendanaan BPR belum didukung oleh permodalan yang kuat serta keterbatasan dalam menghimpun dana masyarakat (2) kualitas sumberdaya yang belum memadai baik dari teknis manajerial maupun teknis operasional

2.3.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal (investasi) merupakan faktor yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Peningkatan penanaman modal akan memacu peningkatan produktifitas dan juga penyerapan tenaga kerja. Kinerja pembangunan pada urusan wajib penanaman modal dilihat dari beberapa indikator berikut.

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)

Penanaman modal dapat dibagi atas 2 (dua) bagian utama yaitu penanaman modal swasta (*private investment*) dan penanaman modal pemerintah (*public investment*). Penanaman modal swasta merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta seperti pendirian pabrik baru, peralatan dan penambahan faktor produksi baru. Penanaman modal ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN), swasta asing (PMA) dan rumah tangga. Sedangkan penanaman modal pemerintah merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur, transportasi, komunikasi, listrik, irigasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sampai dengan 2020 di Kota Bukittinggi terdapat 243 investor yang terdiri dari 240 Penanaman Modal

Dalam Negeri dan 3 Penanaman Modal Asing. Kondisi ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.104.
Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

No	Tahun	PMDN	PMA
1	2016	12	1
2	2017	26	0
3	2018	15	0
4	2019	83	2
5	2020	104	0
	Jumlah	240	3

Sumber: Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi, 2021

Jumlah investor untuk berinvestasi dipengaruhi oleh Faktor interen (dalam negeri) dan eksteren (luar negeri), salah faktor interen adalah Stabilitas politik dan perekonomian, Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokrasi. Kota Bukittinggi tidak mempunyai potensi sumber daya alam berupa hutan, mineral, gas bumi dan perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Potensi Penanaman Modal di Kota Bukittinggi adalah : (a) Perdagangan dan Jasa., (b) Pariwisata, (c) Pendidikan, (d) Kesehatan. Berdasarkan visi dan misi Penanaman Modal dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan Penanaman Modal yaitu :

1. Perbaikan iklim Penanaman Modal
2. Mendorong persebaran Penanaman Modal
3. Fokus pengembangan infrastruktur pada 3(tiga) potensi unggulan daerah yaitu pariwisata, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan, ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber energy terbarukan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Guna meningkatkan minat Penanaman Modal di Kota Bukittinggi perbaikan iklim investasi terkait dengan infrastruktur dan kelembagaan terus ditingkatkan. Terkait dengan infrastruktur pendukung Penanaman Modal Kota Bukittinggi sudah sangat tersedia, dimulai dengan infrastruktur jalan dan transportasi, infrastruktur energi listrik dan telekomunikasi, yang memadai dan tidak kalah pentingnya ketersediaan lembaga keuangan dan perbankan yang cukup lengkap di Kota Bukittinggi mulai dari perbankan konvensional maupun syariah serta Bank Perkreditan Rakyat. Terkait dengan kelembagaan yang berhubungan dengan penanaman modal telah di bangun Mal Pelayanan Publik sebagai

bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal kemudahan pelayanan perizinan termasuk Penanaman Modal.

b. Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Pada tahun 2020, jumlah investasi di Kota Bukittinggi dari 240 investor PMDN tercatat sebesar Rp. 9.830.481.111.488 dan dari 3 investor PMA tercatat sebesar US\$ 42.184.665. Dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Bukittinggi telah dilakukan berbagai upaya seperti promosi investasi dan juga meningkatkan iklim investasi serta peningkatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2.105.
Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2020 Kota Bukittinggi

No	Tahun	PMDN (Rp.)	PMA (USD)
1	2016	6.985.859.748.080	40.000.000
2	2017	29.968.275.764	
3	2018	26.532.500.000	
4	2019	2.493.028.587.614	2.184.665
5	2020	295.092.000.030	
	Jumlah	9.830.481.111.488	42.184.665

Sumber: Dinas PMPTSPPTK, 2021

2.3.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor pembangunan. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti : (1) masih terbatasnya peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (2) masih terbatasnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan dan masyarakat (3) masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan; (4) belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Sedangkan permasalahan dalam pembangunan olahraga antara lain: (1) masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga. (2) masih terbatasnya sarana olahraga yang representatif; (3) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (4) belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

Untuk kedepannya berkaitan dengan pelayanan olahraga dan kepemudaan diupaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui

institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan karang taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana oleh raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olahraga (*sport center*) yang baru.

Jumlah Organisasi Pemuda

Kelompok pemuda yang kreatif biasanya sering berkumpul hingga membentuk organisasi sesuai dengan kreatifitas mereka dan menyusun suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Semakin banyak organisasi kepemudaan di suatu wilayah maka menggambarkan bahwa tingginya peran serta pemerintah daerah dalam membina organisasi kepemudaan. Jika banyaknya aktifitas pemuda yang terorganisir akan mengurangi permasalahan sosial di kalangan pemuda.

Tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah organisasi pemuda yang terdaftar yaitu sebanyak 121 yang tersebar di 3 kecamatan, jumlah ini meningkat 100 organisasi dibandingkan dari tahun 2019. Hal ini menggambarkan tingginya minat pemuda untuk berorganisasi dan tingginya peran pemerintah dalam memfasilitasi aktifitas pemuda sehingga mereka eksis pada setiap kegiatan. Untuk terus memicu peningkatan jumlah organisasi pemuda ini diharapkan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan pada khususnya berupaya mengajak para pemudanya untuk berorganisasi sehingga program pemerintah dapat tersalur melalui program organisasi mereka. Secara data dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.106.
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Guguk Panjang	6	9	7	6	52
2.	Mandiingin Koto Selayan	8	7	9	8	33
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	8	8	8	7	36
JUMLAH		22	24	24	21	121

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi, 2021

Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga yang ada di Kota Bukittinggi juga tersebar di setiap kecamatan, organisasi dari sekolah dan dari organisasi olahraga dari masyarakat itu sendiri. Untuk jumlah organisasi olahraga dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.107.
Jumlah Klub/ Persatuan Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sepak Bola	25	25	25	22	24

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Bola Volly	50	20	10	14	16
3.	Bola Basket	11	10	20	20	2
4	Bulu Tangkis	45	45	40	24	25
5	Tenis Meja	60	60	12	4	8
6	Atletik	3	3	3	3	4
7	Gerak Jalan	260	260	60	50	50
8	Tenis	25	20	9	9	6
9	Catur	50	50	7	10	6
10	Bridge	12	18	6	6	7
11	Bola Sodok	12	12	12	6	6
12	Pacu kuda	16	20	12	12	5
13	Renang	13	10	3	6	12
14	Silat	50	100	35	40	5
15	Takraw	30	40	7	12	48
16	Gulat	1	1	2	2	2
JUMLAH		663	694	263	240	226

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi, 2021

Sesuai tabel di atas tahun 2020 jumlah Klub/ Persatuan Olahraga yang ada di Kota Bukittinggi yaitu 226 organisasi olahraga, jumlah ini menurun sekitar 6% dari tahun sebelumnya. Pembinaan organisasi olahraga dilakukan oleh masing-masing pihak seperti organisasi yang ada di sekolah–sekolah dibina oleh sekolah itu sendiri sedangkan pembinaan organisasi olah raga masyarakat langsung dibina oleh ketua pemuda yang ada di setiap kelurahan dan keseluruhan organisasi ini berada dibawah naungan/bimbingan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi,. Untuk memicu keaktifan organisasi ini untuk mengikuti kegiatan keolahragaan di Bukittinggi ataupun ke luar Bukittinggi perlu perhatian yang lebih dari pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat memberikan bimbingan ataupun pembinaan serta bantuan dalam melengkapi sarana dan prasarana.

2.3.20 *Urusan Pemerintahan Bidang Statistik*

Statistik merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota. Perkembangan dari indikator urusan wajib statistik, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi bersama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi melakukan percepatan pengumpulan data sektoral daerah untuk percepatan penerbitan Bukittinggi Dalam Angka. Langkah percepatan penyusunan Daerah Dalam Angka merupakan kebijakan BPS secara nasional untuk mendukung penyusunan perencanaan nasional dan daerah, atas penerapan kebijakan tersebut Publikasi Bukittinggi dalam Angka Tahun 2020 telah tersedia pada website BPS Kota Bukittinggi pada akhir Februari setiap tahunnya.

Tabel 2.108. Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020						
No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku “Kota dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021

2.3.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Dalam hal ini untuk Kota Bukittinggi Urusan persandian ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kegiatannya Kota Bukittinggi memiliki 2 (dua) alat sandi yaitu Email Sandi dan Kriptografi.

Email sandi adalah sistem/ perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim dan menerima berita yang bersifat rahasia yang mana email ini langsung dipantau oleh BSSN. Kriptografi adalah cara untuk mengamankan informasi dengan menggunakan kode atau sistem atau ilmu untuk tulisan rahasia dengan pertimbangan bahwa komunikasi dan data dapat dikodekan untuk mencegah agar orang lain tidak dapat mengetahui.

Tabel 2.109. Pemanfaatan Persandian Tahun 2020				
NO.	Nama Alat Sandi	Skpd Pemanfaat	Jumlah Total Skpd	% Pemanfaatan
1.	Email Sandi	1	28	3,5%
2.	Kriptografi	1	28	3,5%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, 2021

Terdapat 7 (tujuh) SKPD perangkat daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tidak lagi menggunakan santel dalam menerima surat dari instansi luar, dan untuk penggunaan alat sandi hanya digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Dimana alat sandi yang digunakan tersebut adalah Email Sandi, sementara untuk Kriptografi sampai saat ini hanya dimanfaatkan oleh Kepala Daerah.

2.3.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan bidang seni, budaya dan olah raga sangat erat kaitannya dengn kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran

pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu 1) mewujudkan masyarakat indonesia yang berakhlak mulia, bermoral etika,berbudaya dan beradap serta 2) mewujudkan bangsa yang berdaya saiang untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Seni budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bukittinggi selama ini telah dikenal sebagai salah satu kota seni dan budaya. Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di tengah-tengah masyarakat, pemerintah dan stake holder lainnya di Kota Bukittinggi.

Sebagai Kota Pariwisata, Kota bukittinggi tidak hanya senantiasa melestarikan dan mengembangkan kebudayaan agar tetap lestari dan terjaga namun lebih dari itu budaya lokal yang ada di Kota Bukittinggi di jual dan dijadikan atraksi pada event-event pariwisata. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Disamping penyelenggaraan dan melestarikan kegiatan-kegiatan budaya, pelestarian benda, situs dan kawasan budaya juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bukittinggi. Berikut jumlah kelompok seni tradisional yang ada di Kota Bukittinggi yang terus selalu dibina dan dikembangkan :

Tabel 2.110.
Kelompok Seni Tradisional Yang Ada di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni
1	Mandiingin Koto Selayan	7
2	Guguk Panjang	14
3	Aur Birugo Tigo Baleh	10
	Jumlah	31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah kebudayaan. Urusan kebudayaan dikelola oleh Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas 3 hal yaitu:

1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota
3. Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota

Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia/daerah. Bukittinggi selain terkenal dengan obyek wisata alamnya, juga dikenal sebagai salah satu Kota Seni dan Budaya, dengan adat istiadat khas dan kemajemukan penduduk yang ikut memberi warna bagi kebudayaan

yang ada, karena selain suku Minangkabau, penduduk Kota Bukittinggi berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Arab dan lainnya. Peran pemerintah dalam hal ini, adalah memfasilitasi keanekaragaman kebudayaan yang ada agar tetap lestari dengan tidak meninggalkan nilai tradisi didalamnya namun tetap dapat mengikuti perkembangan zaman.

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan seni budaya Kota Bukittinggi, pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpartisipasi dalam berbagai event seni dan budaya dengan mengikut sertakan sanggar atau kelompok seni yang ada di Kota Bukittinggi baik di tingkat regional maupun nasional. Festival atau pagelaran seni budaya yang telah diikuti sebagai berikut:

Tabel 2.111.
Festival Seni dan Budaya yang Diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Tanggal	Tempat	Kelompok Seni
1	Festival Randai Se-Sumbar 2019	12 s.d 14 Juli 2019	Pelataran Parkir Pasar Raya Padang	Randai Pamenan Mato Kota Bukittinggi
2	Sumbar Expo 2019	14 s.d 17 November 2019	Lapangan Merdeka Medan	Perguruan Silat Sunua Harimau Lalok Kota Bukittinggi

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel di atas, promosi kebudayaan Kota Bukittinggi khususnya seni tradisional Minangkabau telah dilakukan, namun dengan keterbatasan anggaran pada pemerintah kota, tidak semua event seni budaya yang diadakan dapat diikuti. Namun demikian Pemerintah Kota Bukittinggi tetap memberi perhatian terhadap keberadaan sanggar atau kelompok seni budaya yang ada ditengah masyarakat, dimana hingga saat ini tercatat 56 kelompok seni yang ada di Kota Bukittinggi.

Peran Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal meningkatkan dan mengembangkan seni budaya antara lain memberi bantuan pengadaan peralatan kesenian, pelatihan seni budaya (panitahan) dan fasilitasi kegiatan lainnya.

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Undang–undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kebudayaan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya,

struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya

Upaya melestarikan benda cagar budaya dan situs yang ada baik bersifat fisik (*tangible*) maupun non fisik (*Untangible*) diawali dengan pendataan benda cagar budaya berupa pendokumentasian (tulisan dan gambar), dilanjutkan dengan pendaftaran, penetapan, serta zonasi Kawasan Cagar Budaya. Sebagai upaya untuk melestarikan, melindungi, memelihara dan memanfaatkan potensi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi, Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi. Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut terdapat 42 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.112.
Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
1.	SMU Negeri 2 Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 5 Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
2.	Bangunan Kantor Disdikbud Kota Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 9 Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
3.	Komplek Kantor Polres Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 23 Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
4.	Denzibang 5/1 Bukit Barisan	Jl. Sudirman Kelurahan Birugo Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
5.	Komplek Kantor Kodim 03/04 Agam	Jl. Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
6.	Tugu Peringatan Perang Kamang Mangopoh	Jl. Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
7.	Bangunan SMP 1	Jl. Sudirman No 1 Kelurahan Bukit Cangang Kayu ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
8.	Gereja Katolik	Jl. Sudirman Kelurahan Bukit Cangang Kayu ramang Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
9.	Rumah Bekas Kepala Stasiun	Jl. M.Syafei No. 4 Kelurahan Bukit Cangang kayu ramang Kecamatan Guguak panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
10.	Gereja Protestan	Jl. M Syafei No 12 Kelurahan tarok Dipo	Bangunan Cagar

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
		Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Budaya
11.	Villa Oepang-Oepang	Jl. Sudirman No 11 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
12.	Studio Foto Agam	Jl. Sudirman No 10 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
13.	Hotel Centrum	Jl. Sudirman No 75 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
14.	Istana Bung Hatta	Jl. Istana No. 1 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
15.	Jam Gadang	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
16.	Toko Sulaman Silungkang	Jl. Panorama No 5 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
17.	SD Negeri 14 Bukit Cangang	Jl. Panorama No. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
18.	Wisma Anggrek	Jl. Panorama No. 16 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
19.	Wisma Cipta Sari	Jl. Panorama No 20 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
20.	Lobang Jepang	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
21.	Rumah Keluarga Amiroeddin	Jl. Panorama No. 6 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
22.	Villa Merdeka	Jl. Dr. A. Rivai No 20 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
23.	Rumah Dinas Wakil Walikota (Sekarang Rumah Dinas Sekdako)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
24.	Makam Tuanku Syech Imam Jirek	Jl. Haji Miskin Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
25.	LKAAM Agam	Jl. Veteran No 96 Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
26.	SMP 4	Jl. Dr.A.Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
27.	Benteng Fort de Kock	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
28.	Toko Souvenir (CK Center)	Jl. A. Yani No 85 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
29.	Eks Bank BNI 46 Bukittinggi (rumah kepala BNI)	Jl. A. Yani No 128 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
30.	Cerobong Asap	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
31.	Mesjid Surau Gadang (Masjid Jami'/ bangunan asli tidak ada lagi)	Jl. H. Miskin Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
32.	Rumah Gadang	Jl. Ipuh Mandiangan No 61 A Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
33.	Rumah Tinggal	Jl. Mandiangan No 22 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
34.	Rumah Tinggal	Jl. Mandiangan No 38 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
35.	Rumah Tinggal	Jl. Veteran No 97 A Kelurahan Benteng Pasar atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
36.	Rumah Tinggal	Jl. Dr. A. Rivai No 8 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
37.	Rumah Tinggal	Jl. Dr. A. Rivai No 40/42 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
38.	Rumah/Salon	Jl. Panorama No 8 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
39.	Rumah Keluarga Dr. Erman (RS. Madina)	Jl. M Syafe'i Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
40.	Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
41.	Rumah Kelahiran Bung Hatta	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
42.	Batu Kurai Limo Jorong	Jl. Kurai XIII Kelurahan Parit Antang Kecamatan ABTB Bukittinggi	Benda Cagar Budaya

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2021

c. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Revitalisasi (menghidupkan) karya budaya merupakan proses secara sistemik dan metodologi untuk menggiatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman. Revitalisasi karya budaya merupakan suatu pekerjaan yang bukan sekedar menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestarikannya, melainkan bahwa kearifan lokal yang tersimpan digunakan sebagai pencerah dalam mendampingi dan mewarnai karakter bangsa.

Inventarisasi (pendataan, pencatatan dan pelaporan) karya budaya perlu dilakukan guna mencegah hilangnya warisan budaya atau mengalami klaim orang lain karena tidak dihargai di rumah sendiri. Dengan adanya inventarisasi diharapkan warisan budaya bisa terdokumentasikan dengan baik dan bisa menjadi sumber pengetahuan di masa yang akan datang, dengan adanya inventarisasi ini juga diharapkan mampu mencegah hilangnya nilai-nilai budaya oleh gelombang globalisasi yang semakin hebat. Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.113.
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Uraian	Asal
1	Randai Pamenan Mato	Binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
2	Amril	Pelaku Seni (silek)
3	Hendri Adek	Pelaku Seni (silek)
4	Ramli	Pelaku Seni (silek)
5	Sofyan Nadar	Pelaku Seni (silek)
6	Hendra	Pelaku Seni (silek)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari data diatas terlihat jumlah karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi pada tahun 2020 adalah 6 (enam) buah, yang merupakan karya seni dari anak bangsa yang merupakan pelaku seni di Kota Bukittinggi.

2.3.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2015-2019 di Kota Bukittinggi tergambar pada beberapa indikator yaitu Jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan serta koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Indikator tersebut digambarkan sebagai berikut:

a. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Perkembangan jumlah perpustakaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 termasuk perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.114.
Jumlah Perpustakaan Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pusat)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah	185	185	136	136	136
3.	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemerintah Daerah	49	52	103	103	103
Total Perpustakaan (1+2)		1	235	238	240	240

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka kota Bukittinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, 2021

Kota Bukittinggi mempunyai 1 (satu) Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi. Perpustakaan ini baru membuka pelayanan pengunjung mulai pada tahun 2015. Disamping itu juga terdapat 1 (satu) buah perpustakaan milik pemerintah pusat, yakni UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (PPBH). Aset tersebut murni adalah milik pemerintah pusat termasuk seluruh karyawannya. Tabulasi perpustakaan ini berasal dari sekolah-sekolah (145), PT (23), organisasi masyarakat (5), kecamatan (3), kelurahan (24), SKPD (24), instansi vertikal (10), BUMN/BUMD (3), pondok pesantren (2) dan 1 perpustakaan Nasional.

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Bukittinggi hanya mempunyai 1 (satu) perpustakaan daerah yaitu Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan 1 (satu) perpustakaan Nasional, yaitu Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Perpustakaan tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan

minat baca bagi masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Perpustakaan Umum Daerah masih dalam kondisi keterbatasan, yaitu keterbatasan koleksi dan keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu belum adanya gedung yang representatif untuk sebuah perpustakaan daerah. Namun Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang merupakan milik pemerintah pusat sudah sangat representatif, pada lingkungan yang asri dan nyaman, sehingga memberi ketenangan dan konsentrasi pengunjung untuk lebih fokus membaca.

Semenjak tahun 2012, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah diserahkan kepada pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Nasional Bung Hatta. Pemerintah Kota Bukittinggi mulai merintis membuat perpustakaan daerah dimulai dengan persiapan dan pengelolaan sampai tahun 2014. Pada tahun 2015 baru secara resmi membuka pelayanan untuk perpustakaan daerah yang dibuka untuk umum.

Kalau dilihat dari jumlah pengunjung dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan pada Tahun 2019, ini dapat menggambarkan semakin tingginya minat baca warga masyarakat bukittinggi. Namun karena pandemi covid-19 pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah pengunjung dan persentase kunjungan dan populasi yang harus dilayani. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata persentase kunjungan dibandingkan populasi adalah 6,4%. Artinya masih kecil dari 10% masyarakat Kota Bukittinggi memanfaatkan perpustakaan daerah ini. Hal ini disebabkan rendahnya minat literasi dan meningkatnya akses informasi melalui internet. Jumlah pengunjung pertahun dan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.115.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	3.801	5.749	10.310	12.735	8.392
2.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	124.715	126.804	128.783	130.773	124.297
3.	Persentase kunjungan dibandingkan populasi	3,05	4,53	8,00	9,74	6,75

Sumber: BPS, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

c. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.116.
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	8.618	9.881	9.637	10.910	10.989
2.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	18.326	20.511	18.339	21.153	21.153

Sumber: Dinas Perpustakaan dan kearsipan, 2021

Dari tabel di atas terlihat dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, terjadi peningkatan koleksi baik judul buku maupun jumlah buku. Dengan meningkatkan koleksi buku akan menambah minat baca seseorang, karena semakin banyaknya pilihan buku yang tersedia.

d. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Rasio perpustakaan persatuan pendudukan merupakan jumlah perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Adapun di Kota Bukittinggi rasio perpustakaan Per Satuan Penduduk dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.117.
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan	235	238	240	240	240
2.	Jumlah penduduk	124.715	126.804	128.783	130.773	121.028
3.	Rasio	0,18	0,18	0,19	0,18	0,20

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari data di atas, terlihat jumlah rasio jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk dari tahun 2016 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi oleh pertumbuhan jumlah perpustakaan. Disamping itu kemajuan teknologi juga telah mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap perpustakaan konvensional semakin berkurang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan melalui internet. Untuk itu kedepan Pemerintah Daerah hendaknya dapat mengembangkan perpustakaan kearah elektronik dan digital tanpa mengurangi perhatian pada perpustakaan konvensional.

e. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan merupakan indikator capaian pengelolaan perpustakaan. Semakin baik perpustakaan dikelola maka akan semakin meningkat kunjungan perpustakaan tersebut. Data jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun Kota Bukittinggi tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.118.
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata pengunjung pertahun	3.801	5.749	10.310	12.735	8.392

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Dari data tersebut menggambarkan bahwa dari hingga tahun 2019 memang terjadi peningkatan dalam jumlah pengunjung perpustakaan. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum signifikan dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada umumnya pengunjung yang datang adalah siswa-siswa sekolah yang membutuhkan referensi untuk menambah

wawasan ilmu pengetahuan. Dengan adanya pembatasan aktivitas pendidikan pada masa pandemi covid-19 menyebabkan penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2020.

f. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai sangat menentukan kualitas pada perpustakaan, semakin banyak jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai maka semakin baik kualitas layanan perpustakaan dan akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung yang datang pada perpustakaan. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.119.
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat
Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	8	9	8	7	7

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai bervariasi cenderung turun setiap tahunnya. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak adanya pengangkatan baru pustakawan, tenaga teknis dan penilai. Hal ini perlu komitmen bersama agar minat dan pengangkatan pada jabatan fungsional pustakawan, tenaga teknis dan penilai juga ikut meningkat. Berdasarkan Standard Nasional Perpustakaan, untuk pustakawan dibutuhkan minimal 1 orang per 15.000 penduduk. Dengan demikian jika jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 121.028 pada tahun 2020, maka jumlah ideal pustakawan adalah sebanyak 8 orang. Dengan demikian masih terdapat kekurangan 1 orang pustakawan lagi untuk mencapai jumlah yang ideal tersebut.

2.3.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kearsipan adalah suatu proses pengaturan penyimpanan bahan-bahan atau warkat secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan. Aktvitasnya meliputi penerimaan, pencatatan penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Bukittinggi dari Tahun 2016 s.d. Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.120.
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	4	7	13	14	23
2.	Jumlah perangkat daerah	29	29	29	28	28
3.	Persentase	13,79	24,14	44,80	50,00	82,14

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tahun 2020 terjadi peningkatan tajam dalam jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dari 14 orang pada tahun 2019 menjadi 23 orang pada tahun 2020, sehingga dalam hal perasetase dapat digambarkan bahwa telah terjadi peningkatan dan upaya dalam memperbaiki sistem kearsipan pada perangkat daerah di Kota Bukittinggi.

a. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pengelola Kearsipan yang kompeten akan dapat meningkatkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efesien. Kalau dilihat peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.121.
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Bukittinggi
Tahun2016 s.d. 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	3	3	3	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, belum terlihat peningkatan dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia pengelola kearsipan. Bahkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan tidak terjadinya peningkatan signifikan dalam kualitas dan pelayanan pengelolaan kearsipan di Kota Bukittinggi. Hal ini terjadi disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan pada APBD Kota Bukittinggi.

2.3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mempunyai *multiflier effect* tinggi dalam pembangunan perekonomian. Selain berdampak positif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Dewasa ini banyak daerah yang menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk Kota Bukittinggi.

Kunjungan Wisata

Kota Bukittinggi yang dianugerahi sang pencipta dengan pesona alam dan iklim yang sejuk serta didukung dengan pengembangan berbagai destinasi wisata telah bertopang kepada sektor ini dalam pembangunan daerahnya. Hal ini disebabkan juga karena Kota Bukittinggi tidak memiliki sumber kekayaan alam berupa pertambangan dan juga terbatasnya lahan pertanian.

Salah satu indikator guna melihat kinerja pembangunan Kota Bukittinggi di bidang pariwisata adalah kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Kota Bukittinggi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata ke Kota Bukittinggi berjumlah 584.765 wisatawan yang terdiri dari 32.653 wisatawan mancanegara dan 522.132 wisatawan domestik. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 62% akibat pandemi covid-19. Perkembangan jumlah kunjungan wisata tahun 2016 s.d. 2020 ke Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122.
Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Wisatawan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mancanegara	27.516	30.412	31.841	32.653	2.337
2.	Domestik	511.258	516.483	546.016	522.132	217.631
JUMLAH		538.774	546.895	577.857	584.785	219.968

Sumber: Bukittinggi Dalam angka 2021 & Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga, 2021

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi dilihat atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan keberadaan hotel dan restoran serta sarana pendukung lainnya di Kota Bukittinggi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2020 adalah 48,22% untuk PDRB atas dasar Harga Berlaku dan 48,50% untuk PDRB atas dasar Harga Konstan. Perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi kurun waktu lima tahun terakhir terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.123.
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2016 s.d. 2020

No	Kontribusi Sektor Pariwisata	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	48,74	49,16	49,78	50,11	48,22
2.	Atas Dasar Harga Konstan	50,32	50,43	50,78	50,93	48,50

Sumber: PDRB Bukittinggi 2016-2020.

Dari tabel terlihat Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi baik Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,89% dan 2,43%. Oleh karena itu diperlukan:

1. peningkatan infrastruktur penunjang kepariwisataan,
2. pembenahan sarana dan prasarana pada objek wisata,
3. peningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bukittinggi dan
4. peningkatan promosi dan pemasaran baik ke dalam maupun luar negeri.

Upaya-upaya tersebut terus dilakukan agar pengembangan pariwisata memberikan *multiflier effect* bagi sektor-sektor lainnya, tidak hanya pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, tapi juga berpengaruh pada sektor Perdagangan Besar, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi, dan sektor jasa lainnya.

2.3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan.

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sektor pertanian tidak terlalu berperan di Kota Bukittinggi, hal ini sesuai dengan karakteristik kota yang pemanfaatan lahannya lebih mengarah kepada jasa usaha dan permukiman. Produksi pertanian di Kota Bukittinggi didominasi oleh produksi padi, ketela rambat, ketela pohon dan jagung yang merupakan bahan pangan utama lokal lainnya selain padi.

Produktivitas padi Kota Bukittinggi setiap tahunnya rata-rata masih di atas 60 kw/ha. Pada tahun 2020, dengan luas area tanaman 619,95 ha dapat memproduksi padi sebanyak 3.776,37 ton atau dengan tingkat produktivitas 60,91 kw/ha. Produksi padi tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 28% dibandingkan dengan tahun 2019. Perkembangan produktivitas padi Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d. 2020 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124.
Produktivitas Padi Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

No	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2016	na	800,10	65,33
2.	2017	5 204,00	774,00	67,24
3.	2018	5 481,12	934,82	58,41
4.	2019	5 266,31	805,15	65,41
5.	2020	3 776,37	619,95	60,91

Sumber: Dinas Pertanian dan pangan, 2021

Menurunnya produktivitas padi pada Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. cuaca (musim kemarau) yang menyebabkan lahan mengalami kekeringan dan gagal panen.
2. Masa tanam yang terlambat.
3. Alih fungsi lahan sawah yang pada mulanya ditanami padi setiap tahun banyak yang beralih fungsi untuk keperluan sektor non pertanian, seperti perumahan.
4. Pandemi covid-19

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengatasi masalah ini salah satunya dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani/ gapoktan se Kota Bukittinggi. Selain itu upaya untuk mengatasi masalah irigasi, maka pada tahun 2019 telah dibentuk Komisi Irigasi dan perkumpulan petani pemakai air yang akan membantu pemerintah merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi di Kota Bukittinggi. Sektor infrastruktur saja tidak cukup untuk meningkatkan nilai kerja sistem irigasi, perlu peran kelembagaan yang cukup signifikan sebagai motor penggerak berfungsinya pengelolaan sistem irigasi.

Produktivitas Jagung di Kota Bukittinggi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena berkurangnya luas area tanam dari 47 ha pada tahun 2019 menjadi 17 ha, sedangkan produktivitas lahan hampir sama pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sekitar 56,87 Kw/Ha. Perkembangan produktivitas jagung tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125.
Produktivitas Jagung Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2016	77	32	45,38
2.	2017	73,61	38	43,30
3.	2018	37,4	41,9	37,74
4.	2019	232,88	47	56,8
5.	2020	96,68	17,00	56,87

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan 2021

Produksi ketela rambat di Kota Bukittinggi Tahun 2020 meningkat hampir 60% dibandingkan dari tahun 2019. Demikian juga halnya dengan produktivitas pada tahun 2020, meningkat 26% dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan kualitas bibit, cara tanam ataupun kualitas tanah/area tanam. Berikut perkembangan produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d. 2020.

Tabel 2.126.
Produktivitas Ketela Rambat Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

No,	Tahun	Produksi Ketela Rambat (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2016	77	32	45,38
2.	2017	73,61	38	43,30
3.	2018	37,4	41,9	37,74
4.	2019	232,88	47	56,8
5.	2020	372,32	49	71,6

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Produktivitas Ketela Pohon di Kota Bukittinggi Tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 produksi dan produktivitas ketela rambat merupakan yang tertinggi, padahal luas area tanam terkecil dalam 5 tahun terakhir. Sama halnya dengan produktivitas Ketela Rambat bahwa peningkatan ini menandakan adanya perbaikan kualitas bibit, cara tanam ataupun kualitas tanah/area tanam. Berikut perkembangan produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d. 2020

Tabel 2.127.
Produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

No,	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2016	784	12	326,67
2.	2017	284,56	13	218,89
3.	2018	318,7	14	212,45
4.	2019	541,45	13	416,5
5.	2020	861	11	782,7

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bukittinggi baik dilihat melalui atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini merupakan karakteristik sebuah kota, dimana struktur perekonomiannya tidak lagi bertopang kepada kelompok primer. Penurunan ini telah tergambar dari produtivitas padi yang cenderung turun setiap tahunnya sebagaimana pembahasan di atas.

Sektor Pertanian adalah salah satu sektor atau lapangan usaha dimana didalamnya terdapat penggunaan sumberdaya hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan, bahan baku industri dan sumber energi dimana di dalamnya meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d. 2020 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128.
Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 s.d. 2020

No	Kategori	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,37	1,30	1,37	1,30	1,18

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2016 masih berkontribusi sebesar 1,37%, seiring bertambahnya tahun terus menurun sampai pada tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 1,18%. Sejalan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga

Konstan pun mengalami penurunan. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian ini hanya 1,31%, dimana dalam kurun waktu lima tahun, maka pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian menurun menjadi 1,16%. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.129.
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010)
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Sub Sektor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,31	1,26	1,18	1,12	1,16

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2021

2.3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan Kota Bukittinggi dalam pembangunan daerah. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi ditopang dengan keberadaan pasar simpang aur, pasar atas, dan pasar bawah. Pasar Simpang Aur Kuning merupakan pasar grosir terbesar di Sumatera sehingga pasar simpang Aur Kuning disebut juga sebagai Tanah Abang II. Hal ni menyebabkan Bukittinggi bukan saja sebagai sentral perdagangan yang berskala lokal, tapi juga regional.

Sektor Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara produsen dan konsumen yang meliputi kegiatan membeli dan menjual barang baru maupun bekas untuk penyaluran atau pendistribusian tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi didalamnya mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara produsen dan konsumen yang meliputi kegiatan membeli dan menjual barang baru maupun bekas untuk penyaluran atau Pendistribusian tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi didalamnya mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB sangat dominan dimana pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 33,59% naik sebesar 0,14% pada tahun 2020 menjadi 33,73%. Meningkatnya kontribusi sector perdagangan ini maka secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 2.130.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Sub Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	Perdagangan Besar dan Eceran	33,59	33,87	33,89	34,03	33,73

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2021

2.3.28 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Industri menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industry, sedangkan perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Untuk mengukur kinerja unsur perindustrian, dapat dilihat dari kontribusi sector industry pada kota Bukittinggi, yang berasal dari Industri Pengolahan. Potensi komoditi industri pengolahan yang ada di Kota Bukittinggi adalah Industri pakaian jadi dari tekstil, industri bordir/sulaman, industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture, industri kue-kue basah, industri kerupuk dan sejenisnya, industri roti dan sejenisnya serta industri pengolahan teh dan kopi.

Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB yang dilihat melalui peranan sektor industri pengolahan mempunyai kecendrungan penurunan setiap tahunnya baik dilihat melalui atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan tahun 2020 sebesar 5,19% terjadi penurunan 0,16% dibanding tahun 2019. Berikut perkembangan peranan sektor perindustrian terhadap PDRB dari tahun 2016 s.d. 2020:

Tabel 2.131.
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Kota Bukittinggi Tahun 2016 -2020

No	Sub Sektor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Industri Pengolahan	6,45	6,07	5,66	5,03	5,19

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2020

Dari grafik terlihat jelas bahwa kontribusi Perindustrian Kota Bukittinggi terhadap PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan maupun Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2016 -2020 cendrung menurun. Salah satu penyebabnya adalah melemahnya nilai rupiah yang menyebabkan kenaikan biaya produksi serta kenaikan suku bunga kredit. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kontribusi sector perindustrian ini antara lain dengan meningkatkan daya saing dan mempersiapkan produk unggulan, meningkatkan kapasitas produsen untuk ekspor, melakukan pendampingan promosi baik dalam dan luar negeri

serta memperkuat jaringan kerjasama dengan daerah Kab/Kota lain, dan negara tetangga. Hal ini mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu, karena aktivitas industri memberi efek ganda yang luas bagi penyerapan tenaga kerja local dan dapat memacu dan mendorong pembangunan sektor-sektor lainnya, misalkan sektor pertanian dan sektor jasa.

2.3.29 **Perencanaan**

Terdapat tujuh indikator penunjang urusan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi. Pada tahun 2018 dilakukan revisi terhadap dokumen perencanaan RPJPD yang yang pada tahun 2019 ditetapkan dengan Perda, RPJMD yang ditetapkan Perda/Perkada, RKPD yang ditetapkan Perkada, Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD. Dan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW. Berikut tabel indikator penunjang urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.132.
Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020

No	Indikator	Tahun 2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	91,89 %
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi, 2021.

Kota Bukittinggi sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2017.

2.3.30 **Keuangan**

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semenjak tahun 2014. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah siap untuk menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintrah) secara penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, perbendaharaan, pembukuan dan pengelolaan aset. Dalam

amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) menyatakan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kota Bukittinggi memiliki persentase belanja pendidikan yang telah melebihi dua puluh persen, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh amandemen keempat UUD 1945.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, pada dasarnya Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut dapat diprioritaskan untuk mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan program strategis dan program nasional.

2.3.31 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai upaya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.133.
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 jam	20 jam	20 jam	20 jam	20 jam

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Dari tabel tersebut di atas, kalau dilihat dari rata-rata pegawai yang masih rata-rata 20 jpl (jam pelajaran) dalam satu tahun yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, namun masih terdapat PNS yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya. Sehingga upaya dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Bukittinggi belum memperlihatkan hasil yang signifikan, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

a. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal untuk Aparatur Sipil Negeri (ASN) merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kualiatas ASN tersebut. Salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Bukittinggi di Kota Bukittinggi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.134.
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Bukittinggi
Tahun 2020

NO	Uraian	2020
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	117
2.	Jumlah total ASN	2.603
3.	Persentase	4,49

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Pada tahun 2020 sebanyak 117 orang (4,49%) ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kualitas SDM Pegawai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga terbukanya kesempatan Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendidikan formal baik S1 maupun S2 yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi.

b. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan PNS. Diklat struktural bagi ASN bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan sikap pegawai dalam melakukan jabatan secara profesional dengan dilandasi oleh etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi dan menciptakan aparatur Negara yang mampu sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.135.
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	31	35	35	25	0
2.	Jumlah total jabatan ASN	589	595	560	564	551
3.	Persentase	5,26	5,88	7,00	7,00	0

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa persentase pejabat Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural meningkat dari tahun 2016-2018, akan tetapi pada tahun 2019 karena keterbatasan anggaran, ASN yang mengikuti diklat struktural tidak sebanyak tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 tidak ada yang mengikuti diklat struktural karena pandemi covid-19.

c. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Jabatan Administrasi adalah Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan Kasubid. dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi

pemerintah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan erat dengan satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah tidak mengalami peningkatan, tetap berjumlah 26 orang untuk yang eselon 2. Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.136.
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah
Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26	26	26	26	26
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	558	558	558	558	558
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	999	984	984	942	942

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

2.3.32 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian merupakan sebuah proses penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru atau suatu rumusan yang menunjukkan adanya hasil. Kegiatan penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dibutuhkan disemua kalangan termasuk di pemerintahan karena banyak program strategis daerah ataupun kegiatan yang berskala resiko besar ataupun dampak besar sangat diperlukan kajian atau penelitian. Banyak pekerjaan pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik di Kota Bukittinggi mempergunakan hasil kajian atau penelitian, dan ini merupakan kebutuhan oleh pemerintah. Tentu pemikiran tersebut tidak terlepas dari pandangan Pemerintah Kota Bukittinggi bahwa penelitian atau kajian mempunyai nilai yang sangat berarti dan penting untuk di pedomani.

Setiap tahun pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan kegiatan penelitian dan kajian pada sector-sektor yang dianggap sangat strategis dalam rangka menyusun kebijakan baik secara teknis maupun rekomendasi regulasi yang melahirkan kebijakan walikota. Berikut tabel indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

Tabel 2.137.
Indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020

No	Indikator	Tahun 2020
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
	Penerapan SIDA :	
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	17,86%
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	20,00%

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi, 2021

2.3.33 **Pengawasan**

Penunjang urusan pengawasan berada pada Inspektorat. Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit kinerja dan keuangan setiap tahun semakin membaik, hal ini menggambarkan upaya SKPD menyajikan pelaksanaan pembangunan juga semakin baik. Disamping itu dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 ini adalah bagian penguatan APIP untuk lebih independen, efektif dan optimalisasi dalam mengawasi perangkat daerah. Pada tahun 2020 Persentase tindak lanjut temuan yang telah dilakukan yaitu sebesar 82% dan jumlah temuan BPK sebanyak 10 temuan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.138.
Indikator Penunjang Urusan Pengawasan
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase tindak lanjut temuan	81%	82%	84%	81%	82%
2.	Jumlah Temuan BPK	10 Temuan	9 Temuan	10 Temuan	14 Temuan	10 Temuan

Sumber: Inspektorat, 2021

2.3.34 **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraannya bertugas melaksanakan fungsi penunjang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat memfasilitasi setiap kebutuhan DPRD Kota Bukittinggi. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam melihat fungsi DPRD pada Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Alat-Alat Kelengkapan Dewan, Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) serta Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.Selanjutnya tabel Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan adalah :

Tabel 2.139.
Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020

No.	Indikator	Tahun 2020
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD)	Ada

No.	Indikator	Tahun 2020
	maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	
3.	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota, seluruh fungsi dari DPRD Kota Bukittinggi selalu dijalankan dengan baik, mulai dari fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran. Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekomoni daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekomoni daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data yang ada menunjukan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bukittinggi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya sebagian besar produk domestik yang dihasilkan di wilayah Kota Bukittinggi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Tabel 2.140.
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (juta Rp.)	3.644.335,23	3.906.189,75	4.241.071,84	4.704.582,80	4.784.023,59
b. ADHK (juta Rp.)	2.667.154,56	2.812.783,39	2.970.566,93	3.129.062,85	3.106.038,73
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	53,73	52,41	52,94	54,11	55,45
Rata-rata Konsumsi per Kapita (Ribu Rp.)					
a. ADHB (Ribu Rp.)	29.221,31	30.804,94	32.931,92	35.975,18	36.045,17
b. ADHK 2010 (Ribu Rp.)	21.386,00	22.182,13	23.006,45	23.927,44	23.402,42
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	4,70	5,46	5,61	5,34	-0,74
b. Per Kapita	2,94	3,72	3,99	3,73	-2,19

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2021 (data di olah)

Data di atas menunjukan bahwa periode tahun 2016-2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas harga berlaku) maupun harga rill (atas dasar harga Konstan). Pertambahan jumlah penduduk juga menjadi pendorong kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga kenaikan tersebut juga kan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama tahun 2016 s.d. 2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung berfluktuasi dimana posisi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 55,45 % Untuk konsumsi per rumah tangga rata-rata meningkat dari tahun ke tahun baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, dimana pada tahun 2020 setiap rumah tangga menghabiskan dana sekitar 36,04 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Selanjutnya dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan dari tahun 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan. Pengeluaran ini didominasi untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, diikuti oleh aneka komoditas dan jasa, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, komoditas tahan lama, dan pajak pungutan, dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara. Perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan dari Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2020 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141.
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan
Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Rata-rata Pengeluaran (Rp.)
1.	2016	649.340,12
2.	2017	764.869,06
3.	2018	767.413,00
4.	2019	882.383,00
5.	2020	861.872,00

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2021 (data di olah)

b. Produktivitas Total Daerah

Di samping pengeluaran per kapita, ukuran lain yang dapat digunakan adalah Produktivitas total daerah, yang dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor, dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Produktifitas total daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 terlihat pada Tabel berikut

Tabel 2.142.
Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	2015	2016*	2017	2018**	2019***
Produktivitas Total Daerah	109,24	120,48	132,80	133,69	148,82

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Ketaatan Terhadap RTRW Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukiittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 -2030. Ketaatan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan Pola Ruang yang telah digariskan dalam Perda RTRW di Kota Bukittinggi belum terdata dengan baik namun tindakan kearah penertiban itu sudah dilakukan sejak dari penerbitan Advis Planning sebagai dasar dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan pengawasan yang dilakukan terhadap IMB yang telah diterbitkan serta terhadap bangunan yang dibangun secara liar/belum mengontongi IMB.

Dalam Advis Planning dijelaskan pola ruang lahan yang dimohonkan oleh pemohon berikut intensitas kawasan tersebut sehingga dalam membangun akan meminimalkan penyimpangan pemanfaatan ruang yang akan terjadi. Dari tahun ke tahun permohonan Advis Planning cendrung meningkat, peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketaatannya dalam pemanfaatan ruang sesuai aturan yang berlaku

b. Luas Wilayah Produktif

Luas Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, yang terdiri dari kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan wisata, kawasan ruang terbuka

non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan campuran, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

Sedangkan Wilayah produktif merupakan Wilayah yang didalamnya melakukan proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing, yang terdiri kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Rasio wilayah produktif dan Wilayah Budidaya Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.143.
Rasio Luas Wilayah Produktif dan Luas Seluruh Wilayah Budidaya

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Produktif	1016,17	992,63	1.974,88	1.974,88	1.974,88
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	NA	1966,63	1.974,88	1.974,88	1.974,88
	Rasio (1 : 2)	-	1 : 1,98	1 : 1	1 : 1	1 : 1

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2018 - 2020 luas wilayah Produktif dan Luas Wilayah Budidaya di Kota Bukittinggi sama, dengan artian luas wilayah budidaya merupakan daerah-daerah produksi dan distribusi. Perhitungan luasan ini mengacu kepada hasil Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota BUKittinggi Tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan melalaui Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu variabel yang penting untuk diperhatikan. Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas , maka hal itu mengidenkasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relative tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Bukittinggi. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melbatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan social di masyarakat. Berikut ini merupakan tabel mengenai angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016 s.d. 2020.

Tabel 2.144.
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kasus Narkoba	24	32	34	41	30
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	1	0	0	2
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	13	16	10	11	12
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	104	68	51	43	51
5.	Jumlah Kasus Pencurian	252	230	245	241	158
6.	Jumlah Kasus Penipuan	24	8	17	16	11
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	419	355	357	352	264

Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi, 2021

Berdasarkan data yang ada, seperti yang tersaji pada Tabel di atas terlihat bahwa angka kriminalitas yang terjadi di Kota Bukittinggi bersifat fluktuatif, jumlah kejahatan yang tertangani tahun 2017 menurun menurun menjadi 355 kasus, sebelumnya di tahun 2016 419 kasus dan menurun menjadi 264 pada Tahun 2020.

Penurunan kriminalitas ini diharapkan mampu meningkatkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat Kota Bukittinggi. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas di daerah yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Proses Perizinan

Salah satu hal yang menjadi penentu dalam menarik minat investor adalah kemudahan dalam proses perizinan. Dengan memberikan kemudahan dalam sebuah proses perizinan akan membuat iklim investasi suatu daerah menjadi kondusif.

Berikut diuraikan lamanya proses beberapa perizinan Kota Bukittinggi dalam menunjang iklim investasi Kota Bukittinggi yang diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019.

1. Izin Mendirikan Bangunan. Lama proses perizinan 6 (enam) hari kerja Pemrosesan izin setelah pengumuman IMB
2. Surat Izin Usaha Perdagangan. Lama proses perizinan1 (satu) hari kerja setelah permintaan Rekomendasi diterima
3. Tanda Daftar Gudang. Prses perizinan 5 (lima) hari kerja setelah Rekomendasi diterima.
4. Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal. Proses perizinan 5 (lima)hari kerja rekomendasi SKPD dan 2 (dua) hari kerja pemrosesan izin.
5. Izin Reklame. Proses perizinan 4 (empat) hari kerja pemrosesan izin baru, 3 (tiga) hari kerja pemrosesan izin perpanjangan, 2 (dua) hari kerja untuk izin isidentil

6. Izin Usaha Angkutan. Proses perizinan (tiga) hari kerja rekomendasi SKPD dan dua hari kerja pemrosesan izin.
7. Izin Trayek. Proses perizinan (tiga) hari kerja rekomendasi SKPD dan 2 (dua) hari kerja pemrosesan izin
8. Izin Usaha Warung Internet. Proses perizinan 3 (tiga) hari kerja rekomendasi SKPD dan 2 (dua) hari kerja pemrosesan izin
9. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi. Proses perizinan (lima) hari kerja rekomendasi SKPD, 14 (empat) belas hari kerja pengumuman dan enam hari kerja pemrosesan izin.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi. Proses perizinan 5 (lima) hari kerja rekomendasi SKPD dan 2 (dua) hari kerja pemrosesan izin.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka proses perizinan dilaksanakan melalui One Single Submission (OSS) yang merupakan sistem yang mengintegrasikan pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik. Pada saat ini akan dilakukan perubahan terhadap peraturan terkait perizinan dengan menyesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga Kerja yang berkualitas merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja, menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya system ketenagakerjaan yang ideal serta memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi dan juga

dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Berikut dapat dilihat perkembangan kelulusan tingkat strata 1 s.d 3 tahun 2016 s.d. 2020:

Tabel 2.145.
Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1	10.063	9.622	10.454	11.394	11.645
2.	Jumlah lulusan S2/S3	1.322	893	956	1.091	1.117
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	11.385	10.515	11.410	12.485	12.771
5.	Jumlah penduduk	124.715	126.804	128.783	130.773	130.773
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	7,77	8,29	8,85	9,54	9,77

Sumber: Dinas PMPTSP, 2021, Bukittinggi Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Penduduk muda usia dibawah 15 tahun disebut sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergandung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Penduduk usia 65 tahun ke atas juga dianggap sudah tidak produktif lagi. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif. Berikut dapat dilihat rasio ketergantungan Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d 2020:

Tabel 2.146.
Rasio Ketergantungan Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	34.375	34,710	35,014	35,285	31.202
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.751	5.982	6,244	6,543	7.323
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	40.126	40.692	41,258	41,828	38.525
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	84.589	86.112	87,525	88,945	82.503
5.	Rasio Ketergantungan	47,44	47,25	47,14	47,03	31,83

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s.d. 2020 cenderung menurun hal ini menggambarkan bahwa beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk belum produktif dan penduduk tidak produktif berkurang, kondisi ini akan berdampak positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.

2.5 Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengatur ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang merupakan tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh setiap pemerintah daerah pada batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar tersebut merupakan urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai urusan konkuren meliputi:

- a. Urusan Wajib Pendidikan;
- b. Urusan Wajib Kesehatan;
- c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Urusan Wajib Sosial, dan
- f. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan masyarakat.

Prinsip dasar SPM pada orientasinya tidak hanya memperjuangkan kualitas pelayanan semata, namun juga memperjuangkan kuantitas sehingga bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Urusan wajib pemerintahan yang telah diperintahkan penyusunan SPM-nya ternyata mempunyai dasar yang kuat dalam ketentuan konstitusi UUD 1945. Artinya, pengaturan dan penerapan SPM sesungguhnya merupakan implementasi dari ketentuan konstitusi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah

diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya. Evaluasi SPM merupakan pemberian gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan oleh daerah melalui Perangkat Daerah (PD) terkait.

Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Bukittinggi 2020 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 86,80% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.147.
Capaian SPM Kota Bukittinggi Tahun 2020

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi/ Capaian
Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)		100%	72,32%
Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	Persentase warga negara usia 7-12 tahun memperoleh layanan pendidikan dasar (sekolah dasar) sesuai standar	100%	107,51%
	Persentase warga negara usia 13-15 tahun memperoleh layanan pendidikan dasar (menengah pertama) sesuai standar	100%	72,92%
Pendidikan Kesenjangan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun memperoleh layanan pendidikan kesetaraan sesuai standar	100%	19,54
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase warga negara usia 5-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini sesuai standar	100%	89,32%
Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan)		100%	80,82%
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90,96%
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92,15%
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	55,48%
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	77,54%
Pelayanan kesehatan pada	Jumlah warga negara usia lanjut	100%	99,66%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi/ Capaian
usia lanjut	yang mendapatkan layanan kesehatan		
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	67,49%
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	53,27%
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan ODGJ berat yang terlayani kesehatan	100%	100%
Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga negara terduga TB yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	33,28%
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara engan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
Bidang Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		100%	84,23%
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	88,22%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	80,23%
Bidang Perumahan Rakyat (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman)		100%	100%
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/ kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		100%	83,43%
Sub Urusan Trantibum (Satuan Polisi Pamong Praja)		100%	97,75%
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	93,24%
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%	100%
	Cakupan rasio petugas linmas	100%	100%
Sub Urusan Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		100%	52,55%
Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase penyelesaian dokumen jenis dan risiko bencana sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi/ Capaian
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	33,33%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen rencana penanggulangan bencana sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%
	Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%
	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi	100%	0%
	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	0%
	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	22,22%
	Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	0%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon setiap status KLB penyakit/ wabah zoonosis prioritas	100%	100%
	Persentase kecepatan respon setiap status darurat bencana	100%	100%
	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%
	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	75%
Sub Urusan Kebakaran (Dinas Kebakaran)		100%	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
Bidang Sosial (Dinas Sosial)		100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi/ Capaian
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	-	-
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pencapaian SPM sebesar 86,80%, realisasi capaian penerapan SPM masih di bawah target nasional 100%. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat bahwa capaian kinerja SPM harus 100% didukung oleh program dan kegiatan yang jelas. Karena itu butuh penguatan dan peningkatan pelaksanaan sesuai peraturan masing-masing kementerian.

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pendidikan tahun 2020 sebagai berikut :

- Pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2020 sesuai standar jumlah dan kebutuhan barang/jasa serta standar jumlah dan kualitas barang perlengkapan dasar untuk PAUD sudah dilaksanakan dengan baik melalui dana penyelenggaraan sekolah dan BOP.
- Sementara untuk SD Negeri dan SMP Negeri, pemenuhan kebutuhan dasar untuk buku teks pelajaran telah disediakan untuk semua siswa melalui dana BOS, pengadaan buku paket untuk koleksi pustaka hanya dipinjamkan kepada semua murid, dan untuk alat tulis belum ada penganggaran baik dari pusat maupun daerah.
- Untuk pendidikan kesetaraan, buku modul belum dianggarkan pada APBD maupun APBN. Modul diperbanyak melalui fotokopi dan penggandaan, alat tulis telah dianggarkan melalui dana penyelenggaraan paket A, B, dan C.
- Untuk tenaga kependidikan, ada 3 kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, akan tetapi karena pandemi Covid-19 kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan anggaran di refocusing di perubahan anggaran.
- Untuk ruang kelas baru, pembangunan dan pemeliharaan sekolah merupakan prioritas RPJMD pada tahun 2020 yaitu SMPN 3 dan SDN 7.

Dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan sesuai Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 merupakan aturan baru yang sampai saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan pengumpulan data untuk pemenuhan capaian SPM. Permasalahan dalam pencapaian

SPM belum adanya data terpilah sebagai dasar penghitungan kebutuhan dalam penganggaran SPM dalam RKPD

Adapun capaian SPM bidang kesehatan tahun 2020 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4). Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.943 orang dari 2.136 orang sasaran ibu hamil yang ditargetkan. Sehingga capaian pelayanan kesehatan ibu hamil didapatkan 90,7% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yaitu 93,7%.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes selama tahun 2020 di Kota Bukittinggi adalah 1.870 orang dari 2.039 sasaran ibu bersalin yang ditargetkan atau sebesar 91,7% meningkat dari 93,8% pada tahun 2019.
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir. Dari 1.865 jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari, semuanya 100% (1.865 bayi baru lahir) sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4. Pelayanan Kesehatan Balita. Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 5.294 dari 9.542 balita yang ada di wilayah kerja selama tahun 2020, atau sebesar 55,5% dan mengalami peningkatan dari 79,2% pada tahun 2019.
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar. Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan pendidikan dasar adalah 28.742 orang dan semuanya terealisasi sebanyak 28.742 orang atau mencapai target nasional 100%.
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif. Jumlah pengunjung usia 15-49 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2020 adalah sebesar 50.401 orang dari 64.997 orang, atau sebesar 77,5%, mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2019 yaitu 82%.
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut. Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam setahun sebanyak 8.438 orang dari 8.467 orang. Jadi capaian kinerja tahun 2020 sebesar 99,7% mengalami peningkatan dari 97% pada tahun 2019.
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebanyak 12.514 orang dari 18.543 orang dari sasaran penderita hipertensi atau sebesar 67,5%, mengalami penurunan dari 72% pada tahun 2019.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM). Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebanyak 742 dari 1.393 dari sasaran penderita DM atau sebesar 53,3% mengalami penurunan dari 75% pada tahun 2019.
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat. Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebanyak 200 orang dari 200 orang sasaran penderita ODGJ atau dengan capaian 100%.
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB). Jumlah orang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebanyak 220 orang dari sasaran TB yaitu 661 atau sebesar 33,3%, mengalami penurunan dari 94% pada tahun 2019.
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. Tahun 2020, orang yang terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar yaitu 31 orang dari 31 orang atau dengan capaian 100%.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar dan targetnya sesuai jenis layanan pada bidang pekerjaan umum adalah 100% secara nasional.

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020 diukur dari: 1). Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari, didapat dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan 2). Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Belum tercapainya indikator terkait kebutuhan air minum disebabkan karena sumber air baku yang terletak diluar Kota Bukittinggi serta sarana distribusi yang belum optimal.

Pada tahun 2020, realisasi penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana kab/kota

Pada tahun 2020, tidak ada kejadian bencana alam yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan rumah bagi warga Bukittinggi sehingga SPM Bidang Perumahan Rakyat pada indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota belum terlaksana namun telah melakukan proses pra-identifikasi perumahan di kawasan rawan bencana.

Sesuai dengan Renja Dinas Perumahan dan kawasan permukiman tahun 2020, telah dilaksanakan pembuatan aplikasi untuk pendataan perumahan yang diberi nama SIRUBI. Tahun 2021 nanti rencananya akan dilanjutkan dengan pendataan

perumahan di kawasan rawan bencana berdasarkan RTRW Kota Bukittinggi dan dokumen wilayah rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Kota Bukittinggi.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

Di tahun 2020 telah dilaksanakan bantuan sosial untuk 1 (satu) rumah yang terkena program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait rencana pembangunan rumah potong hewan.

Adapun target pencapaian SPM bidang trantibum linmas, diuraikan sebagai berikut:

1. Sub Urusan Trantibum

- 1) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
Dari 1465 kasus yang dipantau oleh Satpol PP maupun dari laporan masyarakat, sebanyak 1366 kasus pelanggaran perda dapat diselesaikan atau telah dilakukan penyidikan dan penindakan di tahun 2020.
- 2) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Tingkat patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Bukittinggi adalah 3 kali patroli dalam sehari atau jumlah regu dalam patroli sebanyak 4 regu, dan ini sudah sesuai dengan target nasional yaitu 3 kali patroli dalam sehari atau pencapaian sebesar 100%.
- 3) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kab/kota
Pada tahun 2020, sasaran rasio petugas linmas di Kota Bukittinggi adalah 0,36 atau 36%. Sedangkan target nasional adalah 1 (100%) atau 1 orang anggota linmas per RT.

2. Sub Urusan Bencana Daerah

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana
Terdiri dari 2 sub kegiatan dengan 5 komponen/sasaran. Dari 5 sasaran, dapat dilaksanakan 3 komponen atau realisasi sebesar 60%. Untuk sub kegiatan penyusunan kajian resiko bencana terlaksana semua komponen atau tercapai 100% sedangkan sub kegiatan KIE rawan bencana terlaksana 1 dari 3 komponen atau 33,33% sehingga realisasi untuk penerapan SPM pelayanan informasi rawan bencana sebesar 60%.
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - a) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi
Pencapaian SPM ini adalah 0%, hal ini disebabkan karena dari 2 komponen yaitu pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur dan

pelatihan bagi warga, kedua komponen tersebut tidak dilaksanakan di tahun 2020 sehingga SPM ini tidak mencapai target nasional.

- b) Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana

Pencapaian SPM ini sebesar 18,18%. Terdiri dari 9 komponen/sasaran dan hanya terlaksana 2 komponen, sisanya tidak dilaksanakan oleh BPBD karena komponen tersebut merupakan tanggungjawab Perangkat Daerah lain yaitu Dinas Kesehatan.

- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 88,89%.

3. Sub Urusan Kebakaran

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota Bukittinggi pada tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebanyak 58 layanan. Dan jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2020 adalah sebanyak 58 kejadian. dan seluruh kejadian dapat ditangani oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi. Sehingga capaian Indikator Utama Layanan SPM Sub Kebakaran Pada Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebesar 100 %.

Selain kejadian kebakaran, selama tahun 2020 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi Manusia (Operasi darurat non kebakaran) sebanyak 13 (Tiga Belas) kejadian.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

Menurut data PMKS Kota Bukittinggi hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2020 jumlah seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 566 orang. Sebanyak 84 orang penyandang disabilitas merupakan penyandang disabilitas ringan, masih potensial dan berasal dari keluarga mampu, tidak memenuhi kriteria sesuai permensos nomor 9 tahun 2018, sebagian juga ada yang pindah dan meninggal dunia.

Penyandang Disabilitas yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rehabilitasi dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 482 orang.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yangmendapat penanganan dan bantuan dari Dinas Sosial pada tahun 2020adalah 482 orang dengan capaian 100%, baik dari APBD, APBN dan Propinsi, dengan rincian :

- a. Dari APBN
 - Bantuan program keluarga harapan sebanyak 17 orang
 - Bantuan BPNT sebanyak 73 orang
 - b. Dari APBD
 - Bantuan alat bantu dengar sebanyak 10 orang
 - Bantuan permakanan (sembako disabilitas) sebanyak 300 orang
 - Pelatihan pijat tuna netra sebanyak 12 orang
 - Pelatihan bahasa isyarat sebanyak 20 orang
 - Bantuan dari hibah dan bansos IPSM sebanyak 50 orang
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
 Sesuai dengan kriteria berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2018, kasus anak terlantar pada tahun 2020 berjumlah 726 orang anak yang berasal dari keluarga miskin dan 1 orang anak yang membutuhkan penanganan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, dan telah tertangani 100%, dengan rincian:
 - a. Dari APBN, anak terlantar yang berasal dari keluarga miskin diberi bantuan tas sekolah sebanyak 726 orang anak
 - b. Dari APBD, sebanyak 1 orang anak melalui kegiatan pelayanan bagi anak dan bayi terlantar yang membutuhkan perlindungan khusus.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
 Menurut data Hasil FKP Kota Bukittinggi jumlah seluruh lansia yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 764 orang, umumnya berumur > 70 tahun. Sesuai dengan permensos nomor 9 tahun 2018, Lansia yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rehabilitasi dasar Lansia terlantar di luar panti sebanyak 764 orang.
 Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat penanganan dan bantuan dari Dinas Sosial pada tahun 2020 adalah 100%, baik dari APBD, APBN dan Propinsi, dengan rincian :
 - a. Dari APBN
 - Bantuan program keluarga harapan sebanyak 84 orang
 - b. Dari APBD
 - Bantuan sembako untuk 500 orang lansia di Kota Bukittinggi dan juga dilakukan pembinaan terhadap 350 orang lansia miskin produktif untuk pengembangan usahanya
 - Bantuan dari hibah dan bansos IPSM sebanyak 180 orang
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
 Rehabilitasi sosial dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis pada tahun 2017 berupa Razia Gelandangan dan

Pengemis.Gelandangan dan Pengemis yang terjaring Razia kemudian dilakukan pembinaan dan penyuluhan dari Kemenag, Kepolisian dan Pekerja Sosial.

Pada Tahun 2029, Dinas Sosial tidak lagi melaksanakan kegiatan tersebut, karena kegiatan tersebut sudah terakomodir dalam kegiatan SK4 pada Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terealisasi secara maksimal (100%).

Pada tahun 2019 terjadi bencana alam longsor tebing, banjir dan bencana sosial kebakaran. Masyarakat terkena dampak yang dilaporkan kelurahan adalah sebanyak 211 KK atau 790 Jiwa, yang masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makan harian selama masa tanggap darurat dan pemberian matras, serta family kit bagi korban bencana.

Uraian bencana yang terjadi pada tahun 2020 antara lain :

- Korban bencana sosial, kebakaran sebanyak 27 KK atau 690 jiwa
- Korban bencana alam, banjir, dll sebanyak 184 KK atau 100 jiwa

2.6 Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

Evaluasi capaian kinerja pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dilihat melalui capaian kinerja Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur pencapaian sasaran strategis. Capaian Kinerja RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 terlihat pada tabel berikut.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2019

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan 14 sasaran strategis dengan 22 Indikator Kinerja Utama dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sasaran strategis beserta indikator serta target dan realisasinya terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.148.
Hasil Pengukuran Kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	1	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	2%	2,39%	119,5%
2	Terlaksanya reformasi birokrasi	2	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
		3	Peringkat LPPD	35	27	122,86%
		4	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
			daerah			
		5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75%	85,03%	113,37%
		6	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,1336	0,1524	114,07%
3	Terpenuhinya RTH Kota	7	Persentase RTH Publik	17%	8,4%	49,41,7%
4	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	8	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	75%	88,12%	117,49%
5	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	9	Cakupan akses air minum layak	95%	88,68%	93,34%
		10	Luas Kawasan Kumuh	0 ha	0 ha	100%
		11	Persentase sanitasi layak	100%	96,39%	96,39%
6	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	12	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	70%	80,13%	114,47
7	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	13	Pertumbuhan ekonomi	6,40%	5,88%	91,87
		14	PDRB Perkapita	54,50 juta	66,52	122,06%
		15	Indeks Gini	<0,3	0,267	100%
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	16	Tingkat Kemiskinan	3,35%	4,6%	62,69%
9	Meningkatkan pelayanan pariwisata	17	Kunjungan Wisatawan	588.245	584.785	99,41%
10	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	18	Harapan lama sekolah	15 tahun	14,96 tahun	99,73%
11	Meningkatkan kualitas pendidikan	19	Angka Rata-rata lama sekolah	11,20 Tahun	11,32 tahun	101,67%
12	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	20	Angka Harapan Hidup	73 tahun	74,22 tahun	101,67%
13	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	21	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	80%	100%	125%
14	Terkendalinya jumlah penduduk	22	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,45	1,55	93,11%

Sumber : LKIP Kota Bukittinggi Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 22 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 14 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 107,21%. Beberapa indikator kinerja yang kurang memenuhi target adalah terkait dengan persentase RTH Publik dan tingkat kemiskinan. Capaian kinerja untuk persentase RTH Publik hanya 49,41%, masih sangat jauh dibawah target tahun 2019 sebesar 17%. Jika mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang meliputi 20 (dua puluh) persen Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 (sepuluh) persen Ruang Terbuka Hijau Privat.

Luas RTH Kota bukittinggi pada tahun 2019 adalah 212,163 Ha (8,4%) dari luas RTH yang seharusnya tersedia yaitu sebesar 506 Ha (20%). Sehingga untuk persyaratan luas minimal 20 (dua puluh) persen RTH Publik dari luas wilayah yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang belum tercapai. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M2008 bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbagi dua, yaitu :

- a. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- b. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Penyebab tidak tercapainya target capaian persentase RTH Publik dikarenakan kawasan yang seharusnya menjadi RTH dalam kondisi terbangun sehingga hal ini menjadi kendala dalam penambahan luas kawasan RTH. Disamping itu, lahan untuk pembangunan dan penambahan luas RTH yang sulit disediakan di Kota Bukittinggi. Penyebab lain yang membuat tidak tercapainya target adalah karena sebagian lahan yang berpotensi untuk diplot sebagai RTH adalah tanah kaum sehingga dibutuhkan pembahasan/negosiasi yang panjang dengan tokoh masyarakat untuk menyepakati suatu area untuk dijadikan RTH publik. Harga tanah yang tinggi di kota Bukittinggi juga merupakan faktor pendorong kegagalan pencapaian target pemenuhan RTH publik karena keterbatasan APBD untuk pembelian tanah dimaksud.

Indikator kinerja utama lainnya yang belum mencapai target adalah penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Pada tahun 2019 realisasi kinerja untuk tingkat kemiskinan sebesar 4,6% masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,35%. Capaian indikator Tingkat Kemiskinan sejak awal RPJMD masih belum dicapai. Namun hingga tahun 2019, angka capaian tiap tahunnya terus bergerak turun dan mengikuti target capaian dengan realisasi melebihi angka 50% ditiap tahunnya. Angka ini didominasi oleh penduduk rentan miskin yang perlu diintervensi dengan program pemberdayaan.

Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan terus muncul sebagai sebab ataupun akibat dari pemberat berbagai jenis persoalan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Belum tercapainya penurunan angka kemiskinan sesuai target adalah karena intervensi penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran. Disamping itu, semua pihak termasuk SKPD yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan belum bersinergi dengan baik sehingga masih ada program yang tumpang tindih dalam pelaksanaan intervensi.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2020

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan 23 sasaran strategis dengan 29 Indikator Kinerja Utama dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sasaran strategis beserta indikator serta target dan realisasinya terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149.
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
1	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100 %	89.24%	89.24%
2	Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	2	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	5	2.63%	52.6 %
3	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	100	0	0%
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan	4	Nilai SAKIP	A	BB	95 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
	Pemerintahan	5	Nilai EKPPD	3.365	3.2293	96.08 %
5	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100 %
		7	Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK	1	-	0%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	80	81.70	103.58%
7	Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	9	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	13.7	8.33	60.78 %
8	Peningkatan Kualitas Jalan	10	Indeks Jalan Mantap	100	89	89 %
9	Peningkatan Kualitas Air Minum	11	Indeks Air Minum Layak	95	88.68	93.34 %
10	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	12	Indeks Akses Sanitasi Layak	100	82,17	82,17%
		13	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	99.80	97.43	97.62 %
11	Peningkatan Kepemilikan Rumah	14	Indeks Kepemilikan Rumah	71.56	34.4	48.07 %
12	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	15	Indeks Kualitas Air	83.98	47.33	56.47 %
13	Meningkatnya Kualitas Udara	16	Indeks Kualitas Udara	88.37	83.54	94.53 %
14	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67.46	37.11	55.01 %
15	Peningkatan Pelayanan Transportasi	18	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80	86.03	107.53 %
		19	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	160	59	134.7 %
16	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer	20	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	3.48	-31.084	-9.3 %
17	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder	21	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6.35	-2.6	-41.26 %
18	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier	22	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9.57	-2.9	-30.3 %
19	Penurunan Kemiskinan	23	Tingkat Kemiskinan	3.35	4.45	67.17 %
20	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	24	Harapan Lama Sekolah	14.9	14.95	100.06 %
		25	Angka Rata Rata Lama Sekolah	11.33	11.33	100 %
21	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	26	Usia Harapan Hidup	74.52	74.38	99.81 %
22	Mewujudkan Pembangunan Ramah	27	Indek Pemberdayaan Gender	73.84	60.99	82.59 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
	Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas	28	Indeks Ramah Disabilitas	75	85.16	119.94 %
23	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29	Angka Kriminalitas	435	109	175.5 %

Sumber : LKIP Kota Bukittinggi Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, beberapa capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2020 belum mencapai target terutama yang terkait dengan perekonomian daerah. Hal ini secara umum disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Kota Bukittinggi yang berdampak terhadap perekonomian daerah. Pada saat pandemi Covid-19 melanda, seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat termasuk Kota Bukittinggi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan pembatasan ini, Kota Bukittinggi yang perekonomiannya tergantung pada tingkat kunjungan mendapat dampak yang cukup besar. Indikator kinerja yang tidak mencapai target sebagai terdampak pandemi Covid-19 adalah pertumbuhan PDRB baik sektor primer, sekunder maupun tersier dan rasio pembiayaan yang bersumber dari masyarakat.

Indikator Kinerja Utama lain yang belum memenuhi target adalah Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan penilaian terhadap 2 (dua) SKPD 2 (dua) SKPD yang diusulkan sebagai SKPD penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai implementasi Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Usulan penilaian masih dalam tahapan proses dan menunggu konfirmasi dari KemenPAN dan RB karena salah satu persyaratan mutlak bagi SKPD yang diajukan untuk penialain WBK adalah progress penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan harus 100 % selesai. Namun karena 2 SKPD yang diusulkan ini masih belum bisa menyelesaikan progres tindaklanjut hasil pemeriksaan ini, maka tidak dapat melangkah ke proses penilaian selanjutnya. Telah dilakukan asistensi dan pendampingan terhadap SKPD yang diusulkan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan penilaian WBK terutama terkait penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan tetapi tidak dapat dipenuhi tepat waktu karena terdapat beberapa temuan yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya.

Daftar isi

2	BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1	Aspek Geografis dan Demografi	1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	1
2.1.2	Penggunaan Lahan	11
2.1.3	Potensi Pengembangan Wilayah	13
	Pusat Pelayanan Kota – Fungsi Sekunder	13
2.1.4	Wilayah Rawan Bencana	15
2.1.5	Demografi.....	21
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	22
2.2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	23
2.2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	28
2.2.3	Laju Inflasi	29
2.2.4	PDRB Perkapita	30
2.2.5	Indeks Gini	31
2.2.6	Penduduk Miskin.....	32
2.2.7	Indeks Pembangunan Manusia	35
2.2.8	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	37
2.3	Aspek Pelayanan Umum.....	41
2.3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	42
2.3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	51
2.3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	59
2.3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 67	
2.3.5	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 69	
2.3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	74
2.3.7	Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja.....	76
2.3.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 78	
2.3.9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.....	79
2.3.10	Pertanahan.....	81
2.3.11	Lingkungan Hidup	82
2.3.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	94
2.3.13	Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	95
2.3.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 97	
2.3.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.....	98
2.3.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	102
2.3.17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	103
2.3.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	107
2.3.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	109
2.3.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.....	111
2.3.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	112
2.3.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	112
2.3.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	118
2.3.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	121
2.3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.....	122
2.3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.....	124
2.3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.....	127
2.3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	128
2.3.29	Perencanaan.....	129
2.3.30	Keuangan.....	129
2.3.31	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	130
2.3.32	Penelitian dan Pengembangan	132

2.3.33	Pengawasan	133
2.3.34	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	133
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	134
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	134
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	136
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	137
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	139
2.5	Standar Pelayanan Minimal	141
2.6	Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021.....	151
3	Daftar isi	157
4	DAFTAR TABEL	158
5	Daftar Gambar	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi	2
Tabel 2.2. Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya	5
Tabel 2.3. Sungai/ Batang yang Melalui Bukittinggi	7
Tabel 2.4. Curah Hujan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	11
Tabel 2.5. Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)	11
Tabel 2.6. Arahan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Bukittinggi	13
Tabel 2.7. Arahan Pengembangan Pariwisata Kota Bukittinggi	15
Tabel 2.8. Sejarah Kejadian Bencana di Kota Bukittinggi Tahun 2000–2018	16
Tabel 2.9. Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Bukittinggi.....	17
Tabel 2.10. Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor	17
Tabel 2.11. Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Bukittinggi	18
Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 s.d. 2020	21
Tabel 2.13. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	22
Tabel 2.14. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020 (dalam juta rupiah)	25
Tabel 2.15. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020 (dalam juta rupiah).....	26
Tabel 2.16. Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Bukittinggi Tahun 2010 dan 2020	27
Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukitinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016 s.d. 2020	28
Tabel 2.18. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d. 2020	29
Tabel 2.19. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	31
Tabel 2.20. Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	32
Tabel 2.21. Penduduk Miskin Kota Bukittinggi	33
Tabel 2.22. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	33
Tabel 2.23. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berkurangnya Kesenjangan	34
Tabel 2.24. Perbandingan IPM Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.25. Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Bukittinggi	39
Tabel 2.26. Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bukittinggi.....	39
Tabel 2.27. Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kota Bukittinggi	40
Tabel 2.28. Indikator Pada Setiap TPB/SDGs yang Tidak Memiliki Data di Kota Bukittinggi.....	41
Tabel 2.29. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020	42
Tabel 2.30. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	43
Tabel 2.31. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan APK PAUD	43
Tabel 2.32. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi	44

Tabel 2.33. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Proporsi Sekolah Berakreditasi Minimal B.....	45
Tabel 2.34. Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020.....	45
Tabel 2.35. Angka Melanjutkan (AM) dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2016 s.d. 2020	46
Tabel 2.36. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	46
Tabel 2.37. Ketersediaan Sekolah, Penduduk Usia Sekolah dan Rasio Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	47
Tabel 2.38. Jumlah Guru, murid dan Rasio Guru Jenjang Pendidikan Dasar Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	49
Tabel 2.39. Angka Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi	51
Tabel 2.40. Angka Kematian Bayi Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	52
Tabel 2.41. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Bayi Tahun 2016 s.d 2020	52
Tabel 2.42. Angka Kematian Ibu Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	53
Tabel 2.43. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020.....	54
Tabel 2.44. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Balita dan Gizi Ibu Hamil	54
Tabel 2.45. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Bukittinggi	56
Tabel 2.46. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2016 s.d. 2020.....	56
Tabel 2.47. Jumlah Dokter/ Tenaga Medis di Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020	57
Tabel 2.48. Jumlah Dokter dan Jumlah Penduduk Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	58
Tabel 2.49. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk Tahun 2016 s.d. 2020.....	58
Tabel 2.50. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait kesehatan Masyarakat.....	59
Tabel 2.51. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	60
Tabel 2.52. Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	61
Tabel 2.53. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan.....	62
Tabel 2.54. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan.	63
Tabel 2.55. Rasio Tempat Ibadah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	64
Tabel 2.56. Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020.....	64
Tabel 2.57. Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Tahun 2016.d 2020 Kota Bukittinggi	65
Tabel 2.58. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan Tahun 2016 s.d 2019 Kota Bukittinggi	66
Tabel 2.59. Rasio Rumah Layak Huni Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020.....	67
Tabel 2.60. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020	68
Tabel 2.61. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	68
Tabel 2.62. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	69
Tabel 2.63. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tahun 2016-2020.....	70
Tabel 2.64. Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan dan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	71
Tabel 2.65. Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dan jumlah Pelanggaran PERDA.....	72
Tabel 2.66. Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	73
Tabel 2.67. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	74
Tabel 2.68. Data PPKS Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	75
Tabel 2.69. Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi	76
Tabel 2.70. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan	77
Tabel 2.71. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang..	77
Tabel 2.72. Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	78
Tabel 2.73. Capaian Kota layak Anak Kota Bukittinggi.....	79

Tabel 2.74. Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	80
Tabel 2.75. Skor Pola Pangan Harapan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	81
Tabel 2.76. Capaian kinerja urusan Pertanahan Tahun 2016 s/d 2020	82
Tabel 2.77. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	83
Tabel 2.78. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d. 2020	84
Tabel 2.79. Daerah Pelayanan Sektor Persampahan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	84
Tabel 2.80. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	85
Tabel 2.81. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Bukittinggi	87
Tabel 2.82. Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Penyediaan Pangan Menurut Kecamatan	91
Tabel 2.83. Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Penyediaan Air Bersih Menurut Kecamatan.....	92
Tabel 2.84. Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Pencegahan dan Perlindungan Menurut Kecamatan.....	92
Tabel 2.85. Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Menurut Kecamatan	93
Tabel 2.86. Daya Dukung Kota Bukittinggi dalam Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism Menurut Kecamatan	93
Tabel 2.87. Jumlah Penduduk yang telah memiliki KTP dan Jumlah Penduduk Wajib KTP Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020	94
Tabel 2.88. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.....	95
Tabel 2.89. Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	95
Tabel 2.90. Jumlah LSM Tahun 2016 s.d. 2020 di Kota Bukittinggi.....	96
Tabel 2.91. Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016 s.d 2020	97
Tabel 2.92. Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	98
Tabel 2.93. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	99
Tabel 2.94. Rasio Izin Trayek Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	100
Tabel 2.95. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	101
Tabel 2.96. Jumlah Terminal Bis Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	101
Tabel 2.97. Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	101
Tabel 2.98. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	102
Tabel 2.99. Cakupan Pengembangan KIM Tahun 2020	103
Tabel 2.100. Perkembangan Koperasi Aktif Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	104
Tabel 2.101. Jumlah Unit dan Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 .	105
Tabel 2.102. Rata-rata pertumbuhan Industri Kecil Kota Bukittinggi Tahun 2010-2020	106
Tabel 2.103. Jumlah BPR / LKM Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	107
Tabel 2.104. Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	108
Tabel 2.105. Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2020 Kota Bukittinggi	109
Tabel 2.106. Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	110
Tabel 2.107. Jumlah Klub/ Persatuan Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	110
Tabel 2.108. Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	112
Tabel 2.109. Pemanfaatan Persandian Tahun 2020	112
Tabel 2.110. Kelompok Seni Tradisional Yang Ada di Kota Bukittinggi	113
Tabel 2.111. Festival Seni dan Budaya yang Diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	114
Tabel 2.112. Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi ...	115
Tabel 2.113. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020	117
Tabel 2.114. Jumlah Perpustakaan Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	118
Tabel 2.115. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	119
Tabel 2.116. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020	119
Tabel 2.117. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020	120
Tabel 2.118. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	120
Tabel 2.119. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi.....	121

Tabel 2.120. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	121
Tabel 2.121. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020....	122
Tabel 2.122. Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016 s.d. 2020.....	123
Tabel 2.123. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2016 s.d. 2020	123
Tabel 2.124. Produktivitas Padi Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	124
Tabel 2.125. Produktivitas Jagung Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019.....	125
Tabel 2.126. Produktivitas Ketela Rambat Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	125
Tabel 2.127. Produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	126
Tabel 2.128. Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.....	126
Tabel 2.129. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2016 s.d. 2020	127
Tabel 2.130. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 s.d. 2020.....	128
Tabel 2.131. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Kota Bukittinggi Tahun 2016 -2020	128
Tabel 2.132. Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020	129
Tabel 2.133. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	130
Tabel 2.134. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Bukittinggi Tahun 2020	131
Tabel 2.135. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi	131
Tabel 2.136. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	132
Tabel 2.137. Indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020	132
Tabel 2.138. Indikator Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2016 s.d. 2020	133
Tabel 2.139. Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020	133
Tabel 2.140. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi.....	135
Tabel 2.141.	135
Tabel 2.142. Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020	136
Tabel 2.143. Rasio Luas Wilayah Produktif dan Luas Seluruh Wilayah Budidaya	137
Tabel 2.144. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020 ...	138
Tabel 2.145. Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi	140
Tabel 2.146. Rasio Ketergantungan Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	140
Tabel 2.147. Capaian SPM Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	142
Tabel 2.148. Hasil Pengukuran Kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2019	151
Tabel 2.149. Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	154

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bukittinggi.....	4
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Bukittinggi	8
Gambar 2.3. Peta Geologi Kota Bukittinggi	9
Gambar 2.4. Peta Hidrologi Kota Bukittinggi	10
Gambar 2.5. Distribusi Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Persentase)	12
Gambar 2.6. Peta Goncangan Tanah Kota Bukittinggi	20
Gambar 2.7. Sektor yang Berkontribusi Besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2020	23
Gambar 2.8. Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Bukittinggi hingga Tahun 2030	27
Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2020	30
Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2020 ...	30
Gambar 2.11. Proyeksi PDRB Perkapita Kota Bukittinggi.....	32
Gambar 2.12. Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi	33
Gambar 2.13. Perbandingan Peringkat IPM Kota Bukittinggi Tahun 2013 dan 2019	36
Gambar 2.14. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi	36
Gambar 2.15. Proyeksi APK SD/MI dan SMP/MTs Kota Bukittinggi	43
Gambar 2.16. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020	50
Gambar 2.17. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2016-2020	71
Gambar 2.18. Tren Jumlah Industri Kecil Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020.....	106

No table of figures entries found.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pemerintah Kota Bukittinggi berkewajiban pengelola keuangan daerah tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pembahasan tentang gambaran umum keuangan daerah berhubungan dengan analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai tentang sumber Pendapatan Daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk memahami kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu analisis kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa datang.

3.1 KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016-2020

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, serta kondisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas (Modal). Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah. Dari Laporan Realisasi Anggaran dapat dinilai perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, termasuk kebijakan dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut. Dari Neraca Pemerintah Daerah dapat dianalisis kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi Utang melalui analisis perkembangan elemen utama Aset Daerah, Kewajiban Daerah, dan Ekuitas Daerah, serta menggunakan rasio-rasio keuangan.

Dalam periode analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Bukittinggi 2016-2020, terjadi 3 perubahan/kejadian mendasar yang berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah. Perubahan pertama tahun 2017 sehubungan dengan pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota karena pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan. Pengurangan kewenangan tersebut mengakibatkan pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Bukittinggi. Selanjutnya pengurangan ini mengakibatkan penurunan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU), karena jumlah PNS merupakan salah satu variabel penentuan besaran DAU.

Pademi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 berpengaruh besar terhadap pelaksanaan APBD; tidak hanya penyesuaian jumlah DAU yang diterima daerah tetapi juga kebijakan *refocusing* Belanja Daerah. Perubahan ketiga adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan, antara lain dalam klasifikasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Analisis dampak Pademi COVID-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan penurunan PAD yang cukup signifikan, yaitu Rp27.808,93 juta dibandingkan tahun 2019. Jika dianalisis lebih rinci, penurunan ini terutama karena adanya pembatasan aktivitas dan wisatawan sehingga jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi mengalami penurunan signifikan. Akibatnya, tingkat hunian dan pendapatan Hotel mengalami penurunan drastis, selanjutnya mengakibatkan Pajak Hotel yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi juga turun signifikan. Hal yang sama juga terjadi terhadap beberapa objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya. Penurunan beberapa objek PAD utama yang jumlahnya lebih dari Rp1 miliar dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Penurunan Pendapatan Objek PAD Utama (>Rp 1 miliar)
Tahun 2020 Dibanding Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp Juta)	Persen
1	Pajak Hotel	6.455,54	44,67
2	Pajak Restoran	1.388,48	20,17
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.556,93	56,52
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.031,27	53,65
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.019,55	50,77
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.465,05	29,24
7	Penerimaan Jasa Giro	1.689,77	16,50
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	5.371,21	100,00

Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Bukittinggi mempertimbangkan perubahan kondisi yang terjadi tahun 2017 dan tahun 2020. Jumlah dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
A	PENDAPATAN DAERAH						
1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	30.709,69	38.282,14	45.131,25	45.204,12	35.857,03	3,95
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.070,50	27.329,45	29.942,90	33.125,47	21.833,60	0,89

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.636,54	4.953,91	4.935,91	6.071,91	6.331,96	8,10
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	14.887,05	31.810,43	21.926,73	27.495,10	20.065,07	7,75
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	71.303,78	102.375,93	101.936,79	111.896,60	84.087,66	4,21
2.	Dana Perimbangan						
2.1	Bagi Hasil Pajak	14.473,75	14.428,38	11.132,50	7.567,43	13.375,20	(1,95)
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	654,55	1.091,77	1.457,70	1.578,24	1.948,43	31,35
2.3	Dana Alokasi Umum	458.968,48	450.905,88	450.905,88	464.187,53	429.026,32	(1,67)
2.4	Dana Alokasi Khusus	36.926,03	20.827,20	21.067,91	41.148,70	21.016,69	(13,14)
2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	36.807,06	28.975,64	38.497,88	37.582,02	38.141,52	0,89
	Jumlah Dana Perimbangan	547.829,87	516.228,87	523.061,87	552.063,92	503.508,16	(2,09)
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
3.1	Pendapatan Hibah	-	1.000,00	14.738,72	14.981,80	20.040,92	171,63
3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	22.912,07	26.270,09	27.604,69	29.151,15	25.459,10	2,67
3.3	Dana Penyesuaian	5.000,00	7.500,00	28.250,00	26.013,22	56.127,08	83,04
3.4	Bantuan Keuangan			-			
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.912,07	34.770,09	70.593,41	70.146,18	101.627,10	38,14
	Jumlah Pendapatan Daerah	647.045,72	653.374,89	695.592,07	734.106,70	689.222,92	1,59
B	BELANJA DAERAH						
1.	Belanja Tidak Langsung						
1.1	Belanja Pegawai	336.101,76	249.390,76	284.870,09	362.187,75	284.967,68	1,75
1.2	Belanja Hibah	11.063,43	11.813,56	16.165,52	12.651,15	37.699,08	35,87
1.3	Belanja Bantuan Sosial	1.333,69	1.244,14	1.655,93	2.834,16	417,55	(10,26)
1.4	Belanja Tidak Terduga	-	1.742,36	16,22	97,09	31.485,49	162,42
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	511,98	597,13	1.467,82	559,30	706,06	8,37
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	349.010,85	264.787,96	304.175,58	378.329,46	355.265,86	5,42
2.	Belanja Langsung						
2.1	Belanja Pegawai	49.860,24	50.967,34	39.801,21	-	35.993,08	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.375,61	160.938,55	183.263,49	150.771,65	156.083,98	(6,37)
2.3	Belanja Modal	80.926,57	113.994,19	178.010,82	187.986,46	249.317,61	32,48
	Jumlah Belanja Langsung	282.162,42	325.900,08	401.075,52	338.758,11	441.394,68	6,70
	Jumlah Belanja Daerah	631.173,28	590.688,03	705.251,10	717.087,57	796.660,54	5,99
	Jumlah Surplus/Defisit	15.872,45	62.686,85	(9.659,04)	17.019,13	(107.437,62)	
C	PEMBIAYAAN DAERAH						
1.	Penerimaan Pembiayaan	88.463,14	79.573,56	110.574,32	97.049,48	206.823,64	23,65
1.1	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	88.463,14	79.573,56	84.420,18	88.590,32	107.773,84	5,06
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	26.154,14	8.459,16	99.049,80	94,61
2.	Pengeluaran Pembiayaan	23.200,00	57.127,13	5.000,00	-	-	
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000,00	43.127,13	-	-	-	
2.2	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintahan Daerah	8.200,00	14.000,00	5.000,00	-	-	
	Pembiayaan Netto	65.263,14	22.446,42	105.574,32	97.049,48	206.823,64	33,42
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	81.135,59	85.133,28	95.915,28	114.068,61	99.386,03	5,20

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kota Bukittinggi berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun cukup baik, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,30% per tahun, yaitu dari Rp647.045,72 juta tahun 2016 menjadi Rp734.106,70 juta tahun 2019. Namun, Pendapatan Daerah tahun 2020 turun menjadi Rp689.222,92 juta. Penurunan ini terutama disebabkan dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 tersebut.

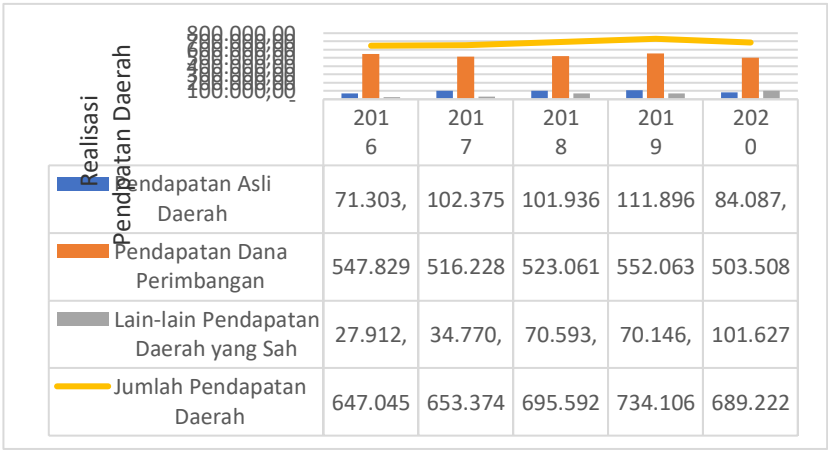
Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu dari Rp71.303,78 juta tahun 2016 menjadi Rp102.375,93 juta tahun 2017, dan tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan yang relatif stabil sehingga tahun 2019 berjumlah Rp111.896,60 juta. Namun, tahun 2020 turun menjadi Rp84.087,66 juta. Secara keseluruhan, dalam 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 4,21%.

Dalam periode yang sama, Pendapatan Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih rendah. Pendapatan Dana Perimbangan tahun 2016 adalah Rp547.829,87 juta dan turun menjadi Rp516.228,87 juta tahun 2017. Penurunan Pendapatan Dana Perimbangan ini terjadi karena pengurangan kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seperti urusan pendidikan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan lainnya. Pendapatan Dana Perimbangan tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan sehingga tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi Rp552.063,92 juta. Tetapi karena kebijakan refocusing Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, maka Pendapatan Dana Perimbangan tahun 2020 turun menjadi Rp503.508,16 juta.

Terdapat 2 kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Dana Perimbangan, yaitu pengurangan kewenangan dan dampak pademi COVID-19. Oleh sebab itu, laju pertumbuhan dapat dilihat tahun 2016-2020 dan tahun 2017-2019. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar minus 2,09%, sedangkan laju pertumbuhan periode tahun 2017-2019 yang bebas dari 2 kondisi di atas adalah 3,41%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Dana Penyesuaian, sehingga pada tahun-tahun tersebut terjadi peningkatan yang signifikan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 adalah Rp27.912,07 juta dan meningkat menjadi Rp85.332,13 juta tahun 2018, dan juga meningkat menjadi Rp101.627,10 juta tahun 2020. Secara keseluruhan, dalam 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 38,14%. Jumlah dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut :

Gambar 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (Rp juta)



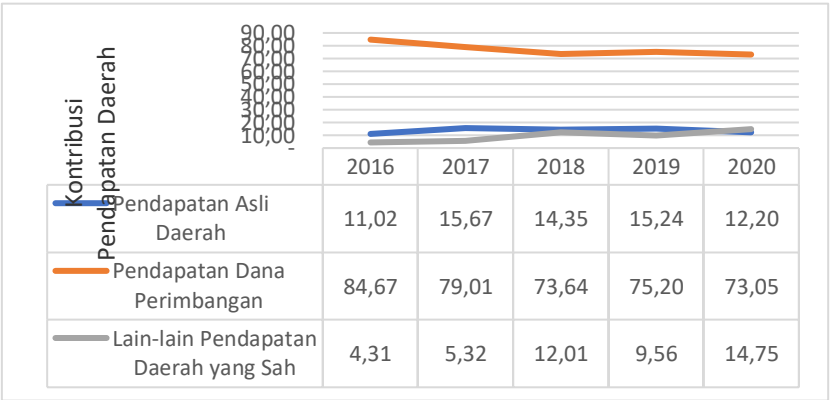
Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang lebih tinggi dibandingkan sumber Pendapatan Daerah lainnya sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan kontribusi PAD terhadap sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi lainnya sedikit mengalami peningkatan. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2016 adalah 11,02% dan tahun 2017 naik menjadi 15,67% dan turun signifikan menjadi 12,20% tahun 2020.

Sebaliknya, kontribusi pendapatan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari 84,67% tahun 2016 menjadi 75,20 pada tahun 2019, dan turun lebih signifikan menjadi 73,05% tahun 2020. Penurunan kontribusi Dana Perimbangan ini diikuti dengan peningkatan kontribusi Dana Penyesuaian tahun 2018 dan tahun 2020.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam 5 tahun terakhir sangat berfluktuasi. Akibatnya, kontribusinya pun berfluktuasi. Kontribusi terendah terjadi tahun 2016 yaitu sebesar 4,31%, dan meningkat menjadi 10,15% tahun 2018 dan menjadi 14,75% tahun 2020. Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.2 berikut :

Gambar 3.2
Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Pajak Daerah. Perkembangan Pajak Daerah relatif stabil; secara rata-rata selama periode 2016-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 13,75% per tahun, yaitu dari Rp30.709,69 juta tahun 2016 menjadi Rp45.204,12 juta tahun 2019. Namun tahun 2020, mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp35.857,03 juta, atau mengalami penurunan sebesar 20,68% dari tahun sebelumnya. Penyebab utama penurunan penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 ini adalah dampak pandemi COVID-19.

Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah ini juga mengalami pertumbuhan relatif stabil, tetapi juga mengalami penurunan yang signifikan tahun 2020. Jika tahun 2016 jumlah Retribusi Daerah ini adalah Rp21.070,50 juta dan meningkat tahun-tahun berikutnya sehingga tahun 2019 menjadi

Rp33.125,47 juta. Namun tahun 2020 jumlah Pendapatan Retribusi Daerah ini turun sebesar 34,09% dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi Rp21.833,60 juta tahun 2020. Penyebab utama penurunan tahun 2020 ini adalah dampak pandemi COVID-19 karena beberapa pelayanan tidak dapat dilaksanakan sehingga retribusi tidak dapat dihasilkan, seperti pelayanan objek rekreasi.

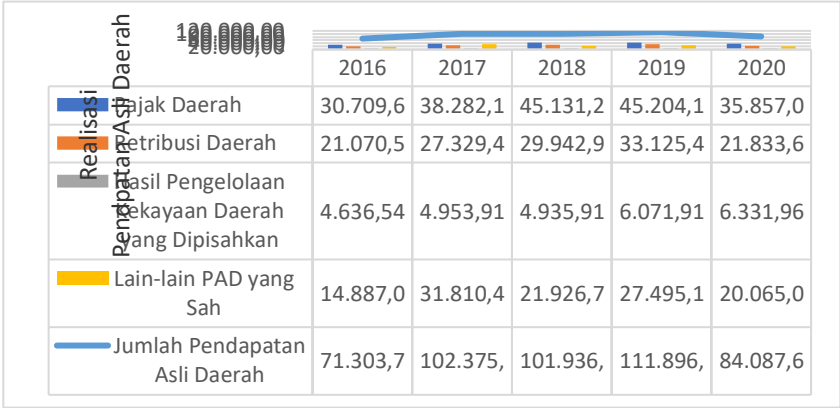
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Bukittinggi masih relatif kecil namun mengalami perkembangan yang signifikan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp4.636,54 juta tahun 2016 menjadi Rp6.331,96 juta tahun 2020. Berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8.10%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal Bank Nagari dan juga PT BPR Jam Gadang.

Sumber PAD yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah relatif stabil, karena dari tahun 2016-2020 selalu menunjukkan perkembangan. Jika tahun 2016 jumlah Lain-lain PAD yang Sah berjumlah Rp14.887,05 juta dan meningkat menjadi Rp20.065,07 juta tahun 2020. Salah satu sumber Lain-lain PAD yang Sah yang memberikan peningkatan tahun 2017 dan tahun 2019 antara lain kebijakan yang tegas dari Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengenakan denda terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melanggar kewajiban yang ditetapkan, serta penegakkan disiplin dalam pengadaan barang dan jasa serta denda lainnya.

Kenaikan yang signifikan tahun 2017 disebabkan kebijakan penegakkan disiplin sehingga dikenakan denda kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak pembayaran, serta perlakuan akuntansi terhadap Pendapatan Dana Bos yang dicatat sebagai bagian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Akan tetapi pada tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya, pendapatan Dana Bos ini diperlakukan sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Dana Bos tahun 2017 tersebut Rp16.232,86 juta, sedangkan penegakkan disiplin kerja denda Pajak Daerah Rp259,34 juta, denda Retribusi Daerah Rp55.25 juta, dan pengembalian Belanja Rp946,36 juta

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan tahun 2019. Hal ini terjadi karena penegakkan disiplin atau knerja rekanan sehingga dilakukan Eksekusi atas Jaminan Rp5.371,21 juta dan peningkatan Penerimaan Jasa Giro Rp5.962,40 juta. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.3 berikut:

Gambar 3.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (Rp juta)

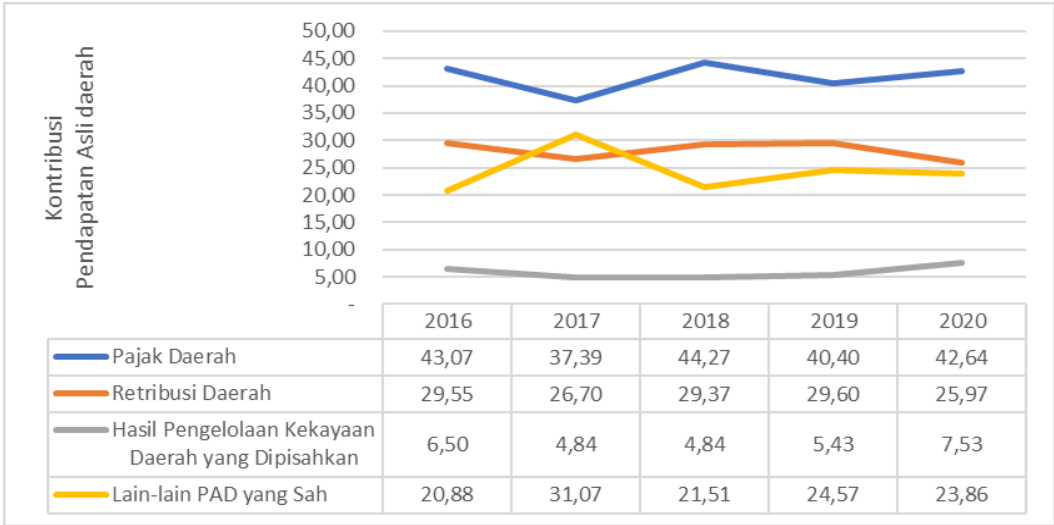


Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Analisis kontribusi masing-masing sumber PAD menunjukkan bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar tetapi mengalami fluktuasi. Kontribusi Pajak Daerah tahun 2016 adalah 43,07%, turun menjadi 37,39% tahun 2017, tetapi meningkat menjadi 44,27% tahun 2018. Namun kontribusi Pajak Daerah ini mengalami penurunan signifikan menjadi 40,40% tahun 2019, dan naik menjadi 42,64% tahun 2020. Kontribusi terbesar kedua adalah Retribusi Daerah, yang kontribusinya juga mengalami fluktuasi, yaitu dari 29,55% tahun 2016 menjadi 26,70% tahun 2017, kembali naik tahun 2018 dan 2019, tetapi kembali turun menjadi 25,97% tahun 2020.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan sumber PAD ketiga terbesar, yang mengalami peningkatan signifikan tahun 2017, dari 20,88% tahun 2016 menjadi 31,07% tahun 2017, tetapi tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga tahun 2020 kontribusinya menjadi 23,86%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami penurunan kontribusi, yaitu dari 6,50% tahun 2016 menjadi 5,43% tahun 2019, tetapi tahun 2020 kembali naik menjadi 7,53%. Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.4 berikut :

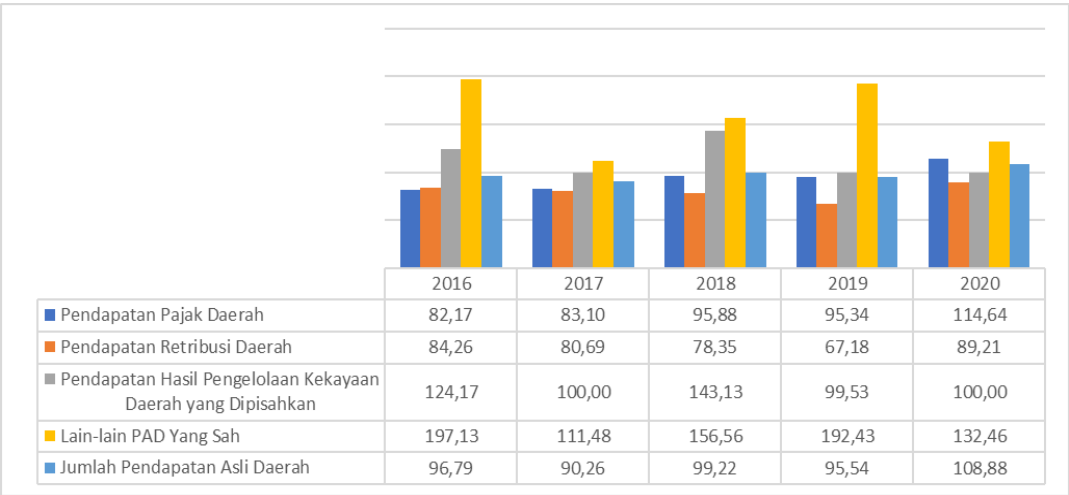
Gambar 3.4
Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran (efektifitas penerimaan) PAD Pemerintah Kota Bukittinggi tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 90,26%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2020 yaitu sebesar 108,88%. Jika dibandingkan efektifitas penerimaan sumber-sumber PAD tersebut, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memiliki tingkat efektifitas penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perkembangan efektifitas penerimaan PAD dapat dilihat pada Grafik berikut:

Gambar 3.5
Efektifitas Penerimaan PAD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Dana Perimbangan

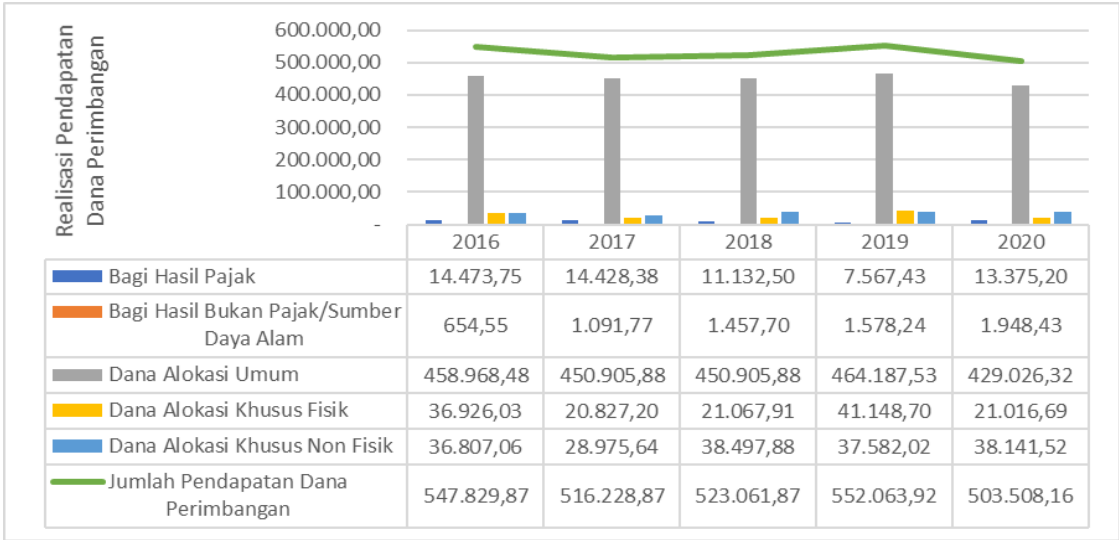
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Dana Perimbangan mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya karena pengurangan kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dari Rp547.829,87 juta tahun 2016 menjadi Rp516.228,87 juta tahun 2017. Selama 3 tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 3,41%, sehingga menjadi Rp552.063,92 juta tahun 2019. Tetapi, tahun 2020 turun menjadi Rp503.508,16 juta. Hal ini terjadi akibat kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 sehingga ada pengurangan Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penerimaan Dana Perimbangan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 minus 2,09%.

Analisis berdasarkan tingkat pertumbuhan menunjukkan bahwa DAK Fisik menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata minus tertinggi dibandingkan dengan 3 sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun DAK Fisik adalah minus 13,14%, yaitu dari Rp36.926,03 juta tahun 2016 menjadi Rp21.016,69 juta tahun 2020. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak turun dari Rp14.473,75 juta tahun 2016 menjadi Rp13.375,20 juta tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun minus 1,95%.

Sedangkan DAU merupakan pendapatan Dana Perimbangan yang memiliki pertumbuhan minus ketiga tertinggi, yaitu dari Rp458.968,48 juta tahun 2016 menjadi Rp429.026,32 juta tahun 2020, atau tumbuh minus 1,67% per tahun. Sedangkan pendapatan DAK non Fisik dan Dana Bagi Hasil Alam dan masih mengalami pertumbuhan positif, masing sebesar 0,89% dan 31,35%. Perkembangan Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bukittinggi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.6.

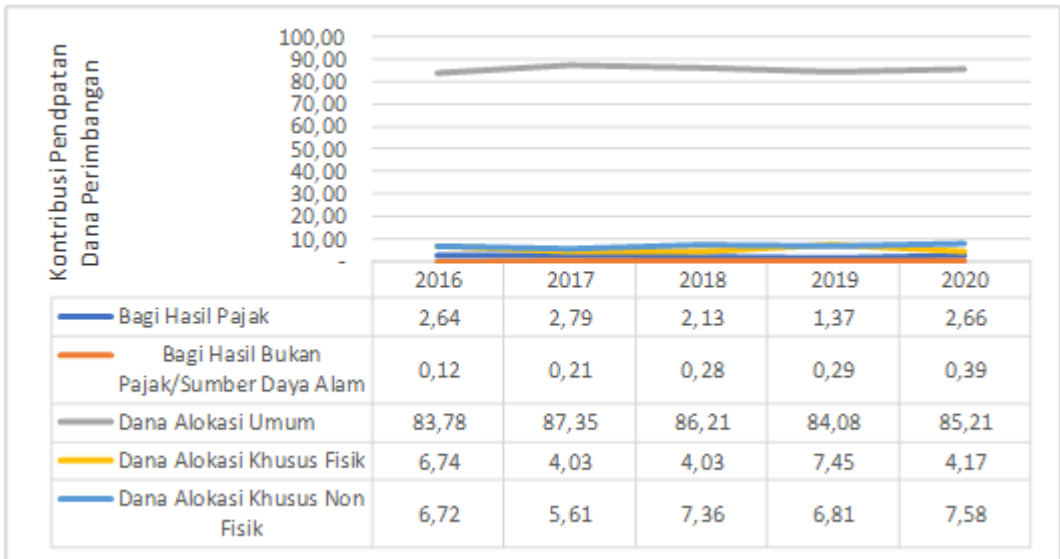
Jumlah pendapatan DAU jauh lebih besar dibandingkan sumber penerimaan Dana Perimbangan lainnya, sehingga perbedaan kontribusinya sangat signifikan. Tetapi jika dilihat pertumbuhan rata-rata per tahun, hanya kontribusi pendapatan DAK fisik yang menunjukkan pertumbuhan minus. Sedangkan 4 jenis pendapatan Dana Perimbangan lainnya masih memiliki pertumbuhan kontribusi yang positif. Perkembangan kontribusi jenis pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bukittinggi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.7.

Gambar 3.6
Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

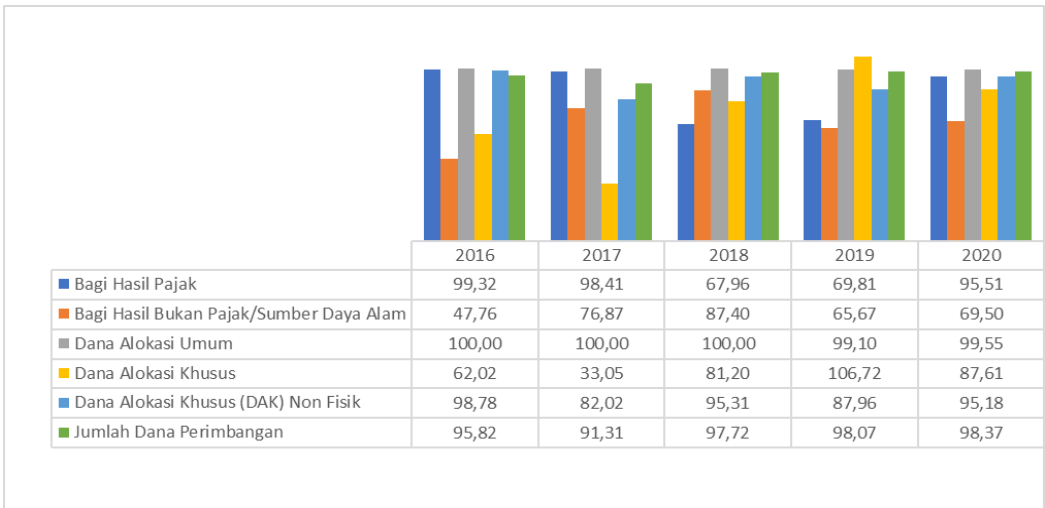
Gambar 3.7
Kontribusi Sumber Pendapatan Dana Perimbangan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bukittinggi tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 91,31%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2020 yaitu sebesar 98,37%. Jika dibandingkan efektifitas penerimaan sumber-sumber Dana Perimbangan tersebut, Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber Dana Perimbangan yang memiliki tingkat efektifitas penerimaan yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber Dana Perimbangan lainnya. Perkembangan efektifitas penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada Grafik berikut:

Gambar 3.8
Efektifitas Penerimaan Dana Perimbangan Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir juga mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Sumber penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Pendapatan Hibah. Dari ketiga sumber tersebut, Bagi Hasil Pajak Provinsi relatif mengalami perkembangan yang stabil, kecuali tahun 2020. Sedangkan 2 sumber lainnya sangat berfluktuasi. Pendapatan Dana Penyesuaian tahun 2016 berjumlah Rp5.000,00 juta, dan meningkat menjadi Rp28.250,00 juta tahun 2018, dan meningkat menjadi Rp56.127,08 juta tahun 2020.

Perkembangan jumlah pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2016 Rp22.912,07 juta dan meningkatkan menjadi Rp29.151,15 juta tahun 2019. Sejalan penurunan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tahun 2020 jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Pemerintah Kota Bukittinggi juga turun menjadi Rp25.459,10 juta. Secara keseluruhan, pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,69%.

Pendapatan Hibah yang diperoleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam 3 tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan. Jumlah Pendapatan Hibah yang diperoleh tahun 2018 berjumlah Rp14.738,72 juta dan meningkat menjadi Rp20.040,92 juta tahun 2020. Dengan demikian, dalam 3 tahun terakhir, jumlah Pendapatan Hibah tumbuh rata-rata per tahun 16,61%. Perkembangan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.9 berikut:

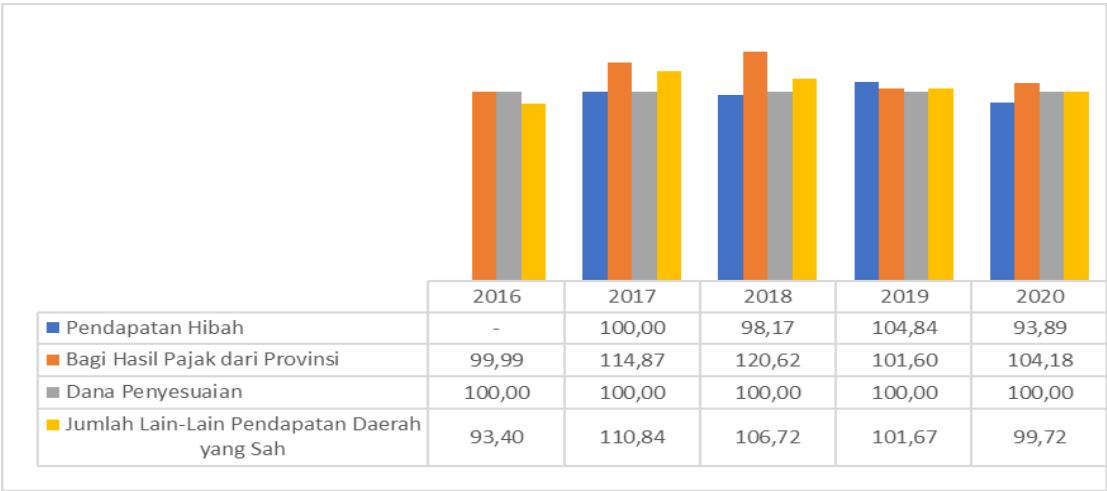
Gambar 3.9
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Analisis efektifitas penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 93,40%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2017 yaitu sebesar 110,84%. Kecuali Pendapatan Hibah, sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah lainnya di atas 100,00%. Perkembangan efektifitas penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada Grafik 3.10.

Gambar 3.10
Efektifitas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

2. Belanja Daerah

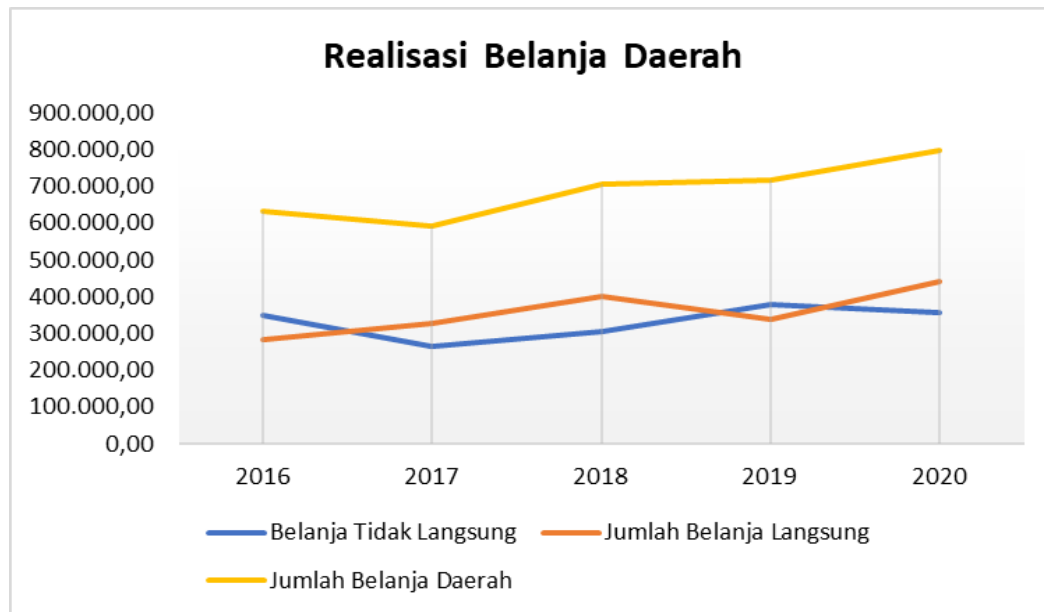
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung lebih fokus untuk pengeluaran/operasional rutin pemerintah daerah, dan tidak berhubungan dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Sedangkan Belanja Langsung berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, Belanja Daerah mengalami peningkatan yang berfluktuasi kecuali tahun 2017. Hal ini disebabkan karena implementasi perubahan kewenangan kota/kabupaten tahun 2017 untuk beberapa urusan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Perubahan ini mengakibatkan Belanja Daerah mengalami penurunan signifikan tahun 2017. Jumlah Belanja Daerah tahun 2016 adalah Rp631.173,28 juta dan turun menjadi Rp590.688,03 juta tahun 2017. Namun demikian, jumlah Belanja Daerah meningkat relatif besar menjadi Rp705.251,10 juta tahun 2018. Peningkatan yang besar juga terjadi tahun 2020, yaitu dari Rp717.087,57 juta tahun 2019 menjadi Rp796.660,54 juta tahun 2020.

Belanja Tidak Langsung tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Tidak Langsung tahun 2016 berjumlah Rp349.010,85 juta dan turun menjadi Rp264.787,96 juta tahun 2017. Tetapi, tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang stabil sehingga jumlah Belanja Tidak Langsung tahun 2020 Rp430.986,09 juta. Hal ini berarti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan rata-rata 5,42% per tahun.

Belanja Langsung mengalami perkembangan berfluktuasi. Jumlah Belanja Langsung tahun 2016 berjumlah Rp282.162,42 juta, meningkat menjadi Rp401.075,52 juta tahun 2018. Hal terutama karena adanya peningkatan yang jauh lebih besar untuk Belanja Modal. Namun Belanja Langsung turun menjadi Rp365.674,45 juta tahun 2020. Penurunan ini terjadi karena kebijakan Pemerintah untuk refocusing anggaran guna membantu mengatasi dampak pandemi COVID-19. Hal ini berarti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Belanja Langsung tumbuh rata-rata 6,70% per tahun. Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.11 berikut:

Gambar 3.11
Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Hal lain yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut adalah adanya perubahan proporsi jumlah belanja. Selama 2 tahun dalam kurun waktu tahun 2016-2020 yang analisis, jumlah Belanja Langsung lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung, yang terjadi tahun 2017 dan 2018. Sebaliknya, tahun 2016, 2019, dan 2020, jumlah Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Kondisi seperti ini antara lain disebabkan implementasi perubahan kewenangan kota/kabupaten sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kewenangan ini mengakibatkan Belanja Pegawai menjadi lebih rendah karena pegawai beberapa urusan, seperti urusan pendidikan dialihkan menjadi pegawai Provinsi Sumatera Barat. Proporsi Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.12.

Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung selama kurun waktu tahun 2016-2020 secara total mengalami penurunan, namun realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah pegawai yang ada di Pemerintah Kota Bukittinggi dan perubahan administrasi kepegawaian secara berkala. Berbeda dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, besarnya cenderung sama setiap tahunnya kecuali tahun 2020 karena hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan kebijakan umum terhadap prioritas anggaran tahun bersangkutan.

Gambar 3.12
Proporsi Belanja Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (%)



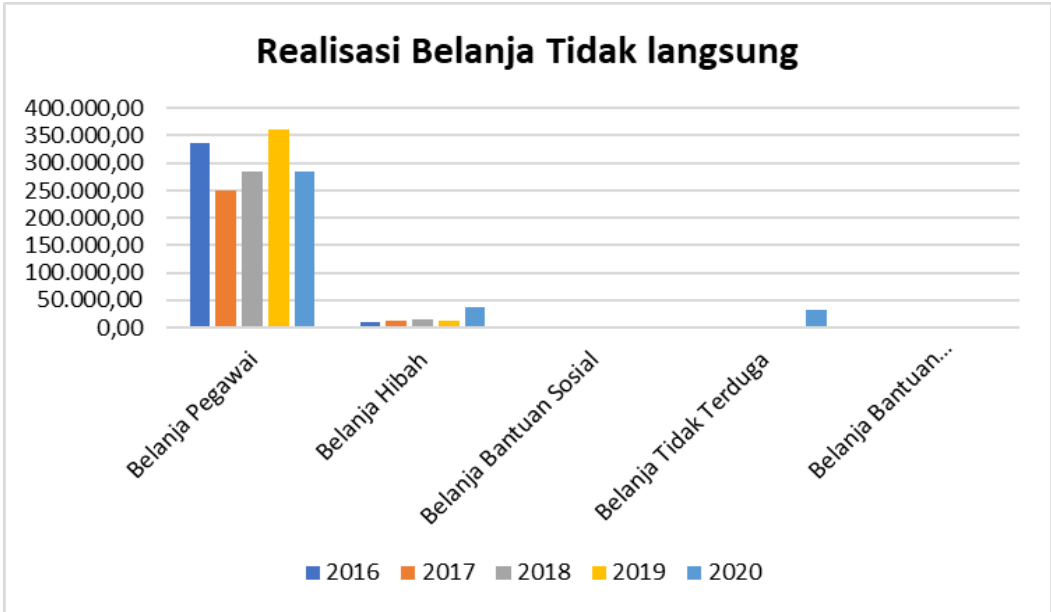
Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Analisis lebih rinci dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan dominasi Belanja Pegawai; lebih dari 90,00% Belanja Tidak Langsung tersebut merupakan Belanja Pegawai. Bahkan tahun 2019, kenaikan Belanja Pegawai jauh lebih besar karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah dengan menambahkan “Belanja Tambahan Penghasilan PNS”, sehingga terjadi kenaikan dari Rp284.870,09 juta tahun 2018 menjadi Rp362.187,75 juta tahun 2019.

Belanja Hibah juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar, khususnya tahun 2020. Jumlah Belanja Hibah tahun 2016 berjumlah Rp11.063,43 juta, dan meningkat menjadi Rp16.165,52 juta tahun 2018, dan kembali mengalami peningkatan yang lebih besar tahun 2020 menjadi Rp37.699,08 juta.

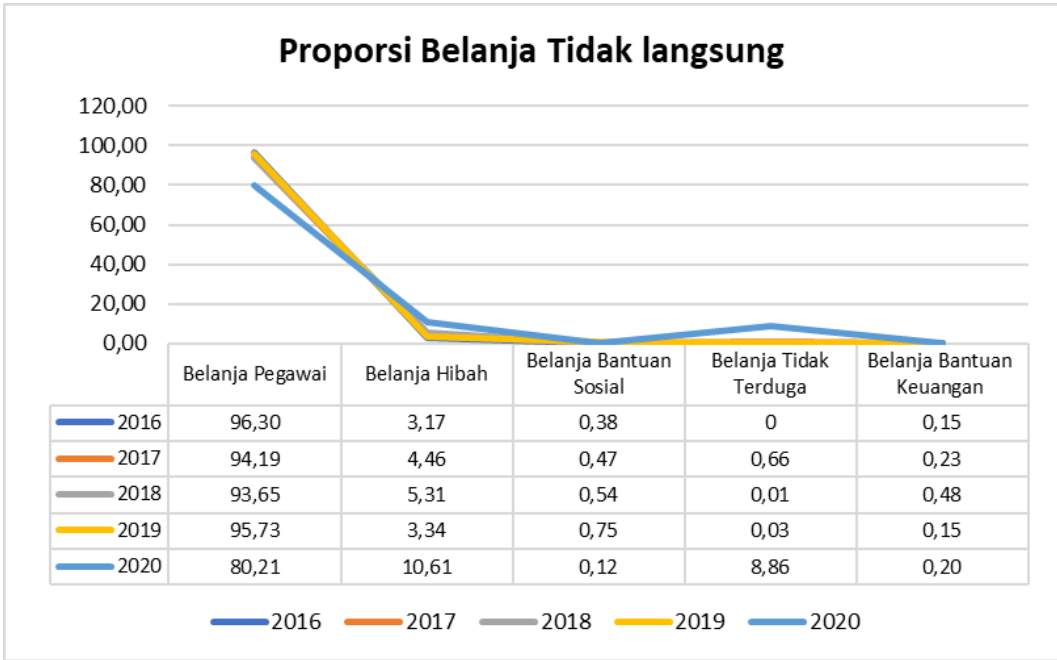
Belanja Tidak Terduga relatif kecil, dan tidak banyak berubah sampai tahun 2019. Namun, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan kebijakan khusus untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 tidak mengeluarkan Belanja Tidak Terduga. Namun tahun 2017 Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.742,36 juta dan 2 tahun berikutnya di bawah Rp100 juta. Tetapi tahun 2020, Belanja Tidak Terduga naik drastis menjadi Rp31.485,49 juta. Hal ini menunjukkan tekad Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengurangi beban masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19. Perkembangan realisasi dan proporsi Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.13 dan Grafik 3.14 berikut:

Gambar 3.13
 Realisasi Belanja Tidak Langsung
 Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Gambar 3.14
 Proporsi Belanja Tidak Langsung
 Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Analisis perbandingan anggaran dan realisasi dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas pengeluaran diantara jenis Belanja Tidak Langsung. Namun setiap tahunnya rata-rata di atas 90%. Sesuai dengan sifat belanjanya, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga tidak selalu di atas 90%. Dari 5 jenis belanja yang membentuk Belanja Tidak Langsung, Efektivitas pengeluaran Belanja Pegawai adalah yang terbaik, dan yang paling rendah

efektifitasnya adalah Belanja Terduga. Perkembangan efektifitas pengeluaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.15

Gambar 3.15
Efektifitas Pengeluaran Belanja Tidak Langsung
Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Belanja Langsung

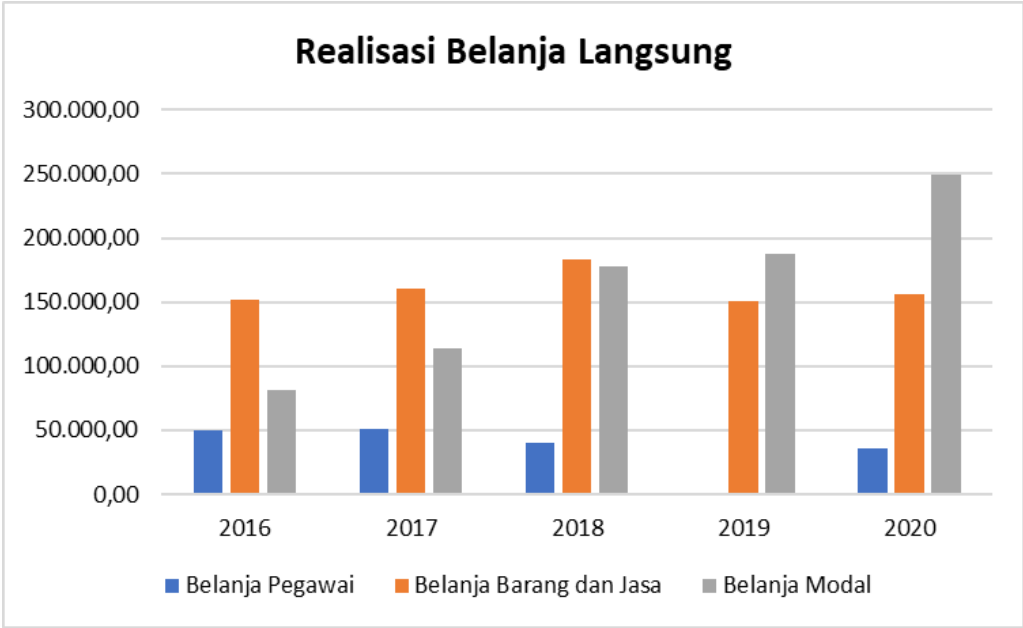
Analisis terhadap Belanja Langsung menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi tidak lagi mengeluarkan Belanja Pegawai karena sudah digantikan dengan “Belanja Tambahan Penghasilan PNS” yang tergolong sebagai Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas. Sejalan dengan Instruksi Presiden (INPRES) tentang *refocussing* anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, maka Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah Belanja Barang dan Jasa tahun 2016 adalah Rp151.375,61 juta dan meningkat menjadi Rp183.263,49 juta tahun 2018, tetapi tahun-tahun berikutnya turun, menjadi Rp150.771,65 juta tahun 2019 dan menjadi Rp116.356,83 juta tahun 2020.

Berbeda dengan kebijakan di atas, Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi masih menunjukkan peningkatan, termasuk tahun 2020. Jumlah Belanja Modal tahun 2016 berjumlah Rp80.926,57 juta dan tahun-tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan sehingga tahun 2020 jumlah Belanja Modal ini menjadi Rp249.317,61 juta.

Secara tidak langsung, penurunan Belanja Barang dan Jasa tetapi diikuti dengan perkembangan dan besarnya Belanja Modal seperti ini menunjukkan tekad Pemerintah Kota Bukitinggi untuk lebih banyak menggunakan belanjanya untuk perkembangan

ekonomi masyarakat. Perkembangan realisasi dan proporsi Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.16 dan Grafik 3.17 berikut:

Gambar 3.16
Realisasi Belanja Langsung
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Gambar 3.17
Proporsi Belanja Langsung
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (%)

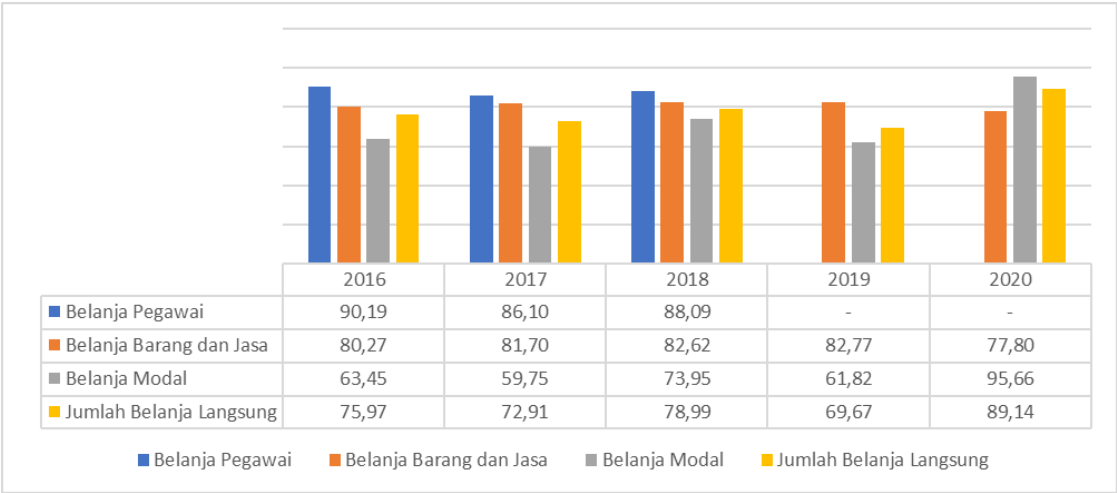


Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Analisis perbandingan anggaran dan realisasi dari Belanja Langsung menunjukkan capaian yang kurang baik, karena semua jenis Belanja Langsung dan selama 5 tahun periode yang dianalisis tingkat capaiannya di bawah 90%, kecuali Belanja Pegawai tahun 2016. Capaian efektifitas pengeluaran Belanja Langsung seperti ini membutuhkan, antara lain peningkatan kualitas perencanaan anggaran kegiatan yang

telah direncanakan dapat dibelanjakan secara lebih efektif. Penghematan belanja tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan saja, tetapi sudah dimulai dari penyusunan perencanaan, antara lain dengan menggunakan Analisis Standar Belanja sebagai dasar dalam menentukan jumlah belanja suatu kegiatan. Perkembangan efektifitas pengeluaran Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.18

Gambar 3.18
Efektifitas Pengeluaran Belanja Langsung
Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sehingga selisihnya akan menghasilkan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto Pemerintah Kota Bukittinggi selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp65.263,14 juta tahun 2016 menjadi Rp206.823,64 juta tahun 2020 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 33,42% per tahun selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Penerimaan Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, kecuali pada 3 tahun terakhir, yang juga berasal dari Pencairan Dana Cadang. Jumlah penerimaan pembiayaan tahun 2016 Rp88.463,14 juta dan meningkat menjadi Rp206.823,64 juta tahun 2020.

Pengeluaran Pembiayaan terutama digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2016 dan 2017 serta Penyertaan Modal pada BUMD pada tahun 2016-2018. Namun demikian, dari tahun 2016-2020 terjadi penurunan Pengeluaran Pembiayaan dari Rp23.200,00 juta tahun 2016 menjadi Rp57.127,13 juta tahun 2017, dan menjadi Rp5.000,00 juta tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada terjadi pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.463,14	79.573,56	110.574,32	97.049,48	206.823,64	23,65
1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	88.463,14	79.573,56	84.420,18	88.590,32	107.773,84	5,06
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	26.154,14	8.459,16	99.049,80	
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.200,00	57.127,13	5.000,00	-	-	
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000,00	43.127,13	-	-	-	
2	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintahan Daerah	8.200,00	14.000,00	5.000,00	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	65.263,14	22.446,42	105.574,32	97.049,48	206.823,64	33,42

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

3.1.2 Analisis Kesehatan Fiskal Daerah

Salah satu analisis yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menilai Kesehatan Fiskal Daerah adalah konsep yang dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993). Analisis fiskal ini menggunakan beberapa indikator rasio untuk menilai kondisi kesehatan fiskal Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang.

Analisis kesehatan fiskal daerah ini dilakukan berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3 terbitan, tahun 2015-2016, tahun 2017-2018, dan tahun 2019-2020. Data keuangan tersebut tidak semuanya realisasi tetapi juga anggaran. Data anggaran keuanga terdiri tahun 2016, 2018, dan 2020. Sedangkan data realisasi terdiri dari tahun 2017 dan tahun 2019. Namun dengan keterbatasan seperti itu, maka dalam analisis lebih ditekankan data tahun 2017 dan tahun 2019.

1. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung pemerintah, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran rill dari pendapatan daerah, sehingga diharapkan analisis rasio ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang.

Rasio ini dihitung dengan membagi total pendapatan daerah dengan jumlah penduduk, atau dengan formula sebagai berikut:

Indikator Pedapatan Daerah Per Kapita	=	$\frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

Analisis data penduduk dan pendapatan daerah kota-kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota se-Sumatera Barat, dan laju pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata per tahun di atas rata-rata kota di Sumatera Barat.

Laju pertumbuhan seperti itu mengakibatkan kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam membiayai pelayanan kepada penduduknya sedikit di bawah rata-rata kota di Sumatera Barat. Kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam membiayai pelayanan penduduknya tahun 2017 adalah Rp5,15 Juta, dan naik menjadi Rp5,61 juta tahun 2019. Jika dibandingkan dengan rata-rata kota se-Sumatera Barat, kemampuan membiayan pelayanan dari Pemerintah Kota Bukittinggi sedikit di bawah rata-rata kota se-Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan rasio ini, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan intensifikasi pemungutan berbagai sumber PAD serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan lain guna meningkatkan Pendapatan Daerah. Perkembangan kemampuan membayai pelayanan penduduk menurut kota se-Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Kota di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Rp Juta)

No	Kota	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Padang	2,41	2,26	2,48	2,47	2,96	5,24
2	Solok	8,89	8,71	8,33	8,67	8,32	(1,66)
3	Sawahlunto	10,43	9,54	9,91	10,23	9,70	(1,79)
4	Padang Panjang	11,11	11,28	11,85	10,77	10,57	(1,22)
5	Bukittinggi	4,73	5,15	5,42	5,61	6,64	8,85
6	Payakumbuh	5,89	5,61	5,41	5,88	5,63	(1,11)
7	Pariaman	7,88	7,38	7,39	7,61	6,68	(4,03)
	Rata-Rata	7,33	7,13	7,25	7,32	7,22	(0,41)

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan PAD mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah; semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian

PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini menekankan *money follows program*. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Indikator Kemandirian Keuangan Daerah	=	Pendapatan Asli Daerah
		Total Pendapatan Daerah

Data tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa ketergantuan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Sumber Dana dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya di atas rata-rata kota di Sumatera Barat. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah 15,62% dan turun sedikit menjadi 15,24% tahun 2019. Jika dibandingkan dengan rata-rata kota se-Sumatera Barat, rasionya sedikit di bawah capaian Pemerintah Kota Bukittinggi, masing-masing adalah 13,61% dan 12,29%.

Sekalipun capaian kinerja kemandirian keuangan di atas rata-rata kota se-Sumatera Barat, namun Pemerintah Kota Bukittinggi seharusnya tetap membuat kebijakan dan upaya-upaya peningkatan PAD, agar kemandirian Pemerintah Kota Bukittinggi bisa ditingkatkan; mendekati capaian kinerja kota lain seperti Pemerintah Kota Padang yang sudah di atas 20%. Perkembangan rasio kemandirian kota se-Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rasio Kemandirian Daerah Menurut Kota di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (%)

No	Kota	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Padang	21,57	26,22	25,83	23,24	32,82	11,06
2	Solok	7,33	7,01	8,43	6,77	7,53	0,68
3	Sawahlunto	9,32	10,77	10,69	8,94	9,78	1,20
4	Padang Panjang	10,69	15,03	22,31	13,37	16,38	11,26
5	Bukittinggi	12,34	15,62	14,34	15,24	18,83	11,13
6	Payakumbuh	12,66	15,78	14,86	13,06	15,56	5,28
7	Pariaman	4,65	4,83	6,10	5,44	5,36	3,62
	Rata-Rata	11,22	13,61	14,65	12,29	15,18	7,84

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, Tahun 2019-2020 (diolah)
*/ Data APBD

3. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal daerah merupakan konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan

permasalahan yang ada di suatu daerah. Semakin besar ruang fiskal, semakin leluasa pemerintah daerah dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan prioritas daerah.

Ruang fiskal daerah dihitung berdasarkan pendapatan daerah selain yang sudah memiliki *earmark* (DAK, hibah, dana penyesuaian dan otsus, dan dana darurat) yang dapat digunakan untuk membiayai belanja diskresi (belanja selain belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Rasio Ruang Fiskal Daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Indikator Ruang Fiskal Daerah

=

Ruang Fiskal Daerah

Total Pendapatan Daerah

Pengurangan kewenangan kota akibat implementasi UU 23 tahun 2014 mengakibatkan penurunan yang signifikan dari dana *earmark* yang diterima oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu dari Rp78.733,09 juta tahun 2016 menjadi Rp58.302,84 juta tahun 2017. Namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah dana *earmark* Kembali menunjukkan peningkatan, sehingga tahun meningkat menjadi Rp 135.326,21 juta.

Namun demikian, peningkatan dana *earmark* tersebut juga diikuti dengan peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung yang jauh lebih besar. Belanja Pegawai Tidak Langsung tahun 2016 Rp336.101,76 juta menjadi Rp249.390,76 juta tahun 2017, dan tahun-tahun berikutnya meningkat signifikan sehingga tahun 2020 menjadi Rp360.230,41 juta.

Akibat peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung yang lebih besar daripada peningkatan dana *earmark* mengakibatkan dana yang dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan Pemerintah Kota Bukittinggi lainnya menjadi turun. Pengolahan data Pemerintah Kota Bukitting menunjukkan terjadinya penurunan Ruang Fiskal Daerah dari 52,91% tahun 2017 dan turun menjadi menjadi 28,10%.

Dengan ruang fiskal yang terbatas seperti dijelaskan di atas, maka Pemerintah Kota Bukitting harus lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan di Kota Bukittinggi.

Tabel 3.6
Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan Daerah	647.045,72	653.374,89	695.592,07	734.106,70	689.222,92
B1	Dana Alokasi Khusus Fisik	36.926,03	20.827,20	21.067,91	41.148,70	21.016,69
B2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	36.807,06	28.975,64	38.497,88	37.582,02	38.141,52
B3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000,00	7.500,00	28.250,00	26.013,22	56.127,08
B4	Pendapatan Hibah	-	1.000,00	14.738,72	14.981,80	20.040,92
B5	Belanja Pegawai	336.101,76	249.390,76	284.870,09	362.187,75	360.230,41
B	Selisih	232.210,87	345.681,29	308.167,48	252.193,20	193.666,31
C	Ruang Fiskal Daerah (%)	35,89	52,91	44,30	34,35	28,10

Sumber: Badan Keuangan, Kota Bukittinggi

4. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peningkatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan daerah dalam mengkonversi potensi penerimaan menjadi realisasi penerimaan yang semakin besar. Indikator peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Indikator Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	=	$\frac{\text{Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Domestik Regional Bruto}}$

Rasio tersebut juga dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya rasio ini bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan *ability to pay*, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. *Tax burden* terkait pula dengan keadilan.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Kota Bukittinggi relatif kecil, tetapi sedikit di atas capaian rata-rata kota di Sumatera Barat. Rasio yang dicapai Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah 0,61% sedangkan rata-rata kota di Sumatera Barat adalah 0,38%. Sedangkan rasio yang dicapai Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah 0,52% sedangkan rata-rata kota di Sumatera Barat adalah 0,32%.

Indikasi penyebab rendahnya capaian kinerja ini di antaranya adalah belum optimalnya unit pemungut pajak dan retribusi dalam melakukan intensifikasi pemungutan dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak dan retribusi yang masih perlu ditngkatkan. Kebijakan dan penguatan terhadap peraturan terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi juga perlu dilakukan agar penegakkan disiplin dan atau sanksi yang lebih keras dapat dilaksanakan secara efektif.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 menunjukkan tren penurunan atau minus 2,88% sedangkan rata-rata kota di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dengan rata-rata per tahun 0,80%. Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengusahakan secara maksimal untuk meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya, atau PAD umum, maka tidak tertutup kemungkinan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Pemerintah Kota Bukittinggi di bawah rata-rata kota di Sumatera Barat.

Perkembangan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB menurut kota dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB
Menurut Kota Tahun 2016-2020 (%)

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Padang	0,79	0,73	0,67	0,62	1,03	7,03
2	Solok	0,33	0,31	0,29	0,26	0,29	(3,41)
3	Sawahlunto	0,19	0,17	0,16	0,15	0,18	(0,60)
4	Padang Panjang	0,33	0,30	0,28	0,26	0,27	(4,60)
5	Bukittinggi	0,67	0,61	0,56	0,52	0,59	(2,88)
6	Payakumbuh	0,34	0,31	0,29	0,26	0,43	6,14
7	Pariaman	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18	(7,50)
	Rata-Rata	0,41	0,38	0,35	0,32	0,43	0,80

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, Tahun 2019-2020 (diolah)
*/ Data APBD

5. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Kemampuan Mendanai
Belanja Daerah

=

Penerimaan Daerah

Pengeluaran Daerah

Kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mendanai Belanja Daerah relatif terkendali, namun kecenderungannya menunjukkan sedikit peningkatan. Jika tahun 2017 rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar 113,09% dan meningkat menjadi 115,91% tahun 2020. Kondisi ini berbanding terbalik dengan rata-rata kota di Sumatera Barat, yang mengalami peningkatan dari 112,98% tahun 2017 menjadi 103,54% tahun 2019. Perkembangan rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Menurut Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2019 (%)

No	Kota	2017	2019
1	Padang	107,26	78,45
2	Solok	126,03	109,61
3	Sawahlunto	101,15	102,09
4	Padang Panjang	121,15	107,84
5	Bukittinggi	113,09	115,91
6	Payakumbuh	112,43	107,43
7	Pariaman	109,77	103,46
	Rata-Rata	112,98	103,54

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, Tahun 2019-2020 (diolah)
*/ Data APBD

6. Belanja Modal

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan proporsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Modal. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif. Karena, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Di samping itu, Belanja Modal memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio Belanja Modal, diharapkan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio Belanja Modal, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja modal daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Indikator	=	Belanja Modal
Belanja Modal		Total Belanja Daerah

Data tahun 2016-2020 menunjukan peningkatan dalam rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi. Rasio Belanja Modal tahun 2016 adalah 11,33 dan naik menjadi 34,91% tahun 2020. Kondisi sebaliknya terjadi pada rata-rata kota di Sumatera Barat, di mana terjadi penurunan dari 25,37% tahun 2016 menjadi 19,79% tahun 2020. Perkembangan rasio Belanja Modal menurut kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Rasio Belanja Modal Menurut Kota di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (%)

No	Kota	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Padang	21,96	19,15	17,39	15,93	19,19	(3,32)
2	Solok	25,66	25,23	23,23	18,81	17,46	(9,19)
3	Sawahlunto	27,77	20,85	19,81	15,16	19,26	(8,75)
4	Padang Panjang	38,86	34,78	21,13	16,36	13,49	(23,24)
5	Bukittinggi	11,33	19,30	31,06	26,22	34,91	32,48
6	Payakumbuh	22,73	25,44	20,59	22,61	20,13	(2,99)
7	Pariaman	29,28	23,90	27,38	22,23	14,07	(16,74)
	Rata-Rata	25,37	24,09	22,94	19,62	19,79	(6,03)

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, Tahun 2019-2020 (diolah)
*/ Data APBD

7. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Dalam konteks manajemen kinerja, Belanja Pegawai Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau program, yang berarti tidak berhubungan dengan target kinerja tertentu. Semakin kecil rasio belanja pegawai tidak langsung ini, maka akan semakin besar proporsi Belanja Daerah yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung guna meningkatkan kinerja daerah. Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung	=	$\frac{\text{Belanja Pegawai Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$

Pengurangan pegawai akibat pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan terjadinya penurunan Belanja Pegawai Tidak Langsung di seluruh kota di Indonesia, termasuk di Pemerintahan Kota Bukittinggi.

Analisis data tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa proporsi rata-rata Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh pemerintahan kota di Sumatera Barat adalah 38,88% dari Belanja Daerah. Sedangkan proporsi belanja ini di Pemerintah Kota Bukittinggi tahun adalah 41,20%. Pada tahun 2017 proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Pemerintah Kota Bukittinggi 42,22% dan turun menjadi 40,87% tahun 2019. Sedangkan rata-rata kota di Sumatera Barat naik dari 36,46% tahun 2017 menjadi 37,88% tahun 2019. Tabel 3.10 berikut memperlihatkan perkembangan dan perbandingan proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh kota di Sumatera Barat.

Tabel 3.10
Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Menurut Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Kota	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Padang	51,39	43,88	46,15	31,71	43,87	(3,88)
2	Solok	45,28	35,41	36,25	36,81	38,49	(3,98)
3	Sawahlunto	33,16	32,79	34,74	37,40	35,68	1,85
4	Padang Panjang	36,12	31,60	36,92	42,79	42,95	4,42
5	Bukittinggi	52,29	42,22	38,06	40,87	32,56	(11,16)
6	Payakumbuh	46,18	38,69	43,02	39,57	41,06	(2,89)
7	Pariaman	37,32	30,60	33,08	36,03	35,73	(1,08)
	Kota	43,11	36,46	38,32	37,88	38,62	(2,71)

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, Tahun 2019-2020 (diolah)
 */ Data APBD

8. Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah

Indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah menunjukkan proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode. Semakin kecil rasionya, maka semakin tinggi jaminan pengembalian utang dari suatu Pemerintah Daerah. Indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah dihitung berdasarkan formula berikut:

Kemampuan Membayar Pokok Pinjaman dan Bunga	=	$\frac{\text{Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$

Karena adanya peraturan dan pembatasan yang ketat dari Pemerintah Pusat, maka sampai saat ini tidak banyak daerah yang telah melakukan Pinjaman (Utang) Daerah. Kota di Sumatera Barat yang saat ini memiliki pinjaman sehingga menimbulkan belanja bunga dan angsuran pokok pinjaman hanya Kota Padang dan Kota Sawah Lunto. Pemeritah Kota Bukittinggi sampai saat ini tidak memiliki Utang (kecuali hutang belanja) sehingga tidak menimbulkan Belanja Bunga.

3.1.3 Neraca Daerah

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, yang menggambarkan posisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas. Perkembangan jumlah Aset Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,34% per tahun, dari Rp1.492.027,31 juta tahun 2016 menjadi Rp1.701.359,63 juta tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh Aset Tetap, yaitu sebesar 7,25%, dari Rp1.126.195,60 juta tahun 2016 menjadi Rp1.490.224,95 juta tahun 2020. Pertumbuhan jumlah (nilai) Aset Tetap ini sejalan dengan perkembangan kebijakan Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pertumbuhan kedua tertinggi adalah Aset Lancar, yaitu sebesar 6,94% dari Rp96.681,43 juta tahun 2016 menjadi Rp126.459,66 juta tahun 2020. Peningkatan Asset Lancar ini relatif stabil dari tahun ke tahun.

Investasi Jangka Panjang menduduki rangking ketiga. Sejalan dengan kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi, maka jumlah Investasi Jangka Panjang pun meningkat. Tahun 2016, jumlah Investasi Jangka Panjang berjumlah Rp48.226,92 juta dan meningkat menjadi Rp53.951,16 juta, atau meningkat rata-rata sebesar 2,84% per tahun. Sedangkan pertumbuhan terendah adalah untuk Dana Cadang yang telah dicairkan pada tahun 2019 sehingga saldo Dana Cadangan tahun 2020 hanya Rp26,76 juta.

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bukittinggi selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,61% per tahun, dan tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang dalam 5 tahun terakhir. Jumlah dan perkembangan jumlah utang yang rendah ini mencerminkan sikap kehati-hatian dan sekaligus mengurangi resiko kegagalan membayar utang dari Pemerintah Kota Bukittinggi.

Karena jumlah dan perkembangan jumlah utang yang rendah, maka pertumbuhan rata-rata Ekuitas Dana Pemerintah Kota Bukittinggi mendekati pertumbuhan rata-rata per tahun dari Aset. Jumlah Ekuitas Dana tahun 2016 adalah Rp1.489.246,93 juta dan meningkat menjadi Rp1.698.510,35 juta, yang berarti rata-rata tumbuh sebesar 3,34% per tahun. Perkembangan jumlah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
1	Aset Lancar	96.681,43	99.311,14	101.679,86	125.154,64	126.459,66	6,94
2	Investasi Jangka Panjang	48.226,92	65.808,61	56.234,72	54.703,92	53.951,16	2,84
3	Aset Tetap	1.126.195,60	1.037.824,72	1.144.702,00	1.317.286,77	1.490.224,95	7,25
4	Dana Cadangan	71.220,66	115.061,18	96.232,00	94.067,61	26,76	(86,08)
5	Aset Lainnya	149.702,70	197.276,77	46.482,92	29.670,98	30.697,10	(32,71)
	Jumlah Aset	1.492.027,31	1.515.282,42	1.445.331,50	1.620.883,91	1.701.359,63	3,34
1	Kewajiban (Utang) Jangka Pendek	2.780,38	3.426,64	6.619,77	2.686,74	2.849,28	0,61
2	Kewajiban (Utang) Jangka Panjang				-	-	
	Jumlah Utang	2.780,38	3.426,64	6.619,77	2.686,74	2.849,28	0,61
3	Ekuitas Dana	1.489.246,93	1.511.855,77	1.438.711,73	1.618.197,18	1.698.510,35	3,34
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	1.492.027,31	1.515.282,42	1.445.331,50	1.620.883,91	1.701.359,63	3,34

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Untuk mengetahui kualitas keuangan daerah (Neraca) dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok Akun Neraca yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan suatu organisasi untuk melunasi Kewajiban Jangka Pendek pada saat jatuh tempo. Sedangkan Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan organisasi melunasi seluruh kewajibannya (utang) pada saat organisasi dilikuidasi.

Rasio likuiditas dapat diukur dari Rasio Lancar, Rasio Cepat (*quick ratio*), dan Rasio Kas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Rasio Lancar tahun 2016 sebesar 3.477,28%, yang berarti kemampuan membayar Kewajiban Jangka Pendek 34,77 kali lipat. Rasio Cepat (*quick ratio*) sebesar 3.299,96%, yang berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi membayar Kewajiban Jangka Pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid lebih dari 32,99 kali lipat. Sedangkan Rasio Kas sebesar 2.901,52%, yang berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi membayar Kewajiban Jangka Pendeknya dengan menggunakan aset sangat likuid lebih dari 29,02 kali lipat

Hasil perhitungan tahun 2020 kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melunasi kewajibannya yang jauh lebih baik. Rasio Lancar meningkat menjadi 4.438,311%, Rasio Cepat meningkat menjadi 4.215,42% dan Rasio Kas meningkat menjadi 3.312,32. Dengan demikian, kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi melunasi Utang Jangka Pendeknya sangat tinggi.

Rasio Solvabilitas memperlihatkan kemampuan suatu organisasi melunasi kewajibannya, baik Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Rasio Solvabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio total Utang terhadap total Aset dan rasio Total Utang terhadap Ekuitas Dana (Modal). Rasio total Utang terhadap total Aset memperlihatkan seberapa besar Aset yang dimiliki dibayai (didanai) dari Utang. Semakin besar nilainya berarti semakin besar pembiayaan yang berasal dari Utang. Dalam periode tahun 2016-2020, Pemerintah Kota Bukittinggi paling tinggi membiayai Asetnya dengan Utang hanya sebesar 0,46%.

Kemampuan melunasi total Utang ini juga dapat dilihat dari perbandingan antara total Utang dengan Ekuitas Dana. Rasio total Utang terhadap Ekuitas Dana dari Pemerintah Kota Bukittinggi paling tinggi hanya sebesar 0,46%, yang terjadi tahun 2018. Dengan demikian, kedua indikator Solvabilitas tersebut menunjukkan Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki Utang yang sangat rendah. Perkembangan Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
A	Rasio Likuiditas						
1	Rasio Lancar	3.477,28	2.898,21	1.536,00	4.658,24	4.438,31	6,29
2	Rasio Cepat	3.299,96	2.696,89	1.445,97	4.500,41	4.215,42	6,31
3	Rasio Kas	2.901,52	2.463,67	1.338,29	4.013,20	3.312,32	3,37
B	Rasio Solvabilitas						
1	Rasio Jumlah Utang dengan Jumlah Aset	0,19	0,23	0,46	0,17	0,17	(2,63)
2	Rasio Jumlah Utang dengan Ekuitas Dana	0,19	0,23	0,46	0,17	0,17	(2,64)

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi penggunaan anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, khususnya Belanja Pegawai. Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan perkembangan Belanja Aparatur dalam 5 tahun terakhir.

Karena implementasi pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tahun 2017, di mana beberapa urusan diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah Belanja Aparatur. Begitu juga dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Oleh sebab itu, analisis perkembangan Belanja Aparatur hanya dilakukan untuk tahun 2017-2019.

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2017–2019, menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun 14,98%, yaitu dari Rp392.979,66 juta tahun 2017 menjadi Rp519.510,05 juta tahun 2019. Peningkatan seperti ini antara lain disebabkan adanya peningkatan Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2018 dan peningkatan Belanja

Modal untuk Aparatur tahun 2018 dan 2019. Peningkatan Belanja Aparatur ini tentu juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017-2019 (Rp juta)

No	Uraian	2017	2018	2019
A	Belanja Tidak Langsung	249.390,76	284.871,09	293.106,43
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	175.287,13	170.933,42	175.739,05
2	Belanja Tambahan Penghasilan	69.233,09	105.355,10	106.885,95
3	Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta operasional KDH/ WKDH	2.754,10	6.148,60	7.660,18
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.185,74	1.294,49	1.697,19
5	Belanja Pemungutan Retribusi Daerah	930,71	1.139,47	1.124,05
B	Belanja Langsung	143.588,90	201.996,12	226.403,62
1	Belanja Honorarium PNS	21.612,61	13.477,93	14.151,12
2	Belanja Uang Lembur	5.707,66	7.886,26	7.491,20
3	Belanja Honorarium Non PNS	20.819,95	15.277,08	14.873,79
4	Belanja Pegawai Dana BOS	2.827,11	3.159,94	2.955,14
5	Belanja Upah Kerja	4.573,59	16.886,86	19.188,86
6	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	299,59	180,43	251,80
7	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	291,05	424,20	243,67
8	Belanja premi asuransi kesehatan	3.085,24	2.958,11	1.467,77
9	Belanja makanan dan minuman pegawai		2.029,15	1.436,93
10	Belanja pakaian dinas dan atributnya	408,43	460,35	697,27
11	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	976,58	1.304,42	910,36
12	Belanja Perjalanan Dinas	38.223,93	41.148,59	40.944,33
13	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-
14	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-
15	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan perlengkapan dll)	44.763,15	96.802,81	121.791,40
	Jumlah Belanja Aparatur	392.979,66	486.867,21	519.510,05

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Selanjutnya untuk mengetahui apakah kebijakan penggunaan anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi semakin baik, maka perlu dilakukan analisis proporsi Belanja untuk memenuhi kebutuhan Belanja Aparatur dengan total pengeluaran daerah. Di lihat dari proporsi Belanja Aparatur terhadap pengeluaran daerah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2017-2019 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Proporsi Belaja Aparatur tahun 2017 adalah 66,04%, meningkat menjadi 69,18% tahun 2018, dan meningkat menjadi 72,50% tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi belanja untuk pembangunan semakin berkurang. Kedepan harus dibuat berbagai kebijakan agar proporsi Belanja Aparatur ini dapat ditekan/diturunkan. Tabel 3.14 memperlihatkan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Aparatur tahun 2017-2019.

Tabel 3.14
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Belanja Aparatur
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2019 (Rp juta)

Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
2017	392.979,66	595.090,90	66,04
2018	486.867,21	703.783,29	69,18
2019	519.510,05	716.528,26	72,50

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Di samping itu, untuk menutup surplus/defisit tersebut maka diperlukan pembiayaan daerah, sehingga dalam pembahasan ini juga diperlukan analisis pembiayaan daerah.

Surplus atau defisit riil yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam periode tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Surplus Riil terjadi apabila Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Jika terjadi Surplus Riil berarti akan mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan semakin besar. Sebaliknya jika terjadi Defisit Riil maka akan menghasilkan SiLPA yang semakin kecil. Dengan asumsi kebijakan “Anggaran Seimbang” maka semakin kecil Surplus Riil atau semakin besar Defisit Riil berarti semakin efektif pelaksanaan Rencana Kerja yang dibuat. Sebaliknya, jika besar Surplus Riil berarti semakin kurang efektif pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun.

Dalam periode waktu 2016-2020, terjadi 3 kali Defisit Riil dan 2 kali Surplus Riil. Defisit Riil terjadi tahun 2016, 2018, dan 2020, dengan jumlah masing-masing Rp7.327,55 juta, Rp14.659,04 juta, dan Rp107.437,62 juta. Sedangkan Surplus Riil terjadi tahun 2017 dan 2019, dengan jumlah masing-masingnya sebesar Rp5.559,72 juta dan Rp17.019,13 juta.

Surplus atau Defisit Riil yang terjadi ditutupi dengan Penerimaan Pembiayaan. Dalam periode waktu tahun 2016-2020, Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Bukittinggi hanya berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan Pencairan Dana Cadangan. Penggunaan SiLPA tahun 2016 berjumlah Rp88.463,14 juta dan meningkat menjadi Rp107.773,84 juta tahun 2020. Sedangkan Pencairan Dana Cadangan terjadi tahun 2018-2020, dengan jumlah masing-masingnya adalah Rp26.154,14 juta, Rp8.459,16 juta, dan Rp99.049,80 juta

Sekalipun terjadi Surplus Riil dan Defisit Riil yang terjadi antara tahun 2016-2018, namun karena jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah Penerimaan Pembiayaan, mengakibatkan jumlah SiLPA tahun 2016-2018 masih menunjukkan peningkatan. Jumlah SiLPA pada tahun 2016 adalah Rp81.135,59 juta dan meningkat menjadi Rp114.068,61 juta. Tetapi, Defisit Riil sebesar Rp107.773,84 juta tahun 2020, mengakibatkan SiLPA tahun 2020 turun menjadi Rp99.386,03 juta. Perkembangan Surplus/Defisit Riil ini dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	647.045,72	653.374,89	695.592,07	734.106,70	689.222,92	1,59
	Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	631.173,28	590.688,03	705.251,10	717.087,57	796.660,54	5,99
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23.200,00	57.127,13	5.000,00	-	-	(100,00)
A	Defisit riil	(7.327,55)	5.559,72	(14.659,04)	17.019,13	(107.437,62)	
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan						
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA sebelumnya	88.463,14	79.573,56	84.420,18	88.590,32	107.773,84	5,06
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	26.154,14	8.459,16	99.049,80	
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan						
7	Penerimaan Pinjaman Daerah						
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
9	Penerimaan Piutang Daerah						
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	88.463,14	79.573,56	110.574,32	97.049,48	206.823,64	23,65
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	81.135,59	85.133,28	95.915,28	114.068,61	99.386,03	5,20

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Penyebab terjadinya SiLPA tersebut terutama karena adanya penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan juga karena pelampaun penerimaan PAD. Pelampaun penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan yang lebih besar daripada dianggarkan. Sebaliknya, kekurangan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan lebih rendah daripada anggaran.

Dalam kuran waktu tahun 2016-2020 terjadi 4 kali kekurangan penerimaan PAD, dan 1 kali pelampauan PAD. Kekurangan penerimaan PAD tertinggi terjadi tahun 2017 yaitu Rp11.048,81 juta dan terrendah terjadi tahun 2018 sebesar Rp801,49 juta. Sedangkan pelampauan penerimaan PAD terjadi pada tahun 2020, yaitu Rp6.854,45 juta.

Penyebab lain dari SiLPA tersebut adalah adanya kekurangan penerimaan Dana Perimbangan dalam periode tahun 2016-2020. Tahun 2016 terjadi kekurangan penerimaan Dana Perimbangan sebesar Rp23.887,56 juta, dan kekurangan ini meningkat tahun 2018 menjadi Rp49.101,56 juta. Tetapi tahun-tahun berikut mengalami penurunan sehingga menjadi Rp8.329,20 juta.

Penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2016 berjumlah Rp109.357,14 juta dan tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan. Penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang paling banyak terjadi tahun 2017 yaitu sebesar Rp141.883,93 juta. Namun tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi Rp101.144,85 juta tahun 2020. Perkembangan penyebab realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.16

Tabel 3.16
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
1	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	81.135,59	85.133,28	95.915,28	114.068,61	99.386,03	5,20
2	Pelampauan penerimaan PAD	(2.362,20)	(11.048,81)	(801,49)	(5.217,54)	6.854,45	
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(23.887,56)	(49.101,56)	(27.243,79)	(10.883,15)	(8.329,20)	(23,16)
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(1.971,80)	3.399,71	3.462,97	1.152,36	(284,08)	(38,39)
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	109.357,14	141.883,93	120.497,59	129.016,94	101.144,85	(1,93)
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7	Kegiatan lanjutan						

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

3.2.3 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi Utang untuk tahun berikutnya.

Hal ini berarti bahwa belanja yang menjadi prioritas utama dalam sebuah anggaran seperti belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagai berikut ;

1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk dalam Belanja Mengikat tersebut untuk sumber pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik. Karena, kedua sumber Dana ini sudah pasti dan mengikat penggunaannya, yaitu untuk Belanja Modal. Di samping itu, karena adanya perubahan kewenangan pemerintah kota/kabupaten yang berpengaruh besar terhadap jumlah pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka analisis dalam bagian ini dilakukan untuk periode tahun 2017-2019.

Dari segi jumlah, Belanja Pegawai merupakan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama paling besar (66,67%) dibandingkan belanja lainnya. Sedangkan dari segi tingkat pertumbuhan, Belanja Modal (DAK Fisik) merupakan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama yang memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun paling tinggi (40,56%) dibandingkan belanja lainnya.

Sekalipun pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama befluktuasi, namun perkembangannya tidak banyak mengalami perubahan. Tahun 2017 pengeluaran ini berjumlah Rp255.726,36 juta dan meningkat menjadi Rp270.298,43 juta tahun 2019, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,81%. Perkembangan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2019 (Rp juta)

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
A	Belanja Tidak Langsung	227.618,77	178.041,23	177.082,02	183.399,24	213.550,48	(1,58)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	225.971,27	175.287,13	170.933,42	175.739,05	205.833,55	(2,31)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	-	-	-	-	
3	Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta operasional KDH/ WKDH	1.647,50	2.754,10	6.148,60	7.660,18	7.716,93	47,11
4	Belanja Bunga						
5	Belanja bagi hasil						
B	Belanja Langsung	70.324,48	54.485,14	61.177,90	81.899,19	74.365,39	1,41
1	Belanja Honorarium Non PNS	22.493,79	20.819,95	15.277,08	14.873,79	14.465,39	(10,45)
2	Belanja Upah Kerja	4.983,85	4.573,59	16.886,86	19.188,86	30.932,36	57,84
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	36.926,03	20.827,20	21.067,91	41.148,70	21.016,69	(13,14)
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	357,33	299,59	180,43	251,80	247,00	(8,82)
5	Belanja premi asuransi kesehatan	554,21	3.085,24	2.958,11	1.467,77	2.390,41	44,11
6	Belanja listrik, air, telepon	5.009,26	4.879,58	4.807,52	4.968,27	5.313,54	1,49
C	Pembiayaan Pengeluaran	23.200,00	23.200,00	57.127,13	5.000,00	-	
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000,00	15.000,00	43.127,13		-	
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.200,00	8.200,00	14.000,00	5.000,00	-	
	TOTAL	321.143,24	255.726,36	295.387,05	270.298,43	287.915,87	(2,69)

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Di samping dialokasikan untuk belanja program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Program Prioritas Kepala Daerah serta alokasi untuk Belanja Daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen dari Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 dilakukan dengan melihat tren realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir, memperhitungkan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Bukittinggi serta aspek-aspek lain yang berkaitan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah

Dalam menghitung proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah tersebut digunakan beberapa asumsi. Asumsi dasar untuk Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan dari Pajak Daerah tetap diproyeksikan meningkat dari periode RPJMD sebelumnya, namun dikarenakan pendapatan pajak daerah Kota Bukittinggi lebih banyak ditopang oleh industri pariwisata yang sangat terdampak oleh penyebaran covid-19 maka pendapatan-pendapatan yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata seperti pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir hanya diprediksi tumbuh rata-rata 6,50 persen pertahun.
2. Sejalan dengan pajak daerah, pandemi covid-19 juga berdampak pada penerimaan retribusi daerah namun tetap diasumsikan meningkat dari periode 2016-2020, hal ini didukung dengan bertambahnya objek pendapatan retribusi baru diantaranya objek retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD, objek retribusi parkir pada basement Pertokoan Pasar Atas.
3. Terkait Pendapatan Transfer baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diproyeksikan mampu tumbuh rata-rata 1,5 persen per tahun. Asumsi pertumbuhan ini didukung tren pendapatan transfer periode RPJMD sebelumnya serta terdapatnya Dana Insentif Daerah yang dapat diperoleh oleh setiap daerah berdasarkan kriteria tertentu atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu setiap tahunnya.

4. Penyusunan Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan pertumbuhan penerimaan hibah dari pihak ketiga selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 0,02 persen per tahun maka lain-lain pendapatan yang sah dapat dikatakan stagnan.

Asumsi dasar Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka untuk penganggaran belanja tahun anggaran 2021 tidak lagi menggunakan nomenklatur rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung, akan tetapi menggunakan nomenklatur rekening belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Hal ini berdampak pada proyeksi belanja kedepan.
2. Secara umum asumsi yang digunakan untuk proyeksi belanja daerah Kota Bukittinggi 2021-2026 memperhatikan 4 kondisi yakni : (1) tren belanja daerah lima tahun sebelumnya; (2) proyeksi pendapatan daerah pada periode yang sama guna memenuhi prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja; (3) kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran, serta (4) alokasi belanja wajib, mengikat, dan prioritas utama.
3. Penganggaran Belanja Daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
4. Belanja pegawai sebagai kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD dan pegawai ASN berikut tambahan penghasilannya diasumsikan meningkat 2,5 persen per tahun yang dipertimbangkan atas kenaikan gaji, jumlah pegawai, dan lain-lain yang berkaitan.
5. Belanja barang dan jasa dalam rangka penganggaran pengadaan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah diasumsikan meningkat 2,5 persen setiap tahunnya. Hal ini memperhatikan tren pengeluaran pemerintah pada belanja barang dan jasa selama tahun 2016 sampai dengan 2020.
6. Belanja hibah yang ditujukan untuk pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD diasumsikan sama setiap tahun.
7. Belanja Modal Pemerintah Daerah memperoleh porsi minimal 30 persen dari APBD.

Kebijakan pembiayaan diskenariokan sebesar 6% pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasikan di atas 6%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial. Namun demikian, dalam perhitungan Kapasitas Riil tidak dilakukan proyeksi penerimaan SiLPA karena penerimaan SiLPA tersebut tidak direncanakan melainkan adalah akibat dari pelaumpauan target pendapatan dan atau penghematan belanja. Berdasarkan asumsi-asumsi yang dijelaskan di atas, maka hasil proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut :

Tabel 3.18
Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Bukittinggi (Rp juta)

No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	PENDAPATAN	701.560,03	593.874,22	732.933,36	748.469,79	758.139,02	773.229,51
A1	Pendapatan Asli Daerah	132.555,62	130.141,02	146.946,38	153.796,26	154.646,26	160.784,37
1	Pajak Daerah	39.207,01	40.457,61	47.235,50	47.235,50	48.085,50	50.603,05
2	Retribusi Daerah	53.656,74	26.872,34	27.589,58	29.831,56	29.245,06	30.437,89
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.795,00	5.795,00	6.084,75	6.388,99	6.388,99	6.546,76
4	Lain-lain PAD yang sah	33.896,87	57.016,07	66.036,55	70.340,21	70.926,71	73.515,11
A2	Pendapatan Transfer	554.183,91	463.733,20	571.166,97	579.853,53	588.672,76	597.625,27
1	Transfer Pemerintah Pusat	531.298,47	433.866,81	547.356,97	555.567,32	563.900,83	572.359,34
2	Transfer Pemerintah Daerah	22.885,44	29.866,39	23.810,01	24.286,21	24.771,93	25.267,37
A3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	14.820,50	-	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.819,88
1	Hibah	14.820,50	-	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.819,88
2	Dana Darurat						-
3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan						-
							-
B	BELANJA	754.807,56	748.811,02	759.767,63	770.302,91	787.606,08	802.694,61
B1	Belanja Operasi	616.375,60	616.431,66	624.391,22	634.926,50	646.008,94	657.594,72
1	Belanja Pegawai	331.927,11	340.225,29	348.730,92	357.449,20	366.385,43	375.545,06
2	Belanja Barang dan Jasa	259.906,00	263.154,82	266.444,26	269.774,81	273.147,00	276.561,34
3	Belanja Bunga						-

No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Belanja Subsidi						-
5	Belanja Hibah	23.311,69	11.801,54	7.966,04	6.452,49	5.226,52	4.233,48
6	Belanja Bantuan Sosial	1.230,80	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.254,85
B2	Belanja Modal	127.417,15	131.379,37	130.622,48	132.255,26	133.908,46	135.582,31
1	Belanja Modal	127.417,15	131.379,37	134.376,41	134.376,41	140.597,14	144.099,89
B3	Belanja Tidak Terduga	11.014,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	Belanja Tidak Terduga	11.014,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B4	Belanja Transfer						
1	Belanja Bagi Hasil						
2	Belanja Bantuan Keuangan						

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

3.3.2 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 1 menjelaskan bahwa Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan Pendapatan Daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan, maka untuk lima tahun ke depan diperlukan peningkatan Pendapatan Daerah yang lebih besar. Peningkatan ini sangat dimungkinkan karena kinerja keuangan daerah selama periode tahun 2016-2020 memperlihatkan kecenderungan yang semakin baik dan terkendali. Oleh sebab itu berdasarkan potensi yang dimiliki dan untuk memastikan kemampuan keuangan daerah, perlu dibuat proyeksi Pendapatan Daerah dan proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta belanja prioritas utama.

Berdasarkan hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama yang dijelaskan di atas, dan membuat proyeksi berdasarkan capai pertumbuhan rata-rata per tahun 5 tahun terakhir maka dapat disusun proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat, serta prioritas utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Hasil perhitungan proyeksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat, Serta Prioritas Utama Pemerintah Kota
Bukittinggi Tahun 2021-2026 (Rp juta)

No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Belanja Operasi	229.295,40	234.085,03	239.748,61	244.780,71	250.707,91	261.950,76
1	Belanja Pegawai	191.585,22	196.374,85	201.284,22	206.316,33	211.474,24	222.326,69
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	179.775,04	184.269,42	188.876,16	193.598,06	198.438,01	203.398,96
1.2	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.810,18	12.105,43	12.408,07	12.718,27	13.036,22	13.362,13
1.3	Belanja Gaji KDH/ WKDH	740,92	759,44	778,43	797,89	817,83	838,28
1.4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	640,00	656,00	672,40	689,21	706,44	724,10
1.5	Belanja Pegawai BOS	1.035,76	1.061,66	1.088,20	1.115,40	1.143,29	1.171,87
1.6	Belanja Pegawai BLUD	2.502,50	2.565,06	2.629,19	2.694,92	2.762,29	2.831,35
2	Belanja Barang dan Jasa	37.710,18	37.710,18	38.464,39	38.464,39	39.233,67	39.624,07
2.1	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.684,39	10.684,39	10.898,07	10.898,07	11.116,04	11.226,65
2.2	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	885,77	885,77	903,49	903,49	921,56	930,73
2.3	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	337,26	337,26	344,00	344,00	350,88	354,38
2.4	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Prasarana dan Sarana Umum	2.884,12	2.884,12	2.941,80	2.941,80	3.000,63	3.030,49
2.5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.671,28	5.671,28	5.784,71	5.784,71	5.900,40	5.959,11
2.6	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	957,02	957,02	976,16	976,16	995,68	1.005,59
2.7	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	883,40	883,40	901,07	901,07	919,09	928,24
2.8	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.879,32	1.879,32	1.916,90	1.916,90	1.955,24	1.974,70
2.9	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan	6,10	6,10	6,22	6,22	6,35	6,41

No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pangan						
2.10	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.606,18	2.606,18	2.658,30	2.658,30	2.711,47	2.738,45
2.11	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	500,47	500,47	510,48	510,48	520,69	525,87
2.12	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.799,83	2.799,83	2.855,83	2.855,83	2.912,95	2.941,93
2.13	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.615,04	7.615,04	7.767,35	7.767,35	7.922,69	8.001,53
3	Belanja Bunga						
4	Belanja Subsidi						
5	Belanja Hibah						
6	Belanja Bantuan Sosial						
B	Pengeluaran Pembiayaan						
1	Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo						
2	Pembentukan Dana Cadangan						

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Pemerintah Kota Bukittinggi dalam periode tahun 2021 – 2026 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Langkah pertama adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pengeluaran prioritas daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam perhitungan Kapasitas Riil ini juga diasumsikan DAK Fisik yang bersifat *earmark* sehingga sebagai diperlakukan pengurang dari total penerimaan daerah. Dengan demikian, Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dari hasil proyeksi Pendapatan Daerah seperti terlihat pada Tabel 3.18 dan proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti terlihat pada Tabel 3.19. Hasil perhitungan untuk memperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperlihatkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021– 2026 (Rp juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Daerah	701.560,03	593.874,22	732.933,36	748.469,79	758.139,02	773.229,51
Pencairan Dana Cadangan						
Sisa Lebih Riil Perhitungan	99.386,03					
Total Penerimaan	800.946,06	721.944,78	732.933,36	748.469,79	758.139,02	773.229,51
Dikurangi:						
DAK Fisik	21.016,69	21.016,69	21.016,69	21.016,69	21.016,69	21.016,69
Belanja Wajib & Pengeluaran Pembiayaan Yg Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama	229.295,40	234.085,03	239.748,61	244.780,71	250.707,91	261.950,76
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	550.633,97	466.843,05	472.168,06	482.672,38	486.414,42	490.262,06

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2021

Berdasarkan kapasitas kemampuan keuangan daerah maka disusun rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah kedalam dua prioritas berikutnya, yaitu :

- Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- Prioritas II : dialokasi untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
- Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang ditemukan di daerah. Pada Bab 2 dan 3 dokumen ini telah disajikan gambaran umum daerah dan gambaran keuangan daerah. Belum semua potensi sumberdaya Kota Bukittinggi dapat optimal dimanfaatkan selama tiga periode RPJMD sebelumnya, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD 2006-2025. Hal itu juga diperlihatkan oleh hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahun 2020. RPJMD periode 2021-2026. Sehubungan dengan itu, maka permasalahan pembangunan Kota Bukittinggi akan dirumuskan pada bab ini.

Selain perumusan masalah pembangunan yang akan diselesaikan dalam periode 5 tahun yang akan datang, juga dilakukan analisis untuk menghasilkan isu-isu strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan akan membantu efektifitas pencapaian tujuan pembangunan sehingga memperlihatkan kualitas perencanaan yang lebih baik. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan keberhasilan tujuan di masa datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Perencanaan ini nantinya akan mencari alternatif solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan di Kota Bukittinggi maka akan dilakukan pengelompokan berdasarkan 3 bidang pembangunan yaitu

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Secara Makro

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan secara makro di Kota Bukittinggi maka dilakukan pengelompokan berdasarkan 3 bidang pembangunan yaitu bidang Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan.

1. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Tidak berbeda dengan Kabupaten/ Kota lain di Indonesia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Kota Bukittinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2020 terkoreksi sampai ke angka -1,74 persen dari 5,88 pada tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2020 ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar -1,60% dan berada pada urutan ke 16 se-Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.

Struktur ekonomi Kota Bukittinggi yang bertumpu pada lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha transportasi dan lapangan usaha lain yang berkaitan dengan aktifitas wisata sangat terpuruk atas pandemi yang terjadi. Dampak dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi terhadap perekonomian masyarakat terlihat dari turunnya daya beli masyarakat yang terlihat dari angka pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita disesuaikan Kota Bukittinggi tahun 2020 hanya sebesar 13,28 juta rupiah/orang/tahun, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,58 juta rupiah/orang/tahun.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi telah memberi dampak baik terhadap penanganan pandemi covid 19 di Kota Bukittinggi terutama untuk pasien yang membutuhkan penanganan rawatan. Demikian juga jika mengamati Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kota Bukittinggi yang sudah mencapai 74,34 tahun, angka ini tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, bahkan jauh lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebesar 69,47 tahun.

Namun demikian, oleh karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, maka peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan tetap jadi fokus pemerintah Kota Bukittinggi kedepan terutama terkait penyediaan akses, sarana prasarana, dan jaminan kesehatan masyarakat selain penanganan pandemi covid yang belum berakhir.

Beberapa indikator makro pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan yang landai beberapa tahun terakhir. Angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi meningkat 0,01 tahun dari tahun 2019 sebesar 14,96 menjadi 14,97 tahun 2020, begitu juga dengan tahun 2018 ke tahun 2019. Meskipun lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar 14,02 tahun, tetapi angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi lebih rendah dari Kota Padang Panjang dan Kota Padang yang mencapai 15,06 tahun dan 16,52 tahun. Demikian juga dengan indikator rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi yang hanya mengalami peningkatan 0,01 tahun dari tahun 2019 sebesar 11,32 tahun menjadi 11,33 tahun pada tahun 2020. Meskipun lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat, namun angka ini masih rendah dari Kota Padang Panjang dan Kota Padang yang mencapai 11,62 tahun dan 11,58 tahun.

Terkait dengan indikator makro ketenagakerjaan, Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi masih tergolong tinggi yaitu 7,51 persen. Angka ini lebih tinggi daripada Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat yang hanya 6,88 persen, dan jika diurutkan dari yang terendah pada seluruh kabupaten/ Kota di Sumatera Barat tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi berada pada urutan ke 16.

Berdasarkan data beberapa indikator makro pembangunan sumber daya manusia Kota Bukittinggi sebagaimana uraian diatas maka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi selama 5 (lima) tahun kedepan terutama terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

3. Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bukittinggi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan pada dua tahun terakhir. Indeks SAKIP Kota Bukittinggi selama 2 (dua) tahun terakhir adalah BB, indeks ini sama dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan 2 (dua) kota lain di Sumatera Barat. Namun demikian, pemerintah Kota Bukittinggi berkeinginan mendapat predikat A pada pertengahan masa RPJMD ini, hal ini penting untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

Predikat capaian penilaian SAKIP Kota Bukittinggi belum seiring dengan capaian penilaian Reformasi Birokrasi (Indeks RB). Penilaian Reformasi Birokrasi Kota Bukittinggi masih berpredikat B pada beberapa tahun terakhir. Demikian juga dengan capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sampai dengan tahun 2020, belum ada unit kerja Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Berkaitan dengan Urusan Pemerintah Daerah

Perumusan permasalahan pembanguana Berkaitan dengan urusan pemerintah daerah bertujuan untuk merumuskan program pembangunan daerah pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Penyajian permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah dikelompokkan atas permasalahan pembangunan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, permasalahan pembangunan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, permasalahan pembangunan urusan pilihan dan permasalahan urusan pendukung, penunjang, dan pengawas pemerintahan.

Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Permasalahan:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) dan angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan belum mencapai 100 persen (APM SD/MI sebesar 99,38 persen dan SMP/MTs sebesar 81,46 persen, dan APK SMP/MTs 84,76% tahun 2020)
2. Angka partisipasi kasar PAUD masih rendah (APK PAUD dibawah 50 persen tahun 2020)
3. Kondisi bangunan sekolah kondisi baik (sudah mencapai 98,46 persen bangunan SD/MI berkategori baik dan 93,33 persen bangunan SMP/MTs berkategori baik pada tahun 2020)
4. Kualitas penyelenggaraan pendidikan belum optimal (terdapat 4 SD/MI belum terakreditasi minimal B, dan 2 SMP/MTs belum terakreditasi minimal B pada tahun 2019)
5. Belum semua anak usia 13-15 tahun terserap pada SMP/MTs (APS SD/MI sebesar 99,90 dan SMP/MTs sebesar 98,40 tahun 2020)

6. Belum seluruh guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1/DIV (guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tahun 2020 sebesar 87,94 persen)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Permasalahan:

1. Jumlah Posyandu belum memenuhi kebutuhan balita yang memerlukan pelayanan (rasio posyandu perbalita tahun 2020 sebesar 12,38 sedangkan standar ideal adalah 13)
2. Pemenuhan gizi anak balita masih rendah (prevalensi anak balita stunting sebesar 14,9% dan prevalensi anak balita yang kurus/ wasting sebesar 5,24% tahun 2020)
3. Pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil masih rendah (16,80 persen ibu hamil mengalami anemia pada tahun 2019)
4. Penyebaran penyakit menular masih tinggi (terdapat 34 pasien HIV, terdapat 40 pasien TB pada tahun 2020)
5. Pengawasan penggunaan narkoba masih rendah (proporsi penduduk yang pernah menggunakan narkoba sebesar 6,72 per 10.000 penduduk)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan:

1. Akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan masih kurang
2. Ketersediaan sumber air baku Kota Bukittinggi belum memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan belum menyeluruh terpenuhi
4. Ketersediaan sarana air limbah belum memadai
5. Luasan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bukittinggi belum memenuhi target (Persentase luas ruang terbuka publik terhadap luasan RTH publik sudah mencapai 78% tahun 2020 dan itu masih belum memenuhi UU Nomor 26 Tahun 2017)
6. Luas kawasan tertutup pepohonan semakin berkurang setiap tahunnya (Persentase luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara (Ha) menurun sebesar 6,48 persen selama 2 tahun terakhir).

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan:

1. Masih banyak masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni (Persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga baru mencapai 75 persen tahun 2020)
2. Belum tuntas penanganan rumah kumuh kawasan perkotaan (Persentase rumah tangga kumuh perkotaan)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan:

1. Cakupan linmas per-kelurahan belum memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota (sebesar 36 persen dari ketentuan 100 persen)
2. Pelanggaran Perda belum semua terselesaikan pada tahun bersangkutan (Persentase kasus pelanggaran perda terselesaikan pada tahun 2020 sebesar 93 persen)
3. Ketersediaan sarana penanggulangan kebakaran belum memenuhi standar International Fire Chiefs Association of Asia/ IFCAA (Cakupan ketersediaan mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk masih 49,58 persen tahun 2020)
4. Masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan kebakaran masih sedikit (belum terbentuknya relawan kebakaran).

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Permasalahan:

1. Capaian percepatan penanggulangan kemiskinan belum memenuhi target (Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 4,74% jauh dibawah target yaitu 2,84 pada tahun 2021)
2. Pemenuhan hak dasar dan inklusifitas penyandang disabilitas masih rendah (Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusifitasnya hanya 17,35 pada tahun 2019)
3. Proporsi penduduk miskin dan rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) masih rendah (Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan sebesar 34,80 persen tahun 2019)
4. Angka PPKS di Kota Bukittinggi masih tinggi, terutama anak penyandang kedisabilitas, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, pengemis, pemulung, korban bencana alam, perempuan rawan sosial dan fakir miskin (Tahun 2020)

menunjukkan angka anak penyandang kedisabilitas sebanyak 150 anak, lanjut usia terlantar sebanyak 745 orang, penyandang disabilitas sebanyak 565 orang, pengemis sebanyak 3 orang, pemulung sebanyak 54 orang, korban bencana alam sebanyak 690 orang, perempuan rawan sosial sebanyak 936 orang dan fakir miskin sebanyak 5.231 orang).

Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan:

1. Capaian pengentasan pengangguran belum optimal (pengangguran terbuka Kota Bukittinggi tahun 2020 sebesar 7,51 persen, dibawah target RPJMD sebesar 5,28 persen)
2. Capaian peningkatan partisipasi angkatan kerja belum optimal (angka partisipasi angkatan kerja tahun 2020 sebesar 69 persen, dibawah target RPJMD sebesar 73,45 persen)
3. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah (Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebesar 13,64 persen tahun 2020)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan:

1. Partisipasi perempuan di legislatif, eksekutif dan yudikatif masih rendah (hanya 8% dari anggota DPRD perempuan, dalam pemerintahan perempuan pengambil kebijakan (eselon 2) hanya 13% , camat 0%, lurah 12% dan di lembaga Yudikatif 42%)
2. Indeks Ketahanan Keluarga masih rendah (Terdapat pasangan yang belum sah secara negara dalam pernikahan pada tahun 2020 sebanyak 79 persen. Perempuan kepala keluarga pada tahun 2018 sebanyak 1.307 orang dan tahun 2019 sebanyak 4.212 orang. Angka stunting 14,9% pada Tahun 2020 dan rasio KDRT Tahun 2020 sebanyak 13,48)
3. Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi (Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan sebesar 0,3 pada tahun 2019)

4. Masih ada anak yang mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional. (Jumlah anak (0 - 18 tahun) yang mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional pada tahun 2019 sebesar 0,06 % dari 10 ribu anak)
5. Penanganan 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus masih rendah (Jumlah anak disabilitas usia 0-18 yang ekonomi rentan pada tahun 2019 sebanyak 96 orang (yang termasuk dalam basis data BDT baru 2 orang), terjadi peningkatan kasus anak berhadapan dengan hukum dari 3 orang pada tahun 2018 menjadi 7 orang pada tahun 2019 dan 2020)
6. Layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal (belum terbentuk UPT PPA dan rumah perlindungan)
7. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Rate/ ASFR masih tinggi (Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun terhadap 10.000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun sebesar 33)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Permasalahan:

1. Tingginya ketergantungan Kota Bukittinggi terhadap suplai pangan utama (beras) dari luar Kota Bukittinggi (Ketersediaan pangan utama Kota Bukittinggi sebesar 4,16 kg/ penduduk/ tahun).
2. Pola konsumsi masyarakat Kota Bukittinggi masih belum sesuai B2SA/ Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (Skor pangan harapan/ PPH mengalami penurunan tahun 2016 dari 91,8, tahun 2017 menjadi 87,3, tahun 2018 menjadi 82,1, dan tahun 2018 menjadi 83,1, sampai tahun 2020 menjadi 81,5)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan:

Belum semua persil tanah yang dikuasai pemerintah daerah memiliki sertifikat (Dari total 420 persil tanah yang dikuasai, hanya 137 persil dengan luas 385.121,80 M² telah memiliki sertifikat dan sebanyak 283 persil dengan luas 757.946,46 M² belum memiliki sertifikat)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan:

1. Timbunan/ produksi sampah terus mengalami peningkatan (produksi sampah tahun 2016 sebanyak 432 m³ dan meningkat mencapai 45.068 ton tahun 2020)
2. Banyak usaha / kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan izin lingkungan. Jumlah izin lingkungan usaha kegiatan yang dikeluarkan s/d tahun 2017 sebanyak 74 usaha kegiatan, yang taat dan memenuhi hanya sebanyak 4 usaha kegiatan.

Pada tahun 2019 dari sebanyak 98 usaha kegiatan, yang taat/ memenuhi hanya sebanyak 9 usaha kegiatan)

3. Pencemaran air sungai masih tinggi (skor mutu Batang Agam -59 dan Batang Tambuo adalah -52 yaitu termasuk pada Kelas D: buruk)
4. Belum ada Taman keanekaragaman hayati

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan:

Belum seluruh penduduk wajib KTP memiliki KTP (rasio penduduk yang telah memiliki KTP terhadap penduduk wajib KTP sebesar 99,96 persen tahun 2020)

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan:

1. Kepesertaan KB di Kota Bukittinggi masih rendah (Persentase peserta KB aktif terhadap jumlah Pasangan Usia Subur sebesar 68,53 persen pada tahun 2020)
2. Penyediaan kebijakan pengendalian penduduk belum optimal (belum tersusun Kebijakan Pengendalian Penduduk/ Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang meliputi 5 (Lima) bidang yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk di Kota Bukittinggi)
3. Kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dalam Kerjasama Pendidikan Kependudukan melalui jalur formal ,informal dan non formal, belum efektif.
4. Jumlah remaja yang terpapar edukasi kesehatan reproduksi dan gizi remaja, masih rendah (Tahun 2020 sebesar 290 orang)
5. Masih rendahnya pemahaman PUS tentang metoda kontrasepsi modern (rasio akseptor KB tahun 2020 sebesar 68,06%)

8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Permasalahan:

1. Budaya *zero accident* belum terukur (rasio jumlah kecelakaan terhadap jumlah kendaraan masih 1:500)
2. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor belum optimal (Tahun 2020, persentase kepemilikan KIR angkutan umum hanya 79 persen dengan jumlah uji KIR terhadap jumlah angkutan umum sebanyak 4.150, hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya gedung pengujian, kendaraan bermotor yang representatif, dan UPPPKB yang belum terakreditasi)
3. Rendahnya pemenuhan kebutuhan rambu dan marka lalu lintas (Persentase pemenuhan rambu lalu lintas tahun 2020 sebesar 41,4 persen)

9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan:

1. Belum seluruh kelurahan memiliki Kelompok Informasi Masyarakat/ KIM (Rasio KIM terhadap jumlah kelurahan sebesar 62,5 persen tahun 2020).
2. Pengelolaan isu publik dan aduan masyarakat belum optimal (belum tersedia aplikasi pengelola isu publik dan hubungan masyarakat)

10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan:

1. Cakupan koperasi aktif masih rendah (jumlah koperasi aktif sebesar 94 koperasi tahun 2020)
2. Masih rendahnya keterampilan dan modal pelaku usaha mikro
3. Masih terbatasnya pemasaran hasil usaha mikro

11. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Permasalahan:

1. Terbatasnya SDM pengelola statistik (belum ada fungsional stastisian dan geodesi)
2. Pengelolaan Satu Data Indonesia belum optimal (belum ada regulasi/ kebijakan pengelolaan SDI di tingkat daerah)

12. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Permasalahan:

1. Kebijakan pengamanan informasi belum tersedia (perlu penyusunan Rencana strategis pengamanan informasi dan tata kelola keamanan informasi)
2. Layanan keamanan informasi belum optimal (hanya 2 SKPD yang menerapkan tanda tangan elektronik)
3. Terbatasnya sumber daya pengelola keamanan informasi (tidak ada pejabat fungsional pengelola persandian)

13. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Permasalahan:

1. Tingkat kunjungan perpustakaan di Kota Bukittinggi masih rendah (hanya 6,75 persen kunjungan dibandingkan populasi)
2. Kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai yaitu tenaga fungsional pustakawan (jumlah pustakawan tahun 2020 sebanyak 7 orang dari 9 orang tenaga pustakawan yang dibutuhkan)

14. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Permasalahan:

1. Belum seluruh perangkat daerah menerapkan arsip secara baku (hanya 23 SKPD yang sudah menerapkan arsip secara baku tahun 2020)

2. Keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang di akuisisi (belum ada arsip statis yang diakuisisi selama 5 tahun terakhir)

Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pilihan Pariwisata

Permasalahan:

Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan (Terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan domestik tahun 2020 sebesar 58,32 persen atau 304.501 orang pada tahun 2020, dan terus menurun pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19)

2. Urusan Pilihan Pertanian

Permasalahan:

1. Produksi dan luas area tanam, dan produktifitas padi terus mengalami penurunan (pada tahun 2020, produksi padi mengalami penurunan sebesar 1.673,63 ton atau 30,71 persen dari tahun sebelumnya, luas area tanam masih tetap dibanding tahun sebelumnya namun produktifitas padi mengalami penurunan sebesar 4,5 Kw/Ha).
2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurun setiap tahun selama 5 (lima) tahun terakhir (Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menalami penurunan terus menerus dari 1,37 persen tahun 2016 menjadi 1,18 pada tahun 2020).
3. Rendahnya PAD sektor peternakan dan kesehatan hewan (belum tersedianya pet hotel sebagai tempat layanan penitipan satwa, tidak tersedia pasar ternak yang representatif, tidak ada agrowisata berkonsep edukasi peternakan)

3. Urusan Pilihan Perikanan dan kelautan

Permasalahan:

1. Keterbatasan penyediaan akses pembudidaya ikan bagi kelompok perikanan dan keterbatasan penyediaan benih ikan oleh BBI (Kelompok pembudidaya ikan mandiri tahun 2019 sebesar 5%, jumlah produksi benih ikan mengalami penurunan yaitu sebanyak 274.459 ekor)
2. Rendahnya produksi perikanan (jumlah produksi perikanan tahun 2020 sebanyak 420,20 ton berada dibawah target yang ditetapkan provinsi sebesar 475 ton)
3. Rendahnya konsumsi ikan (tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun sebesar 40,5 persen tahun 2020 berada dibawah

4. Urusan Pilihan Perindustrian

Permasalahan:

Kontribusi sektor industri pengolahan menurun selama 5 (lima) tahun terakhir (Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2016 sebesar 7,22 persen mengalami penurunan secara terus menerus hingga 5,97 persen pada tahun 2020)

Permasalahan Pembangunan Urusan Pendukung, Penunjang, dan Pengawas Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan:

Belum akuratnya batas wilayah, nama jalan dan penomoran rumah (ketidaksesuaian data batas wilayah, nama jalan, dan penomoran rumah sebesar 20 persen tahun 2019).

2. Fungsi Keuangan

Permasalahan:

1. Manajemen data dan informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan masih lemah (Pada tahun 2019 (Jumlah temuan BPK terhadap sistem pengendalian intern sebanyak 3 temuan, dan jumlah temuan BPK terhadap ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah sebanyak 2 temuan)
2. Penataan manajemen asset masih lemah (Jumlah temuan terhadap pengelolaan aset daerah tahun 2019 sebanyak 1 temuan)
3. Administrasi perpajakan masih lemah (Jumlah temuan BPK terhadap pengelolaan pendapatan daerah sebanyak 1 temuan)

3. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan:

Masih rendahnya penerapan inovasi daerah oleh perangkat daerah (hanya 17,86 persen perangkat daerah yang menerapkan inovasi daerah tahun 2020)

4. Fungsi Pengawasan

Permasalahan:

1. Belum seluruh temuan pengawas yang ditindaklanjuti (Persentase tindak lanjut temuan pada 2020 sebesar 82 persen)
2. Masih ada temuan atas pemeriksaan BPK (Jumlah temuan BPK tahun 2020 sebanyak 10 temuan)

4.2 Isu Strategis

Isu strategis disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi Kota Bukittinggi;
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Bukittinggi;
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas :
 - i. RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025;
 - ii. Isu Strategis dan kebijakan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - iii. Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

4.2.1. Dinamika Internasional, Nasional, dan Regional

1. Ketidakpastian Perekonomian Global

Resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan 3 sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun, bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk beralih menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik.

Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-

panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

2. Dampak Pandemi Covid-19 Secara Global dan Nasional

Pada awal penyebaran wabah Covid-19 dunia, dampak terhadap ekonomi dunia diperkirakan akan mengikuti pola SARS pada tahun 2003. Negara yang terkena wabah akan mengalami penurunan pertumbuhan yang tajam dalam satu triwulan, tetapi akan pulih dengan cepat pada triwulan berikutnya, membentuk pola huruf V. Ekonomi dunia diperkirakan menurun, tetapi masih positif. Namun demikian, kondisi berubah sangat cepat ketika penyebaran wabah Covid-19 mulai menyebar ke berbagai negara di luar China pada akhir Februari 2020. Episentrum penyebaran wabah Covid-19 tidak lagi di China, beralih ke Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan dan menetapkan kebijakan social distancing dan lockdown, yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Aktivitas dunia mengalami gangguan besar dan menurun tajam, tercermin dari penurunan *Baltic Dry Index* (BDI) dan Indeks PMI Manufacturing global. BDI per 5 Mei 2020 turun lebih dari 45,0 persen sejak bulan Januari 2020, menggambarkan penurunan yang signifikan dari aktivitas perdagangan dunia. Sementara itu, PMI Manufacturing Global pada bulan Maret dan April 2020 tercatat di bawah 50, yang menggambarkan kontraksi output industri secara global. Pada tahun 2020, nilai investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI) dunia diperkirakan turun tajam hingga 30,0–40,0 persen. Aktivitas perdagangan dunia juga diperkirakan mengalami gangguan, turun hingga sekitar 13,0–32,0 persen. Sektor pariwisata, perjalanan wisata ke luar negeri juga diperkirakan turun hingga 40,1 persen.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia direvisi dengan cepat. Dampak ekonomi yang pada awalnya diperkirakan akan berbentuk V, berubah menjadi huruf U atau bahkan huruf L. Internasional Monetary Fund (IMF) yang pada awal tahun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3 persen, merevisi proyeksi tersebut menjadi -3,0 persen pada April 2020. Lembaga internasional lain, Oxford Economics dan Goldman Sachs, juga memperkirakan terjadinya resesi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar -2,8 dan 2,0 persen pada tahun 2020.

Wabah Covid-19 memicu peningkatan sentimen negatif di pasar keuangan global dan kepanikan pasar. Harga komoditas tahun 2019 yang meningkat seiring dengan optimisme perbaikan ekonomi dunia, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak dari penyebaran wabah Covid-19. Penurunan harga komoditas didorong oleh penurunan permintaan sebagai dampak penurunan aktivitas industri global dan perjalanan internasional. Harga komoditas yang paling terkena dampak adalah minyak mentah dunia, turun hingga ke kisaran US\$30 per barel.

Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar dari pandemi Covid-19, pemerintah berbagai negara dunia mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, baik negara maju maupun berkembang memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank sentral di beberapa negara telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan di beberapa negara juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit. Di samping itu, bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah Covid-19.

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020.

Dari sisi PDB pengeluaran, konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPRRT) diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6–1,8 persen pada tahun 2020. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (social distancing) untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat.

Pembentukan modal tetap bruto atau investasi diperkirakan terkena dampak negatif yang besar, tumbuh sebesar -2,8–0,3 persen pada tahun 2020. Tekanan pada neraca keuangan perusahaan akibat rendahnya penerimaan seiring penurunan permintaan, ketidakpastian penyelesaian Covid-19 yang mendorong investor asing maupun domestik menunda keputusan investasi, dan ditunda atau dihentikannya proyek infrastruktur pemerintah menjadi beberapa faktor yang mendorong perlambatan investasi.

Ekspor barang dan jasa yang pada awalnya ditargetkan tumbuh 3,7 persen. Diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,7–3,0 persen pada tahun 2020. Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia. Selain ekspor barang, penurunan ekspor jasa juga akan mengalami penurunan, terutama jasa transportasi dan jasa perjalanan. Turunnya ekspor perjalanan didorong oleh penurunan wisatawan mancanegara sebagai dampak penutupan perbatasan Indonesia dan negara lainnya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan juga mengalami kontraksi sebesar 12,0–7,5 persen dari sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik. Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,3–4,0 persen menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu terpengaruh oleh penyebaran covid-19. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan belanja untuk memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak Covid-19.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja terPHK tersebut, masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menambah pengangguran sebanyak 4,22 juta jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tingginya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 7,8–8,5 persen.

Penyebaran wabah Covid-19 berdampak juga terhadap pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2020. Namun pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan, antara lain (1) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditingkatkan indeks bantuannya sebesar 25 persen serta penyaluran dilakukan setiap bulan; (2) Program Sembako yang diperluas menjadi 20 juta KPM dengan indeks bantuan yang meningkat menjadi Rp200.000/KPM/bulan; (3) Bantuan sosial tunai selama 3 bulan bagi 9 juta KPM di luar wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; (4) Bantuan sosial

khusus bagi keluarga terdampak di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, bagi 1,9 juta KPM selama 3 bulan; (5) Bantuan pembebasan serta pengurangan tarif listrik 450 VA dan 900 VA bagi penduduk miskin dan rentan; serta (6) pemanfaatan Dana Desa untuk mengurangi dampak Covid-19. Dengan bantuan tersebut diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan pada kisaran 9,7–10,2 persen pada tahun 2020.

Rasio Gini yang mengalami penurunan secara bertahap sejak tahun 2016 hingga mencapai 0,265 pada Tahun 2020, diperkirakan akan kembali meningkat sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19. Pada tahun 2021, capaian rasio gini menyentuh kisaran angka 0,379-0,381.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak pula pada IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Penurunan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan daya beli. Pembatasan aktivitas penduduk selama pandemic menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, serta terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal. Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Kecepatan menghentikan penularan akan mencegah jumlah kematian yang besar, mempercepat selesainya pandemi dan membatasi penyebaran COVID-19 pada wilayah tertentu (disease containment).

Namun saat ini sistem kesehatan Indonesia masih relatif lemah disebabkan oleh kecilnya investasi di sektor kesehatan, khususnya sektor kesehatan publik (public health) termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif maupun kuratif. Alhasil, tekanan besar pada sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian karena COVID-19 berdampak pada terhambatnya penanganan pelayanan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit.

Pandemi COVID-19 juga berdampak nyata pada penyelenggaraan pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah (keluarga), melalui pembelajaran daring berbasis teknologi informasi. Sebagai langkah darurat, sekolah di rumah tentu saja penting, namun proses pembelajaran daring tidak sepenuhnya efektif. Dampak lain yang juga harus mendapat perhatian serius adalah kemampuan finansial keluarga (rumah tangga) yang menurun karena kehilangan pekerjaan, sehingga tidak dapat membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi demikian dapat menyebabkan siswa-siswa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, IPM diperkirakan akan mencapai 72,11–72,16 lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam RKP tahun 2020 sebesar 72,51. Perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak pula pada IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Penurunan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan daya beli. Pembatasan aktivitas penduduk selama pandemi menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, serta terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal.

Penyebaran Covid-19 diperkirakan menyebabkan perubahan target penurunan emisi GRK dari 26,29 persen menjadi pada kisaran 25,36-26,03 persen pada tahun 2020. Di satu sisi, penyebaran COVID-19 berdampak signifikan terhadap aktivitas sosial-ekonomi, ditandai dengan menurunnya utilisasi kapasitas pada sektor industri dan jasa, serta sektor lainnya yang terkait dengan lahan. Penurunan aktivitas ekonomi tersebut diperkirakan berdampak positif pada penurunan tingkat emisi GRK. Dengan adanya perubahan pada aktivitas ekonomi tersebut dan juga perubahan pada kebijakan pembangunan rendah karbon menyebabkan proyeksi total emisi GRK mengalami penurunan dari 1.414.435 ton CO₂ menjadi 1.353.565-1.365.825 ton CO₂ pada tahun 2020.

Disamping itu, perubahan tersebut juga menyebabkan proyeksi baseline emisi GRK di tahun 2020 mengalami penurunan, dari 1.918.819 ton CO₂ menjadi 1.829.783 ton CO₂. Di sisi yang lain, Covid-19 berimplikasi negatif pada besaran anggaran untuk implementasi aksi mitigasi serta program dan kegiatan pembangunan rendah karbon. Aksi pembangunan rendah karbon seperti reforestasi, pencegahan deforestasi, peningkatan kapasitas EBT dan efisiensi energi pada tahun 2020 diperkirakan tidak dapat berjalan. Kondisi tersebut akan berdampak negatif pada upaya penurunan emisi GRK pada tahun 2020 dengan magnitude yang lebih sedikit lebih besar dari penurunan emisi GRK akibat penurunan aktivitas sosial ekonomi sebagai dampak dari penyebaran Covid-19.

Dampak dari tidak terlaksananya aksi pembangunan karbon pada tahun 2020, diperkirakan akan dirasakan di tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi karena tidak semua aksi pembangunan rendah tersebut berimplikasi langsung pada penurunan emisi tahun 2020. Terdapat aksi yang baru berdampak pada penurunan emisi setelah beberapa tahun kemudian, seperti restorasi gambut dan reforestasi.

4.2.2. Isu Strategis dan Kebijakan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025

Dengan mempedomani permasalahan pembangunan dan faktor-faktor strategis jangka panjang di Kota Bukittinggi maka teridentifikasi beberapa isu strategis. Isu-isu strategis pada dasarnya menyangkut dengan kondisi dan aspek penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi sampai dengan berakhirnya periode RPJPD pada Tahun 2025. Karena isu-isu tersebut merupakan kondisi yang mendasar dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan, oleh karena itu penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir masalah pokok pembangunan dan isu-isu strategis. Analisis terhadap isu strategis yang ditetapkan dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengamalan Agama dan Kearifan Lokal

Pemahaman agama dan budaya untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat kota menjadi isu strategis yang sangat penting dimasa mendatang. Sebab, meskipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun dalam implementasinya terlihat belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat. Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negative yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai. Falsafah ini telah mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat Minagkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. Kedua, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia.

Selanjutnya, yang ketiga, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance dan clean government. Membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku. Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada output dan outcomes.

Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan.

Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan tepercaya, yaitu :

- a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
- c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
- d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)
- e. Perlunya semua stakeholder untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan masyarakat.
- f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari hardware dan software. Hardware berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah *brainware* berupa sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public. Disinilah pentingnya *reinventing government* dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi focus untuk dioptimalkan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ditinjau dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kecenderungan peningkatan yang stabil dan berada diatas rata-rata IPM Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat maka IPM Kota Bukittinggi berada pada urutan tertinggi kedua setelah Kota Padang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang Kota Bukittinggi yang dibangun sejalan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah. Peningkatan pembangunan daerah yang tidak sejalan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan berdampak kepada peningkatan kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang akan memberikan efek penggandaan terhadap pengembangan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi harus mampu mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bukittinggi sehingga dapat mempertahankan predikat yang sejak lama dikenal sebagai kota pendidikan dan kota yang berbudaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya diukur dengan pengeluaran perkapita masyarakat, peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang diukur melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui peningkatan angka harapan hidup masyarakat Kota Bukittinggi.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi

guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah.

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. Ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan perekonomian daerah yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi individu dan masyarakat berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Percepatan pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015, terdapat fenomena pada beberapa negara yang targetnya dikhawatirkan tidak tercapai. Namun dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai kelanjutan agenda global pasca MDGs, kekhawatiran ini tidak terjadi.

Agenda SDGs ini relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2015, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini.

Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan :

- a. penurunan tingkat pengangguran;
- b. ketersediaan tenaga kerja terampil;
- c. peningkatan pendapatan masyarakat,
- d. meningkatnya produktivitas usaha;
- e. pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

5. Pengembangan Kepariwisata

Kegiatan pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan perekonomian Kota Bukittinggi. Sektor pariwisata memberikan kontribusi paling besar pada PAD Kota Bukittinggi dan berkontribusi besar terhadap perkembangan sektor-sektor pada PDRB Kota Bukittinggi yang berkaitan dengan aktifitas pariwisata. Oleh karena itu Perkembangan Kota Bukittinggi akan sangat dipengaruhi oleh pengembangan sektor kepariwisataan sebagai sektor dominan dan pilar penting pembangunan kota.

Sebagai sektor utama dan dominan dalam pengembangan perekonomian daerah Kota Bukittinggi, sektor pariwisata menjadi isu strategis pengembangan Kota Bukittinggi. Pengembangan daya tarik objek wisata dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata menjadi prioritas pengembangan pariwisata kedepan. Pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi secara jangka panjang diarahkan kepada pengembangan pariwisata yang berbudaya. Melalui konsep pariwisata yang berbudaya, Kota Bukittinggi dapat mengembangkan kebudayaan dan kearifan lokal menjadi bagian atraksi wisata serta melindungi kebudayaan daerah dari masuknya kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya daerah Kota Bukittinggi.

6. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah.

Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan Kota Kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur Kereta Api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi masal yang murah dan representatif. Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Di samping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep smart city. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional.

7. Peningkatan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Pesatnya perkembangan Kota Bukittinggi berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan ruang bagi peruntukan infrastruktur dan kegiatan perekonomian. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi telah mengatur peruntukan ruang Kota Bukittinggi untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan Kota Bukittinggi serta mengendalikan angka alih fungsi lahan Kota Bukittinggi. Keberlangsungan sumber daya alam secara jangka panjang harus tetap dipertahankan untuk menyediakan lingkungan yang sehat untuk generasi berikutnya dan menjaga Kota Bukittinggi dari ancaman bencana alam. Namun demikian, menjaga keberlangsungan sumber daya alam juga tidak menghalangi perkembangan daerah. Rencana tata ruang wilayah menyediakan Batasan Batasan terhadap pengembangan infrastruktur tanpa menghambat perkembangannya.

8. Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan. Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep green city juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi

Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030, dirumuskan beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bukittinggi, yaitu:

- a. Pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan;
- b. Pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata didasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan sistem transportasi;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana Kota Bukittinggi yang merata dan terpadu secara regional dan nasional;

- d. Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat;
- f. Pengembangan sektor pariwisata alam dan pariwisata budaya Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional; dan
- g. Peningkatan fungsi dan kualitas perlindungan setempat dan cagar budaya di Kota Bukittinggi;
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

3. Kebijakan Pembangunan Daerah tetangga

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat, maka perencanaan pembangunan Kota Bukittingi meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD. Adapun penyelarasan pembangunan antar daerah di Kota Buktinggi hanya dengan RPJMD Kabupaten Agam. Karena Kota Bukitinggi dikelilingi hanya oleh Kabupaten Agam.

Tabel 4.1
Hubungan Pembangunan Kota Bukittinggi dengan Daerah Tetangga

NO	KABUPATEN AGAM	KETERKAITAN
1	Kabupaten Agam yang memliki peluang kerja yang jauh sedikit dari Kota Buktinggi, sehingga akan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dengan daerah tujuan terdekat adalah Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi dapat menjadi tujuan bagi para pencari kerja dan penduduk miskin yang bekerja tanpa keahlian
2	Kabupaten Agam sedang membenahi objek objek Wisata	Kota Bukittinggi akan menerima manfaat dari pembangunan objek wisata di Kabupaten Agam , terutama dibidang jasa hotel dan perdagangan dan jasa
3	Minimnya fasilitas kesehatan dan jauhnya jangkauan masyarakat ke Rumah Sakit di Kabupaten Agam di Lubukbasung, mengakibatkan penduduk memilih alternatif memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi akan menjadi sasaran utama bagi masyarakat di wilayah Agam dalam peningkatan kualitas kesehatan dengan keberadaan beberapa Rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Propinsi, dan swasta serta ditambah dengan keberadaan RSUD
4	Masih rendahnya IPM Kabupaten Agam dibanding Kota Bukittinggi	IPM Kota Bukittinggi jauh lebih tinggi dari Kabupaten Agam menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi sasaran pendidikan bagi penduduk di wilayah sekitar Bukitinggi.
5	Kabupaten Agam belum mempunyai pusat perdagangan yang merupakan tujuan propinsi tetangga.	Kota Bukittinggi mempunyai Pusat grosir dan eceran yang merupakan pusat grosir di wilayah Sumatera Tengah, yang identik dengan Pusat Grosir Tanah Abang, menguntungkan Kota Bukittinggi untuk peningkatan ekonomi masyarakat, karena propinsi tetangga memanfaatkan pusat gosir tersebut dalam perdagangan khususnya konveksi

NO	KABUPATEN AGAM	KETERKAITAN
6	Kabupaten Agam memiliki sumber air baku yang sangat dibutuhkan oleh Kota Bukittinggi untuk kebutuhan air bersih	Kota Bukittinggi membutuhkan kerjasama lanjutan dengan Kabupaten Agam dalam mencari sumber air baku yang baru untuk disalurkan di Daerah Kota Bukittinggi.

4.2.3. Sasaran-Sasaran Pembangunan yang Belum Dapat Dipenuhi pada Masa RPJMD Sebelumnya

Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi salah satu dasar analisa isu strategis Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026. Beberapa sasaran pembangunan yang belum optimal pencapaiannya diuraikan sebagai berikut :

1. Pencapaian RTH Kota

Luas RTH publik yang seharusnya tersedia dibandingkan dengan luas Kota Bukittinggi adalah 5.047.800 m2, sedangkan luas RTH publik pada akhir tahun 2020 adalah 3.924.200 m2 (78% dari target). Oleh karena itu, masih terdapat kekurangan RTH publik sekitar 1.123.600 m2 atau sekitar 22% dari target yang diamanatkan oleh undang-undang.

Penyebab tidak tercapainya target capaian persentase RTH Publik dikarenakan kawasan yang seharusnya menjadi RTH dalam kondisi terbangun sehingga hal ini menjadi kendala dalam penambahan luas kawasan RTH. Disamping itu, lahan untuk pembangunan dan penambahan luas RTH yang sulit disediakan di Kota Bukittinggi.

Penyebab lain yang membuat tidak tercapainya target adalah karena sebagian lahan yang berpotensi untuk diplot sebagai RTH adalah tanah kaum sehingga dibutuhkan pembahasan/negosiasi yang panjang dengan tokoh masyarakat untuk menyepakati suatu area untuk dijadikan RTH publik. Harga tanah yang tinggi di kota Bukuttinggi juga merupakan faktor pendorong kegagalan pencapaian target pemenuhan RTH publik karena keterbatasan APBD untuk pembelian tanah dimaksud.

2. Pemenuhan target universal akses (sanitasi dan air bersih)

Cakupan akses air minum layak Kota Bukittinggi belum 100 persen tahun 2020, upaya pemerintah Kota Bukittinggi untuk memenuhi cakupan akses air minum layak bagi masyarakat Bukittinggi baru terealisasi 88.68% atau 114.211 jiwa dari 128.783 jiwa. Masih terdapat sekitar 14.572 jiwa yang belum mendapatkan cakupan akses air minum layak di Kota Bukittinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memperluas cakupan akses air minum layak, salah satunya dengan Pembangunan Embung yang dilatarbelakangi oleh masih tingginya kebutuhan akan air di Kota Bukittinggi.

Selain itu, upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menambah debit air minum di Kota Bukittinggi adalah mencari sumber air baku melalui kerjasama dengan Kabupaten Agam yaitu melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional Bukittinggi-Agam dimana saat ini masih dalam tahap pembebasan Finalisasi MoU di Kementerian PUPR dan melalui upaya memaksimalkan potensi sumber air yang ada di Kota Bukittinggi sendiri yaitu rencana pembangunan SPAM Panorama Baru. Upaya lain adalah mengurangi tingkat kebocoran air yaitu dengan penggantian pipa distribusi PDAM yang sudah tua (pipa zaman Belanda) yang dilakukan secara bertahap dengan pendanaan APBN dan APBD Kota Bukittinggi.

Capaian kinerja untuk akses sanitasi layak baru mencapai 96,38%. Hal ini berarti bahwa jika dibandingkan dengan target nasional untuk tahun 2019 yang sudah harus 100%, pencapaian Kota Bukittinggi masih berada dibawah target nasional. Pembangunan Sanitasi Kota Bukittinggi telah dirumuskan dalam Buku Putih Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dimuat dalam bentuk Memorandum Program Integrasi Program Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Dan Nasional melalui Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR. Monitoring dan evaluasi secara nasional program ini dilakukan dalam City Sanitation Summit setiap tahunnya seluruh pemerintah kabupaten dan kota peduli sanitasi, yang tergabung dalam AKKOPSI.

Pada tahun 2016, berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi ditargetkan 90% sanitasi yang ada di Bukittinggi sudah termasuk dalam kategori sanitasi layak, dan pada akhir tahun 2019, sesuai target nasional 100% sanitasi sudah harus masuk dalam sanitasi layak. Fokus penanganan dalam memenuhi sanitasi layak ini meliputi penyediaan tangki septik baik komunal ataupun terpusat. Selanjutnya penyediaan IPLT yang juga akan diarahkan sebagai IPLT Regional karena keterbatasan lahan di Bukittinggi.

3. Penurunan Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020 secara nasional capaian pertumbuhan ekonomi nasional turun secara menyeluruh, bahkan penurunan ini terburuk dalam 5 tahun terakhir. Tidak terkecuali terjadi pada Kota Bukittinggi, penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam 5 tahun terakhir adalah dampak dari menurunnya kinerja perekonomian Nasional.

Secara umum, apabila terjadi penurunan kinerja perekonomian nasional maka hal inipun akan diikuti oleh daerah, termasuk Kota Bukittinggi. Jika di Indonesia penyebab utamanya adalah karena melemahnya sektor industri pengolahan maka di Kota Bukittinggi lebih didominasi oleh sektor perdagangan dan pariwisata.

Menurunnya kinerja perekonomian juga didorong oleh penurunan investasi swasta ke Kota Bukittinggi dan turunnya industri rumah tangga yang disebabkan oleh turunnya permintaan baik nasional maupun internasional dalam bentuk ekspor.

4. Pencapaian Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2020 realisasi kinerja untuk tingkat kemiskinan sebesar 4,74% masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,35%. Capaian indikator Tingkat Kemiskinan sejak awal RPJMD masih belum dicapai. Namun hingga tahun 2020, angka capaian tiap tahunnya terus bergerak turun.

Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Perwujudan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan terus muncul sebagai sebab ataupun akibat dari berbagai jenis persoalan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, keteringgalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

4.2.4. Isu Strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penentuan isu strategis di dalam laporan KLHS dilakukan dari 3 (tiga) sumber, yakni (1) Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Konsultasi Publik, (2) Rumusan isu strategis dari Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), dan (3) Rumusan Isu Strategis dari Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai Perpres No. 59/2017. Berikut diuraikan isu strategis tersebut.

1. Isu Strategis dari konsultasi Publik

Ada 5 (lima) isu strategis yang dihasilkan dari serangkaian proses konsultasi publik KLHS RPJMD Kota Bukittinggi. Isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah;
- 2 Rendahnya ketersediaan air bersih;
- 3 Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain;
- 4 Rendahnya kualitas air bersih; dan
- 5 Rendahnya kualitas dan kapasitas drainase.

2. Rumusan Isu Strategis Berdasarkan DDDTLH

Dinilai dari supply dan demand jasa ekosistem penting, yakni jasa penyediaan pangan, air dan daya dukung fungsi lindung. Didapati bahwa:

1. Kota Bukittinggi sudah mengalami defisit dalam penyediaan pangan, artinya kemampuan memproduksi pangan jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan.
2. Dari sisi kuantitas, Kota Bukittinggi belum mengalami defisit penyediaan air. Namun dari sisi kualitas, Bukittinggi menghadapi defisit air bersih.
3. Kota Bukittinggi berada dalam kondisi sedang dari sisi daya dukung fungsi lindung, dimana luas lahan dengan fungsi lindung mencapai 56% dari total luas lahan.

3. Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Berdasarkan tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), dirumuskan isu strategis TPB/SDGs sebagai berikut :

Tabel 4.2
Isu Strategis TPB/SDGs Berdasarkan Ketidaktercapaian (Indikator Belum Mencapai Target dan Indikator yang Belum Memiliki Data)

NO	BIDANG	ISU	
1	KESEHATAN		
		SPM	
	2.2.1*	1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
	3.2.1*	2	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
	3.2.2*	3	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
	3.2.2.(b)	4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
	3.4.2.(a)	5	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
	3.7.1*	6	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
	3.7.1.(a)	7	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
	3.7.1.(b)	8	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
	1.4.1.(a)	1	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
	1.4.1.(b)	2	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
	1.4.1.(c)	3	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
	2.2.1.(a)	4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
	2.2.2.(b)	5	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
	3.1.2.(a)	6	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
		NON SPM	
	1.3.1.(a)	1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
	3.4.1.(c)	2	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.
	3.4.2*	3	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.

NO	BIDANG	ISU
	3.5.1.(e)	4 Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
	3.8.2.(a)	5 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
	5.6.1.(b)	6 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
	3.4.1.(a)	7 Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.
	3.5.2*	8 Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
	3.a.1*	9 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
2	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
		SPM
	1.5.1*	1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
	1.5.1.(e)	2 Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
	11.5.1*	3 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
	11.5.1.(a)	4 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
	11.5.1.(c)	5 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
	11.b.1*	6 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.
	13.1.2*	7 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		NON SPM
	1.5.2.(a)	1 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
	1.4.1.(f)	2 Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.
3	PEKERJAAN UMUM	
		SPM
	1.4.1.(d)	1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
	1.4.1.(e)	2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
	6.1.1.(a)	3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
	6.1.1.(c)	4 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
	6.2.1.(e)	5 Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
		NON SPM
	6.2.1.(c)	1 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
	6.2.1.(f)	2 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
	6.3.1.(a)	3 Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
	6.3.1.(b)	4 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
	6.5.1.(c)	5 Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
	11.3.2.(b)	6 Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
	11.1.1.(c)	7 Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.
4	PENDIDIKAN	
		SPM
	4.2.2.(a)	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
	4.6.1.(b)	2 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

NO	BIDANG	ISU	
		NON SPM	
	4.1.1.(b)	1	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
	9.5.1*	2	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
5	PERUMAHAN RAKYAT		
		SPM	
	11.1.1.(a)	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
6	SOSIAL		
		SPM	
	1.5.1.(b)	1	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
	1.5.1.(c)	2	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
		NON SPM	
	1.3.1.(d)	1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
	1.a.1*	2	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
	10.2.1*	3	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

4.2.5. Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan faktor pertimbangan di atas, maka penetapan isu strategis RPJMD Kota Bukittinggi menggunakan kriteria sbb :

- a. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, propvinsi dan daerah Kota Bukittinggi;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pembangunan daerah;

Setelah menganalisis isu strategis dari dinamika internasional, nasional, dan regional serta isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Bukittinggi maka ditetapkan isu strategis Kota Bukittinggi, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
2. Percepatan pengurangan kemiskinan (akan diselesaikan oleh isu tartegis no. 1)
3. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
6. Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang disabilitas
7. Peningkatan infrastruktur perkotaan
8. Pelestarian lingkungan hidup
9. Mewujudkan Ketahanan Pangan

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Dampak Covid-19 pada perekonomian nasional juga berdampak pada perekonomian daerah. Pandemi Covid-19 berdampak pada perlambatan semua komponen PDRB. Sejalan dengan program pemerintah pusat, peningkatan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kota Bukittinggi kedepan juga difokuskan pada pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi. Peningkatan perekonomian masyarakat terdampak pandemi covid perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi lima tahun kedepan.

Melemahnya *demand* terhadap produk unggulan daerah atas melemahnya konsumsi dan daya beli masyarakat perlu ditingkatkan baik berupa program pemberdayaan maupun bantuan langsung. Melalui program pemberdayaan dan bantuan langsung diharapkan konsumsi dan daya beli masyarakat meningkat dan akan memberikan multiplier efek terhadap tumbuh kembang usaha kecil menengah dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, anjloknya jumlah kunjungan wisatawan sebagai dampak pandemi Covid-19 perlu disikapi melalui pemberian insentif dan stimulus serta kebijakan yang berpihak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) terutama yang bergerak pada sektor unggulan yaitu sektor-sektor pendukung pariwisata perlu untuk percepatan dalam rangka pemulihan perekonomian daerah.

2. Percepatan Penggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Capaian percepatan penanggulangan kemiskinan belum memenuhi target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah sebelumnya. Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 4,74 persen jauh dibawah target yaitu 2,84 pada tahun 2021. Ditambah dengan meningkatkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran secara nasional sebagai dampak pandemi Covid-19 yang juga berdampak sama terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran Kota Bukittinggi.

Masih tingginya angka PPKS di Kota Bukittinggi terutama lanjut usia terlanjar, pengemis, pemulung, korban bencana alam, perempuan rawan sosial dan fakir miskin juga perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi. Pemenuhan hak dasar masyarakat miskin terutama jaminan sosial dan bantuan sosial harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Agenda pada Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan agenda global pasca MDGs, relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2020, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

3. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Meskipun sebagian besar indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian, namun beberapa tantangan perlu menjadi perhatian diantaranya terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemerataan sarana dan prasarana, akreditasi sekolah, dan kualitas serta kesejahteraan tenaga pengajar.

Penyediaan akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara.

Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. Ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

Penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita perlu menjadi perhatian utama pemerintah pada sektor ini. Masih tingginya prevalensi balita yang menderita pendek, prevalensi balita mengalami kurus, kasus anemia pada ibu hamil perlu disikapi melalui penanganan yang tepat. Selain itu, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyalahgunaan narkoba menjadi isu yang harus ditangani secara baik pada beberapa tahun kedepan. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance dan clean government. Membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku. Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcomes*. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. Hardware berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah brainware berupa sumber daya manusia aparatur yang professional dan berintegrasi.

6. Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas.

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan.

Rendahnya partisipasi perempuan di legislatif dan eksekutif perlu ditangani secara tepat. Masih rendahnya indeks ketahanan keluarga, kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum optimalnya pelayanan dan penanganan 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan, Kondisi ini harus di akui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

7. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Belum tuntasnya penyediaan akses sanitas dan air minum layak dan berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan sumber air baku, pemenuhan sarana dan prasarana pengolahan air limbah, penanganan genangan dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi tantangan pemerintah Kota Bukittinggi kedepan selain penanganan rumah tangga kumuh dan rumah tidak layak huni, serta sektor transportasi seperti penanganan kemacetan dan penyediaan rambu dan marka jalan.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep smart city. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik.

8. Pelestarian Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota, penanganan tumpukan sampah yang terus meningkat, dan buruknya kualitas air sungai perlu menjadi perhatian pemerintah kedepan.

4.2.6. Persandingan Isu Strategis

Rumusan isu strategis jangka menengah Kota Bukittinggi lima tahun kedepan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang sedang dihadapi dan isu-isu eksternal yang mempengaruhi dilakukan penyandingan dengan isu strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3
Persandingan Isu Strategis Nasional dan Kota Bukittinggi

No	Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024	Rancangan Isu Strategis Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Percepatan pengurangan kemiskinan
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

No	Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024	Rancangan Isu Strategis Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas.
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan infrastruktur perkotaan
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pelestarian lingkungan hidup
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber : Bapelitbang, data diolah

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2006 – 2025 telah ditetapkan Visi pembangunan jangka Panjang Kota Bukittinggi adalah Visi *“Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan pula Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 dan telah dilaksanakan dalam tiga periode jangka menengah. Ketiga Periode tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi No.19 Tahun 2005, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 – 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2010, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang terdidik , berbudaya dan beradab berdasarkan iman dan taqwa;
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
- 4) Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera;
- 5) Mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan.

Pelaksanaan RPJMD selama 3 periode telah memperlihatkan hasil yang sejalan dengan RPJPD tersebut. Pada tahun 2021 ini sampailah pada tahapan terakhir untuk melaksanakan semua misi tersebut. Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah mengajukan visi **"MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"**

Terwujudnya masyarakat HEBAT berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah adalah wujud dari masyarakat Kota Bukittinggi beradab, religius, unggul, berdaya saing tinggi, dan mandiri. Masyarakat yang beradab adalah perwujudan dari masyarakat madani, yang menjunjung nilai kemanusiaan, maju dan hebat dalam teknologi dan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai - nilai Agama. Lebih jauh visi tersebut, Bukittinggi adalah sebagai kesatuan geografis, demografis dan budaya. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Bukittinggi akan bersifat terpadu dalam wilayah yang telah ditetapkan.

HEBAT selain sebagai ungkapan yang menunjukkan keunggulan, ketauladanan dan bermartabat juga merupakan akronim dari:

H= Humanis

E= Entrepreneurship

B= Bijak

A= Agamais/ Adil

T= Tauladan.

Sementara itu, "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" adalah adat yang didasari/ ditopang oleh Syariat Agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist. Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Minangkabau. Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah adalah kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai mahluk Allah. Karena Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah yang kini menjadi identitas kultural orang Minangkabau lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses dan pergulatan yang panjang.

Oleh karena itu, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan falsafah yang akan menjiwai seluruh upaya pencapaian visi. Artinya falsafah Minangkabau tersebut dijadikan acuan dan panduan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang akan disusun dan dilaksanakan mestilah tidak bertentangan dengan norma norma adat yang telah didasarkan pada kitab suci Al Qur'an dan Hadist.

Gambar berikut memperlihatkan keterkaitan Visi RPJPD 2026 Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Gambar 5.1.
Visi Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi
Tahun 2006-2025

RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 Terwujudnya masyarakat adil,sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan			
RPJMD 2005-2010 "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi unggulan daerah (jasa dan perdagangan, kepariwisataan, pendidikan dan pelayanan kesehatan) yang dijiwai oleh Agama dan Adat, Syarak Mangato Adaik Mamakai"	RPJMD 2010-2016 "Masyarakat Bukittinggi Cerdas, Sehat dan Berekonomi Mapan dengan Dilandasi Nilai-Nilai Agama dan Adat"	RPJMD 2016-2021 Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	RPJMD 2021-2026 Menciptakan Bukittinggi HEBAT berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Sumber : RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025

Visi RPJMD Kota Bukittinggi memperlihatkan konsistensi kondisi yang diinginkan pembangunan jangka panjang yaitu membangun Bukittinggi berlandaskan kepada Agama dan Budaya alam Minangkabau. Tahun 2025 pembangunan Kota Bukittinggi bercita-cita untuk menjadikan kota Bukittinggi sebagai kota yang maju berbasiskan kepada Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

5.2 Misi

Visi yang spesifik ini memerlukan penjelasan agar setiap *stakeholders* memiliki satu pemahaman dan pandangan yang sama tentang visi pembangunan yang direncanakan. Untuk itu, Visi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dituangkan ke dalam tujuh Misi sebagai berikut

5.2.1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan prinsip ekonomi yang sejalan dengan pemikiran Bung Hatta putra bangsa kebanggaan Kota Bukittinggi yang dikenal juga sebagai Proklamator Kemerdekaan RI dan Bapak Koperasi. Konsep yang dibangun dengan ekonomi kerakyatan adalah membangun Kota Bukittinggi berbasiskan kepada usaha ekonomi yang berasaskan kepada kekeluargaan, berkeadilan yang memihak kepada rakyat kecil. Hal ini sangat relevan dengan Visi yang berorientasi kepada membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (enterprenur).

Dengan demikian, HEBAT dalam sektor ekonomi kerakyatan berarti berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi yang berorientasi pada keterlibatan sebanyak mungkin pelaku usaha dan dijiwai prinsip pemerataan dan keadilan. Lebih jauh mengingat pertumbuhan ekonomi konvensional telah menimbulkan degradasi sumber daya

alam dan kualitas lingkungan hidup maka peningkatan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan antara lain bercirikan rendah karbon, berbasis peningkatan nilai tambah pada sumber daya yang diperbaharui.

5.2.2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan

Pendidikan adalah faktor utama untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang HEBAT, sebagaimana yang dimaksud Visi RPJPD 2005-2025 dan RPJMD periode 2021-2026 Kota Bukittinggi. HEBAT dalam sektor Pendidikan mengandung makna bahwa Pendidikan yang akan dikembangkan adalah perubahan perilaku dan membentuk manusia yang berkarakter humanis, berjiwa enterprenur, bijak, agamis agar bersifat adil dan pantas menjadi tauladan untuk membangun Kota Bukittinggi Maju sesuai cita-cita RPJP 2005-2025.

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang demikian, maka semua potensi baik sumber daya manusia, infrastruktur (sarana dan prasarana pendukung), sistem dan proses pendidikan, serta teknologi harus dimanfaatkan secara optimal. Pendidikan berkarakter HEBAT ini akan dikembangkan melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

Selanjutnya, pembangunan pendidikan kota Bukittinggi juga diarahkan pada meningkatnya kehidupan keagamaan. Hal ini dengan maksud agar pembangunan pendidikan searah dengan penguatan kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat yang berdasarkan ABS-SBK.

5.2.3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Sektor kesehatan dan keberadaan lingkungan hidup yang sehat akan menentukan kualitas kehidupan Kota. Diharapkan dengan kesehatan dan lingkungan yang bersih dan sehat masyarakat kota Bukittinggi akan lebih produktif. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tentunya upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat menekan penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pembangunan sektor kesehatan dan lingkungan akan menunjang sektor lain untuk juga menjadi lebih baik.

Melalui misi ini pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik yang ditandai dengan komponen kualitas lingkungan yang juga semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan diharapkan maka derajat kesehatan masyarakat juga semakin tinggi. Perbaikan kualitas lingkungan ini diperlukan mengingat secara perlahan telah terjadi degradasi sumber daya air dan meningkatnya timbulan sampah. Peurunan kualitas lingkungan ini mengakibatkan menurunnya derajat Kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

5.2.4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Sejak awal RPJPD Kota Bukittinggi telah menetapkan sektor kepariwisataan sebagai sektor unggulan. Namun kontribusi Pariwisata dalam PDRB sulit diketahui mengingat banyak aspek yang terkait yang dapat dikategorikan sebagai bagian

kepariwisataan. Mengingat bahwa kota Bukittinggi disebut juga sebagai kota wisata namun berdasarkan indeks Kepawisataan Indonesia Bukittinggi belum termasuk kategori 10 besar. Karena itu diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan pengelolaan wisata kota Bukittinggi. Aspek-aspek penting yang berkontribusi dalam peningkatan kepariwisataan antara lain aspek lingkungan seperti kesehatan dan kebersihan serta keamanan. Selain itu aspek potensi wisata baik potensi alam maupun buatan perlu digali secara optimal.

Sementara itu di bidang seni budaya pembangunan diarahkan pada pengembangan ekspresi budaya yang dimaksudkan menguatkan budaya Minangkabau yang ABS-SBK. Hal yang sama juga terjadi pada aspek olah raga, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berperan penting dalam mengembangkan olah raga masih perlu dikembangkan.

5.2.5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan

HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan merupakan prasyarat utama pembangunan, baik nasional maupun daerah, termasuk Kota Bukittinggi. Karena kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan. Semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin baik dan cepat tercapainya tujuan pembangunan.

Pengembangan tata kelola pemerintahan yang direncanakan Kota Bukittinggi mengacu kepada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dengan menekankan asas Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Sejalan dengan itu, RPJMN 2020-2024 menggunakan 3 pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Tiga pilar tersebut adalah Aparatur Sipil Negara, Kelembagaan dan Proses Bisnis Organisasi, dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan. Dengan demikian, Kota Bukittinggi juga akan menggunakan 3 pilar ini untuk mencapai misi HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan.

5.2.6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan

Aspek sosial kemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang berhubungan dengan hampir semua aspek lain dalam RPJMD. Pemerataan pendapatan dan akses kepada sumber daya ekonomi untuk membangun ketahanan sosial akan bersentuhan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya hal ini juga berhubungan dengan penyediaan infrastruktur publik, dukungan kepada kaum disabilitas dan perhatian yang tinggi kepada manula. Peningkatan nilai-nilai sosial keagamaan dan adat istiadat memerlukan dukungan yang intensif dari tokoh adat dan ulama. Pembangunan masyarakat

yang HEBAT dalam artian dapat menjadi teladan memerlukan langkah-langkah yang nyata meskipun hasilnya tidak terlihat dalam waktu yang singkat.

5.2.7 HEBAT dalam Sektor Pertanian

Walaupun Bukittinggi identik dengan kota yang berciri perdagangan dan pariwisata, namun masih ada sektor pertanian yang perlu dikembangkan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga masih menjadi perhatian pembangunan untuk periode lima tahun ke depan. Selain itu, pada sub sektor pertanian ini, Kota Bukittinggi juga potensial untuk pengembangan komoditi hortikultura. Konsep yang cocok untuk dikembangkan di Kota Ini adalah pertanian perkotaan.

HEBAT dalam Bidang Pertanian merupakan misi yang akan membawa Kota Bukittinggi menjadi kota yang kuat, inovatif, produktif dan berkelanjutan di bidang pertanian dan pangan. Untuk itu, melalui misi ini Kota Bukittinggi akan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui pertanian perkotaan yang berkelanjutan Untuk mencapai maksud ini, Kota Bukittinggi perlu menetapkan sasaran pembangunan pertanian yakni menuju kota yang ketahanan pangan yang tinggi dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting bagi masyarakat, baik dalam menyediakan kesempatan kerja, kesempatan usaha maupun menyediakan bahan baku bagi sektor ekonomi lainnya, seperti pada industri dan jasa.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka arah kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yang ada baik tingkat kota, tingkat provinsi, nasional, serta dokumen perencanaan daerah tetangga.

Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2006-2025. Keselarasan visi dan misi pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2021 terhadap RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Keselaran Visi Dan Misi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025
dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026

RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006 - 2025	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Masyarakat Adil, Sejahtera dan Terdidik Berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan	Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
MISI	

RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006 - 2025	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
Misi 1 Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradab berdasarkan iman dan taqwa	Misi 2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Misi 2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan
Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian
Misi 4 Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga
Misi 5 Mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan	Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Selain berpedoman pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Keselarasan visi dan misi pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2021 terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Keselaran Visi Dan Misi RPJMN 2020–2024 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021–2026

RPJMN TAHUN 2020 - 2024	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
MISI	
Misi 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 2 Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian

RPJMN TAHUN 2020 - 2024	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
Misi 3 Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataaan, Seni Budaya dan Olahraga Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian
Misi 4 Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan
Misi 5 Kemajuan Budaya Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 6 Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan
Misi 7 Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga	Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 8 Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan
Misi 9 Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya, RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang disusun pada saat bersamaan. Keselarasan visi dan misi pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2021 terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Keselaran Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026

RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2026	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan	Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
MISI	
Misi 1 Meningkatkan SDM yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Misi 2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK	Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian

RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2026	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
Misi 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataaan, Seni Budaya dan Olahraga
Misi 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataaan, Seni Budaya dan Olahraga
Misi 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataaan, Seni Budaya dan Olahraga Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian
Misi 7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan

Selain mempedomani dokumen perencanaan tingkat kota, tingkat provinsi dan nasional sebagaimana disajikan diatas, penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi juga mempertimbangkan dokumen perencanaan daerah tetangga. Oleh karena seluruh wilayah Kota Bukittinggi berbatasan dengan Kabupaten Agam, maka penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 5.4.
Keselaran Visi Dan Misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026
dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026

RPJMD KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 - 2026	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
VISI	
Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani	Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
MISI	
Misi 1 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Melayani	Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan
Misi 2 Membangun Perekonomian Masyarakat yang Kokoh melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah dan Pengembangan Pariwisata	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataaan, Seni Budaya dan Olahraga Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian
Misi 3 Pembangunan Berkenlanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Keterpaduan Tata Ruang Wilayah dan Mitigasi Bencana	Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan
Misi 4 Membangun Masyarakat yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter	Misi 2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 5 Meningkatkan Kehidupan bermasyarakat yang Madani berlandaskan ABS SBK	Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran perlu dirumuskan untuk setiap Misi sebagai sebuah kebijakan strategis untuk menunjukkan prioritas yang tinggi dalam perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sementara Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kota dan Perangkat Daerah dari pencapaian program - program yang dilaksanakan.

Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah berperan penting sebagai rujukan utama dalam membangun daerah, karena menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis lima tahunan. Berikut disajikan rumusan Tujuan dan Sasaran yang diuraikan untuk setiap Misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

VISI : "MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian		Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Data
			Awal	Akhir			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 1 Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Terciptanya ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	-1,74	4,87	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13,282	13,445	13,509	13,746	14,035	14,345	14,68	14,68	BAPELITBANG
					Meningkatnya investasi hijau	Pertumbuhan PMTB (%)	-0,4	3,9	4,2	5,5	5,9	6,0	6,1	6,1	DPMPTSPTK
						Persentase realisasi investasi hijau (%)	50*	55	60	65	70	75	80	80	DPMPTSPTK
					Terbangunnya infrastruktur berorientasi hijau	Indeks daya saing infrastruktur	74*	75	76	77	78	79	80	80	DPUPR
	Terciptanya ekonomi yang merata	Indeks Gini	0,265	0,256	Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	4,74	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99	3,99	BAPELITBANG
					Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,51	7,35	7,18	6,96	6,74	6,48	6,20	6,20	DPMPTSPTK
Misi 2 Hebat dalam Sektor Pendidikan	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	82,79	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,33	11,44	11,55	11,67	11,78	11,89	12	12	DISDIKBUD
						Harapan lama sekolah (Tahun)	14,97	14,98	14,99	15,00	15,01	15,02	15,03	15,03	DISDIKBUD
						Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	45*	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	56,00	DISDIKBUD
					Meningkatnya kehidupan keagamaan	Indeks kesalehan sosial (%)	83,8*	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	85,0	SETDA

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian		Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Data
			Awal	Akhir			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 3 Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	82,79	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30	75,53	75,76	75,76	DINKES
						Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,6949*	0,7002	0,7056	0,7110	0,7164	0,7218	0,7271	0,7271	DINKES
						Prevalensi Stunting (%)	14,9	14,1	13,3	12,5	11,6	10,8	10	10	DINKES
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,56	66,64	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	47,33	55,79	55,89	55,99	56,09	58,72	61	61	DLH
					Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	22,9	35,42	37,36	38,3	39,24	40	50,5	50,5	DLH
					Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	83,54	84,54	84,64	84,74	84,84	85,42	86	86	DLH
					Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	22	24	26	27	28	30	30	30	DLH
						Persentase pengurangan sampah	75	74	73	72	71	70	70	70	DLH
Misi 4 Hebat dalam Sektor Kepariwisataa, Seni Budaya dan Olahraga	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	-5,46	4,87	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,25*	4,30	4,34	4,38	4,42	4,46	4,50	4,50	DISPARPORA
						Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	0	1	1	2	3	4	5	5	DISPARPORA
						Jumlah Kunjungan wisatawan	507.316	532.682	559.316	587.282	880.923	1.057.107	1.268.528	1.268.528	DISPARPORA

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian		Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Data	
			Awal	Akhir			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori baik	kategori sangat baik	Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	16,5	28,5	30	32	34	36	36	36	DISDIKBUD	
	Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	Indeks pembangunan olah-raga	kategori baik	kategori sangat baik	Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat 2	DISPARPORA	
Misi 5 Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria B	Kriteria BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	71,13	73,35	75,57	77,78	80,00	81,11	82,22	82,22	SETDA	
						Nilai EKPPD	32.293	32.308	32.323	32.338	32.353	32.368	32.383	32.383	SETDA	
						Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Indeks integritas pemerintah daerah	75*	75	76	76	77	77	78	78	INSPEKTORAT
						Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	81,70	84,06	85,25	86,43	87,62	88,81	90,00	90,00	SETDA
						Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	18,83	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	20,79	BADAN KEUANGAN
Misi 6 Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori baik	kategori sangat baik	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,33	61,25	61,50	62,00	62,25	62,50	63,00	63,00	DP3APPKB	
					Meningkatnya Kenyamanan Kota	Indeks Kenyamanan Kota	2,9*	3	3,15	3,3	3,4	3,5	3,55	3,55	BAPELITBANG	
					Meningkatnya kehidupan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	1,7	2	2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	DINAS SOSIAL	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian		Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Data
			Awal	Akhir			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	55*	56,5	58	59,5	61	62,5	64	64	DP3APPKB
Misi 7 Hebat dalam Sektor Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,34	1,91	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	89	89,17	89,33	89,50	89,67	89,83	90,00	90,00	DIPERTAPANG
					Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	69*	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00	DIPERTAPANG

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Merujuk kepada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat untuk mencapai sasaran. Agar strategi terlaksana dengan baik, perlu dirumuskan arah kebijakan sebagai kerangka berpikir dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu staregis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Strategi yang ditetapkan merupakan rangkaian tahapan atau langkah berikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap Misi pembangunan Kota Bukittinggi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya membutuhkan arah kebijakan untuk memperjelas bagaimana stragtegi akan dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang disusun berlandaskan Visi dan Misi RPJMD Kota Bukittinggi, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan dan menjamin Misi dapat terlaksana dan mencapai tujuannya dengan baik.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Adapun strategi yang dipilih dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Kota Bukittinggi adalah dijabarkan pada table berikut :

Tabel 6.1.
Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Bukittinggi

VISI : "MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan		
Terciptanya ekonomi kerakyatan	Meningkatnya daya beli masyarakat	Percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid
		Mengembangkan dukungan untuk meningkatkan skala usaha mikro
		Meningkatkan Peran Koperasi untuk kesejahteraan anggota
		Menciptakan Usaha Perdagangan yang kondusif
		Meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan
		Mengembangkan diversifikasi produk UKM
		Peningkatan produksi industri

VISI : "MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya investasi hijau	Meningkatkan kemudahan investasi
		Memperbaiki iklim investasi hijau
	Terbangunnya infrastruktur berorientasi hijau	Meningkatkan kualitas dan penataan infrastruktur pasar
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan bangunan pelengkap untuk menunjang akses antar pusat kegiatan
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan cakupan dan kualitas sarana dan prasarana dasar publik
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan
Terciptanya ekonomi yang merata	Menurunnya kemiskinan	Perluasan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
		Meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin dalam pengembangan Usaha Mikro untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan
	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan daya saing tenaga kerja
Misi 2 Hebat dalam Sektor Pendidikan		
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Mengembangkan sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin
		Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi
		Meningkatkan lama sekolah
		Meningkatkan kualitas pendidikan
		Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
		Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pendukung pendidikan
		Optimalisasi pengelolaan PAUD
		Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian islam
		Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis-ABS-SBK
		Meningkatkan pelestarian warisan budaya
		Meningkatkan budaya baca masyarakat
		Meningkatkan pembinaan lembaga adat
	Meningkatnya kehidupan keagamaan	Mengembangkan sumber pendanaan dan Meningkatkan kompetensi pembelajaran agama
Misi 3 Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan		
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mengembangkan sistem surveillance penyakit menular
		Meningkatkan kebugaran masyarakat

VISI : "MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam
		Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak
		Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
		Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan kemitraan dengan berbagai stakeholder
		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di faskes
		Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi lansia
		Meningkatkan status gizi remaja dan ibu hamil
		Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
Meningkatkan akses masyarakat pada sistem jaminan kesehatan		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Meningkatkan pengelolaan limbah cair domestik
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan limbah cair industri
		Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pentingnya sanitasi layak
		Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi dan pengolahannya yang memenuhi standar
		Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten Agam
		Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih
		Meningkatkannya kualitas lingkungan dengan pemberdayaan multisektoral
		Meningkatkan ketersediaan air baku
		Memperluas akses jaringan perpipaan
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Meningkatkan keragaman hayati tutupan lahan
	Meningkatnya kualitas udara	Mengendalikan pencemaran udara
		Mengurangi kebiasaan membakar sampah
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Mengembangkan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah
		Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah
		Internalisasi budaya 3R
Misi 4		
Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	Meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung teknologi informasi kepariwisataan

VISI : "MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
		Meningkatnya teknologi informasi sektor kepariwisataan	
		Meningkatkan destinasi wisata ramah keluarga ramah lingkungan	
		Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata	
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas	
		Meningkatkan olahraga rekreasi	
		Meningkatkan kenyamanan wisatawan	
		Mengembangkan atmosfir dan insentif bagi berkembang Usaha Mikro ekonomi kreatif	
Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Menumbuhkembangkan kecintaan terhadap budaya daerah	
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam even budaya	
Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	Meningkatkan olahraga prestasi tingkat propinsi dan nasional	
		Menumbuhkan dan mengembangkan bakat olahraga sejak usia muda	
		Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kelompok olahraga	
		Membiasakan kegiatan olah raga	
Misi 5 Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	
		Memperkuat basis penerimaan dari BUMD	
		Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	
		Meningkatkan profesionalisme ASN	
		Meningkatkan keadilan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan aparatur Negara untuk kinerja yang paripurna	
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih		Menyempurnakan Peraturan (Perda & Perkada) terkait Perencanaan
			Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Meningkatkan kualitas pelayanan
			Meningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kedewanan
			Meningkatkan peran kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan dan pengembangan kota
			Menerapkan prinsip pengelolaan pemerintah yang beradab dan religius
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Meningkatkan kontribusi PAD terhadap pembiayaan APBD

VISI : "MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 6 Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan		
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender
		Meningkatkan kesempatan perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik ditengah masyarakat
	Meningkatnya Kenyamanan Kota	Mensinergikan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan kumuh dan rawan kumuh (padat penduduk)
		Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk fasilitasi relokasi
		Penyebarluasan informasi terkait ketentuan pemanfaatan ruang
		Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya kebakaran
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
		Meningkatnya kehidupan Sosial
	Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi	
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Meningkatkan kapasitas Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
		Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas
Misi 7 Hebat dalam Sektor Pertanian		
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan produktivias sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan
		Mengembangkan sistem deteksi kerawanan pangan
	Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Meningkatkan kesadaran dan manfaat konsumsi beras organik
		Mengarusutamakan bercocok tanam secara organik

6.2 Arah Kebijakan

Sementara itu, pada setiap strategi yang dipilih, dirumuskan pula arah kebijakan seperti terlihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Bukittinggi

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Memperluas akses kesempatan berusaha	Memperluas akses kesempatan berusaha	Memperluas akses kesempatan berusaha	Memperluas akses kesempatan berusaha	Memperluas akses kesempatan berusaha
Membuka akses pasar produk lokal	Membuka akses pasar produk lokal	Membuka akses pasar produk lokal	Membuka akses pasar produk lokal	Membuka akses pasar produk lokal
Memperkuat akses modal Usaha mikro berdampak	Memperkuat akses modal Usaha mikro berdampak	Memperkuat akses modal Usaha mikro berdampak	Memperkuat akses modal Usaha mikro berdampak	Memperkuat akses modal Usaha mikro berdampak
Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro	Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro	Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro	Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro	Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro
Standarisasi produk Usaha Mikro	Standarisasi produk Usaha Mikro	Standarisasi produk Usaha Mikro	Standarisasi produk Usaha Mikro	Standarisasi produk Usaha Mikro
Meningkatkan kejasama pengembangan usaha	Meningkatkan kejasama pengembangan usaha	Meningkatkan kejasama pengembangan usaha	Meningkatkan kejasama pengembangan usaha	Meningkatkan kejasama pengembangan usaha
Meningkatkan kinerja usaha koperasi	Meningkatkan kinerja usaha koperasi	Meningkatkan kinerja usaha koperasi	Meningkatkan kinerja usaha koperasi	Meningkatkan kinerja usaha koperasi
Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen	Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen	Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen	Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen	Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen
Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung.	Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung.	Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung.	Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung.	Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung.
Meningkatkan informasi dan promosi produk lokal	Meningkatkan informasi dan promosi produk lokal	Meningkatkan informasi dan promosi produk lokal	Meningkatkan informasi dan promosi produk lokal	Meningkatkan informasi dan promosi produk lokal
Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan	Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan	Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan	Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan	Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan
Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar	Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar	Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar	Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar	Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar
Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro	Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro	Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro	Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro	Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro
Menciptakan kawasan One Village One Product	Menciptakan kawasan One Village One Product	Menciptakan kawasan One Village One Product	Menciptakan kawasan One Village One Product	Menciptakan kawasan One Village One Product
penumbuhan wirausaha baru	penumbuhan wirausaha baru	penumbuhan wirausaha baru	penumbuhan wirausaha baru	penumbuhan wirausaha baru
Menerapkan praktek prinsip industri hijau	Menerapkan praktek prinsip industri hijau	Menerapkan praktek prinsip industri hijau	Menerapkan praktek prinsip industri hijau	Menerapkan praktek prinsip industri hijau
Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan	Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan	Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan	Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan	Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan
Meningkatkan kualitas layanan investasi	Meningkatkan kualitas layanan investasi	Meningkatkan kualitas layanan investasi	Meningkatkan kualitas layanan investasi	Meningkatkan kualitas layanan investasi

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau
Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal	Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal	Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal	Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal	Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal
Meningkatkan penataan pasar dan pedagang	Meningkatkan penataan pasar dan pedagang	Meningkatkan penataan pasar dan pedagang	Meningkatkan penataan pasar dan pedagang	Meningkatkan penataan pasar dan pedagang
Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan	Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan	Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan	Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan	Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan
Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya	Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya	Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya	Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya	Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya
Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum	Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum	Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum	Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum	Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum
Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak	Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak	Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak	Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak	Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak
Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan
Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik	Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik	Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik	Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik	Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik
Meningkatkan cakupan sanitasi layak	Meningkatkan cakupan sanitasi layak	Meningkatkan cakupan sanitasi layak	Meningkatkan cakupan sanitasi layak	Meningkatkan cakupan sanitasi layak
Meningkatkan pemahaman tentang ketertiban keselamatan dan keamanan berlalu lintas	Meningkatkan pemahaman tentang ketertiban keselamatan dan keamanan berlalu lintas	Meningkatkan pemahaman tentang ketertiban keselamatan dan keamanan berlalu lintas	Meningkatkan pemahaman tentang ketertiban keselamatan dan keamanan berlalu lintas	Meningkatkan pemahaman tentang ketertiban keselamatan dan keamanan berlalu lintas
Optimalisasi fasilitas perndukung perlengkapan jalan	Optimalisasi fasilitas perndukung perlengkapan jalan	Optimalisasi fasilitas perndukung perlengkapan jalan	Optimalisasi fasilitas perndukung perlengkapan jalan	Optimalisasi fasilitas perndukung perlengkapan jalan
Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial	Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial	Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial	Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial	Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja	Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja	Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja	Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja	Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja
Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin
Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas	Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas	Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas	Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas	Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas
Membangun sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin berbasis filantropi	Membangun sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin berbasis filantropi	Membangun sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin berbasis filantropi	Membangun sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin berbasis filantropi	Membangun sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin berbasis filantropi
Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS serta antar PTN dan PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi	Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS serta antar PTN dan PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi	Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS serta antar PTN dan PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi	Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS serta antar PTN dan PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi	Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS serta antar PTN dan PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi
Meningkatkan capaian wajib pendidikan 12 tahun	Meningkatkan capaian wajib pendidikan 12 tahun	Meningkatkan capaian wajib pendidikan 12 tahun	Meningkatkan capaian wajib pendidikan 12 tahun	Meningkatkan capaian wajib pendidikan 12 tahun
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK
Meningkatkan akses teknologi dan informasi	Meningkatkan akses teknologi dan informasi	Meningkatkan akses teknologi dan informasi	Meningkatkan akses teknologi dan informasi	Meningkatkan akses teknologi dan informasi
Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi	Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi	Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi	Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi	Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi
Menumbuhkan dan memfasilitasi kelompok diskusi islam pada pendidikan menengah	Menumbuhkan dan memfasilitasi kelompok diskusi islam pada pendidikan menengah	Menumbuhkan dan memfasilitasi kelompok diskusi islam pada pendidikan menengah	Menumbuhkan dan memfasilitasi kelompok diskusi islam pada pendidikan menengah	Menumbuhkan dan memfasilitasi kelompok diskusi islam pada pendidikan menengah
Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi ABS-SBK	Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi ABS-SBK	Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi ABS-SBK	Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi ABS-SBK	Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi ABS-SBK
Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar	Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar	Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar	Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar	Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar
Meningkatkan pelestarian warisan budaya benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Meningkatkan pelestarian warisan budaya benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Meningkatkan pelestarian warisan budaya benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Meningkatkan pelestarian warisan budaya benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Meningkatkan pelestarian warisan budaya benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ABS-SBK	Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ABS-SBK	Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ABS-SBK	Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ABS-SBK	Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ABS-SBK
Meningkatkan pelestarian naskah kuni	Meningkatkan pelestarian naskah kuni	Meningkatkan pelestarian naskah kuni	Meningkatkan pelestarian naskah kuni	Meningkatkan pelestarian naskah kuni
Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan	Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan	Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan	Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan	Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan
Meningkatkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa	Meningkatkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa	Meningkatkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa	Meningkatkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa	Meningkatkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta instansi terkait lainnya	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta instansi terkait lainnya	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta instansi terkait lainnya	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta instansi terkait lainnya	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta instansi terkait lainnya
Meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan	Meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan	Meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan	Meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan	Meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular
Meningkatkan sistem layanan kesehatan penyakit menular secara terpadu	Meningkatkan sistem layanan kesehatan penyakit menular secara terpadu	Meningkatkan sistem layanan kesehatan penyakit menular secara terpadu	Meningkatkan sistem layanan kesehatan penyakit menular secara terpadu	Meningkatkan sistem layanan kesehatan penyakit menular secara terpadu
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular
Meningkatkan atmosfir untuk Meningkatkan kebugaran masyarakat	Meningkatkan atmosfir untuk Meningkatkan kebugaran masyarakat	Meningkatkan atmosfir untuk Meningkatkan kebugaran masyarakat	Meningkatkan atmosfir untuk Meningkatkan kebugaran masyarakat	Meningkatkan atmosfir untuk Meningkatkan kebugaran masyarakat
Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif	Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif	Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif	Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif	Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif
Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pola pangan seimbang	Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pola pangan seimbang	Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pola pangan seimbang	Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pola pangan seimbang	Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pola pangan seimbang
Meningkatkan sinergisme lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam intervensi sasaran prioritas	Meningkatkan sinergisme lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam intervensi sasaran prioritas	Meningkatkan sinergisme lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam intervensi sasaran prioritas	Meningkatkan sinergisme lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam intervensi sasaran prioritas	Meningkatkan sinergisme lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam intervensi sasaran prioritas
Meningkatkan kualitas sarana dan prasaranan layanan kesehatan dan tenaga kesehatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaranan layanan kesehatan dan tenaga kesehatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaranan layanan kesehatan dan tenaga kesehatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaranan layanan kesehatan dan tenaga kesehatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaranan layanan kesehatan dan tenaga kesehatan
Mengembangkan sistem bagi layanan kesehatan lansia	Mengembangkan sistem bagi layanan kesehatan lansia	Mengembangkan sistem bagi layanan kesehatan lansia	Mengembangkan sistem bagi layanan kesehatan lansia	Mengembangkan sistem bagi layanan kesehatan lansia
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi bagi remaja dan ibu hamil	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi bagi remaja dan ibu hamil	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi bagi remaja dan ibu hamil	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi bagi remaja dan ibu hamil	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi bagi remaja dan ibu hamil
Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan
Mendorong partisipasi lembaga filantropi dalam mendukung akses jaminan kesehatan	Mendorong partisipasi lembaga filantropi dalam mendukung akses jaminan kesehatan	Mendorong partisipasi lembaga filantropi dalam mendukung akses jaminan kesehatan	Mendorong partisipasi lembaga filantropi dalam mendukung akses jaminan kesehatan	Mendorong partisipasi lembaga filantropi dalam mendukung akses jaminan kesehatan
Meningkatkan infrastruktur pengolahan air limbah	Meningkatkan infrastruktur pengolahan air limbah	Meningkatkan infrastruktur pengolahan air limbah	Meningkatkan infrastruktur pengolahan air limbah	Meningkatkan infrastruktur pengolahan air limbah
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik
Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian perizinan industri	Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian perizinan industri	Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian perizinan industri	Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian perizinan industri	Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian perizinan industri
Meningkatkan edukasi sanitasi layak	Meningkatkan edukasi sanitasi layak	Meningkatkan edukasi sanitasi layak	Meningkatkan edukasi sanitasi layak	Meningkatkan edukasi sanitasi layak
Meningkatkan penyediaan sarana berbasis masyarakat	Meningkatkan penyediaan sarana berbasis masyarakat	Meningkatkan penyediaan sarana berbasis masyarakat	Meningkatkan penyediaan sarana berbasis masyarakat	Meningkatkan penyediaan sarana berbasis masyarakat
Mengembangkan pengelolaan sanitasi terpusat	Mengembangkan pengelolaan sanitasi terpusat	Mengembangkan pengelolaan sanitasi terpusat	Mengembangkan pengelolaan sanitasi terpusat	Mengembangkan pengelolaan sanitasi terpusat
Meningkatkan kerjasama antar daerah	Meningkatkan kerjasama antar daerah	Meningkatkan kerjasama antar daerah	Meningkatkan kerjasama antar daerah	Meningkatkan kerjasama antar daerah
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air
Meningkatkan ketersediaan sarana Air Bersih	Meningkatkan ketersediaan sarana Air Bersih	Meningkatkan ketersediaan sarana Air Bersih	Meningkatkan ketersediaan sarana Air Bersih	Meningkatkan ketersediaan sarana Air Bersih

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mengembangkan sistem pengelolaan air bersih	Mengembangkan sistem pengelolaan air bersih	Mengembangkan sistem pengelolaan air bersih	Mengembangkan sistem pengelolaan air bersih	Mengembangkan sistem pengelolaan air bersih
Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan dan keamanan makanan dan minuman	Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan dan keamanan makanan dan minuman	Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan dan keamanan makanan dan minuman	Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan dan keamanan makanan dan minuman	Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan dan keamanan makanan dan minuman
Meningkatkan kerjasama regional dalam penyediaan air baku	Meningkatkan kerjasama regional dalam penyediaan air baku	Meningkatkan kerjasama regional dalam penyediaan air baku	Meningkatkan kerjasama regional dalam penyediaan air baku	Meningkatkan kerjasama regional dalam penyediaan air baku
Melakukan perluasan dan revitalisasi jaringan	Melakukan perluasan dan revitalisasi jaringan	Melakukan perluasan dan revitalisasi jaringan	Melakukan perluasan dan revitalisasi jaringan	Melakukan perluasan dan revitalisasi jaringan
Meningkatkan luas RTH	Meningkatkan luas RTH	Meningkatkan luas RTH	Meningkatkan luas RTH	Meningkatkan luas RTH
Meningkatkan perlindungan kawasan lindung	Meningkatkan perlindungan kawasan lindung	Meningkatkan perlindungan kawasan lindung	Meningkatkan perlindungan kawasan lindung	Meningkatkan perlindungan kawasan lindung
Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat	Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat	Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat	Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat	Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat
Mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber	Mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber	Mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber	Mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber	Mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber
Meningkatkan pengawasan pembakaran sampah	Meningkatkan pengawasan pembakaran sampah	Meningkatkan pengawasan pembakaran sampah	Meningkatkan pengawasan pembakaran sampah	Meningkatkan pengawasan pembakaran sampah
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Meningkatkan sistem pengelolaan sampah	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah
Mengembangkan dukungan bagi pelaksanaan 3R	Mengembangkan dukungan bagi pelaksanaan 3R	Mengembangkan dukungan bagi pelaksanaan 3R	Mengembangkan dukungan bagi pelaksanaan 3R	Mengembangkan dukungan bagi pelaksanaan 3R
Meningkatkan promosi wisata berbasis ekonomi kreatif	Meningkatkan promosi wisata berbasis ekonomi kreatif	Meningkatkan promosi wisata berbasis ekonomi kreatif	Meningkatkan promosi wisata berbasis ekonomi kreatif	Meningkatkan promosi wisata berbasis ekonomi kreatif
Mengembangkan Bukittinggi sebagai tujuan MICE	Mengembangkan Bukittinggi sebagai tujuan MICE	Mengembangkan Bukittinggi sebagai tujuan MICE	Mengembangkan Bukittinggi sebagai tujuan MICE	Mengembangkan Bukittinggi sebagai tujuan MICE
Pengembangan Bukittinggi sebagai tujuan wisata kesehatan	Pengembangan Bukittinggi sebagai tujuan wisata kesehatan	Pengembangan Bukittinggi sebagai tujuan wisata kesehatan	Pengembangan Bukittinggi sebagai tujuan wisata kesehatan	Pengembangan Bukittinggi sebagai tujuan wisata kesehatan
Meningkatkan Sarana dan parasarana kepariwisataan	Meningkatkan Sarana dan parasarana kepariwisataan	Meningkatkan Sarana dan parasarana kepariwisataan	Meningkatkan Sarana dan parasarana kepariwisataan	Meningkatkan Sarana dan parasarana kepariwisataan
Penambahan luas sebaran jaringan dan Meningkatkan teknologi Broadband	Penambahan luas sebaran jaringan dan Meningkatkan teknologi Broadband	Penambahan luas sebaran jaringan dan Meningkatkan teknologi Broadband	Penambahan luas sebaran jaringan dan Meningkatkan teknologi Broadband	Penambahan luas sebaran jaringan dan Meningkatkan teknologi Broadband
Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informatika	Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informatika	Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informatika	Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informatika	Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informatika
Mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat	Mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat	Mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat	Mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat	Mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat
Memperkuat branding wisata kota Bukittinggi	Memperkuat branding wisata kota Bukittinggi	Memperkuat branding wisata kota Bukittinggi	Memperkuat branding wisata kota Bukittinggi	Memperkuat branding wisata kota Bukittinggi

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisataan dalam pemanfaatan IT	Meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisataan dalam pemanfaatan IT	Meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisataan dalam pemanfaatan IT	Meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisataan dalam pemanfaatan IT	Meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisataan dalam pemanfaatan IT
Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas	Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas	Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas	Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas	Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas
Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan	Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan	Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan	Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan	Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan
Mengembangkan even-even olahraga rekreasi	Mengembangkan even-even olahraga rekreasi	Mengembangkan even-even olahraga rekreasi	Mengembangkan even-even olahraga rekreasi	Mengembangkan even-even olahraga rekreasi
Menciptaka rasa aman bagi pengunjung wisata	Menciptaka rasa aman bagi pengunjung wisata	Menciptaka rasa aman bagi pengunjung wisata	Menciptaka rasa aman bagi pengunjung wisata	Menciptaka rasa aman bagi pengunjung wisata
Mengembangkan kreatifitas generasi millenial dalam pengembangan industri kreatif	Mengembangkan kreatifitas generasi millenial dalam pengembangan industri kreatif	Mengembangkan kreatifitas generasi millenial dalam pengembangan industri kreatif	Mengembangkan kreatifitas generasi millenial dalam pengembangan industri kreatif	Mengembangkan kreatifitas generasi millenial dalam pengembangan industri kreatif
Mengembangkan infrastruktur pendukung bagi perkembangan industri kreatif	Mengembangkan infrastruktur pendukung bagi perkembangan industri kreatif	Mengembangkan infrastruktur pendukung bagi perkembangan industri kreatif	Mengembangkan infrastruktur pendukung bagi perkembangan industri kreatif	Mengembangkan infrastruktur pendukung bagi perkembangan industri kreatif
Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Meningkatkan pelestarian budaya daerah
Pelaksanaan even budaya	Pelaksanaan even budaya	Pelaksanaan even budaya	Pelaksanaan even budaya	Pelaksanaan even budaya
Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
Menyelenggarakan dan terlibat aktif dalam even olahraga tingkat propinsi dan nasional	Menyelenggarakan dan terlibat aktif dalam even olahraga tingkat propinsi dan nasional	Menyelenggarakan dan terlibat aktif dalam even olahraga tingkat propinsi dan nasional	Menyelenggarakan dan terlibat aktif dalam even olahraga tingkat propinsi dan nasional	Menyelenggarakan dan terlibat aktif dalam even olahraga tingkat propinsi dan nasional
Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga pada tingkat sekolah	Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga pada tingkat sekolah	Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga pada tingkat sekolah	Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga pada tingkat sekolah	Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga pada tingkat sekolah
Mengembangkan organisasi olahraga dan kepemudaan	Mengembangkan organisasi olahraga dan kepemudaan	Mengembangkan organisasi olahraga dan kepemudaan	Mengembangkan organisasi olahraga dan kepemudaan	Mengembangkan organisasi olahraga dan kepemudaan
Mengembangkan kebiasaan berolahraga masyarakat	Mengembangkan kebiasaan berolahraga masyarakat	Mengembangkan kebiasaan berolahraga masyarakat	Mengembangkan kebiasaan berolahraga masyarakat	Mengembangkan kebiasaan berolahraga masyarakat
Meningkatkan kapabilitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan arsip daerah	Meningkatkan kapabilitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan arsip daerah	Meningkatkan kapabilitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan arsip daerah	Meningkatkan kapabilitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan arsip daerah	Meningkatkan kapabilitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan arsip daerah
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD
Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD	Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD	Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD	Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD	Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD
Melaksanakan Review LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi	Melaksanakan Review LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi	Melaksanakan Review LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi	Melaksanakan Review LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi	Melaksanakan Review LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi
Terlaksananya Evaluasi SAKIP SKPD	Terlaksananya Evaluasi SAKIP SKPD	Terlaksananya Evaluasi SAKIP SKPD	Terlaksananya Evaluasi SAKIP SKPD	Terlaksananya Evaluasi SAKIP SKPD

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, capaian kinerja, dan penurunan pelanggaran disiplin ASN	Meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, capaian kinerja, dan penurunan pelanggaran disiplin ASN	Meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, capaian kinerja, dan penurunan pelanggaran disiplin ASN	Meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, capaian kinerja, dan penurunan pelanggaran disiplin ASN	Meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, capaian kinerja, dan penurunan pelanggaran disiplin ASN
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN
Meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan penempatan pegawai	Meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan penempatan pegawai	Meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan penempatan pegawai	Meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan penempatan pegawai	Meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan penempatan pegawai
Memperkuat implementasi Peraturan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Memperkuat implementasi Peraturan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Memperkuat implementasi Peraturan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Memperkuat implementasi Peraturan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Memperkuat implementasi Peraturan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
Mengembangkan pelayanan publik yang efisien dan ramah	Mengembangkan pelayanan publik yang efisien dan ramah	Mengembangkan pelayanan publik yang efisien dan ramah	Mengembangkan pelayanan publik yang efisien dan ramah	Mengembangkan pelayanan publik yang efisien dan ramah
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap kegiatan kedewanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap kegiatan kedewanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap kegiatan kedewanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap kegiatan kedewanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap kegiatan kedewanan
Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan	Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan	Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan	Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan	Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan
Internalisasi nilai-nilai pengabdian dan religius dalam pelaksanaan tugas	Internalisasi nilai-nilai pengabdian dan religius dalam pelaksanaan tugas	Internalisasi nilai-nilai pengabdian dan religius dalam pelaksanaan tugas	Internalisasi nilai-nilai pengabdian dan religius dalam pelaksanaan tugas	Internalisasi nilai-nilai pengabdian dan religius dalam pelaksanaan tugas
Meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah	Meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah	Meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah	Meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah	Meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah
Meningkatkan kualitas pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan kualitas pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan kualitas pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan kualitas pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan kualitas pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan
Meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan
Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan ditengah masyarakat	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan ditengah masyarakat	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan ditengah masyarakat	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan ditengah masyarakat	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan ditengah masyarakat
Fasilitasi rumah dan lahan relokasi bencana	Fasilitasi rumah dan lahan relokasi bencana	Fasilitasi rumah dan lahan relokasi bencana	Fasilitasi rumah dan lahan relokasi bencana	Fasilitasi rumah dan lahan relokasi bencana
Menyusun dokumen dan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang komprehensif	Menyusun dokumen dan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang komprehensif	Menyusun dokumen dan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang komprehensif	Menyusun dokumen dan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang komprehensif	Menyusun dokumen dan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang komprehensif
Menegakkan aturan yang jelas dan komprehensif	Menegakkan aturan yang jelas dan komprehensif	Menegakkan aturan yang jelas dan komprehensif	Menegakkan aturan yang jelas dan komprehensif	Menegakkan aturan yang jelas dan komprehensif
Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan
Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana	Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana	Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana	Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana	Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana
Mengembangkan kelompok pengamanan lokal	Mengembangkan kelompok pengamanan lokal	Mengembangkan kelompok pengamanan lokal	Mengembangkan kelompok pengamanan lokal	Mengembangkan kelompok pengamanan lokal
Penyediaan pengaduan masyarakat	Penyediaan pengaduan masyarakat	Penyediaan pengaduan masyarakat	Penyediaan pengaduan masyarakat	Penyediaan pengaduan masyarakat
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga filantropi	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga filantropi	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga filantropi	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga filantropi	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga filantropi
Menyediakan kebutuhan dasar PPKS	Menyediakan kebutuhan dasar PPKS	Menyediakan kebutuhan dasar PPKS	Menyediakan kebutuhan dasar PPKS	Menyediakan kebutuhan dasar PPKS
Meningkatkan kemampuan ekonomi PPKS	Meningkatkan kemampuan ekonomi PPKS	Meningkatkan kemampuan ekonomi PPKS	Meningkatkan kemampuan ekonomi PPKS	Meningkatkan kemampuan ekonomi PPKS
Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dalam melindungi anak dan remaja	Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dalam melindungi anak dan remaja	Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dalam melindungi anak dan remaja	Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dalam melindungi anak dan remaja	Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dalam melindungi anak dan remaja
Peningkatan media informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan media informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan media informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan media informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan media informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatkan peran Keluarga dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.	Meningkatkan peran Keluarga dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.	Meningkatkan peran Keluarga dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.	Meningkatkan peran Keluarga dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.	Meningkatkan peran Keluarga dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
Penyediaan sarana dan prasarana publik tematik	Penyediaan sarana dan prasarana publik tematik	Penyediaan sarana dan prasarana publik tematik	Penyediaan sarana dan prasarana publik tematik	Penyediaan sarana dan prasarana publik tematik
Meningkatkan teknologi pertanian	Meningkatkan teknologi pertanian	Meningkatkan teknologi pertanian	Meningkatkan teknologi pertanian	Meningkatkan teknologi pertanian
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan
Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi kerawanan pangan	Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi kerawanan pangan	Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi kerawanan pangan	Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi kerawanan pangan	Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi kerawanan pangan
Mengkampanyekan manfaat konsumsi beras organik	Mengkampanyekan manfaat konsumsi beras organik	Mengkampanyekan manfaat konsumsi beras organik	Mengkampanyekan manfaat konsumsi beras organik	Mengkampanyekan manfaat konsumsi beras organik
Peningkatan nilai tambah produk pertanian organik	Peningkatan nilai tambah produk pertanian organik	Peningkatan nilai tambah produk pertanian organik	Peningkatan nilai tambah produk pertanian organik	Peningkatan nilai tambah produk pertanian organik
Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik	Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik	Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik	Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik	Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah dikembangkan sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun sebagaimana terlihat dalam tabel 6.3.

Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kota Bukittinggi 2022-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi 1 Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Terciptanya ekonomi kerakyatan	Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri		2%	550,05	2%	420,63	2%	317,28	2%	355,52	2%	327,83	2%	459,45	2.430,74	1.880,69	DPMPTSPPTK
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	127	150	80,00	170	85,00	200	190,00	220	205,00	250	220,00	300	735,00	1.515,00	1.435,00	DPMPTSPPTK
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan produk dalam negeri			559,54		950,00		975,00		1.050,00		1.175,00		1.260,00		5.410,00	DISKOPUKMDAG
			Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro		1%	756.393662	1%	1.062,90	1%	1.156,99	1%	1.155,75	1%	1.152,10	1%	1.194,85	5%	5.722,61	DISKOPUKMDAG
			Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro		10 persen	45,227	10 persen	251,15	10 persen	251,80	10 persen	252,45	10 persen	253,10	10 persen	254,75		1.263,25	DISKOPUKMDAG
			Proram Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	persentase tertib niaga			-		285,00		310,00		335,00		360,00		385,00		1.675,00	DISKOPUKMDAG
			Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro		1%	756,393662	1%	1.062,90	1%	1.156,99	1%	1.155,75	1%	1.152,10	1%	1.194,85	5%	5.722,61	DISKOPUKMDAG
			Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro		10 persen	45,227	10 persen	251,15	10 persen	251,80	10 persen	252,45	10 persen	253,10	10 persen	254,75		1.263,25	DISKOPUKMDAG
			Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro		1%	756,393662	1%	1.062,90	1%	1.156,99	1%	1.155,75	1%	1.152,10	1%	1.194,85	5%	5.722,61	DISKOPUKMDAG
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	14%	16%	17,5	18%	17,50	20%	50,83	22%	129,38	24%	18,70	26%	54,90	26%	271,31	DISKOPUKMDAG
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan unit usaha koperasi	14%	16%	199,206	18%	-	20%	73,00	16%	25,00	16%	77,00	16%	-	16%	175,00	DISKOPUKMDAG
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan koperasi		16%	755,5	18%	104,00	20%	-	20%	30,00	22%	-	22%	35,00		169,00	DISKOPUKMDAG

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi PAD sektor pengelolaan Pasar		16%	7.714,90	20%	8.500,00	25%	9.350,00	30%	9.435,00	35%	9.443,50	40%	9.444,35	40%	46.172,85	DISKOPUKMDAG
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang telah menggunakan standarisasi perdagangan			-		20,00		30,00		30,00		30,00		30,00		140,00	DISKOPUKMDAG
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang telah menggunakan standarisasi perdagangan			-		20,00		30,00		30,00		30,00		30,00		140,00	DISKOPUKMDAG
			Program Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Lainnya	Persentase tingkat kestabilan harga barang pokok dan barang penting.			40,48		65,00		70,00		80,00		90,00		100,00		405,00	DISKOPUKMDAG
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan produk dalam negeri			559,54		950,00		975,00		1.050,00		1.175,00		1.260,00		5.410,00	DISKOPUKMDAG
			Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro		1%	756,393662	1%	1.062,90	1%	1.156,99	1%	1.155,75	1%	1.152,10	1%	1.194,85	5%	5.722,61	DISKOPUKMDAG
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan			1.483,67		1.860,00		1.621,00		1.747,50		1.860,00		1.979,30		9.067,80	SETDA
			Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro		10 persen	45,227	10 persen	251,15	10 persen	251,80	10 persen	252,45	10 persen	253,10	10 persen	254,75		1.263,25	DISKOPUKMDAG
			Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro		1%	756,393662	1%	1.062,90	1%	1.156,99	1%	1.155,75	1%	1.152,10	1%	1.194,85	5%	5.722,61	DISKOPUKMDAG
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri		2%	550,05	2%	420,63	2%	317,28	2%	355,52	2%	327,83	2%	459,45	2.430,74	1.880,69	DPMPTSPTK
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	50%*	50%	1.941,81	55%	4.387,04	60%	5.507,50	65%	7.299,50	70%	7.970,50	75%	8.332,50	75%	33.497,04	DPMPTSPTK
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	2%	2%	1.941,81	2%	4.387,04	2%	5.507,50	2%	7.299,50	2%	7.970,50	2%	8.332,50		33.497,04	DPMPTSPTK

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota				-		0,00		0,00		0,00		0,00		95,00		95,00	DPMPTSPPTK
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan		50%	237,00	55%	239,00	60%	290,00	65%	292,00	70%	343,00	75%	345,00		1.509,00	DPMPTSPPTK
		Meningkatnya investasi hijau	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kemudahan berusaha	100%	100%	154,41	100%	160,22	-	-	-	-	100%	200,00	100%	-		360,22	DPMPTSPPTK
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan		0,5	50,9398	0,55	89,923	0,6	100	0,65	120	0,7	140	0,75	160	660,8628	609,923	DPMPTSPPTK
			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi hijau	45 M	55 M	166,05	60 M	175,00	65 M	180,00	70 M	185,00	75 M	190,00	80 M	195,00	1.091,05	925,00	DPMPTSPPTK
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data informasi perizinan secara online	100%	100%	84,01	100%	142,58	100%	170,00	100%	172,00	100%	180,00	100%	185,00	100%	849,58	DPMPTSPPTK
		Terbangunnya infrastruktur berorientasi hijau	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi PAD sektor pengelolaan Pasar		16%	7.714,90	20%	8.500,00	25%	9.350,00	30%	9.435,00	35%	9.443,50	40%	9.444,35	40%	46.172,85	DISKOPUKMDAG
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan produk dalam negeri			559,54		950,00		975,00		1.050,00		1.175,00		1.260,00		5.410,00	DISKOPUKMDAG
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan beserta bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap			14.007,00		31.089,11		23.500,00		20.100,00		19.700,00		20.300,00		114.689,11	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan beserta bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap			14.007,00		31.089,11		23.500,00		20.100,00		19.700,00		20.300,00		114.689,11	DPUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Hijau			9.828,13		34.086,67		24.323,67		24.323,67		24.323,67		24.823,67		131.881,33	DPUPR
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung yang telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)			-		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		2.500,00	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan			123,52		144,23		820,84		820,84		820,84		820,84		3.427,59	DPUPR

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan	0%	2,21%	410,00	26,55 %	1.225,00	48,63 %	2.244,00	23%	271,50		-		-	100,00%	3.740,50	DPKP
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan rumah yang layak	97,51%	0,25%	1.965,25	0,24%	3.068,12	0,24%	7.948,89	0,24%	7.715,66	0,24%	8.487,23	0,24%	7.139,80	98,96%	34.359,70	DPKP
			Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga			170,58		13784		28200		23200		23200	96,5%	23700		112084	DPUPR	
			Program Penatagunaan Tanah	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan			341,51	0,0003 41514	375,67	0,0003 75665	413,23		454,55		500,01		550,01		2.293,47	DPUPR
			Program Penetapan Tanah Ulayat	Data jumlah tanah ulayat			82,39	8,2385 5E-05	90,62	9,0624 1E-05	99,69		109,66		120,62		132,68	0,000553 269	553,27	DPUPR
			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	IK : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			148,65	0,00	163,51	0,00	179,86		197,85		217,63		239,40	0,00	998,25	DPUPR
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	IK : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			34,80	0,00	38,28	0,00	42,11		46,32		50,95		56,05	0,00	233,70	DPUPR
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	IK : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			40,84	0,00	44,92	0,00	49,42		54,36		59,79		65,77	0,00	274,26	DPUPR
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	97,51%	0,25%	1.725,78	0,24%	4.190,00	0,24%	3.225,00	0,24%	3.546,00	0,24%	3.903,00	0,24%	4.293,00	98,96%	19.157,00	DPKP
			Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis		13.487 ,61	85%	15.956 ,42	86%	17.050 ,68	87%	18.647 ,48	88%	20.403 ,93	90%	22.336 ,06	90%	94.394,56	DPKP	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Perkotaan berkondisi baik		100%	20.722,94	100%	25.775,00	100%	14.500,00	100%	12.900,00	100%	10.800,00	100%	10.725,36	100%	74.700,36	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase RT yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah				1.150,00		2.550,00		950,00		200,00		200,00		5.050,00	DPUPR	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	60	65	3.136,89	70,00	30.894,74	75	36.894,00	80	11.374,50	85	13.345,00	90	11.630,50	95	104.138,7 4	DISHUB

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi	50	50		55,00		60		65		70		75		80		
				Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	D	D		C		C		B		A		A		A		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Sektor Perhubungan	86	86		86,00		87		87		87		88		88		
				Kontribusi PAD di Bidang Perhubungan	73	100		100,00		100		100		100		100		100		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase jalan beserta bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap			14.007,00		31.089,11		23.500,00		20.100,00		19.700,00		20.300,00		114.689,11	DPUPR
	Terciptanya ekonomi yang merata	Menurunnya kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		60	230,00	65	224,00	70	260,00	75	260,00	80	278,00	85	300,00		1.322,00	DINSOS
				Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		60	1.750,00	60	1.750,00	60	1.875,00	60	1.900,00	60	1.935,00	60	2.000,00		9.460,00	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	127	150	80,00	170	85,00	200	190,00	220	205,00	250	220,00	300	735,00	1.515,00	1.435,00	DPMPTSPPTK
			Program Pemberdayaan Sosial				2.260,00		2.260,00		2.545,00		2.545,00		2.730,00		2.950,00		13.030,00	DINSOS
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana		60	2.813,00	70	2.813,00	80	3.445,00	80	3.445,00	80	3.713,00	80	3.815,00		17.231,00	DINSOS
		Meningkatnya kesempatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri		2%	550,05	2%	420,63	2%	317,28	2%	355,52	2%	327,83	2%	459,45	2.430,74	1.880,69	DPMPTSPPTK
			Program Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	0	0	77,90	0	80,00	0	87,00	0	95,00	0	102,00	0	110,00	551,90	474,00	DPMPTSPPTK
				Jumlah tenaga kerja yang menerima BPJS	13624	14000		15000		15500		16000	-	16500	-	17000	-	17000	-	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi 2 Hebat dalam Sektor Pendidikan	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	68,75%	73,15	28.895,00	79,15 %	79.803,29	84,25 %	90.500,23	89,55 %	101.699,46	94,75 %	104.520,80	100%	120.856,71	100%	497.380	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	68,75%	73,15	28.895,00	79,15 %	79.803,29	84,25 %	90.500,23	89,55 %	101.699,46	94,75 %	104.520,80	100%	120.856,71	100%	497.380	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	68,75%	73,15	28.895,00	79,15 %	79.803,29	84,25 %	90.500,23	89,55 %	101.699,46	94,75 %	104.520,80	100%	120.856,71	100%	497.380	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	0%	0%		20%	726,12	40%	131,50	60%	145,55	80%	55.705,00	100%	165,52	100%	56.874	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	68,75%	73,15	28.895,00	79,15 %	79.803,29	84,25 %	90.500,23	89,55 %	101.699,46	94,75 %	104.520,80	100%	120.856,71	100%	497.380	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	68,75%	73,15	28.895,00	79,15 %	79.803,29	84,25 %	90.500,23	89,55 %	101.699,46	94,75 %	104.520,80	100%	120.856,71	100%	497.380	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	68,75%	73,15	28.895,00	79,15 %	79.803,29	84,25 %	90.500,23	89,55 %	101.699,46	94,75 %	104.520,80	100%	120.856,71	100%	497.380	DISDIKBUD
			Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi			2.863,00		6.432,65		3.800,00		4.075,00		3.925,00		3.680,00		24.775,65	DISKOMINFO	
			Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar																DISKOMINFO	
			Nilai Kepuasan Komunikasi Publik			1.250,00		8.110,94		3.375,00		3.375,00		3.380,00		3.380,00		21.620,94	DISKOMINFO	
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	0%	0%		20%	726,12	40%	131,50	60%	145,55	80%	55.705,00	100%	165,52	100%	56.874	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	68,75%	73,15	28.895,00	79,15 %	79.803,29	84,25 %	90.500,23	89,55 %	101.699,46	94,75 %	104.520,80	100%	120.856,71	100%	497.380	DISDIKBUD

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memiliki izin	100%	100%		100,%	250,00	100%	250,00	100%	250,00	100%	305,00	100%	305,00	100%	1.360	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	0%	0%		20%	726,12	40%	131,50	60%	145,55	80%	55.705,00	100%	165,52	100%	56.874	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	0%	0%		20%	726,12	40%	131,50	60%	145,55	80%	55.705,00	100%	165,52	100%	56.874	DISDIKBUD
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP	100%	100%		100%	350,00	100%	400,00	100%	450,00	100%	500,00	100%	550,00	100%	2.250	DISDIKBUD
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaaan Warisan Budaya	1 Warisa n Budaya	-	1 Warisa n Budaya	240,00	2 Warisa n Budaya	347,00	3 Warisa n Budaya	374,00	4 Warisa n Budaya	387,00	5 Warisa n Budaya	445,00	5 Warisan Budaya	1.793	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaaan Warisan Budaya	1 Warisa n Budaya	-	1 Warisa n Budaya	2.327,93	2 Warisa n Budaya	2.782,37	3 Warisa n Budaya	2.856,55	4 Warisa n Budaya	2.894,55	5 Warisa n Budaya	2.916,55	5 Warisan Budaya	13.778	DISDIKBUD
			Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan	1 Warisa n Budaya	-	1 Warisa n Budaya	565,00	2 Warisa n Budaya	722,00	3 Warisa n Budaya	714,00	4 Warisa n Budaya	757,00	5 Warisa n Budaya	925,00	5 Warisan Budaya	3.683	DISDIKBUD

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Pembinaan Warisan Budaya															
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	-	1 Warisan Budaya	857,00	2 Warisan Budaya	260,00	3 Warisan Budaya	235,00	4 Warisan Budaya	270,00	5 Warisan Budaya	275,00	6 Warisan Budaya	1.897	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	-	1 Warisan Budaya	732,18	2 Warisan Budaya	1.002,18	3 Warisan Budaya	1.002,18	4 Warisan Budaya	1.002,18	5 Warisan Budaya	1.002,18	5 Warisan Budaya	4.741	DISDIKBUD
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1. Persentase peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan		10 % dari tahun sebelumnya	83,37	10 % dari tahun sebelumnya	211,73	10 % dari tahun sebelumnya	166,73	10 % dari tahun sebelumnya	166,73	10 % dari tahun sebelumnya	166,73	10 % dari tahun sebelumnya	166,73	10 % dari tahun sebelumnya	878,66	DPK
			Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	CUKUP	747,51	CUKUP	2.659,83	BAIK	2.518,33	BAIK	4.990,03	BAIK	2.396,03	SANGAT BAIK	2.384,03	SANGAT BAIK	14.948,26	DPK
			Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat				20029,19		27285,66		29787,74		30350,13		33156,75		34021,65		154601,93	SETDA
		Meningkatnya kehidupan keagamaan	Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat				20.029,19		27.285,66		29.787,74		30.350,13		33.156,75		34.021,65		154.601,93	SETDA
			Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat				20.029,19		27.285,66		29.787,74		30.350,13		33.156,75		34.021,65		154.601,93	SETDA

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi 3 Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%		
			Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,5	128,76	2,45	292,50	2,4	367,00	2,38	495,00	2,28	555,00	2,2	775,00	2,2	2.484,50	DP3APPKB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	68%	68,29 %	2.126,93	68,5%	1.635,63	68,75 %	1.926,86	69,0%	1.925,62	69,1%	2.160,55	69,25 %	2.075,99	69,25%	9.724,64	DP3APPKB
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%		
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90%	90%	253,60	90%	266,28	90%	279,59	95%	293,57	95%	308,25	95%	323,66	95%	1.471,36	DINKES
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai analisa beban kerja	80%	80%	428,08	80%	449,74	80%	472,51	85%	496,44	85%	521,60	85%	548,06	90%	2.488,34	DINKES
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%			
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%			
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES	
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%			
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%			
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%			
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES	
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%			
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%			

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	0,6	0,6	450,676	0,6	511,5925 2	0,65	595,8924 24	0,65	725,8248 64	0,7	832,6571 04	0,7	919,8216 02	0,7	3585,788 514	DINKES
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase RT yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah					1.150,00		2.550,00		950,00		200,00		200,00		5.050,00	DPUPR
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun(Limbah B3)	Persentase limbah LB3 usaha kegiatan yang di kelola	5%*	5%*	-	5%	28,00	10%	31,00	15%	31,00	20%	35,00	25%	37,00	25%	162,00	DLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	89,88	40%	28,00	42%	178,44	43%	192,04	45%	204,39	47%	210,78	47%	813,64	DLH
				Persentase PPLH tersertifikasi	11%*	11%*		11%		22%		33%		44%		55%		55%		
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu	60%*	60%	440,06	65%	1.301,00	65%	2.057,62	70%	1.332,29	70%	1.337,00	75%	2.064,00	75%	8.091,91	DLH
				Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu	87,5%	87,5%		87,5%		87,5%		87,5%		100%		100%		100%		DLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	89,88	40%	28,00	42%	178,44	43%	192,04	45%	204,39	47%	210,78	47%	813,64	DLH
				Persentase PPLH tersertifikasi	11%*	11%*		11%		22%		33%		44%		55%		55%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis	83%	85%	13.487,61	85%	15.956,42	86%	17.050,68	87%	18.647,48	88%	20.403,93	90%	22.336,06	90%	94.394,56	DPKP
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis	83%	85%	13.487,61	85%	15.956,42	86%	17.050,68	87%	18.647,48	88%	20.403,93	90%	22.336,06	90%	94.394,56	DPKP
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu	60%*	60%	-	65%	253,00	65%	253,00	70%	253,00	70%	253,00	75%	253,00	75%	1.265,00	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu	60%*	60%	440,06	65%	1.301,00	65%	2.057,62	70%	1.332,29	70%	1.337,00	75%	2.064,00	75%	8.091,91	DLH
				Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu	87,5%	87,5%		87,5%		87,5%		87,5%		100%		100%		100%		DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	89,88	40%	28,00	42%	178,44	43%	192,04	45%	204,39	47%	210,78	47%	813,64	DLH
				Persentase PPLH tersertifikasi	11%*	11%*		11%		22%		33%		44%		55%		55%		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi ber kondisi baik			4.085,68		7.910,21		6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00	0,03	34.710,21	DPUPR
				Jumlah daerah Irigasi yang terbangun																
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga			170,58		13.784,00		28.200,00		23.200,00		23.200,00	96,5%	23.700,00		112.084,00	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga			170,58		13.784,00		28.200,00		23.200,00		23.200,00	96,5%	23.700,00		112.084,00	DPUPR
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	80.077,52	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Cakupan kunjungan balita	85%	80%		85%		90%		95%		95%		95%		95%		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%		90%		93%		95%		95%		100%		100%		
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga			170,58		13.784,00		28.200,00		23.200,00		23.200,00	96,5%	23.700,00		112.084,00	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga			170,58		13.784,00		28.200,00		23.200,00		23.200,00	96,5%	23.700,00		112.084,00	DPUPR
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (Kehati)	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	10%*	10%*	3.072,89	10%	9.287,66	20%	8.294,79	30%	7.918,02	40%	4.909,27	50%	6.994,75	50%	37.404,49	DLH
				Persentase penambahan vegetasi di taman kehati	10%*	10%*		10%		20%		30%		40%		50%		50%		
				Persentase penambahan jumkah vegetasi di hutan kota	10%*	10%*		10%		20%		30%		40%		50%		50%		
			Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (Kehati)	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	10%*	10%*	3.072,89	10%	9.287,66	20%	8.294,79	30%	7.918,02	40%	4.909,27	50%	6.994,75	50%	37.404,49	DLH
				Persentase penambahan vegetasi di taman kehati	10%*	10%*		10%		20%		30%		40%		50%		50%		
				Persentase penambahan jumkah vegetasi di hutan kota	10%*	10%*		10%		20%		30%		40%		50%		50%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	598,13	40%	521,91	42%	670,89	43%	570,89	45%	600,00	47%	630,00	47%	2.993,69	DLH
				Persentasi penambahan jumlah vegetasi di RTH	10%*	10%*		10%		20%		30%		40%		50%		50%		
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha),Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi	40%*	40%*		40%	72,09	42%	80,00	43%	88,00	45%	120,00	47%	150,00	47%	510,09	DLH
				Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	10%*	10%*		10%		20%		30%		40%		50%		50%		
				Persentase timbulan sampah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (Kehati)	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	10%*	10%*	3.072,89	10%	9.287,66	20%	8.294,79	30%	7.918,02	40%	4.909,27	50%	6.994,75	50%	37.404,49	DLH
				Persentase penambahan vegetasi di taman kehati	10%*	10%*		10%		20%		30%		40%		50%		50%		
				Persentase penambahan jumkah vegetasi di hutan kota	10%*	10%*		10%		20%		30%		40%		50%		50%		
		Meningkatnya kualitas udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu	60%*	60%	440,06	65%	1.301,00	65%	2.057,62	70%	1.332,29	70%	1.337,00	75%	2.064,00	75%	8.091,91	DLH
				Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu	87,5%	87,5%		87,5%		87,5%		87,5%		100%		100%		100%		
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	89,88	40%	28,00	42%	178,44	43%	192,04	45%	204,39	47%	210,78	47%	813,64	DLH
				Persentase PPLH tersertifikasi	11%*	11%*		11%		22%		33%		44%		55%		55%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	21,00	40%	23,10	42%	25,41	43%	27,96	45%	30,75	47%	33,83	47%	141,06	DLH
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	100%	100%	12.530,18	100%	17.414,40	100%	18.520,32	100%	31.722,83	100%	33.312,38	100%	34.365,88	100%	135.335,80	DLH
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat	26%*	26%*		26%		27%		28%		30%		30%		30%		
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	5%*	5%*		5%		10%		15%		20%		30%		30%		
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	100%	100%	12.530,18	100%	17.414,40	100%	18.520,32	100%	31.722,83	100%	33.312,38	100%	34.365,88	100%	135.335,80	DLH
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat	26%*	26%*		26%		27%		28%		30%		30%		30%		
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	5%*	5%*		5%		10%		15%		20%		30%		30%		
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	presentase usaha/ kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	106,40	40%	432,13	42%	475,00	43%	500,00	45%	525,00	47%	550,00	47%	2.482,13	DLH
				Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	10%*	10%*		10%		20%		30%		40%		50%		50%		
				persentase timbulan sampah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Meningkatnya pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	100%	100%	12.530,18	100%	17.414,40	100%	18.520,32	100%	31.722,83	100%	33.312,38	100%	34.365,88	100%	135.335,80	DLH
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat	26%*	26%*		26%		27%		28%		30%		30%		30%		
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	5%*	5%*		5%		10%		15%		20%		30%		30%		
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	100%	100%	12.530,18	100%	17.414,40	100%	18.520,32	100%	31.722,83	100%	33.312,38	100%	34.365,88	100%	135.335,80	DLH
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat	26%*	26%*		26%		27%		28%		30%		30%		30%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	5%*	5%*		5%		10%		15%		20%		30%		30%		
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase prasarana persampahan yang berkondisi baik			-		1.950,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		8.350,00	DPUPR
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	100%	100%	12.530,18	100%	17.414,40	100%	18.520,32	100%	31.722,83	100%	33.312,38	100%	34.365,88	100%	135.335,80	DLH
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat	26%*	26%*		26%		27%		28%		30%		30%		30%		
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	5%*	5%*		5%		10%		15%		20%		30%		30%		
Misi 4 Hebat dalam Sektor Kepariwisataa, Seni Budaya dan Olahraga	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	Program Pemasaran Pariwisata	Spanding Of Money Wisatawan			527,08		3.500,00		4.440,00		3.919,50		3.944,50		4.039,50		19.843,50	DISPARPORA
				Meningkatnya Jumlah Segmen Wisatawan																
			Program Pemasaran Pariwisata	Spanding Of Money Wisatawan			527,08		3.500,00		4.440,00		3.919,50		3.944,50		4.039,50		19.843,50	DISPARPORA
				Meningkatnya Jumlah Segmen Wisatawan																
			Program Pemasaran Pariwisata	Spanding Of Money Wisatawan			527,08		3.500,00		4.440,00		3.919,50		3.944,50		4.039,50		19.843,50	DISPARPORA
				Meningkatnya Jumlah Segmen Wisatawan																
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Pengembangan Objek Wisata	5%*	5%*	10.886,00	5%	27.825,00	5%	261.475,00	5%	29.131,00	5%	25.051,00	5%	26.476,80	10%	369.958,80	DISPARPORA
				Presentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	15%*	15%*		15%		15%		15%		15%		15%		20%		
			Program Pemasaran Pariwisata	Spanding Of Money Wisatawan			527,08		3.500,00		4.440,00		3.919,50		3.944,50		4.039,50		19.843,50	DISPARPORA

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Meningkatnya Jumlah Segmen Wisatawan																
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi			2.863,00		6.432,65		3.800,00		4.075,00		3.925,00		3.680,00		24.775,65	DISKOMINFO
				Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar																DISKOMINFO
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Kepuasan Komunikasi Publik			1.250,00		8.110,94		3.375,00		3.375,00		3.380,00		3.380,00		21.620,94	DISKOMINFO
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Pengembangan Objek Wisata	5%*	5%*	10.886,00	5%	27.825,00	5%	261.475,00	5%	29.131,00	5%	25.051,00	5%	26.476,80	10%	369.958,80	DISPARPORA
				Presentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	15%*	15%*		15%		15%		15%		15%		15%		20%		
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Pengembangan Objek Wisata	5%*	5%*	10.886,00	5%	27.825,00	5%	261.475,00	5%	29.131,00	5%	25.051,00	5%	26.476,80	10%	369.958,80	DISPARPORA
				Presentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	15%*	15%*		15%		15%		15%		15%		15%		20%		
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Pengembangan Objek Wisata	5%*	5%*	10.886,00	5%	27.825,00	5%	261.475,00	5%	29.131,00	5%	25.051,00	5%	26.476,80	10%	369.958,80	DISPARPORA
				Presentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	15%*	15%*		15%		15%		15%		15%		15%		20%		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	60	65	3.136,89	70,00	30.894,74	75	36.894,00	80	11.374,50	85	13.345,00	90	11.630,50	95	104.138,74	DISHUB
				Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi	50	50		55,00		60		65		70		75		80		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	D	D		C		C		B		A		A		A		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Sektor Perhubungan	86	86		86,00		87		87		87		88		88		
				Kontribusi PAD di Bidang Perhubungan	73	100		100,00		100		100		100		100		100		
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan beserta bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap			14.007,00		31.089,11		23.500,00		20.100,00		19.700,00		20.300,00		114.689,11	DPUPR
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	25%*	25%*	1.880,87	25%	1.856,66	25%	1.267,00	25%	1.650,00	25%	1.680,00	25%	1.745,00	50%	8.198,67	DISPARPORA
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	25%*	25%*	404,96	25%	1.000,00	25%	1.080,00	25%	2.890,00	25%	3.040,00	25%	3.140,00	50%	11.150,00	DISPARPORA
			Program Pengembnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	75%*	75%	1.723,55	75%	26.322,85	75%	55.275,74	75%	64.988,62	75%	-	75%	35.866,84	100%	182.454,06	DISPARPORA
				Peningkatan Presatsi Olahraga	peringkat 3	peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 2		
				Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	100 orang *	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	5 kasus	9 kasus	978,38	9 kasus	850,00	8 kasus	950,00	8 kasus	1.100,00	7 kasus	1.200,00	7 kasus	1.250,00	7 kasus	5.350,00	KESBANGPOL
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	90%	95%	11.530,35	95%	12.683,38	96%	13.951,72	96%	15.346,89	97%	16.881,58	97%	18.569,74	97%	77.433,32	SATPOL PP
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kemitraan	3 Kab/ Kota*	3 Kab/ Kota*	-	3 Kab/ Kota	100,00	3 Kab/ Kota	500,00	3 Kab/ Kota	250,00	3 Kab/ Kota	100,00	3 Kab/ Kota	100,00	6 Kab/ Kota	1.050,00	DISPARPORA
				jumlah Pemasana Ekraf	5 Pasar*	5 Pasar*		5 Pasar		5 Pasar		5 Pasar		5 Pasar		5 Pasar		6 Pasar		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan	Jumlah Industri Kreatif	6 Sub Sektor Ekraf*	6 Sub Sektor Ekraf*	350,00	6 Sub Sektor Ekraf	6.450,00	6 Sub Sektor Ekraf	10.857,50	6 Sub Sektor Ekraf	7.190,00	6 Sub Sektor Ekraf	8.490,00	6 Sub Sektor Ekraf	10.090,00	7 Sub Sektor Ekraf	43.077,50	DISPARPORA
			Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Event budaya Nasional	3 Event*	3 Event*		3 Event		3 Event		3 Event		3 Event		3 Event		4 Event		
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																	
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik																	
	Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisa n Buday a		1 Warisa n Buday a	857,00	2 Warisa n Buday a	260,00	3 Warisa n Buday a	235,00	4 Warisa n Buday a	270,00	5 Warisa n Buday a	275,00	6 Warisan Budaya	1.897	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisa n Buday a		1 Warisa n Buday a	732,18	2 Warisa n Buday a	1.002,18	3 Warisa n Buday a	1.002,18	4 Warisa n Buday a	1.002,18	5 Warisa n Buday a	1.002,18	5 Warisan Budaya	4.741	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Kreatif	6 Sub Sektor Ekraf*	6 Sub Sektor Ekraf*	350,00	6 Sub Sektor Ekraf	6.450,00	6 Sub Sektor Ekraf	10.857,50	6 Sub Sektor Ekraf	7.190,00	6 Sub Sektor Ekraf	8.490,00	6 Sub Sektor Ekraf	10.090,00	7 Sub Sektor Ekraf	43.077,50	DISPARPORA
				Jumlah Event budaya Nasional	3 Event*	3 Event*		3 Event		3 Event		3 Event		3 Event		3 Event		4 Event		
	Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	Program Pengembnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	75%*	75%	1.723,55	75%	26.322,85	75%	55.275,74	75%	64.988,62	75%	-	75%	35.866,84	100%	182.454,06	DISPARPORA
				Peningkatan Presatsi Olahraga	peringkat 3	peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 2		
				Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	100 orang *	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		
			Program Pengembnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	75%*	75%	1.723,55	75%	26.322,85	75%	55.275,74	75%	64.988,62	75%	-	75%	35.866,84	100%	182.454,06	DISPARPORA

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Peningkatan Presatsi Olahraga	peringkat 3	peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 2		
				Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	100 orang *	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		
			Program Pengemnbnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	75%*	75%	1.723,55	75%	26.322,85	75%	55.275,74	75%	64.988,62	75%	-	75%	35.866,84	100%	182.454,06	DISPARPORA
				Peningkatan Presatsi Olahraga	peringkat 3	peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 2		
				Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	100 orang *	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	68,75%	73,15	28.895,00	79,15 %	79.803,29	84,25 %	90.500,23	89,55 %	101.699,46	94,75 %	104.520,80	100%	120.856,71	100%	497.380	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	25%*	25%*	1.880,87	25%	1.856,66	25%	1.267,00	25%	1.650,00	25%	1.680,00	25%	1.745,00	50%	8.198,67	DISPARPORA
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	25%*	25%*	404,96	25%	1.000,00	25%	1.080,00	25%	2.890,00	25%	3.040,00	25%	3.140,00	50%	11.150,00	DISPARPORA
			Program Pengemnbnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	75%*	75%	1.723,55	75%	26.322,85	75%	55.275,74	75%	64.988,62	75%	-	75%	35.866,84	100%	182.454,06	DISPARPORA
				Peningkatan Presatsi Olahraga	peringkat 3	peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 2		
				Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	100 orang *	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		
Misi 5 Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan	75%	75%	1.165,83	77%	1.268,44	80%	1.357,23	82%	1.452,24	85%	1.553,90	90%	1.662,67	90%	7.294,48	BAPELITBANG
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan	100%	100%	754,46	100%	1.133,30	100%	1.242,68	100%	1.345,10	100%	1.465,45	100%	1.564,34	100%	6.750,87	BAPELITBANG
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset	100%	100%	910,85	100%	2.270,00	100%	3.770,00	100%	3.140,00	100%	2.975,00	100%	3.240,00	100%	15.395,00	BAPELITBANG

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	100%	100%	2.951,13	100%	15.697,98	100%	18.819,28	100%	18.052,68	100%	16.568,68	100%	15.282,73	100%	84.421,35	BADAN KEUANGAN
				Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penyerapan dana transfer	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penyerapan belanja daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelola an	6 Bidang pengel olaan		6 Bidang pengel olaan		6 Bidang pengel olaan		6 Bidang pengel olaan		6 Bidang pengel olaan		6 Bidang pengel olaan		6 Bidang pengel olaan		
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase SKPD/Ormas/Orpol/Pero rang an yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip sesuai prosedur dan aturan yang berlaku	10,71%	17,85 %	585,64	17,85 %	1.518,27	53,57 %	329,06	71,43 %	362,87	82,14 %	398,93	89,29 %	426,38	89,29%	3.035,51	DPK
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase SKPD memiliki ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	0,50%	0,6	26,21	0,7	214,15	0,8	236,85	0,9	469,95	0,9	621,75	1	700,78	1	2.269,69	DPK

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	10,40	10,6		10,7		10,8		10,9		11		12		12		
			Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase SKPD dalam melaksanakan pengelolaan sesuai dengan NSPK	10	20	86,33	30	103,35	40	818,14	50	7.081,76	60	5.085,94	70	345,39	60	13.434,58	DPK
			Program Perekonomian Dan Pembangunan				1.483,67		1.860,00		1.621,00		1.747,50		1.860,00		1.979,30		9.067,80	SETDA
			Program Perekonomian Dan Pembangunan				1.483,67		1.860,00		1.621,00		1.747,50		1.860,00		1.979,30		9.067,80	SETDA
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtanggankan terhadap PAD	0,5%	0,1%	1.991,19	1	2.755,63	1	3.306,76	1	3.168,98	1	3.998,27	1	2.763,32	1	15.992,96	BADAN KEUANGAN
				Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD	0	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah informasi data pengelolaan BMD	12 jenis	12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Tertagih	100%	100%	1.215,99	100%	2.875,75	100%	2.972,34	100%	3.389,13	100%	4.026,04	100%	2.839,09	100%	16.102,35	BADAN KEUANGAN
				Jumlah penambahan objek pajak baru	10 objek	10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		
				Jumlah jenis pajak memakai sistem online	17 data online	17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		
				Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	100%	100%		100%		100%		1,0		100%		100%		100%		
				Persentase peningkatan pajak daerah	20%	20%		20%		20%		0,2		20%		20%		20%		
				Persentase peningkatan retribusi daerah	20%	20%		20%		20%		0,2		20%		20%		20%		
				Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%	100%		100%		100%		1,0		100%		100%		100%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi	100%	100%	253,94	100%	253,94	100%	500,52	100%	507,83	100%	515,28	100%	522,89	100%	2.300,46	INSPEKTORAT
				Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Administrasi Umum				32.550,32		36.722,88		40.700,15		45.132,00		50.085,88		55.656,87		228.297,78	SETDA
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi	100%	100%	253,94	100%	253,94	100%	500,52	100%	507,83	100%	515,28	100%	522,89	100%	2.300,46	INSPEKTORAT
				Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas Aparatur	58*	58	1.463,79	60	2.575,13	62	2.133,78	64	2.535,56	66	2.647,20	70	2.079,93	70	11.971,60	BKPSDM
			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	58*	58	1.463,79	60	2.575,13	62	2.133,78	64	2.535,56	66	2.647,20	70	2.079,93	70	11.971,60	BKPSDM
				Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	80*	80	1.083,77	82	1.506,09	84	1.690,88	86	1.528,38	88	1.558,33	90	1.698,06	90	7.981,74	
			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	58*	58	1.463,79	60	2.575,13	62	2.133,78	64	2.535,56	66	2.647,20	70	2.079,93	70	11.971,60	BKPSDM
				Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	80*	80	1.083,77	82	1.506,09	84	1.690,88	86	1.528,38	88	1.558,33	90	1.698,06	90	7.981,74	
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Program Fasilitas/ Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase difasilitasi seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	21.044,37	100%	22.096,58	100%	23.801,41	100%	24.961,48	100%	26.179,56	100%	27.458,54	100%	124.497,57	SET. DPRD

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	25%	25%	1.000,82	29%	1.140,51	29%	1.163,32	32%	1.186,58	32%	1.210,31	36%	1.234,52	36%	5.935,23	INSPEKTORAT
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi			2.863,00		6.432,65		3.800,00		4.075,00		3.925,00		3.680,00		24.775,65	DISKOMINFO
				Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar																DISKOMINFO
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Kepuasan Komunikasi Publik			1.250,00		8.110,94		3.375,00		3.375,00		3.380,00		3.380,00		21.620,94	DISKOMINFO
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Aplikasi yang lulus uji BSSN			85,00		130,00		150,00		150,00		150,00		150,00		730,00	DISKOMINFO
				Persentase otoritas yang bersertifikat elektronik																
				Persentase perangkat daerah yang menggunakan sertifikat elektronik secara aktif																
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase keterediaan data statistik sektoral			120,00		405,60		250,00		240,00		260,00		200,00		1.355,60	DISKOMINFO
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi	100%	100%	253,94	100%	253,94	100%	500,52	100%	507,83	100%	515,28	100%	522,89	100%	2.300,46	INSPEKTORAT
				Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penyelenggaraan	Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	100%	100%	1.277,97	100%	1.405,77	100%	1.546,34	100%	1.700,98	100%	1.871,08	100%	2.058,18	100%	8.582,35	KEC. MKS

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	100%	100%	1.910,00	100%	2.101,00	100%	2.311,10	100%	2.542,20	100%	2.796,40	100%	3.076,10	100%	12.826,80	KEC. GP
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Penyelenggaraan PemerintahanDan Pelayanan Publik	Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	100%	100%	1.115,42	100%	1.230,88	100%	1.353,97	100%	1.489,37	100%	1.638,30	100%	1.802,13	100%	7.514,65	KEC. ABTB
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84%	86%	917,38	88%	963,25	90%	1.011,42	92%	1.061,99	93%	1.115,09	94%	1.170,84	94%	5.322,58	DISDUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84%	86%	410,82	88%	431,36	90%	452,92	92%	475,57	93%	499,35	94%	524,32	94%	2.383,52	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	90%	91%	282,62	92%	296,75	3%	311,59	94%	327,17	95%	343,53	96%	360,70	96%	1.639,75	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	90%	91%	59,72	92%	62,70	93%	65,84	94%	69,13	95%	72,59	96%	76,22	96%	346,47	DISDUKCAPIL
			Program Fasilitasi/ Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase difasilitasi/nya seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	21.044,37	100%	22.096,58	100%	23.801,41	100%	24.961,48	100%	26.179,56	100%	27.458,54	100%	124.497,57	SET. DPRD

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	7.292,00	100%	7.321,20	100%	7.353,30	100%	7.388,70	100%	7.427,50	100%	7.470,30	100%	36.961,00	KEC. GP
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	35%	35%	1.650,43	35%	250,61	35%	10.268,18	35%	10.495,00	35%	10.744,50	35%	11.018,95	35%	42.777,24	KEC. ABTB
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda	100%		-	100%	75,00	100%	82,50	100%	90,75	100%	99,83	100%	109,81	100%	457,89	KEC. MKS
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda	100%	100%	100,00	100%	110,00	100%	121,00	100%	133,10	100%	146,40	100%	161,10	100%	671,60	KEC. GP
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	-	100%	75,00	100%	82,50	100%	90,75	100%	99,83	100%	109,81	100%	457,89	KEC. ABTB
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda	100%	100%	210,04	100%	385,00	100%	423,50	100%	465,85	100%	512,44	100%	563,68	100%	2.350,47	KEC. ABTB
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Penyelenggaraan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda	100%	100%	100,00	100%	110,00	100%	121,00	100%	133,10	100%	146,40	100%	161,10	100%	671,60	KEC. GP

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%		86,02	100%	94,62	100%	104,08	100%	114,49	100%	125,94	100%	138,53	100%	577,66	KEC. MKS
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase Pajak Tertagih	100%	100%	1.215,99	100%	2.875,75	100%	2.972,34	100%	3.389,13	100%	4.026,04	100%	2.839,09	100%	16.102,35	BADAN KEUANGAN	
			Jumlah penambahan objek pajak baru	10 objek	10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek			
			Jumlah jenis pajak memakai sistem online	17 data online	17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online			
			Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	100%	100%		100%		100%		1,0		100%		100%		100%			
			Persentase peningkatan pajak daerah	20%	20%		20%		20%		0,2		20%		20%		20%			
			Persentase peningkatan retribusi daerah	20%	20%		20%		20%		0,2		20%		20%		20%			
			Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%	100%		100%		100%		1,0		100%		100%		100%			
			Persentase Pajak Tertagih	100%	100%	1.215,99	100%	2.875,75	100%	2.972,34	100%	3.389,13	100%	4.026,04	100%	2.839,09	100%	16.102,35	BADAN KEUANGAN	
			Jumlah penambahan objek pajak baru	10 objek	10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek			
			Jumlah jenis pajak memakai sistem online	17 data online	17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online			
			Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	100%	100%		100%		100%		1,0		100%		100%		100%			
			Persentase peningkatan pajak daerah	20%	20%		20%		20%		0,2		20%		20%		20%			
			Persentase peningkatan retribusi daerah	20%	20%		20%		20%		0,2		20%		20%		20%			

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%	100%		100%		100%		1,0		100%		100%		100%			
Misi 6 Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	3,94	4	402,26	4,2	710,00	4,4	740,00	4,5	775,00	4,6	810,00	4,7	596,42	4,7	3.631,42	DP3APPKB
			Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	7,53	7,42	257,35	7,31	200,00	7,21	300,00	7,10	400,00	7,00	500,00	6,91	600,00	6,91	2.000,00	DP3APPKB
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase capaian klaster Pemenuhan Hak Anak	60%*	60%	452,34	63%	625,00	66%	750,00	69%	875,00	72%	950,00	75%	1.025,00	75%	4.225,00	DP3APPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap Anak	73,72	70,27	699,85	67,12	525,00	64,25	637,00	61,61	735,00	59,18	875,00	56,93	895,00	56,93	3.667,00	DP3APPKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase SKPD yang menyediakan data terpilah gender dan anak	100%*	100%	27,73	100%	80,00	100%	85,00	100%	90,00	100%	95,00	100%	27,73	100%	377,73	DP3APPKB
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah	79,50%*	79,50 %	979,40	79,75 %	1.450,00	80%	1.650,00	80,25 %	1.750,00	80,50 %	1.875,00	80,75 %	979,40	80,75%	7.704,40	DP3APPKB
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kelompok Kegiatan aktif	80%	80%	187,94	80%	680,28	80%	547,05	85%	589,86	85%	614,96	85%	645,21	85%	3.077,36	DP3APPKB
			Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	3,94	4	402,26	4,2	710,00	4,4	740,00	4,5	775,00	4,6	810,00	4,7	596,42	4,7	3.631,42	DP3APPKB
		Meningkatnya Kenyamanan Kota	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan	0%	2,21%	410,00	26,55%	1.225,00	48,63%	2.244,00	23%	271,50		-		-	100,00%	3.740,50	DPKP	
			Persentase Penyediaan rumah yang layak	97,51%	0,25%	1.965,25	0,24%	3.068,12	0,24%	7.948,89	0,24%	7.715,66	0,24%	8.487,23	0,24%	7.139,80	98,96%	34.359,70	DPKP	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	85%	85%	1.531,36	87%	3.345,48	90%	3.360,26	92%	3.352,02	92%	3.528,12	94%	3.714,12	94%	17.300,00	BPBD
				Persentase respon cepat kejadian bencana	0,85	0,85		0,87		0,9		0,92		0,92		0,94		0,94		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat	85%	85%		87%		90%		92%		92%		94%		94%		
			Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	100	100	1.125,00	100	1.125,00	100	1.375,00	100	1.375,00	100	1.520,00	100	1.615,00	100	7.010,00	DINSOS
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang			1.299,51		3.150,00		2.010,63		1.740,64		1.445,62		1.500,65	0,01	9.847,54	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang			1.299,51		3.150,00		2.010,63		1.740,64		1.445,62		1.500,65	0,01	9.847,54	DPUPR
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kelurahan siaga kebakaran	55%	60%	1.552,58	65%	4.360,32	70%	5.330,45	75%	5.701,98	80%	6.219,85	85%	6.811,63	85%	28.424,24	DISKAR
				Persentase Bangunan yg mempunyai sarana proteksi kebakaran	45%	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%		
				Persentase Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	
				Persentase penurunan kerugian akibat kebakaran	10%	10%		9%		9%		8%		7%		6%		6%		
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kelurahan siaga kebakaran	55%	60%	1.552,58	65%	4.360,32	70%	5.330,45	75%	5.701,98	80%	6.219,85	85%	6.811,63	85%	28.424,24	DISKAR
				Persentase Bangunan yg mempunyai sarana proteksi kebakaran	45%	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%		
				Persentase Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	
				Persentase penurunan kerugian akibat kebakaran	10%	10%		9%		9%		8%		7%		6%		6%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	85%	85%	1.531,36	87%	3.345,48	90%	3.360,26	92%	3.352,02	92%	3.528,12	94%	3.714,12	94%	17.300,00	BPBD
				Persentase respon cepat kejadian bencana	0,85	0,85		0,87		0,9		0,92		0,92		0,94		0,94		
				Persentase perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat	85%	85%		87%		90%		92%		92%		94%		94%		
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	90%	95%	11.530,35	95%	12.683,38	96%	13.951,72	96%	15.346,89	97%	16.881,58	97%	18.569,74	97%	77.433,32	SATPOL PP
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	5 kasus	9 kasus	193,19	9 kasus	562,49	8 kasus	600,24	8 kasus	651,76	7 kasus	697,44	7 kasus	752,68	7 kasus	3.264,61	KESBANGPOL
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	2 kasus	2.513,82	2 kasus	2.765,20	2 kasus	3.385,56	2 kasus	3.724,12	2 kasus	3.666,53	2 kasus	4.035,68	2 kasus	17.577,08	KESBANGPOL
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	2 kasus	93,01	2 kasus	102,32	2 kasus	112,55	2 kasus	123,80	2 kasus	136,18	2 kasus	149,80	2 kasus	624,65	KESBANGPOL
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	5 kasus	9 kasus	849,40	9 kasus	456,16	8 kasus	511,78	8 kasus	587,96	7 kasus	624,75	7 kasus	632,23	7 kasus	2.812,89	KESBANGPOL
		Meningkatnya kehidupan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana	60*	60	2.813,00	70	2.813,00	80	3.445,00	80	3.445,00	80	3.713,00	80	3.815,00	80	17.231,00	DINSOS
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial	70%	70%	2.260,00	70%	2.260,00	70%	2.545,00	70%	2.545,00	70%	2.730,00	70%	2.950,00	70%	13.030,00	DINSOS

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan Nasional	80*	80	1.833,60		1.833,60		1.933,60		1.933,60		933,60		1.967,00		8.601,40	DINSOS
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	60*	60	230,00	65	224,00	70	260,00	75	260,00	80	278,00	85	300,00	85	1.322,00	DINSOS
				Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	60*	60	1.750,00	60	1.750,00	60	1.875,00	60	1.900,00	60	1.935,00	60	2.000,00	60	9.460,00	
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial	70%	70%	2.260,00	70%	2.260,00	70%	2.545,00	70%	2.545,00	70%	2.730,00	70%	2.950,00	70%	13.030,00	DINSOS
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase capaian klaster Pemenuhan Hak Anak	60%*	60%	452,34	63%	625,00	66%	750,00	69%	875,00	72%	950,00	75%	1.025,00	75%	4.225,00	DP3APPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap Anak	73,72	70,27	699,85	67,12	525,00	64,25	637,00	61,61	735,00	59,18	875,00	56,93	895,00	56,93	3.667,00	DP3APPKB
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah	79,50%*	79,50 %	979,40	79,75 %	1.450,00	80%	1.650,00	80,25 %	1.750,00	80,50 %	1.875,00	80,75 %	979,40	80,75%	7.704,40	DP3APPKB
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial	70%	70%	2.260,00	70%	2.260,00	70%	2.545,00	70%	2.545,00	70%	2.730,00	70%	2.950,00	70%	13.030,00	DINSOS
Misi 7 Hebat dalam Sektor Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				-		-		-		40,00		60,00		70,00		170,00	DISPERTAPANG
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				1.026,79		990,00		1.010,00		3.299,10		1.098,80		1.134,20		7.532,10	DISPERTAPANG
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				290,26		220,00		300,00		350,00		380,00		400,00		1.650,00	DISPERTAPANG

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Tahun Berjalan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita	2112,9 kkal/kap/hr	≥ 2100	-	≥ 2100	-	≥ 2100	20,00	≥ 2100	-	≥ 2100	-	≥ 2100	-	≥ 2100	-	DISPERTAPANG
				Konsumsi Energi dan Protein per Kapita	61,9 gr/kap/hr	≥ 57		≥ 57		≥ 57		≥ 57		≥ 57		≥ 57		≥ 57		
				Coefficient Variation (CV) harga beras kota Bukittinggi	≤3%	≤3%	-	≤3%	20,00	≤3%	20,00	≤3%	20,00	≤3%	20,00	≤3%	20,00	≤3%	100,00	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama	8.399 Ton	18.684 Ton	-	18.974 Ton	50,00	19.268 Ton	-	19.567 Ton	50,00	19.567 Ton	-	20.490 Ton	50,00	20.490 Ton	150,00	DISPERTAPANG
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan cadangan pangan pemerintah			10,00		20,00		10,00				25,00		10,00		65,00	DISPERTAPANG
		Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Bahan pangan segar asal tumbuhan terkontaminasi di atas ambang batas	24%	24%	21,00	23%	50,00	23%	50,00	22%	50,00	22%	50,00	21%	50,00	21%	250,00	DISPERTAPANG
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				1.026,79		990,00		1.010,00		3.299,10		1.098,80		1.134,20		7.532,10	DISPERTAPANG
			Program Penyuluhan Pertanian				336,38		480,32		423,35		458,69		506,56		437,21		2.306,14	DISPERTAPANG
			Pogram Perizinan Usaha Pertanian				-		5,00		5,00		6,00		6,00		6,00		28,00	DISPERTAPANG
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi ber kondisi baik			4.085,68		7.910,21		6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00	0,03	34.710,21	DPUPR
				Jumlah daerah Irigasi yang terbangun																

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini akan diuraikan program yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dibagi dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, kemudian akan dialokasikan pagu indikatif program yang merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut didapatkan dari kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten untuk melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Demikian juga peraturan yang sifatnya mandatory sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan Pendidikan minimal 20 % dari Belanja Daerah, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Urusan Kesehatan minimal 10 % dari Belanja Langsung, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) Pasal 230 yang menyatakan pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan,

sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Dalam hal ini pola pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun. Adapun Proyeksi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.1. Sedangkan pada Tabel 7.2 disajikan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah (Rp juta)

Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA DAERAH	754.807,56	748.811,02	759.767,63	770.302,91	787.606,08	802.694,61
Belanja Operasi	616.375,60	616.431,66	624.391,22	634.926,50	646.008,94	657.594,72
Belanja Pegawai	331.927,11	340.225,29	348.730,92	357.449,20	366.385,43	375.545,06
Belanja Barang dan Jasa	259.906,00	263.154,82	266.444,26	269.774,81	273.147,00	276.561,34
Belanja Bunga						
Belanja Subsidi						
Belanja Hibah	23.311,69	11.801,54	7.966,04	6.452,49	5.226,52	4.233,48
Belanja Bantuan Sosial	1.230,80	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.254,85
Belanja Modal	127.417,15	129.009,86	130.622,48	132.255,26	133.908,46	135.582,31
Belanja Modal	127.417,15	131.379,37	134.376,41	134.376,41	140.597,14	144.099,89
Belanja Tidak Terduga	11.014,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Belanja Tidak Terduga	11.014,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Belanja Transfer						
Belanja Bagi Hasil						
Belanja Bantuan Keuangan						

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						613.086,70		214.702,12		232.136,42		297.101,78		264.751,75		1.621.778,58	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	531.957,29	A	123.420,39	A	129.591,41	A	136.070,98	A	142.874,52	A	1.063.914,58	DISDIKBUD
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	68,75%	73,15	79,15%	79.803,29	84,25%	90.500,23	89,55%	101.699,46	94,75%	104.520,80	100%	120.856,71	100%	497.380	DISDIKBUD
1.01.02	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	0%	0%	20%	726,12	40%	131,5	60%	145,55	80%	55.705,00	100%	165,52	100%	56.874	DISDIKBUD
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP	100%	100%	100%	350	100%	400	100%	450	100%	500	100%	550	100%	2.250	DISDIKBUD
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memiliki izin	100%	100%	100,%	250	100%	250	100%	250	100%	305	100%	305	100%	1.360	DISDIKBUD
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						122.585,55		130.749,60		138.940,20		148.003,50		156.177,34		696.456,21	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	38.406,39	A	40.326,71	A	42.343,05	A	44.460,20	A	46.683,21	A	212.219,56	DINKES
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	90%	85%	90%	84.179,16	92%	90.422,89	95%	96.597,15	95%	103.543,30	95%	109.494,13	95%	484.236,65	DINKES
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	95%	90%	95%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan kunjungan neonatal	90%	90%	90%		90%		95%		95%		95%		95%		
		Cakupan kunjungan balita	85%	80%	85%		90%		95%		95%		95%		95%		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90%	85%	90%		93%		95%		95%		100%		100%		
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik	13%	14.50%	13%		11.50%		10%		10%		10%		10%	-	
		Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	45%	40%	45%		50%		55%		60%		60%		60%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase perbaikan status gizi buruk dan kurang pada balita	7,5%	7,8 %	7,5%		7,3 %		7%		6,7%		6,6%		6,6%		
		Persentase keberhasilan pengobatan TB BTA positif	80%	80%	80%		80%		85%		85%		90%		90%	-	
		Persentase kasus HIV mendapat layanan kesehatan & pengobatan	70%	65%	70%		75%		80%		85%		85%		85%		
		Persentase kasus DBD mendapat layanan kesehatan sesuai standar	95%	90%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		
		Persentase masyarakat berisiko terdeksi Diabetes Mellitus	72%	70%	72%		73%		75%		80%		85%		85%	-	
		Persentase masyarakat berisiko terdeksi Hipertensi	85%	80%	85%		90%		90%		90%		90%		90%		
		Persentase ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55%	50%	55%		60%		65%		65%		65%		65%		
		Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar	90%	85%	90%		94%		95%		97%		98%		98%	-	
		Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes dan rujukan	92%	90%	92%		95%		95%		95%		95%		95%	-	
		Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
		Tingkat kepuasan mayarakat pada pelayanan fasyankes dan rumah sakit	85%	80%	85%		85%		85%		85%		85%		85%	-	
		Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	90%	90%	90%		90%		95%		95%		95%		95%	-	
		Cakupan Universal Hearth Coverage (UHC)	85	85	87		90		95		97		100		100	-	
		Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	40%	40%	45%		50%		55%		60%		60%		60%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	45%	45%	50%		55%		60%		65%		65%		65%	-	
		Persentase kelurahan yang melaksanakan kelurahan sehat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar	80%	80%	80%		80%		85%		85%		85%		85%		
		Persentase sarana air minum yang melakukan pengawasan kualitas air	85%	85%	90%		95%		95%		95%		95%		95%		
		Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar	80%	80%	80%		80%		85%		85%		85%		85%		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai analisa beban kerja	80%	80%	80%	449,74	80%	472,51	85%	496,44	85%	521,6	85%	548,06	90%	2.488,34	DINKES
1.02.03	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90%	90%	90%	266,28	90%	279,59	95%	293,57	95%	308,25	95%	323,66	95%	1.471,36	DINKES
1.02.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	60%	60%	60%	511,59	65%	595,89	65%	725,82	70%	832,66	70%	919,82	70%	3.585,79	DINKES
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM						176.540,02		115.762,40		104.720,27		101.880,75		103.920,67		602.824,09	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	10,530.72	A	11,057.26	A	11,610.12	A	12,190.62	A	12,800.16	A	58,188.87	DPUPR
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi ber kondisi baik	70%	72%	75%	11.596,07	77%	6.700,00	80%	6.700,00	82%	6.700,00	85%	6.700,00	85%	38.396,07	DPUPR
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga	97%	97%	97%	13.784,00	98%	28.200,00	98%	23.200,00	99%	23.200,00	99%	23.700,00	99%	112.084,00	DPUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase prasarana persampahan yang berkondisi baik	80%	80%	80%	1.950,00	80%	1.600,00	80%	1.600,00	80%	1.600,00	80%	1.600,00	80%	8.350,00	DPUPR
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase RT yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah	60%	60%	60%	1.150,00	60%	2.550,00	60%	950	60%	200	60%	200	60%	5.050,00	DPUPR
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Perkotaan berkondisi baik	100%	100%	100%	53.432,50	100%	14.500,00	100%	12.900,00	100%	10.800,00	100%	10.725,36	100%	102.357,86	DPUPR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung Hijau	Persentase Bangunan Gedung Hijau	5%	5%	5%	55.226,99	5%	24.323,67	5%	24.323,67	5%	24.323,67	5%	24.823,67	5%	153.021,66	DPUPR
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung yang telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	80%	80%	80%	500	80%	500	80%	500	80%	500	80%	500	80%	2.500,00	DPUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan beserta bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap	89%	89%	89%	25.098,40	90%	23.500,00	90%	20.100,00	91%	19.700,00	91%	20.300,00	91%	108.698,40	DPUPR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	80%	80%	80%	428,90795	80%	820,84	80%	820,84	80%	820,84	80%	820,84	80%	3.712,27	DPUPR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	60%	60%	62%	2.842,42	64%	2.010,63	66%	2.015,64	68%	1.845,62	68%	1.750,65	84%	10.464,96	DPUPR
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						122.585,55		130.749,60		138.940,20		148.003,50		156.177,34		696.456,21	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	3.891,97	A	4.086,57	A	4.290,90	A	4.505,44	A	4.730,72	A	21.505,60	DPKP
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan rumah yang layak	97,51%	0,25%	0,24%	3.068,12	0,24%	7.948,89	0,24%	7.715,66	0,24%	8.487,23	0,24%	7.139,80	98,96%	34.359,70	DPKP
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan	0%	2,21%	26,55%	1.225,00	48,63%	2.244,00	23%	271,5		-		-	100,00%	3.740,50	DPKP
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	97,51%	0,25%	0,24%	4.190,00	0,24%	3.225,00	0,24%	3.546,00	0,24%	3.903,00	0,24%	4.293,00	98,96%	19.157,00	DPKP
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis	83%	85%	85%	15.956,42	86%	17.050,68	87%	18.647,48	88%	20.403,93	90%	22.336,06	90%	94.394,56	DPKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						39.416,00		40.011,31		42.638,23		45.778,75		49.202,15		217.046,43	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	7.959,61	A	5.748,32	A	6.035,74	A	6.337,52	A	6.654,40	A	32.735,58	DISKAR
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	8.414,33	A	8.835,04	A	9.276,80	A	9.740,64	A	10.227,67	A	46.494,47	SATPOL PP
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	2.652,88	A	2.785,52	A	2.924,80	A	3.071,04	A	3.224,59	A	14.658,82	BPBD
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	90%	95%	95%	12.683,38	96%	13.951,72	96%	15.346,89	97%	16.881,58	97%	18.569,74	97%	77.433,32	SATPOL PP
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	85%	85%	87%	3.345,48	90%	3.360,26	92%	3.352,02	92%	3.528,12	94%	3.714,12	94%	17.300,00	BPBD
		Persentase respon cepat kejadian bencana	0,85	0,85	0,87		0,9		0,92		0,92		0,94		0,94		
		Persentase perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat	85%	85%	87%		90%		92%		92%		94%		94%		
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kelurahan siaga kebakaran	55%	60%	65%	4.360,32	70%	5.330,45	75%	5.701,98	80%	6.219,85	85%	6.811,63	85%	28.424,24	DISKAR
		Persentase Bangunan yg mempunyai sarana proteksi kebakaran	45%	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		
		Persentase Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase penurunan kerugian akibat kebakaran	10%	10%	9%		9%		8%		7%		6%		6%		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						13.256,39		14.846,93		15.042,60		14.872,80		16.598,36		74.617,08	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	3.250,79	A	3.413,33	A	3.584,00	A	3.763,20	A	3.951,36	A	17.962,68	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial	70%	70%	70%	2.260,00	70%	2.545,00	70%	2.545,00	70%	2.730,00	70%	2.950,00	70%	13.030,00	DINSOS
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana	60*	60	70	2.813,00	80	3.445,00	80	3.445,00	80	3.713,00	80	3.815,00	80	17.231,00	DINSOS
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	60*	60	65	224	70	260	75	260	80	278	85	300	85	1.322,00	DINSOS
		Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	60*	60	60	1.750,00	60	1.875,00	60	1.900,00	60	1.935,00	60	2.000,00	60	9.460,00	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	100	100	100	1.125,00	100	1.375,00	100	1.375,00	100	1.520,00	100	1.615,00	100	7.010,00	DINSOS
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan Nasional	80*	80	90	1.833,60	90	1.933,60	90	1.933,60	90	933,6	90	1.967,00	90	8.601,40	DINSOS
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						623,00		594,28		655,52		649,83		1.304,45		3.827,06	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	2%*	2%	2%	420,63	2%	317,28	2%	355,52	2%	327,83	2%	459,45	2.430,74	1.880,69	DPMPTSPPTK
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	127	150	170	122,37	200	190	220	205	250	220	300	735	1.515,00	1.472,37	DPMPTSPPTK
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	0	0	0	80	0	87	0	95	0	102	0	110	551,9	474	DPMPTSPPTK
		Jumlah tenaga kerja yang menerima BPJS	13.624	14.000	15.000		15.500		16.000		16.500	-	17.000		17.000	13.624	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						8.654,55		9.479,78		10.208,66		10.967,85		10.279,54		49.590,38	
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	5.064,55	A	5.317,78	A	5.583,66	A	5.862,85	A	6.155,99	A	27.984,83	DP3APPKB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.08.02	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	3,94	4	4,2	710	4,4	740	4,5	775	4,6	810	4,7	596,42	4,7	3.631,42	DP3APPKB
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	7,53	7,42	7,31	200	7,21	300	7,10	400	7,00	500	6,91	600	6,91	2.000,00	DP3APPKB
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah	79,50%*	79,50%	79,75%	1.450,00	80%	1.650,00	80,25%	1.750,00	80,50%	1.875,00	80,75%	979,4	80,75%	7.704,40	DP3APPKB
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase SKPD yang menyediakan data terpilah gender dan anak	100%*	100%	100%	80	100%	85	100%	90	100%	95	100%	27,73	100%	377,73	DP3APPKB
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase capaian klaster Pemenuhan Hak Anak	60%*	60%	63%	625	66%	750	69%	875	72%	950	75%	1.025,00	75%	4.225,00	DP3APPKB
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap Anak	73,72	70,27	67,12	525	64,25	637	61,61	735	59,18	875	56,93	895	56,93	3.667,00	DP3APPKB
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						140,00		100,00		120,00		95,00		130,00		565,00	
2.09.01	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama	8.399 Ton	18.684 Ton	18.974 Ton	50	19.268 Ton	-	19.567 Ton	50	19.567 Ton	-	20.490 Ton	50	20.490 Ton	150	DISPERTAPANG
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita	2112,9 kkal/kap/hr	≥ 2100	≥ 2100	-	≥ 2100	20	≥ 2100	-	≥ 2100	-	≥ 2100	-	≥ 2100	-	DISPERTAPANG
		Konsumsi Energi dan Protein per Kapita	61,9 gr/kap/hr	≥ 57	≥ 57		≥ 57		≥ 57		≥ 57		≥ 57		≥ 57		
		Coefficient Variation (CV) harga beras kota Bukittinggi	≤3%	≤3%	≤3%	20	≤3%	20	≤3%	20	≤3%	20	≤3%	20	≤3%	100	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan cadangan pangan pemerintah				20		10				25		10		65	DISPERTAPANG
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Bahan pangan segar asal tumbuhan terkontaminasi di atas ambang batas	24%	24%	23%	50	23%	50	22%	50	22%	50	21%	50	21%	250	DISPERTAPANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						648,19		713,00		784,30		862,73		949,01		3957,24	
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	80%	80%	80%	40,84	80%	44,92	80%	49,42	80%	54,36	80%	59,79	80%	249,33	DPUPR
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	100%	100%	100%	34,80	100%	38,28	100%	42,11	100%	46,32	100%	50,95	100%	212,46	DPUPR
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	80%	80%	80%	82,39	80%	90,62	80%	99,69	80%	109,66	80%	120,62	80%	502,97	DPUPR
2.10.09	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	80%	80%	80%	341,51	80%	375,67	80%	413,23	80%	454,55	80%	500,01	80%	2084,98	DPUPR
2.10.10	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	80%	80%	80%	148,65	80%	163,51	80%	179,86	80%	197,85	80%	217,63	80%	907,50	DPUPR
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						50.087,20		52.542,63		65.704,84		65.565,39		70.757,73		304.829,67	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	20.627,78	A	21.659,17	A	22.742,12	A	23.879,23	A	25.073,19	A	113.981,49	DLH
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu	60%*	60%	65%	253	65%	253	70%	253	70%	253	75%	253	75%	1.265,00	DLH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu	60%*	60%	65%	1.301,00	65%	2.057,62	70%	1.332,29	70%	1.337,00	75%	2.064,00	75%	8.091,91	DLH
		Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu	87,5%	87,5%	87,5%	98,12	87,5%	297	87,5%	326,7	100%	359,37	100%	395,31	100%	1.648,38	DLH
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (Kehati)	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	10%*	10%*	10%	9.287,66	20%	8.294,79	30%	7.918,02	40%	4.909,27	50%	6.994,75	50%	37.404,49	DLH
		Persentase penambahan vegetasi di taman kehati	10%*	10%*	10%		20%		30%		40%		50%		50%		
		Persentase penambahan jumkah vegetasi di hutan kota	10%*	10%*	10%		20%		30%		40%		50%		50%		
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun(Limbah B3)	Persentase limbah LB3 usaha kegiatan yang di kelola	5%*	5%*	5%	28	10%	31	15%	31	20%	35	25%	37	25%	162	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	40%	28	42%	178,44	43%	192,04	45%	204,39	47%	210,78	47%	813,64	DLH
		Persentase PPLH tersertifikasi	11%*	11%*	11%		22%		33%		44%		55%		55%		
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha),Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	40%	72,09	42%	80	43%	88	45%	120	47%	150	47%	510,09	DLH
		Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	10%*	10%*	10%		20%		30%		40%		50%		50%		
		Persentase timbulan sampah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan , Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	40%	521,91	42%	670,89	43%	570,89	45%	600	47%	630	47%	2.993,69	DLH
		Persentasi penambahan jumlah vegetasi di RTH	10%*	10%*	10%		20%		30%		40%		50%		50%		
2.11.09	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	40%	23,1	42%	25,41	43%	27,96	45%	30,75	47%	33,83	47%	141,06	DLH
2.11.10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	presentase usaha/ kegiatan yang diawasi	40%*	40%*	40%	432,13	42%	475	43%	500	45%	525	47%	550	47%	2.482,13	DLH
		Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	10%*	10%*	10%		20%		30%		40%		50%		50%		
		persentase timbulan sampah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	100%	100%	100%	17.414,40	100%	18.520,32	100%	31.722,83	100%	33.312,38	100%	34.365,88	100%	135.335,80	DLH
		Persentase pengurangan sampah di masyarakat	26%*	26%*	26%		27%		28%		30%		30%		30%		
		Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	5%*	5%*	5%		10%		15%		20%		30%		30%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.007,79		6.308,18		6.623,59		6.954,77		7.302,50		33.196,82	
2.12.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	4.253,72	A	4.466,41	A	4.689,73	A	4.924,22	A	5.170,43	A	23.504,50	DISDUKCAPIL
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84%	86%	88%	963,25	90%	1.011,42	92%	1.061,99	93%	1.115,09	94%	1.170,84	94%	5.322,58	DISDUKCAPIL
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84%	86%	88%	431,36	90%	452,92	92%	475,57	93%	499,35	94%	524,32	94%	2.383,52	DISDUKCAPIL
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	90%	91%	92%	296,75	3%	311,59	94%	327,17	95%	343,53	96%	360,7	96%	1.639,75	DISDUKCAPIL
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	90%	91%	92%	62,7	93%	65,84	94%	69,13	95%	72,59	96%	76,22	96%	346,47	DISDUKCAPIL
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						2.608,41		2.840,91		3.010,48		3.330,51		3.496,20		15.286,50	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,5	2,45	292,5	2,4	367	2,38	495	2,28	555	2,2	775	2,2	2.484,50	DP3APPKB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	68%	68,29%	68,5%	1.635,63	68,75%	1.926,86	69,0%	1.925,62	69,1%	2.160,55	69,25%	2.075,99	69,25%	9.724,64	DP3APPKB
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan aktif	80%	80%	80%	680,28	80%	547,05	85%	589,86	85%	614,96	85%	645,21	85%	3.077,36	DP3APPKB
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						73.043,13		72.006,24		43.667,36		45.847,50		45.373,12		279.937,36	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	11.059,28	A	11.612,24	A	12.192,86	A	12.802,50	A	13.442,62	A	61.109,51	DISHUB
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	60	65	70,00	30.894,74	75	36.894,00	80	11.374,50	85	13.345,00	90	11.630,50	95	104.138,74	DISHUB
		Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi	50	50	55,00		60		65		70		75		80		
		Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	D	D	C		C		B		A		A		A		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Sektor Perhubungan	86	86	86,00		87		87		87		88		88			
		Kontribusi PAD di Bidang Perhubungan	73	100	100,00		100		100		100		100		100			
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Jalan beserta bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap		85%	85%	5.078,46	85%	5.579,27	85%	6.127,19	85%	6.729,91	85%	7.392,90	85%	114.689,11	DPUPR	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						18.020,34		10.825,59		11.283,12		11.329,78		11.286,02		62.744,85		
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	3.476,75	A	3.650,59	A	3.833,12	A	4.024,78	A	4.226,02	A	19.211,26	DISKOMINFO	
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Kepuasan Komunikasi Publik	0%	9%	0,176470588	8.110,94	24%	3.375,00	35%	3.375,00	44%	3.380,00	50%	3.380,00	50%	21.620,94	DISKOMINFO	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi		44%	55,6	6.432,65	67%	3.800,00	78%	4.075,00	89%	3.925,00	100%	3.680,00	100%	21.912,65	DISKOMINFO	
		Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar	0%	50%	76,8		89%		92%		96%		100%		100%		DISKOMINFO	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							8.616,22		9.072,32		9.509,26		9.813,42		10.267,64		47.278,88	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	7.180,67	A	7.539,70	A	7.916,68	A	8.312,52	A	8.728,14	A	39.677,71	DISKOPUKMDAG	
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	14%	16%	18%	17,5	20%	50,83	22%	51,5	24%	18,7	26%	54,9	26%	193,43	DISKOPUKMDAG	
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan koperasi		2%	2%	104	2%	337	2%	95	2%	490	2%	122	12%	1148	DISKOPUKMDAG	
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan unit usaha koperasi	12%	12%	13%	343,8	14%	329	15%	274	16%	441	17%	288	17%	1675,8	DISKOPUKMDAG	
2.17.07	Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro		1%	1%	527,80	1%	614,64	1%	607,95	1%	658,85	1%	700,25	5%	3.109,49	DISKOPUKMDAG	
2.17.08	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro		10%	10%	213,34	10%	786,25	10%	794,15	10%	800,25	10%	746,35	10%	3.340,36	DISKOPUKMDAG	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							567,72		450,00		14.085,74		14.999,18		15.543,64		70.950,52	
2.18.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	12.343,53	A	12.960,71	A	13.608,74	A	14.289,18	A	15.003,64	A	68.205,80	DPMPTSPPTK	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kemudahan berusaha	100%	100%	100%	160,22	-		-	-	100%	200	100%	-	100%	360,22	DPMPTSPPTK	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi hijau	45 M	55 M	60 M	175	65 M	180	70 M	185	75 M	190	80 M	195	1.091,05	925	DPMPTSPPTK	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	100%	100%	100%	1.615,39	100%	1.560,53	100%	1.628,59	100%	1.783,94	100%	1.954,84	100%	9.677,36	DPMPTSPPTK	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	50%*	50%	55%	89,92	60%	100	65%	120	70%	140	75%	160	660,86	609,92	DPMPTSPPTK	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data informasi perizinan secara online	100%	100%	100%	142,58	100%	170	100%	172	100%	180	100%	185	100%	849,58		
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							29.179,51		57.622,74		69.528,62		4.720,00		40.751,84		201.802,73	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	25%*	25%*	25%	1.856,66	25%	1.267,00	25%	1.650,00	25%	1.680,00	25%	1.745,00	50%	8.198,67	DISPARPORA	
2.19.03	Program Pengembnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	75%*	75%	75%	26.322,85	75%	55.275,74	75%	64.988,62	75%	-	75%	35.866,84	100%	182.454,06	DISPARPORA	
		Peningkatan Presatsi Olahraga	peringkat 3	peringkat 3	peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 3		peringkat 2			
		Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	100 orang	100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang			
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	25%*	25%*	25%	1.000,00	25%	1.080,00	25%	2.890,00	25%	3.040,00	25%	3.140,00	50%	11.150,00	DISPARPORA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						405,6		250		240		260		200		1.355,60	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase keterediaan data statistik sektoral	0%	35%	40%	405,6	45%	250	50%	240	55%	260	65%	200	65%	1.355,60	DISKOMINFO
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						130		150		150		150		150		730	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Aplikasi yang lulus uji BSSN	0%	11%	11%	130	11%	150	11%	150	11%	150	11%	150	11%	730	DISKOMINFO
		Persentase otoritas yang bersertifikat elektronik		7%	14%		21%		29%		36%		43%		43%		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						4.722,11		5.113,55		5.181,73		1.002,18		5.563,73		25.892,00	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	732,18	2 Warisan Budaya	1.002,18	3 Warisan Budaya	1.002,18	4 Warisan Budaya		5 Warisan Budaya	1.002,18	5 Warisan Budaya	4.741	DISDIKBUD
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	857	2 Warisan Budaya	260	3 Warisan Budaya	235	4 Warisan Budaya	270	5 Warisan Budaya	275	6 Warisan Budaya	1.897	DISDIKBUD
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	565	2 Warisan Budaya	722	3 Warisan Budaya	714	4 Warisan Budaya	757	5 Warisan Budaya	925	5 Warisan Budaya	3.683	DISDIKBUD
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	240	2 Warisan Budaya	347	3 Warisan Budaya	374	4 Warisan Budaya	387	5 Warisan Budaya	445	5 Warisan Budaya	1.793	DISDIKBUD
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	1 Warisan Budaya	2.327,93	2 Warisan Budaya	2.782,37	3 Warisan Budaya	2.856,55	4 Warisan Budaya	2.894,55	5 Warisan Budaya	2.916,55	5 Warisan Budaya	13.778	DISDIKBUD
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						7.929,41		7.995,80		10.733,04		8.417,85		8.698,61		43.774,72	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	5.057,85	A	5.310,74	A	5.576,28	A	5.855,09	A	6.147,85	A	27.947,80	DPK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	CUKUP*	CUKUP	CUKUP	2.659,83	BAIK	2.518,33	BAIK	4.990,03	BAIK	2.396,03	SANGAT BAIK	2.384,03	SANGAT BAIK	14.948,26	DPK
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1. Persentase peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan	10 % dari tahun sebelumn ya*	10 % dari tahun sebelumn ya	10 % dari tahun sebelumn ya	211,73	10 % dari tahun sebelumn ya	166,73	10 % dari tahun sebelumn ya	166,73	10 % dari tahun sebelumn ya	166,73	10 % dari tahun sebelumn ya	166,73	10 % dari tahun sebelumn ya	878,66	DPK
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						1.835,77		1.384,05		7.914,58		6.106,62		1.472,55		18.739,78	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase SKPD/Ormas/Orpol/Perorangan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip sesuai prosedur dan aturan yang berlaku	10,71%	17,85%	17,85%	1.518,27	53,57%	329,06	71,43%	362,87	82,14%	398,93	89,29%	426,38	89,29%	3.035,51	DPK
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase SKPD memiliki ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	0,50%	0,6	0,7	214,15	0,8	236,85	0,9	469,95	0,9	621,75	1	700,78	1	2.269,69	DPK
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	10,40	10,6	10,7		10,8		10,9		11		12		12		
2.24.04	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase SKPD dalam melaksanakan pengelolaan sesuai dengan NSPK	10	20	30	103,35	40	818,14	50	7.081,76	60	5.085,94	70	345,39	60	13.434,58	DPK
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						900,00		1.020,00		1.080,00		1153,5		1.255,85		1.820,00	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai produksi perikanan budidaya (jutaan rupiah)	9.471	9.800	10.000	740,00	10.200	800,00	10.400	855,00	10.600	913,50	10.800	990,85	108.000	4.299,35	DISPERTAPAN G
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Presentase pengembangan produk perikanan	5%	6%	6%	160,00	6,5%	220,00	7,0%	225,00	7,5%	240,00	8,0%	265,00	8,0%	1110	DISPERTAPAN G

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						47.269,81		287.137,05		50.848,28		8.490,00		52.125,75		485.842,07	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	9.394,81	A	9.864,55	A	10.357,78	A	10.875,67	A	11.419,45	A	51.912,27	DISPARPORA
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Pengembangan Objek Wisata	5%*	5%*	5%	27.825,00	5%	261.475,00	5%	29.131,00	5%	25.051,00	5%	26.476,80	10%	369.958,80	DISPARPORA
		Presentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	15%*	15%*	15%		15%		15%		15%		15%		20%		
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Spanding Of Money Wisatawan				3.500,00		4.440,00		3.919,50		3.944,50		4.039,50		19.843,50	DISPARPORA
		Meningkatnya Jumlah Segmen Wisatawan															
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kemitraan	3 Kab/ Kota*	3 Kab/ Kota*	3 Kab/ Kota	100	3 Kab/ Kota	500	3 Kab/ Kota	250	3 Kab/ Kota	100	3 Kab/ Kota	100	6 Kab/ Kota	1.050,00	DISPARPORA
		jumlah Pemasana Ekraf	5 Pasar*	5 Pasar*	5 Pasar		5 Pasar		5 Pasar		5 Pasar		5 Pasar		6 Pasar		
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Kreatif	6 Sub Sektor Ekraf*	6 Sub Sektor Ekraf*	6 Sub Sektor Ekraf	6.450,00	6 Sub Sektor Ekraf	10.857,50	6 Sub Sektor Ekraf	7.190,00	6 Sub Sektor Ekraf	8.490,00	6 Sub Sektor Ekraf	10.090,00	7 Sub Sektor Ekraf	43.077,50	DISPARPORA
		Jumlah Event budaya Nasional	3 Event*	3 Event*	3 Event		3 Event		3 Event		3 Event		3 Event		4 Event		
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.843,00		4.705,00		9.322,10		5.168,80		5.489,20		29.528,10	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Presentase pengembangan produk pertanian		1	2	200,00	3	300,00	4	300,00	5	300,00	5	300,00	20	1.400,00	DISPERTAPANG
		Nilai produksi pertanian (padi, tanaman hias)	6,7 ton/ha, 3%	6,7 ton/ha, 3%	6,8 ton/ha, 3,5%	583,00	6,8 ton/ha, 3,5%	455,00	6,8 ton/ha, 4%	498,00	6,9 ton/ha, 4%	560,00	6,9 ton/ha, 4%	615,00	6,9 ton/ha, 4%	2.711,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Nilai produksi peternakan (daging, telur)	Daging : 1.347.283 kg; Telur : 4.375 kg	D : 1.450.000 ; T : 4.450	D : 1.550.000 ; T : 4.500	630,00	D : 1.650.000 ; T : 4.550	630,00	D : 1.700.000 ; T : 4.600	5.150,00	D : 1.750.000 ; T : 4.650	700,00	D : 1.800.000 ; T : 4.700	720,00	D : 1.800.000 ; T : 4.700	7.830,00	
		persentase meningkatnya pengolahan hasil pertanian		2%	3%	125,00	5%	125,00	5%	125,00	5%	125,00	5%	125,00	5%	625,00	
		persentase peningkatan luas lahan pertanian organik	0	0	0	-	2%	50,00	3%	60,00	4%	70,00	5%	80,00	5%	260,00	
		Indeks ketersediaan sarana pertanian			4	10,00	4	10,00	4	10,00	4	10,00	4	10,00	4	50,00	
		persentase prasarana pertanian yang fungsional		1	1	525,00	1	250,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	925,00	
		persentase prasarana pertanian yang fungsional	50	5	5	1.000,00	5	1.100,00	5	1.200,00	5	1.300,00	5	1.400,00	80	6.000,00	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	laju konversi lahan pertanian		0.05 ha	0.05 ha	80,00	0.05 ha	100,00	0.04 ha	120,00	0.04 ha	150,00	0.04 ha	180,00	0.04 ha	630	DISPERTAPANG
		Indeks ketersediaan prasarana pertanian		0,5	0,5	700,00	0,5	750,00	0,5	800,00	0,5	850,00	0,5	900,00	0,5	4000	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase pengembangan produk peternakan	8,0%	8,0%	8,0%	50,00	8,5%	50,00	9,0%	60,00	10,0%	60,00	10,0%	75,00	10,0%	295,00	DISPERTAPANG
		Presentase pengembangan produk peternakan	8,0%	8,0%	8,0%	265,00	8,5%	280,00	9,0%	294,10	0,1%	308,80	10,0%	324,20	10,0%	1.472,10	
		Presentase penurunan kasus penyakit hewan	4,0%	5,0%	5,5%	535,00	6,0%	465,00	6,5%	515,00	0,1%	545,00	7,5%	570,00	7,5%	2.630,00	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	margin tata niaga hasil pertanian			22%	15,00	24%	15,00	26%	15,00	28%	15,00	30%	15,00	30%	75	
3.27.07	Pogram Perizinan Usaha Pertanian	persentase peningkatan kelas kelompok tani	15%	15%	15%	125,00	15%	125,00	15%	125,00	15%	125,00	15%	125,00	15%	625,00	DISPERTAPANG
3.27.08	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase pengembangan produk pertanian		1	2	200,00	3	300,00	4	300,00	5	300,00	5	300,00	20	1.400,00	DISPERTAPANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						21.015,85		10.935,00		11.170,00		11.411,50		11.544,35		66.076,70	
3.30.02	Proram Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	persentase tertib niaga			49%	330,85	62%	360	78%	390	95%	413	100%	440	67%	1.933,85	DISKOPUKMD AG
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi PAD sektor pengelolaan Pasar		16%	20%	19.500,00	25%	9.350,00	30%	9.435,00	35%	9.443,50	40%	9.444,35	40%	57.172,85	DISKOPUKMD AG
3.30.04	Program Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase tingkat kestabilan harga barang pokok dan barang penting.			80%	65	80%	70	80%	65,00	80%	90	80%	100	80%	390,00	DISKOPUKMD AG
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jejaring perdagangan produk ekspor		1%		0		0	20%	50	30%	110	50%	120	50%	280	DISKOPUKMD AG
3.30.06	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang telah menggunakan standarisasi perdagangan			63%	170	63%	180	65%	180	73%	180	75%	180	73%	890	DISKOPUKMD AG
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan jejaring perdagangan produk dalam negeri			5%	950	7%	975	9%	1.050,00	10%	1.175,00	12%	1.260,00	12%	5.410,00	DISKOPUKMD AG
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						98.738,67		104.994,35		111.759,37		121.358,85		129.726,85		566.578,10	
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	2%	2%	2%	4.387,04	2%	5.507,50	2%	7.299,50	2%	7.970,50	2%	8.332,50	2%	33.497,04	DPMPTSPPTK
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	50%*	50%	55%	160,22	60%	-	65%	-	70%	200	75%	-	75%	360,22	DPMPTSPPTK
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	50%*	50%	55%	239	60%	290	65%	292	70%	343	75%	345	75%	1.509,00	DPMPTSPPTK
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH						98.738,67		104.994,35		111.759,37		121.358,85		129.726,85		566.578,10	
4.01.01	Program Administrasi Umum	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	36.722,88	A	40.700,15	A	45.132,00	A	50.085,88	A	55.656,87	A	228.297,78	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kelembagaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan peraturan ketatalaksanaan pemerintahan	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase kegiatan pimpinan dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase dokumen perencanaan keuangan, penatausahaan dan pelaporan yang berkualitas	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase kebutuhan KDH, WKDH, Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah dan terpenuhinya kebutuhan KDH, WKDH, Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.02	Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	Indek sikap dan perilaku yang menunjukkan kesalehan sosial				27.285,66		29.787,74		30.350,13		33.156,75		34.021,65		154.601,93	SETDA
		Persentase pemenuhan peraturan perundang - undangan	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase capaian EKPPD sesuai target dengan data dukung yang memadai	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat inflasi	2,21	3	3	1.860,00	3	1.621,00	3	1.747,50	3	1.860,00	3	1.979,30	3	9.067,80	SETDA
		Persentase realisasi belanja modal	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian proses pengadaan barang dan jasa dengan SIRUP	100	100	100		100		100		100		100		100		
4.01 SEKRETARIAT DPRD						42.696,42		45.431,24		47.672,80		50.026,44		52.497,76		238.324,65	
4.02.01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	20.600	A	21.630	A	22.711	A	23.847	A	25.039	A	113.827,08	SET. DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.02.02	Program Fasilitasi/ Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase difasilitasi seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	22.096,58	100%	23.801,41	100%	24.961,48	100%	26.179,56	100%	27.458,54	100%	124.497,57	SET. DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5.01 PERENCANAAN						10.009		11.974		11.821		12.173		12.954		58.930,00	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	5.337	A	5.604	A	5.884	A	6.178	A	6.487	A	29.489,99	BAPELITBANG
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan	75%	75%	77%	1.268,44	80%	1.357,23	82%	1.452,24	85%	1.553,90	90%	1.662,67	90%	7.294,48	BAPELITBANG
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	1.133,30	100%	1.242,68	100%	1.345,10	100%	1.465,45	100%	1.564,34	100%	6.750,87	BAPELITBANG
5.02 KEUANGAN						34.725,00		39.164,00		39.380,00		40.100,00		37.168,00		190.536,00	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	13.396,00	A	14.065,00	A	14.769,00	A	15.50,00	A	16.283,00	A	74.019,77	BADAN KEUANGAN
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	15.697,98	100%	18.819,28	100%	18.052,68	100%	16.568,68	100%	15.282,73	100%	84.421,35	BADAN KEUANGAN
		Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase penyerapan dana transfer	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase penyerapan belanja daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelola an	6 Bidang pengelola an	6 Bidang pengelola an		6 Bidang pengelola an		6 Bidang pengelola an		6 Bidang pengelola an		6 Bidang pengelola an		6 Bidang pengelola an		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD	0,5%	0,1%	100%	2.755,63	100%	3.306,76	100%	3.168,98	100%	3.998,27	100%	2.763,32	100%	15.992,96	BADAN KEUANGAN
		Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD	0	0	0		0		0		0		0		0		
		Jumlah informasi data pengelolaan BMD	12 jenis	12 jenis	12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Tertagih	100%	1100%	100%	2.875,75	100%	2.972,34	100%	3.389,13	100%	4.026,04	100%	2.839,09	100%	16.102,35	BADAN KEUANGAN
		Jumlah penambahan objek pajak baru	10 objek	10 objek	10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		10 objek		
		Jumlah jenis pajak memakai sistem online	17 data online	17 data online	17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		17 data online		
		Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase peningkatan pajak daerah	20%	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
		Persentase peningkatan retribusi daerah	20%	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
		Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%	100%	100%		100%		100%1		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.03 KEPEGAWAIAN						6.061,98		6.474,47		6.723,65		6.831,24		7.617,53		37.105,27	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	4.555,80	A	4.783,59	A	5.022,77	A	5.273,91	A	5.537,60		25.173,67	BKPSDM
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	58*	58	60	1.506,09	62	1.690,88	64	1.690,88	66	1.558,33	70	2.079,93	70	11.971,60	BKPSDM
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	80*	80	82		84		86		88		90		90		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.575,13		2.575,13		2.535,56		2.647,20		2.079,93		11.971,60	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas Aparatur	58*	58	60	2.575,13	62	2.575,13	64	2.535,56	66	2.647,20	70	2.079,93	70	11.971,60	BKPSDM
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2.270,00		10.742,02		3.140,00		2.975,00		3.240,00		57.098,60	
5.05.02	100%	100%	100%	2.270,00	100%	3.770,00	100%	3.140,00	100%	2.975,00	100%	3.240,00	100%	15.395,00	100%	15.395,00	BAPELITBANG
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6.1 INSPEKTORAT DAERAH						8.587,10		9.216,12		9.624,31		10.051,99		10.500,12		47.979,63	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	7.192,65	A	7.552,28	A	7.929,90	A	8.326,39	A	8.742,71	A	39.743,94	INSPEKTORAT
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	25%	25%	29%	1.140,51	29%	1.163,32	32%	1.186,58	32%	1.210,31	36%	1.234,52	36%	5.935,23	INSPEKTORAT
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi	100%	100%	100%	253,94	100%	500,52	100%	507,83	100%	515,28	100%	522,89	100%	2.300,46	INSPEKTORAT
		Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01 KECAMATAN						37.352,52		55.209,72		42.473,70		61.607,65		196.643,60		37.352,52	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	10.870	A	11.413	A	11.984	A	12.583	A	13.212	A	60,061.45	KEC. MKS
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	9.616,69	A	10.097,53	A	10.602,40	A	11.132,52	A	11.689,15	A	53,138.29	KEC. ABTB
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	9.300,42	A	9.765,44	A	10.253,71	A	10.766,40	A	11.304,72	A	51,390.70	KEC. GP
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	1.405,77	100%	1.546,34	100%	1.700,98	100%	1.871,08	100%	2.058,18	100%	8,582.35	KEC. MKS
		Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	2.101,00	100%	2.311,10	100%	2.542,20	100%	2.796,40	100%	3.076,10	100%	12,826.80	KEC. GP
		Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	Program Penyelenggaraan PemerintahanDan Pelayanan Publik	Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	1.230,88	100%	1.353,97	100%	1.489,37	100%	1.638,30	100%	1.802,13	100%	7,514.65	KEC. ABTB
		Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%		100%	12.758,23	100%	13.134,06	100%	13.547,46	100%	14.002,21	100%	14.502,43	100%	67,944.39	KEC. MKS
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	7.321,20	100%	7.353,30	100%	7.388,70	100%	7.427,50	100%	7.470,30	100%	36,961.00	KEC. GP
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	251	100%	8,276	100%	8,303	100%	8,334	100%	8,367	100%	33.530	KEC. ABTB
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%		100%	94,62	100%	104,08	100%	114,49	100%	125,94	100%	138,53	100%	577.66	KEC. MKS
		Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	275	100%	302,5	100%	332,8	100%	366	100%	402,6	100%	1,678.90	KEC. GP
		Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda	100%	100%	100%	385	100%	423,5	100%	465,85	100%	512,44	100%	563,68	100%	2,350.47	KEC. ABTB
		Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	75	100%	82,5	100%	90,75	100%	99,83	100%	109,81	100%	457.89	KEC. GP
		Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	75	100%	82,5	100%	90,75	100%	99,83	100%	109,81	100%	457.89	KEC. MKS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	75	100%	82,5	100%	90,75	100%	99,83	100%	109,81	100%	457.89	KEC. ABTB
		Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						6.841,56		7.770,78		8.508,83		8.762,15		9.379,51		41.262,83	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	BB*	BB	BB	2.105,39	A	2.210,66	A	2.321,19	A	2.437,25	A	2.559,11	A	11.633,59	KESBANGPOL
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	5 kasus	9 kasus	9 kasus	562,49	8 kasus	600,24	8 kasus	651,76	7 kasus	697,44	7 kasus	752,68	7 kasus	3.264,61	KESBANGPOL
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	2 kasus	2 kasus	2.765,20	2 kasus	3.385,56	2 kasus	3.724,12	2 kasus	3.666,53	2 kasus	4.035,68	2 kasus	17.577,08	KESBANGPOL
8.01.03	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	2 kasus	2 kasus	102,32	2 kasus	112,55	2 kasus	123,8	2 kasus	136,18	2 kasus	149,8	2 kasus	624,65	KESBANGPOL
8.01.03	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	5 kasus	9 kasus	9 kasus	456,16	8 kasus	511,78	8 kasus	587,96	7 kasus	624,75	7 kasus	632,23	7 kasus	2.812,89	KESBANGPOL
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	5 kasus	9 kasus	9 kasus	850	8 kasus	950	8 kasus	1.100,00	7 kasus	1.200,00	7 kasus	1.250,00	7 kasus	5.350,00	KESBANGPOL

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi: Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi: Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB.

Penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Berdasarkan indikator tujuan dan sasaran yang tertuang pada bab sebelumnya, dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi. Penetapan indikator kinerja utama daerah selanjutnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kota Bukittinggi

No	Indikator	Tahun Dasar		Target					SKPD Penanggung jawab Data
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,74	2,67	3	4,29	4,63	4,74	4,87	Bapelitbang
2	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13.282	13.445	13.509	13.746	14.035	14.345	14.680	Bapelitbang
3	Pertumbuhan PMTB (%)	-0,4	3,9	4,2	5,5	5,9	6,0	6,1	DPMPSTPT K

No	Indikator	Tahun Dasar		Target					SKPD Penanggung jawab Data
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase realisasi investasi hijau (%)	50*	55	60	65	70	75	80	DPMPTSP TK
5	Indeks daya saing infrastruktur	74*	75	76	77	78	79	80	DPUPR
6	Indeks Gini	0,265	0,262	0,264	0,263	0,261	0,259	0,256	Bapelitbang
7	Tingkat kemiskinan (%)	4,74	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99	Bapelitbang
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7.51	7,35	7,18	6,96	6,74	6,48	6,20	DPMPTSP TK
9	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	80,86	81,14	81,57	82,00	82,45	82,79	Bapelitbang
10	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,33	11,44	11,56	11,67	11,78	11,89	12,00	Disdikbud
11	Harapan lama sekolah (Tahun)	14.97	14,98	14,99	15,00	15,01	15,02	15,03	Disdikbud
12	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	45*	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	Disdikbud
13	Indeks kesalehan sosial (%)	83,8*	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	Sekretariat Daerah
14	Angka harapan hidup (Tahun)	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30	75,53	75,76	Dinas Kesehatan
15	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,6949*	0,7002	0,7056	0,7110	0,7164	0,7218	0,7271	Dinas Kesehatan
16	Prevalensi Stunting (%)	14,9	14,1	13,3	12,5	11,6	10,8	10,0	Dinas Kesehatan
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,64	63,19	63,48	63,76	64,04	65,43	66,64	DLH
18	Indeks kualitas air	47,33	49,61	51,89	54,17	56,09	58,72	61	DLH
19	Indeks kualitas tutupan lahan	22,9	36,42	37,36	38,3	39,24	40	40,5	DLH
20	Indeks kualitas udara	83,54	84,54	84,64	84,74	84,84	85,42	86	DLH
21	Persentase penanganan sampah	22	24	26	27	28	30	30	DLH
22	Persentase pengurangan sampah	75	74	73	72	71	70	70	DLH
23	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	-5,46	2,67	3	4,29	4,63	4,74	4,87	Disparpora
24	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,25*	4,30	4,34	4,38	4,42	4,46	4,50	Disparpora
25	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	0	1	1	2	3	4	5	Disparpora
26	Jumlah Kunjungan Wisatawan	507.316	532.682	559.316	587.282	880.923	1.057.107	1.268.528	Disparpora

No	Indikator	Tahun Dasar		Target					SKPD Penanggung jawab Data
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	Disdikbud
28	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	16,5	28,5	30	32	34	36	36	Disdikbud
29	Indeks pembangunan olahraga	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	Disparpora
30	Prestasi pada Event olahraga Propinsi	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat 2	Disparpora
31	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria B	Kriteria B	Kriteria B	Kriteria B	Kriteria BB	Kriteria BB	Kriteria BB	Inspektorat
32	Nilai SAKIP	71,13	73,35	75,57	77,78	80,00	81,11	82,22	Sekretariat Daerah
33	Nilai EKPPD	3,2293	3,2308	3,2323	3,2338	3,2353	3,2368	3,2383	Sekretariat Daerah
34	Indeks integritas pemerintah daerah	75*	75	76	76	77	77	78	Inspektorat
35	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	81,70	84,06	85,25	86,43	87,62	88,81	90,00	Sekretariat Daerah
36	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	18,83	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	Badan Keuangan
37	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	kategori sangat baik	Bapelitbang
38	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,33	61,25	61,50	62,00	62,25	62,50	63,00	DP3APPKB
39	Indeks Kenyamanan Kota	2,9*	3	3,15	3,3	3,4	3,5	3,55	Bapelitbang
40	Persentase Penurunan PPKS (%)	1,7	2	2	2,2	2,2	2,5	2,5	Dinas Sosial
41	Indeks Pembangunan Keluarga	55*	56,5	58,0	59,5	61,0	62,5	64,0	DP3APPKB
42	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,34	1,44	1,53	1,63	1,72	1,82	1,91	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
43	Indeks Ketahanan Pangan	89,00	89,17	89,33	89,50	89,67	89,93	90,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	69*	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Ket : * data perkiraan

Indikator Kinerja Daerah ditetapkan berdasarkan Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	INDIKATOR KINERJA MAKRO								
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,74	2,67	3,00	4,29	4,63	4,74	4,87	4,87
2	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	49,95	48,47	49,32	50,82	52,54	54,39	56,38	56,38
3	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	71,29	71,76	75,16	78,73	83,51	87,28	92,18	92,18
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,51	7,35	7,18	6,96	6,74	6,48	6,20	6,20
5	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	80,86	81,14	81,57	82,00	82,45	82,79	82,79
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30	75,53	75,76	75,76
7	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,97	14,98	14,99	15,00	15,01	15,02	15,03	15,03
8	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	11,33	11,44	11,56	11,67	11,78	11,89	12,00	11,44
9	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	13.282	13.445	13.509	13.746	14.035	14.345	14.680	14.680
10	Tingkat Kemiskinan (%)	4,74	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99	3,99
11	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	5,74	5,88	5,81	5,72	5,63	5,53	5,43	5,43
12	Indeks Gini	0,265	0,262	0,264	0,263	0,261	0,259	0,256	0,256
B	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) (%)	-1,74	2,67	3,00	4,29	4,63	4,74	4,87	4,87
2	Laju inflasi (%)	2,02	3,00	2,90	2,80	2,70	2,70	2,70	2,70
3	PDRB per kapita (ADHK) (Rp. Juta)	49,95	48,47	49,32	50,82	52,54	54,39	56,38	56,38
4	Indeks Gini	0,265	0,262	0,264	0,263	0,261	0,259	0,256	0,256

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	95,26	95,41	95,52	95,64	95,76	95,88	96,01	96,01
10	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	80,86	81,14	81,57	82	82,45	82,7	82,7
11	Angka melek huruf (%)	99,96	99,97	99,98	99,99	100	100	100	100
12	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,33	11,40	11,47	11,54	11,61	11,69	11,76	11,76
13	Angka harapan hidup (Tahun)	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30	75,53	75,76	75,76
14	Persentase balita gizi buruk (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0
15	Prevalensi balita gizi kurang (%)	5,24	4,19	3,14	2,10	1,05	1,05	0,00	0,00
16	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	66,67	70,83	75,00	79,17	83,33	91,67	100	100
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69	69	70	71	71	72	73	73
19	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,51	7,35	7,18	6,96	6,74	6,48	6,20	6,20
20	Rasio penduduk yang bekerja (%)	46	53	65	67	72	74	76	76
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,70	84,06	85,25	86,43	87,62	88,81	90,00	90,00
22	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	18,83	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	20,79
23	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,5	81,5	82,0	82,0	82,5	82,5	83,0	83,0
25	Penguatan cadangan pangan (Ton)	0	0	13	23	33	45	60	60
26	Penanganan daerah rawan pangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
28	Produksi sektor pertanian (Ton)	5.844	5.845	5.846	5.857	5.858	5.859	5.850	5.850
29	Produksi sektor perkebunan (Ton)	40,26	40,27	40,28	40,29	40,30	40,31	40,32	40,32
30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	55,71	55,94	56,17	56,41	56,64	56,87	57,10	57,10
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	33,73	34,85	35,00	35,15	35,30	35,45	35,60	35,60
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	5,19	5,24	5,29	5,35	5,40	5,45	5,51	5,51
33	Pertumbuhan Industri (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
34	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu/Kapita/Bulan)	13.232	13.445	13.509	13.746	14.035	14.345	14.680	14.680
35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,33	61,25	61,50	62,00	62,25	62,50	63,00	63,00
36	Harapan Lama Sekolah	14,97	14,98	14,99	15,00	15,01	15,02	15,03	15,03

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Rp. Ribu)	13.282	13.445	13.509	13.746	14.035	14.345	14.680	14.680
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp. Juta)	163,33	167,69	172,72	180,13	188,47	197,41	207,02	207,02
3	Nilai tukar petani	100,94	101	102	103	104	105	106	106
4	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	41,69	41,46	41,23	41,00	40,77	40,54	40,31	40,31
5	Produktivitas total (Rp. Juta)	122,92	126,20	129,99	135,56	141,84	148,56	155,80	155,80
6	Angka kriminalitas yang tertangani (kasus)	663	597	537	483	435	392	353	353
7	Rasio ketergantungan (%)	46,70	48,50	50,34	52,23	54,17	56,16	58,20	58,20
ASPEK PELAYANAN UMUM									
PELAYANAN URUSAN WAJIB									
	PENDIDIKAN								
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	112,44	113,43	114,41	115,40	116,38	117,37	118,35	118,35
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	84,76	85,83	86,89	87,96	89,03	90,09	91,16	91,16
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,38	99,69	99,99	100,30	100,60	100,91	101,21	101,21
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	81,46	81,99	82,51	83,04	83,56	84,09	84,61	84,61
5	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	99,94	99,95	99,95	99,96	99,96	99,97	99,97	99,97
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	98,36	98,38	98,45	98,52	98,59	98,66	98,73	98,73
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,14
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	89	89,66	90,66	91,66	92,66	93,66	94,66	94,66
12	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	47,76	53,73	59,70	65,67	71,64	77,61	83,58	83,58
13	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	42,86	47,62	54,55	59,09	63,64	68,18	72,73	72,73

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:233	1:234	1:239	1:243	1:249	1:254	1:259	1:259
15	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1:469	1:493	1:503	1:481	1:490	1:500	1:510	1:510
16	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	602	599	597	594	591	589	586	586
17	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	726	747	734	734	734	734	734	734
18	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	38,23	39,31	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63
19	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	2,73	1,87	1,86	1,86	1,85	1,84	1,83	1,83
20	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	88	90	92	94	96	98	100	100
	KESEHATAN								
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5,36	4,83	4,29	3,75	3,22	2,68	2,14	2,14
2	Angka kelangsungan hidup bayi	994,64	995,17	995,71	996,25	996,78	997,32	997,86	997,86
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,83	4,29	3,75	3,22	2,68	2,14	1,61	1,61
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	321,72	268,10	214,48	160,86	107,24	53,62	0,0	0,0
6	Rasio posyandu per satuan balita	13,94	14,04	14,15	14,25	14,36	14,46	14,67	14,67
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
9	Rasio dokter per satuan penduduk	2,43	2,45	2,47	2,49	2,51	2,53	2,55	2,55
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,43	2,45	2,47	2,49	2,51	2,53	2,55	2,55
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	91,71	92,20	92,69	93,18	93,67	94,16	94,65	94,65
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child	88	92	92	96	96	100	100	100

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Immunization (UCI) (%)								
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	62,4	65	70	75	80	85	90	90
16	NonPolio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	60	65	70	75	80	85	90	90
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	40	45	50	55	60	65	70	70
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2,99	1,99	1,99	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	47,84	51,44	55,04	58,63	62,23	65,83	69,42	69,42
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	87,14	90,00	91,43	92,86	94,29	95,71	97,14	97,14
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Penderita diare yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Angka kejadian Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	17,8	17	17	16,8	16,5	16	15,5	15,5
27	Cakupan kunjungan bayi (%)	81	83	85	88	90	91	92	92
28	Cakupan puskesmas (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Cakupan pembantu puskesmas (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
30	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	91	92	92,5	93	93,5	94	94,5	94,5
31	Cakupan pelayanan nifas (%)	92,3	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95
32	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	71,4	72	73	74	75	76	77	77
33	Cakupan pelayanan anak balita (%)	55,5	56	57	58	60	65	70	70
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	95	95,5	96	96,5	97	97,5	98	98
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
38	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/ mantap	0,8907	0,892	0,8945	0,8996	0,902	0,9067	0,912	0,912
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (m/jiwa)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	49,39	49,70	49,95	51,96	54,20	55,67	56,22	56,22
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	28,62	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	80,23	81,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50
6	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi (%)	80,23	81,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	80,15	81,00	82,50	85,00	86,50	87,00	88,50	88,50
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	2,00	1,80	1,20	1,00	0,80	0,60	0,40	0,40
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50	96,50	96,50
10	Rasio Jaringan Irigasi	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
11	Persentase penduduk berakses air minum (%)	84,99	85,00	85,50	85,60	85,70	85,80	85,90	85,90
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum	84,99	85,00	85,50	85,60	85,70	85,80	85,90	85,90

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	layak, perkotaan dan perdesaan (%)								
13	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	434	425	417	408	400	392		
14	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
15	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
16	Ketaatan terhadap RTRW (%)	79*	80	80	85	85	85	85	85
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
1	Rasio rumah layak huni	0,160	0,160	0,159	0,159	0,158	0,158	0,157	0,157
2	Rasio permukiman layak huni	0,944	0,944	0,944	0,963	0,982	1,000	1,000	1,000
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	83,35	83,35	83,10	82,86	82,62	82,39	82,15	82,15
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,26	0,26	0,25	0,17	0,08	0	0	0
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,26	0,26	0,25	0,17	0,08	0	0	0
5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	11,61	9,29	6,97	4,64	2,32	0	0	0
7	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	94,40	94,40	94,44	96,25	98,23	100	100	100
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	36	36	50	55	60	65	70	70
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	90	95	95	95	95	95	95	95
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	12	11,5	10,5	10	9,5	9	8,5	8,5

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	90	95	95	95	95	95	95	95
	SOSIAL								
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00
2	Persentase PPKS yang tertangani (%)	65,38	65,38	65,38	69,23	69,23	73,08	73,08	73,08
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	40,61	42,76	45,00	50,00	55,00	57,00	60,00	60,00
4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	0,00	8,33	16,67	25,00	33,33	33,33	41,67	41,67
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	80	80	85	90	90	90	90	90
	TENAGA KERJA								
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	127	150	150	200	220	250	300	300
3	Keselamatan dan perlindungan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	13.624	13.800	13.900	14.000	14.300	14.700	15.000	15.000
5	Perselisihan buruh dan pengusaha	100	100	100	100	100	0	0	0

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)								
6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	80	82	85	87	90	95	100	100
7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	-	10	20	30	40	50	60	60
8	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	32	96	96	96	102	102	102	102
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	16	32	32	32	32	32	32	32
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	50	50	50	50	50	50	50	50
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	8	8	8	8	12	12	12	12
3	Rasio KDRT	13,48	12,83	12,18	11,53	10,88	10,23	9,58	9,58
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	1,53	1,44	1,35	1,27	1,18	1,09	1,00	1,00
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	60,51	60,51	60,65	60,75	60,85	60,95	70	70
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)								
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	95	90	90	90	90	90	90	90
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78	105,78
12	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29
13	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	80,67	80,67	80,68	80,69	80,7	80,71	80,72	80,72
	PANGAN								
1	Ketersediaan pangan utama (ton)	14,6	14,76	14,88	15,01	15,26	15,62	20,490	20,490
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kap/hr)	262	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	24	24	23	23	22	22	≥ 63	≥ 63
	PERTANAHAN								
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	38,54	45,00	50	55,00	60	65	70	70
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	78*	80	82	84	86	88	90	90
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	47,33	50,65	50,7	50,75	50,8	50,89	50,9	50,9
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	83,54	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	86,50
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90
7	Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota	18	50	50	50	53	55	55	55
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (org)	0	1	2	4	6	7	8	8
9	Terlaksananya pendidikan (sekolah) / pelatihan masyarakat (siswa)	-	10 / 30	10 / 30	10 / 30	10 / 30	10 / 30	10 / 30	10 / 30
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
11	Pengaduan masyarakat terkait persetujuan lingkungan, yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Timbulan sampah yang ditangani (%)	40	41	42	43	44	45	46	46
13	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	92,71	93	94	95	96	97	98	98
14	Persentase cakupan area pelayanan (%)	96	98	98	98	98	98	98	98

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	96	98	98	98	98	98	98	98
16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	89	90	91	92	93	94	95	95
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk (%)	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,95
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	73	74	75	76	77	78	79	79
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,95
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	64	66	68	70	72	74	76	76
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	30	47	50	55	60	65	70	70
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,55	1,5	1,5	1,5	1,48	1,48	1,48	1,48
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,5	2,45	2,4	2,38	2,28	2,2	2,2
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan	34,5	34,5	35	36	36	37	37	37

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)								
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		1	2	2	2	2	2	2
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	5	5	5	6	6	6
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2	3	5	7	9	14	16	16
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Ratio Akseptor KB (%)	68,00	68,20	68,50	68,90	69,00	69,20	69,25	69,25
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	68,08	68,29	68,50	68,75	69,00	69,10	69,25	69,25
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	7,52	2,24	2,21	2,19	2,1	2	2	2
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	19,88	19,69	19,36	19,02	18,34	16,98	16,64	16,64
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,93	86,30	80,00	77,00	74,00	74,50	74,80	74,80
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	32,40	32,48	33,00	33,18	33,21	33,41	33,52	33,52
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	89,20	89,25	89,26	89,32	89,35	89,36	89,36	89,36
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	77,00	78,00	78,00	79,00	79,00	80,00	80,00	80,00
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	85,00	85,00	86,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	86,00	86,00	86,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,00
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	66,80	66,90	67,00	67,00	67,10	67,20	67,30	67,30
28	Persentase Pembiayaan	14,49	17,21	20,00	23,00	25,00	27,00	30,00	30,00

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (%)								
29	Cakupan peserta KB aktif (%)	68	68	69	69	69	69	69	69
	PERHUBUNGAN								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	618.079	711.984	711.984	711.984	711.984	711.984	711.984	711.984
2	Rasio ijin trayek	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
3	Jumlah uji kir angkutan umum (uji)	4.150	4.592	5.054	5.558	6.113	6.724	7396	7396
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,087	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	79	80	80	80	80	80	80	80
7	Pemasangan Rambu- rambu (%)	67,34	70,00	77,50	78,00	80,00	90,00	95,00	95,00
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m/unit)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	18.554.040	20.800.180	20.800.180	20.800.180	20.800.180	20.800.180	20.800.180	20.800.180
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	618.079	711.984	711.984	711.984	711.984	711.984	711.984	711.984
11	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	28	28	28	28	28	28	28	28
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	14	14	15	17	18	22	24	24
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	98	98	99	99	99	99	99	99
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase koperasi aktif (%)	75,50	75,80	76,10	76,40	76,70	77,00	77,30	77,30
2	Persentase Usaha Mikro (%)	90,80	91,00	91,20	91,40	91,60	91,80	92,00	92,00
	PENANAMAN MODAL								
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	40	43	45	50	55	60	65	65
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rp.)	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.300.000
3	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	11	12	14	16	18	20	20	20
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	10	10	10	10	10	10	10	10
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	5	5	7	7	7	7	7	7
2	Persentase wirausaha muda (%)	2	2	3	3	3	3	3	3
3	Cakupan pembinaan olahraga (cabor)	32	32	32	32	32	32	32	32
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (orang)	10	25	35	35	35	40	40	40
5	Jumlah atlet berprestasi (orang)	0	150	150	150	150	150	150	150
6	Jumlah prestasi olahraga (medali)	0	50	150	50	150	50	150	150
	STATISTIK								
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	belum ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Buku "PDRB"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	PERSANDIAN								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	3,50	3,50	3,50	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00
	KEBUDAYAAN								

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	1	2	2	2	2	2	2
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	1	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	5	5	5	5	5	5	5
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10	11	11	12	12	13	13	13
	PERPUSATAKAAN								
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,062	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,52	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	8392	13600	14960	16320	17680	19040	20400	20400
5	Jumlah koleksi judu buku perpustakaan (judul)	10.989	11.539	12.339	13.139	13.939	14.739	15.539	15.539
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,17
	KEARSIPAN								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	10,71	17,86	28,57	39,29	50,00	60,71	71,43	71,43
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	2	2	2	2	2	2	2	2
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN								
	PARIWISATA								
1	Kunjungan wisata	507.316	538.774	546.895	557.832	568.988	580.367	591.974	591.974
2	Lama kunjungan Wisata (hari)	2,5	2	2	2	2	2	2	2
3	PAD sektor pariwisata (Rp. Juta)	10.809	15.561	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	PERTANIAN								
1	Produktivitas padi atau bahan	6,78	6,79	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)								
2	Cakupan bina kelompok petani (poktan)	15	20	20	20	20	20	20	20
	PERDAGANGAN								
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	-	20	20	20	20	25	30	30
	PERINDUSTRIAN								
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (KUB)	20	20	20	20	20	20	20	20
	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Produksi perikanan (ton)	420,20	430	440	450	460	470	47	47
2	Konsumsi ikan (kg/kap/th)	40,5	41	41,5	42	43	44	45	45
3	Produksi perikanan kelompok nelayan (kg)	3.798	3.800	3.850	3.950	4.000	4.100	4.150	4.150
	PENUNJANG URUSAN								
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	KEUANGAN								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA (%)	11,28	11,03	10,78	10,53	10,28	10,03	9,78	9,78
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	11,28	11,03	10,78	10,53	10,28	10,03	9,78	9,78
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%) (%)	19,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	Persentase belanja kesehatan (10%) 9%)	19,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (jam)	8	16	20	20	20	20	20	20
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	63	60	67	74	81	88	95	95
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26	26	26	26	26	26	26	26
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	338	338	338	338	338	338	338	338
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	542	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	18	50	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENGAWASAN								
1	Persentase tindak lanjut temuan (%)	82	82	83	83	84	84	85	85
2	Persentase pelanggaran pegawai (%)	0,23	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,33
3	Jumlah temuan BPK (temuan)	10	10	10	10	9	9	9	9
	SEKRTARIAT DPRD								
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (9%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Ket : * data perkiraan

BAB IX

PENUTUP

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 telah melalui beberapa tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dimulai dari tahapan persiapan penyusunan yang menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada tahapan persiapan penyusunan juga telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang pada prinsipnya adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Pembangunan Daerah.

Seiring dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih, dilakukan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026 yang merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Guna penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD ini melalui sumbang saran dan masukan dari Stakeholders Kota, dilaksanakan Forum Konsultasi Publik, Pembahasan bersama dengan DPRD Kota Bukittinggi, serta Konsultasi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Rancangan Awal yang telah disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih disempurnakan menjadi Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan saran dan masukan yang telah disampaikan oleh Stakeholders Kota dan rancangan Renstra Perangkat Daerah. Setelah penyusunan Rancangan RPJMD selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang RPJMD guna penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan, dirumuskan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2021-2026. Pada tahapan penyusunan Rancangan Akhir RPJMD sebelum disampaikan ke DPRD Kota Bukittinggi guna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang RPJMD Tahun 2021-2026 juga dilaksanakan review dokumen RPJMD oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Bukittinggi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya tahapan penetapan dilalui melalui pembahasan dan persetujuan bersama DPRD Kota Bukittinggi dan evaluasi Ranperda oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

RPJMD Tahun 2021-2026 telah disusun berdasarkan pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yakni: a).teknokratik, b).partisipatif, c).politis, dan d).atas-bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik yang merupakan penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Pendekatan partisipatif yang merupakan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Perencanaan terlihat melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJMD. Selanjutnya, pendekatan politis adalah dengan menterjemahkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih ke dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang merupakan penyelerasan perencanaan pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Penyusunan Rancangan akhir RPJMD ini juga telah memperhatikan kesinambungan pelaksanaan RPJPD, mengintegrasikan beberapa pertimbangan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), mempedomani RTRW dan RPJMN 2020-2024 serta Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

RPJMD yang merupakan terjemahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih telah diterjemahkan ke dalam arsitektur perencanaan pembangunan daerah, yakni tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang disertai pagu indikatif. Perumusan tersebut memperhatikan kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis daerah yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kota Bukittinggi yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi, juga diupayakan melalui pembiayaan lain; baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kerjasama, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Swadaya Masyarakat, Filantropi dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum.

Guna menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dilaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pengendalian dan evaluasi, RPJMD Tahun 2021-2026 dapat diubah apabila: hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terjadi perubahan yang mendasar. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah ataupun perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah penanggung jawab indikator kinerja dan program berdasarkan dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.

RPJMD Tahun 2021-2026 yang memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah Kota Bukittinggi harus benar-benar dipedomani sehingga tujuan pembangunan Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

WALIKOTA BUKITTINGGI

H. ERMAN SAFAR, SH.